Rasam Pusaka Budaya BANTEN

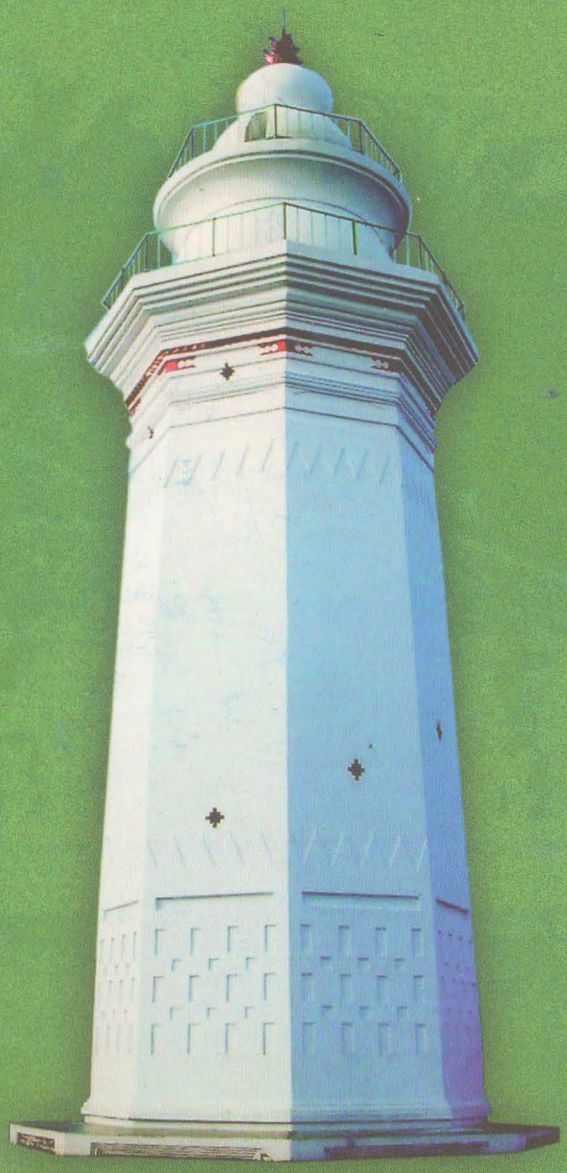

BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA SERANG

WILAYAH KERJA PROVINSI BANTEN, JAWA BARAT, DKI JAKARTA, DAN LAMPUNG

Ragam Pusaka Budaya Banten

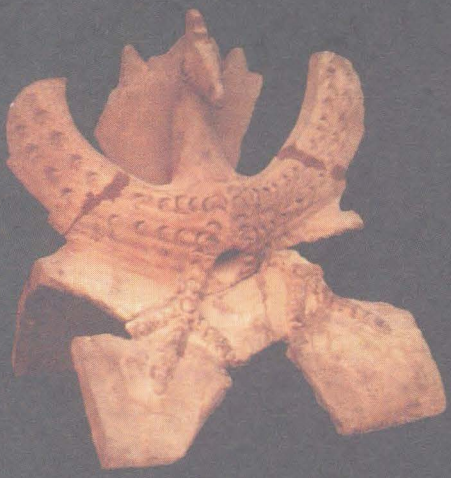

RAGAM PUSAKA BUDAYA

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang Wilayah Kerja Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

© 2005, Cetakan Pertama

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

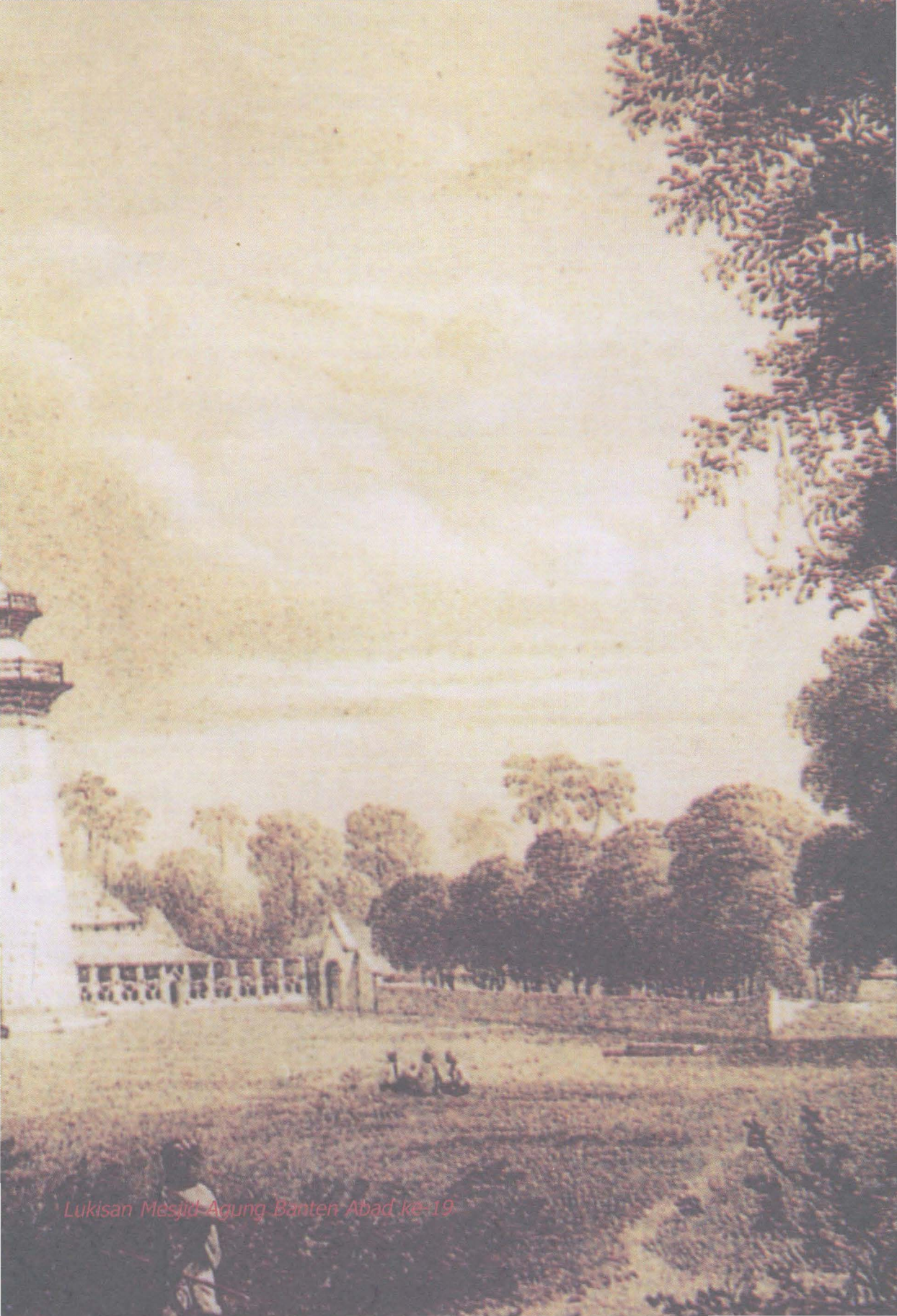

Lukisan Mesjid Agung Banten Abad ke-19

RAGAM
PUSAKA BUDAYA
BANTEN

Pengarah
DRS. H. TRI HATMADJI

Penyunting
PROF. DR. MUNDARDJITO
DRS. FITRA ARDA, M.HUM
DRS. SYARIF ACHMADI

Penulis
JULIADI, S.S.
SONI PRASETIA WIBAWA, S.S.
BAYU ARIYANTO, S.HUM.
PAHLAWAN PUTRA SATRIA NEGARA, S.S.
MIMI LUMBIYANTARI, S.S.

Kontributor Tulisan
UKA TJANDRASASMITA, PROF. DR.
HASAN MUARIF AMBARY, PROF. DR.
HASAN DJAFAR, DRS.
HERIYANTI ONGKODHARMA UNTORO, DR.
NANIEK HARKATININGSIH WIBISONO, DRA.
WIDYA NAYATI, PhD. MA. DRA.
MOH. ALI FADILLAH, DR.
GUTOMO, DRS.
KHATIB MANSUR

Desain Sampul
RISMAN MARAH

Fotografi/Lay Out

ARIF RAHMAN ACHMADI, S.SOS.

DEDI KUSNADI

D.A. MASUPRIATNA

AHMAD ROSYADI W., S.S.

ASEP HILMI

Pengumpul Data

ZAKARIA KASIMIN, DRS.

TEUKU HANIF, DRS.

NUNIK SRI SUMARLINA, DRA.

SRI ANGGOROWATI, S.H.

SWEDHI HANANTA, S.S.

SRI TRISNANI, DRA.

FAJAR SATYA BURNAMA, S.S.

Penerbit

BALAI PELESTARIAN

PENINGGALAN PURBAKALA SERANG

Jl. Letn. Djidun (Komplek Perkantoran) Serang

Tlp. (0254) 203428 – 201575

Sponsorship

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)

WORLD CLASS STEEL COMPANY

ISBN 979-99324-0-8

PROPINSI
LAMPUNG
Selat Sunda
P. PANJANG
P. PRINCE
SKALA 1 : 1.000.000

KEP. SERIBU
P. TUNDA
P. AIR BESAR
DKI
JAKARTA
PROPINSI
JAWA BARAT

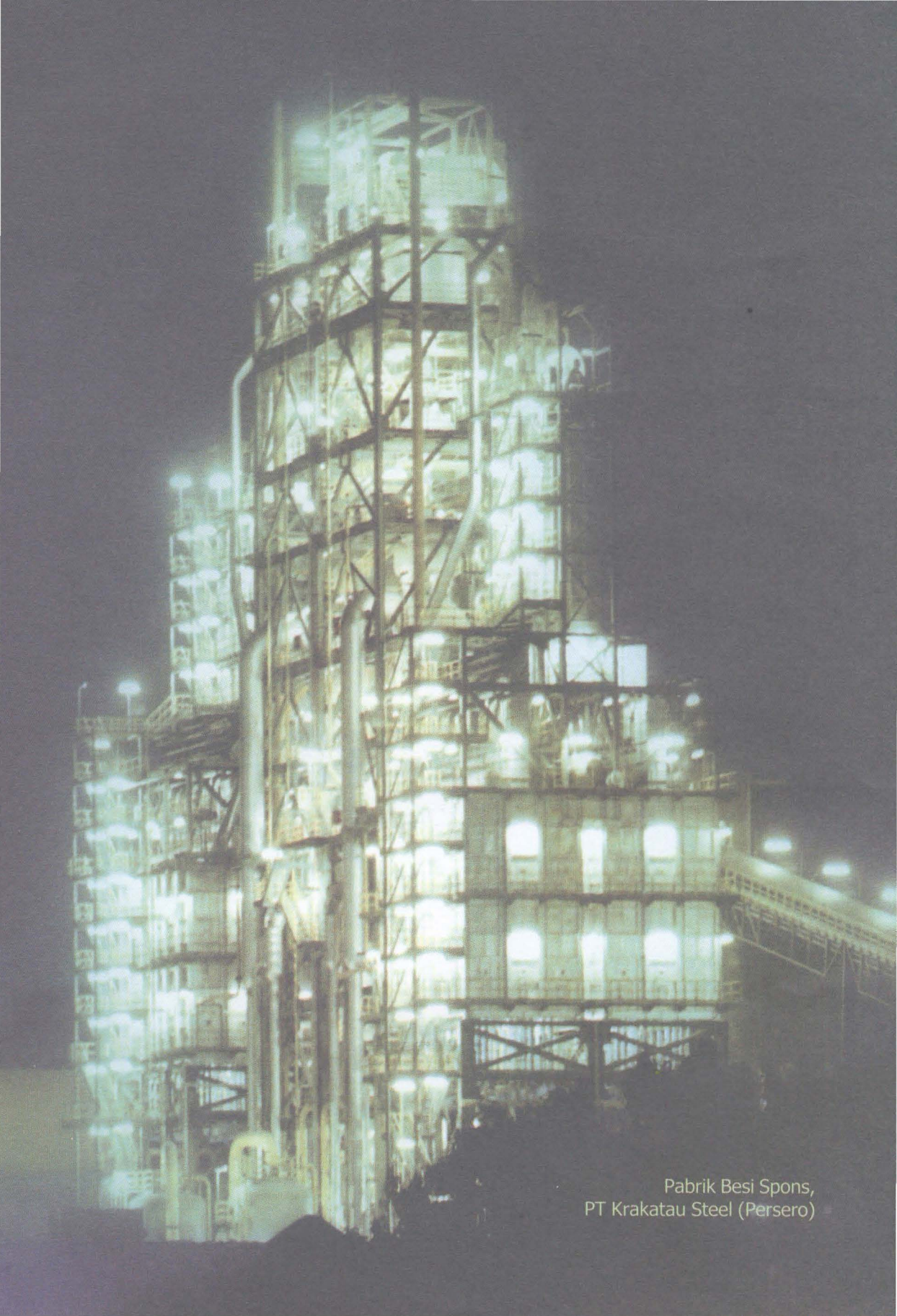

Pabrik Besi Spons,
PT Krakatau Steel (Persero)

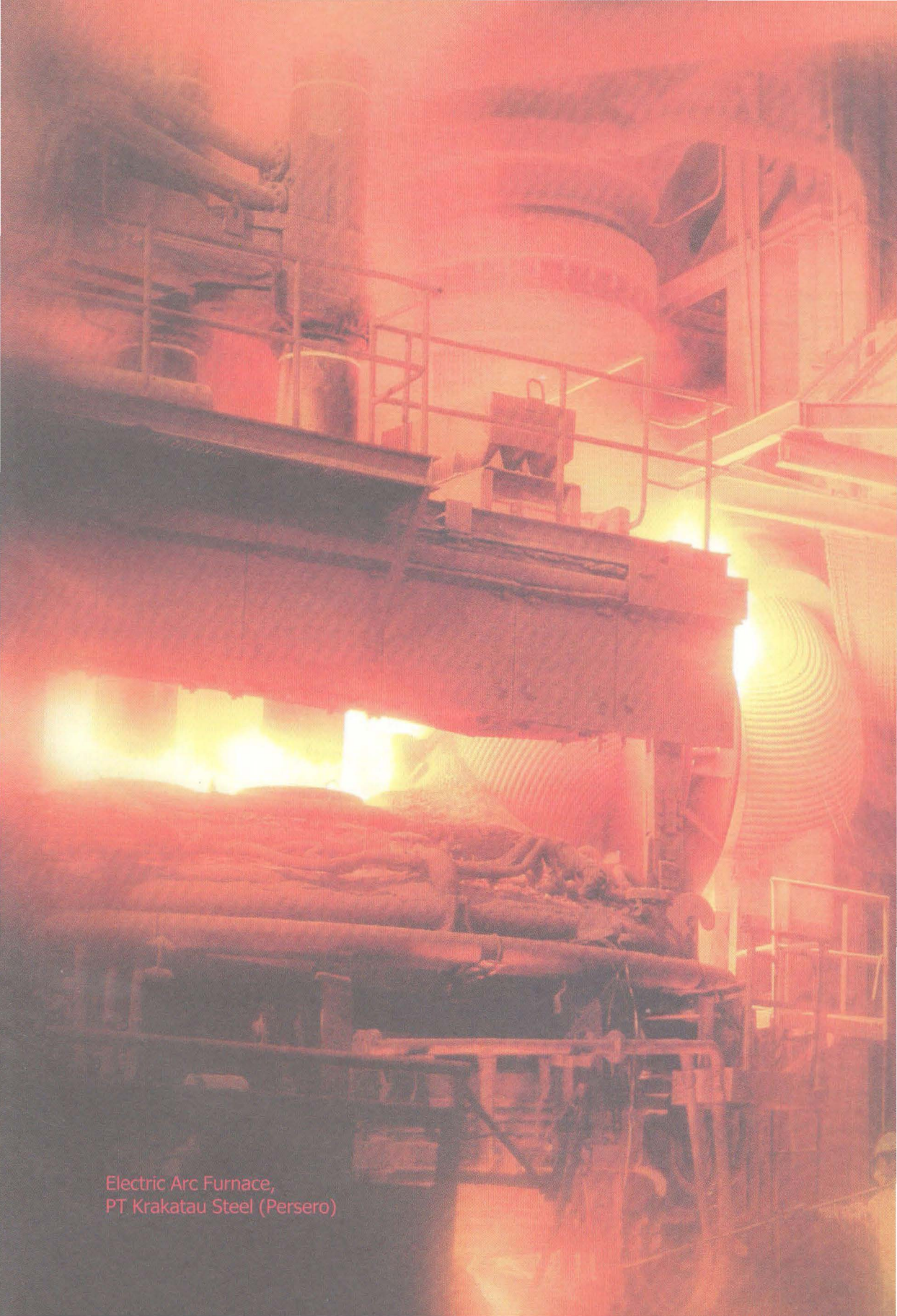

Electric Arc Furnace,
PT Krakatau Steel (Persero)

PRAKATA
KEPALA BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA SERANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera

Budaya Banten adalah bagian dari dinamika budaya nasional yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan ruang yang melingkupinya. Dalam perkembangannya, budaya Banten memberikan warna tersendiri hingga tercipta ciri khas budaya dari masa ke masa. Secara historis-kultural ciri khas budaya masa lalu tersebut memiliki tinggalan, salah satunya adalah tinggalan budaya materi yang lazim disebut peninggalan purbakala.

Peninggalan purbakala, disadari karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, mudah rusak, dan jumlahnya terbatas, maka kemusnahan peninggalan purbakala sangat rentan. Oleh karena sifatnya tersebut, maka salah satu upaya penyelamatan data peninggalan purbakala adalah dokumentasi dalam bentuk penerbitan buku.

Melalui kerjasama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang dengan P.T. Krakatau Steel diterbitkan buku yang diberi judul "Ragam Pusaka Budaya Banten", isinya adalah rekaman tinggalan purbakala di Banten dari sejak masa prasejarah sampai terbentuknya Provinsi Banten. Di samping itu, buku ini dapat memperlihatkan kandungan nilai-nilai luhur budaya Banten sebagai cerminan kepribadian yang selaras, serasi dan seimbang dari masa ke masa.

Lebih jauh dari itu, dengan membaca buku ini akan tergambar potensi keragaman peninggalan purbakala hasil karya budaya Banten. Potensi itu, tentu harus diupayakan untuk tetap lestari dan dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya sebagai obyek wisata budaya.

Buku ini terbit atas kerja keras rekan-rekan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, mulai dari penyusunan konsep tulisan, sampai pada penyiapan materi siap cetak. Melengkapi materi buku, maka di dalamnya dimuat pula artikel-artikel tentang budaya Banten yang ditulis oleh beberapa orang pakar di bidangnya masing-masing antara lain, Prof. Dr. Uka Tjandrasasmita, Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary, Drs. Hasan Djafar, Dr. Heriyanti Ongkodharma Untoro, Dra. Widya Nayati, MA, PhD, Dr. Moh. Ali Fadillah, Dra. Naniek Harkatiningsih Wibisono, Drs. Gutomo dan Tb. Khatib Mansur. Untuk itu kepada para penulis kami ucapkan terima kasih. Secara khusus terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Mundardjito, yang bersedia menyunting buku ini hingga dapat hadir dihadapan kita.

Akhirnya, buku yang ada di tangan anda ini tentu ada kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan menjadi ladang amal untuk memperbaikinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala usaha kita, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 April 2005
Kepala BP3 Serang

Drs. H. Tri Hatmadji

SAMBUTAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku "Ragam Pusaka Budaya Banten". Penerbitan buku yang diprakarsai oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang bekerjasama dengan PT. Krakatau Steel ini perlu kita hargai karena merupakan sebuah terobosan yang sangat berarti, terutama bagi kepedulian lembaga profit terhadap warisan budaya bangsa.

Pengungkapan nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu diiringi dengan publikasi yang memadai, sehingga kekayaan akan khasanah budaya bangsa selain diketahui oleh masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai acuan secara umum.

Dalam buku ini jelas menggambarkan warisan budaya Banten masa lalu dalam berbagai bentuk peninggalan purbakala yang bernilai dan menakjubkan. Peninggalan tersebut tidak hanya penting bagi Banten namun juga merupakan aset nasional yang perlu dikenal, dipahami sehingga berguna untuk pengembangan dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Mudah-mudahan melalui usaha dan kerja keras serta kreatifitas dalam menggali budaya, serta menerbitkan menjadi buku akan mendorong masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang potensi budaya dan selanjutnya mengarah pada upaya upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

Besar harapan kami, dengan terbitnya buku ini dapat merangsang penulisan buku-buku yang bernuansa budaya dengan tema-tema yang berbeda, sehingga kita dapat memperkaya dalam pengetahuan tentang budaya.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat sesuai dengan harapan kita semua.

Jakarta, 29 April 2005

Ir. Jero Wacik, S.E

SAMBUTAN
GUBERNUR BANTEN

Puji dan syukur kehadiratNya, saya menyambut gembira atas terbitnya buku "Ragam Pusaka Budaya Banten". Buku ini berisi informasi tentang berbagai tinggalan budaya Banten sejak jaman Prasejarah hingga Kolonial yang ada di Provinsi Banten ini akan menambah khasanah pustaka kebudayaan, dan memiliki nilai strategis dalam rangka memperkuat jati diri Banten yang pernah menjadi pusat peradaban.

Banten sejauh ini telah populer di seluruh dunia, bukan saja karena keanekaragaman budayanya melainkan juga sejarah masa lalu. Potensi ini harus terus digali, dibina dan dikembangkan lebih lanjut sebagai aset yang prospektif khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, yang gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah maupun devisa negara.

Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, atas prakarsa kreatif menerbitkan buku ini. Ungkapan serupa juga disampaikan kepada para pakar yang terlibat penuh dalam penyusunan buku ini, sehinga akhirnya dapat terwujud.

Diharapkan kehadiran buku ini bukan saja berfaedah bagi pengelola budaya, melainkan juga dapat digunakan sebagai buku pegangan bagi siswa sekolah dan mahasiswa, tidak terkecuali bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum, untuk lebih memupuk rasa memiliki dan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita. Amin.

Serang, 29 April 2005
GUBERNUR BANTEN

H.D. MUNANDAR

SAMBUTAN

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera!

Sungguh sebuah kebanggaan bagi PT Krakatau Steel dapat bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang dalam penerbitan buku berjudul "**Ragam Pusaka Budaya Banten**". Buku ini secara garis besar menggambarkan potensi peninggalan budaya Banten sejak masa prasejarah hingga terbentuknya Propinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, PT Krakatau Steel adalah perusahaan yang memproduksi besi/baja. Apabila ditarik benang merahnya dengan sejarah Banten, ternyata sejak masa Kesultanan Banten (abad XVI-XIX) teknologi pembuatan besi/baja telah dikenal di daerah ini.

Hasil-hasil penelitian arkeologi di situs Banten Lama, pusat Kesultanan Banten, membuktikan hal tersebut. Salah satu temuannya adalah adanya wadah peleburan besi/baja. Data tersebut sejatinya membuktikan bahwa teknologi peleburan besi/baja senantiasa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi umat manusia. Dan secara berkesinambungan, dari dulu hingga kini, PT Krakatau Steel selalu merupakan bagian dari proses kesinambungan tersebut.

Kami kira banyak nilai yang terkandung di dalam buku ini yang bila ditelaah lebih jauh, dapat berguna bagi kehidupan masa sekarang dan masa depan. Nilai-nilai tersebut perlu dipertahankan guna kesejahteraan umat manusia.

Dan pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa ketulusan, kerja keras dan kreativitas penyusun buku ini patut dihargai. Mudah-mudahan kerjasama ini merupakan langkah awal untuk jalinan kerjasama di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amien.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cilegon, 29 April 2005
PT Krakatau Steel (Persero)

Daenulhay
Direktur Utama

SAMBUTAN
TOKOH MASYARAKAT

Sebagai putera daerah yang dari pihak ibu berurat akar dari Banten Lama sampai ke Lebak dan Jasinga, sejarah Banten tidak pernah berhenti diceritakan di keluarga dan memberikan inspirasi bahkan semangat untuk membangun kembali daerah Banten sebagai pusat pertumbuhan (growth center) di bagian barat Pulau Jawa. Wilayah Serang-Banten Lama-Cilegon-Anyer penuh dengan sejarah, mulai dari sebagai pusat perdagangan internasional dalam posisi sebagai entreport dengan status serupa freeport, pada era Kerajaan-kerajaan Islam Pantai di Nusantara, sampai kepada sebagai pusat perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan Barat khususnya VOC dan Pemerintah Hindia Belanda dan NICA.

Mengenai sejarah masa jayanya Banten bisa dimulai dari sejarah Kerajaan Hindu Banten Girang yang terbukti kehadirannya dari sumber-sumber arkeologi yang tersebar di seluruh Banten bagian barat. Kemudian ke sejarah Kerajaan Islam Pantai yang dikonfirmasikan antara lain dalam hubungan diplomatik dengan Kerajaan Inggris di abad ke-18, lalu ke sejarah VOC dan Pemerintah Hindia Belanda dan seterusnya.

Buku ini membeberkan kekayaan sejarah Banten yang menempatkannya sejajar dengan kekayaan sejarah yang dijumpai di wilayah Mataram, di wilayah Majapahit atau di Bali. Dalam posisi itu semoga generasi muda Indonesia akan memperoleh gambaran yang utuh tentang salah satu pusat kerajaan di Nusantara yang kehadirannya diakui atau dikenal oleh kerajaan-kerajaan besar mulai dari Cina, Jepang sampai Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris.

Bersama ini pula patut kita menghormati pekerjaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang yang terus-menerus melakukan upaya untuk menggali peninggalan-peninggalan Banten dan memperkenalkan sejarah Banten sebagai kenyataan yang utuh.

Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

DAFTAR ISI

Prakata Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang___ xi
Sambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata___ xii
Sambutan Gubernur Provinsi Banten___ xiv
Sambutan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero)___ xv
Sambutan Tokoh Masyarakat___ xvi
Daftar Isi___ xvii

Bab I PENDAHULUAN___ 3
Lokasi___ 3
Sejarah dan Kebudayaan Banten___ 3
Dari Surosuwan ke Tirtayasa: Urbanisasi dan Perubahan Sosial di Banten___ 6
(*Moh. Ali Fadillah*)

Bab II BANTEN MASA AWAL___ 31
Masa Berburu dan Mengumpul Makanan___ 31
Masa Bercocok Tanam dan Beternak___ 32
Masa Perundagian___ 34
Penguburan di Situs Anyar Lor___ 34
Nekara Perunggu Tipe Heger IV___ 36

Bab III PENINGGALAN TRADISI MEGALITIK___ 39
Dinamika Tradisi Megalitik: Konsep Awal Pemujaan___ 39
Menhir Baros, Sirit Baduy dan Pasir Peuteuy___ 41
Situs Sirit Gopar___ 41
Situs Sanghyang Heuleut dan Sanghyang Dengdek___ 43
Gunung Pulosari: Ekspresi Idealisme yang Sakral (*inbox*)___ 46
Situs Batu Goong-Citaman___ 48
Situs Cihunjuran___ 49
Situs Batu Ranjang___ 50
Situs Batu Tumbung___ 50
Situs Lebak Kosala___ 51
Situs Lebak Sibeduk___ 52

Tradisi Megalitik dalam Kehidupan Masyarakat Baduy (*inbox*)___ 28

Bab IV TINGGALAN BUDAYA HINDU-BUDA___ 59
Awal Budaya Hindu-Buda di Banten___ 59
Bukti-bukti Tinggalan Dari Masa Hindu-Buda___ 59
Prasasti Munjul___ 59
Arca-arca dari Pulosari___ 61
Arca Ganesha dari Pulau Panaitan___ 62
Arca Nandi dari Karangantu___ 63
Tinggalan Genta Pendeta___ 63
Situs Bekas Kerajaan Banten Girang___
Situs Patapan___ 66

Bab V MASA KESULTANAN DAN PENGARUH BUDAYA ISLAM___ 71
Kerajaan Banten dan Masyarakatnya dalam Kilas Sejarah___ 73
Silsilah Raja yang Memerintah di Banten (*Inbox*)___ 81
Banten Sebagai Peninggalan Kesultanan___ 82
Pemanfaatan Foto Udara dalam Penelitian Arkeologi di Banten___ 86
(*Widya Nayati*)
Keraton Surosuwan___ 93
Keraton Kaibon___ 99
Keraton Tirtayasa___ 103
Kompleks Mesjid Agung Banten___ 104
Mesjid Kasunyatan___ 111
Mesjid Kenari___ 113
Mesjid Pacinan Tinggi___ 113
Mesjid Koja___ 114
Makam Kenari___ 114
Makam Pangeran Arya Mandalika___ 115
Makam di Lingkungan Mesjid Banten___ 115
Makam-makam di Kasunyatan___ 116
Makam Pangeran Mas___ 116
Makam Maulana Yusuf (Pekalangan Gede)___ 117
Makam Pangeran Astapati___ 117
Makam Kuno Katengahan___ 117
Jembatan Rante___ 118
Danau Tasikardi dan Pengindelan___ 119

Meriam Ki Amuk___ 123
Watu Gilang___ 124
Pelabuhan Karangantu___ 125
Pelayaran dan Mata Uang Kesultanan Banten___ 125
(Heriyanti O. Untoro)
Vihara Avalokitecvara___ 128
Rumah Kuno Abad XVIII___ 130
Prasasti Muruy___ 130
Tinggalan Budaya Bertulis dari Masa Kesultanan Banten: Prasasti dan Naskah___ 130
(Hasan Djafar)
Keramik Masa Islam dari Banten Lama___ 139
Ragam Hias Gerabah di Banten Lama___ 142
(Hasan M. Ambary)
Temuan Keramik Asing di Banten Lama___ 148
Keramik dalam Konteks Pertumbuhan Niaga dan Kesultanan Banten___ 149
(Naniek H. Wibisono)

Bab VI MASA PENGARUH KOLONIAL___ 157
Sejarah Kolonial di Banten___ 157
Pemerintahan Hindia Belanda di Banten___ 159
Pemerintahan Kolonial Inggris___ 160
Kembali ke Pemerintahan Hindia Belanda___ 161
Perkembangan Tinggalan Arsitektural Masa Kolonial Belanda___ 162
A. Serang___ 163
Benteng Speelwijk___ 163
Jalan Daendels (Grote Postweg: Jalan Raya Pos)___ 165
Mercusuar Anyer___ 166
Mesjid Cikoneng___ 166
Karesidenan Banten___ 167
Kantor Bupati Serang___ 167
Hotel Vos___ 168
Gedung Osvia___ 168
Gedung Juang 45___ 169
Noormale School___ 169
Gedung Percetakan Fritz Rozak___ 170

Permukiman (Bangunan Tempat Tinggal)___ 170
B. Cilegon___ 171
Gedung Sekolah Dasar Kelas Dua___ 172
Bekas Sekolah Asisten Residen Gubbels___ 172
C. Pandeglang___ 172
Mesjid Caringin___ 172
Mesjid Carita___ 174
Bangunan Kodim 0601___ 174
Kantor Kawedanan Pandeglang___ 174
Pendopo Kabupaten Pandeglang___ 175
Kantor Kawedanan Menes___ 175
Peninggalan Masa Pendudukan Jepangdi Pulau Sangiang___ 176
(Gutomo)
Upaya Pelestarian Warisan Budaya Banten___ 179
(Uka Tjandrasasmita)
Terbentuknya Propinsi Banten___ 184
(Tb. Khatib Mansur)

Bab VII PENUTUP___ 191

DAFTAR PUSTAKA___ 195

DAFTAR ISTILAH___ 203

KUTIPAN UU NO. 5 TAHUN 1992 DAN PP NO. 10 TAHUN 1993
TENTANG CAGAR BUDAYA

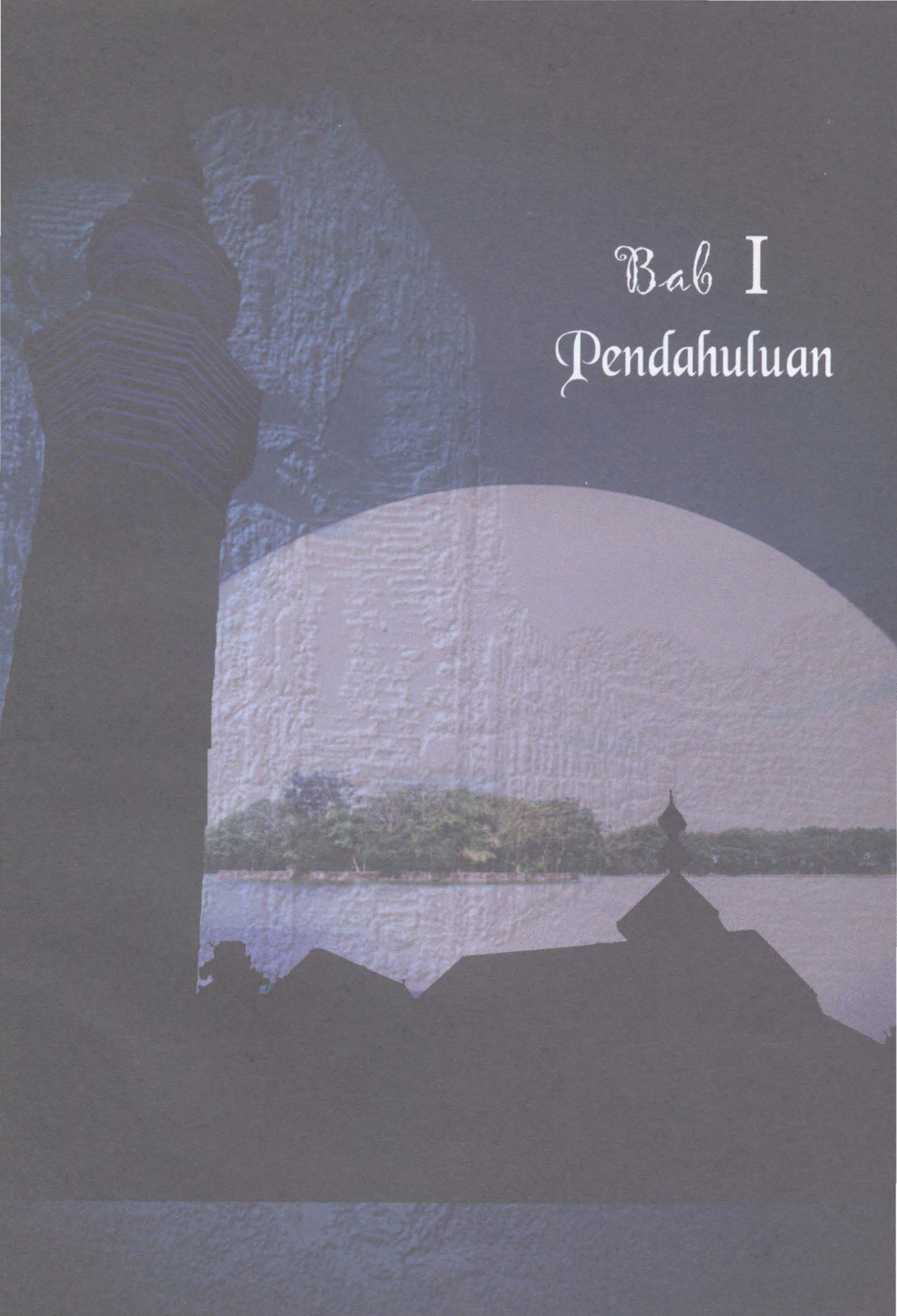

Bab I
Pendahuluan

Prasasti Muruy

Bab I

Lokasi

Secara astronomis Provinsi Banten terletak antara 105° 15′ - 106° 11′ Bujur Timur dan antara 5° 21′ – 7° 10′ Lintang Selatan dengan luas wilayah 8.651,20 km^2. Batas-batasnya adalah di sebelah utara Laut Jawa, di sebelah selatan Lautan Hindia, di sebelah timur Kabupaten Bogor dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di sebelah barat Selat Sunda.

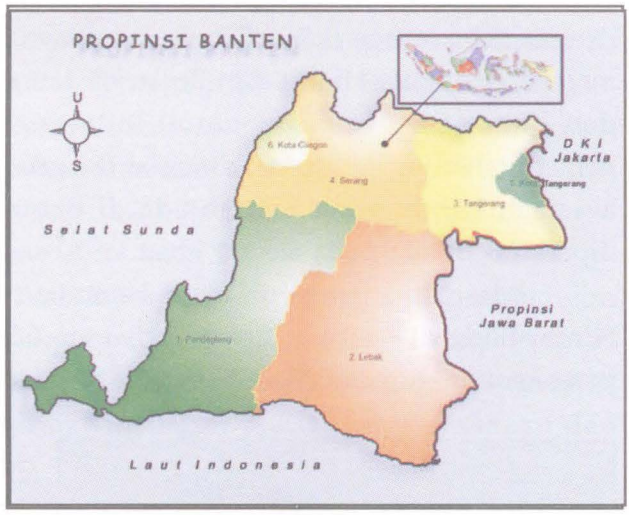

Berdasarkan bentang lahan atau geomorfologinya, wilayah Banten secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi umumnya berada di bagian selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 400 m di atas permukaan air laut. Pegunungan di wilayah ini melintang dari timur ke barat dan diakhiri bentukan Gunung Pulosari, Aseupan dan Karang di sebelah utara. Daerah pegunungan umumnya berupa hutan dan pertanian teknis yang tidak begitu luas. Dataran rendah berada pada bagian utara dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan teknis.

Sejarah dan Kebudayaan Banten

Masa lalu Banten dikenal karena di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan Islam. Namun sebenarnya jauh sebelum berdirinya kerajaan Islam, Banten telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Inventarisasi dan penelitian peninggalan purbakala yang dimulai sejak abad ke-19 di daerah ini membuktikan akan hal tersebut. J.W.G.J Prive, seorang kontrolir Belanda pada tahun 1896 melaporkan adanya temuan bangunan kuno di dekat desa Citorek, Bayah yang kemudian dikenal sebagai bangunan punden

berundak Lebak Sibedug (van der Hoop, 1932: 63-64). Kemudian N.J. Krom dalam bukunya *Rapporten van der Oudheikundingen Dienst in Nederlansch Indie"* tahun 1914 menyatakan bahwa di seputar Kabupaten Pandeglang ada peninggalan arkeologi berupa arca nenek moyang, beberapa kapak batu dari hasil penggalian arkeologis di Pamarayan (Kolelet) dan patung tipe Polinesia di Tenjo (Sanghyang Dengdek) (Djaenuderadjat, 2001:2).

Pendirian monumen-monumen megalitik dengan beragam bentuk seperti punden berundak, arca, menhir, dolmen, dan batu bergores turut memperkaya budaya dan tradisi masyarakat Banten pada masa lalu. Tradisi megalitik mulai ada sekitar 4500 tahun ketika manusia mulai hidup menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Sampai kini tradisi megalitik tersebut oleh sebagian masyarakat adat masih ditaati dan dipatuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Kebudayaan Banten kemudian semakin berkembang setelah bersentuhan dengan kebudayaan luar. Pengaruh budaya dari luar tersebut datang dari India yang membawa agama Hindu dan Buda. Di samping membawa pengaruh agama Hindu dan Buda, masuknya pengaruh India juga berdampak pada sistem sosial dan pemerintahan di nusantara, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan Hindu yang pernah ada di Banten ialah kerajaan Banten Girang yang diperkirakan ada pada sekitar abad ke-10 sampai dengan abad ke-16.

Masuknya pengaruh Islam kemudian berdampak pada mundurnya pengaruh Hindu-Buda di Banten. Kerajaan Banten Girang berada di bawah penguasa Islam, yang kemudian mendirikan kerajaan di sekitar Teluk Banten. Pusat kotanya dikenal dengan nama Surosowan, yang kini disebut Banten Lama. Kerajaan Islam Banten ada dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-19.

Penduduk BantenTahun 1673: Jawa (tengah), Cina (kanan), dan Arab (kiri)

Dalam catatan-catatan lama, kota Banten Lama yang terletak di sekitar 10 km dari kota Serang, dahulu ramai dikunjungi oleh kapal dan pedagang asing dari Arab, Portugis, Cina, Persia, Suriah, India, Turki, Jepang, Filipina, Inggris, Belanda, Prancis, dan Denmark. Selain pedagang asing, pedagang-pedagang nusantara dari Maluku, Solor, Makassar, Sumbawa, Gresik, Juwana dan Sumatra ikut berdagang di Banten Lama.

Pedagang Cina di Banten Tahun 1596

Kini masa lalu Kesultanan Banten tersebut hanya menyisakan bukti-buktinya. Bukti peninggalan tersebut antara lain berupa bekas kompleks Keraton Surosowan yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, Mesjid Agung Banten, Kompleks Makam Raja-raja Banten dan keluarganya, Mesjid Pecinan Tinggi, Kompleks Keraton Kaibon, Mesjid Koja, Benteng Speelwijk, Kelenteng Cina, Watu Gilang, Danau Tasikardi, Mesjid dan Makam Sultan Kenari, Jembatan Rante dan lain-lain. Selain peninggalan berbentuk bangunan, peninggalan dari Banten Lama juga berupa tinggalan-tinggalan lepas seperti keramik (Cina, Jepang, Thailand dan Eropa), tembikar, mata uang, dan lain-lain. Gambaran tentang peninggalan dari sisa kota Banten Lama tersebut di atas akan diuraikan dalam bab V.

Kerajaan Islam Banten yang berbentuk Kesultanan mengalami kemunduran setelah masuknya pengaruh VOC (VOC singkatan dari *Vereniging Oost-Indie Compagnie*, yaitu perkumpulan dagang Belanda di Indonesia tahun 1602-1799) dan penjajahan kolonial Belanda. Belanda kemudian menghancurkan pusat kota kesultanan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Serang. Kekuasaan Belanda di Banten berakhir setelah mengalami kekalahan oleh Jepang pada tahun 1942.

Banten telah mengalami proses perjalanan sejarah dan budaya yang panjang, kini merupakan salah satu wilayah provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama dalam

Pelancong Portugis tahun 1596 di Banten disertai juru bahasa

perjalanannya tersebut, Banten mewariskan tinggalan-tinggalan hasil kegiatan masyarakat dan kebudayaannya yang tak ternilai.

Kekayaan dari beragam pusaka budaya Banten yang tinggi nilainya itu perlu dijunjung tinggi sebagai bukti perjalanan sejarah dan budaya, yang dapat memberi sumbangan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan melalui penggalian nilai-nilai luhur yang tercermin di dalamnya. Di samping itu pusaka budaya tersebut dapat menjadi dasar dalam memupuk kepribadian dan jati diri bangsa.

DARI SUROSOWAN KE TIRTAYASA: URBANISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL DI BANTEN

Dibangun di atas puing-puing ibukota kerajaan Sunda-Hindu di Banten Girang, pusat kekuasaan politik Islam Jawa yang lebih dikenal dengan Kesultanan Banten, kemudian dipindahkan ke delta Cibanten sejak 1527. Kronik *Sajarah Banten (SB)* yang diperkirakan selesai ditulis tahun 1663 telah menceritakan kembali bagaimana kota Banten dibangun oleh raja pertama, Maulana Hasanuddin dan diperkokoh oleh penggantinya, Maulana Yusuf (cf. Djajadiningrat, 1983).

Peristiwa itu tercatat demikian penting dalam sebaris kalimat "*gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis*", mengesankan kita pada gambaran struktur permanen dalam sistem ibukota yang lengkap dengan berbagai simbol kebesaran sebuah kerajaan Islam. Dan memang para ahli arkeologi telah mengidetifikasi keberadaan bangunan istana (Surosowan) dengan sisa-sisa struktur lainnya yang memberi karakter sistem perkotaan di situs Banten Lama (Mundardjito *et. al.*, 1978:4-5). Tetapi setelah mengalami tiga kali suksesi yang nyaris tanpa 'keributan' tahun 1596 sejarah Banten mengalami perubahan sosial yang signifikan. Peristiwa itu, meminjam istilah Claude Guilliot (1992: 57), ditandai oleh beberapa 'tikungan' dari siklus waktu yang disebut Dr. John N. Miksic (1986: 16) sebagai periode *fluctuating fortune* antara 1619-1682, sebuah bentang waktu yang terlalu riskan untuk disebut sebagai *the golden age*.

Jika kita teropong lebih dekat lagi periode itu, sesungguhnya 'kepangeranan' Islam Banten juga pernah mengalami krisis, yang ternyata berlangsung selama hampir tiga dasawarsa (1596-1624). Sayangnya, episode-episode penting itu tidak terlalu jelas digambarkan dalam kronik *Sajarah Banten Rantee-Rante*, bahkan terkesan sang penulis selalu berusaha meminimalkan aspek-aspek konfliktual dalam

keseluruhan peristiwa sejarah Banten (periksa teks Djajadiningrat, 1983; Pudjiastuti, 1991).

Berbeda halnya dengan sumber-sumber Eropa, sebut saja misalnya dalam Willems Lodewijcks dalam bukunya *D'Eerste Schipvaart* ... (1598), yang kemudian diterbitkan kembali oleh Rouffaer & Ijzerman dalam *D'Eerste Schipvaart* ... (1915), serta arsip-arsip VOC (*Dagh Register*) dan *East India Company* (*India Office Records*), banyak kesaksian orang-orang Belanda pertama yang datang ke pelabuhan Banten, disusul oleh para pedagang Inggris dan bangsa Eropa lain, telah mencatat detil-detil peristiwa yang mengungkapkan betapa kritis kekuasaan senantiasa melanda kerajaan itu, baik dipicu oleh masalah suksesi maupun campur tangan orang asing dalam menghadapi berbagai perubahan sosial ekonomi.

Dengan konvergensi bukti sejarah itu, Dr. Claude Guillot (1992:69-70) dengan yakin menyatakan bahwa Banten selama hampir 30 tahun harus mengalami apa yang disebutnya *la guerre civile* (perang sipil) karena benturan dua kelompok elit kota untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Di satu pihak golongan bangsawan mempertahankan hidupnya bagi kepentingan kekuasaan politik dan di lain pihak kelompok pedagang mencoba menguasai otoritas politik bagi kepentingan ekonomi mereka. Akibat dari perang sipil tersebut, Banten tidak mampu menghindari krisis politik dan ekonomi yang kemudian berlanjut ke arah krisis multi-dimensional.

Dari gejala-gejala sejarah itu, banyak masalah bisa diidentifikasi berdasarkan fakta-fakta yang diberikan sumber, tetapi pertanyaannya yang pertama adalah, relevankah kita mengangkat isu kelampauan itu di masa sekarang? Agaknya terlampau dini untuk memberi jawaban, tetapi manakala memikirkan Banten ke depan, mencoba mengkritik sejarah harus dipandang sebagai upaya menemukan pijakan kuat untuk memiliki pandangan ke depan. Kepedulian akademis kita berangkat dari keinginan untuk mengerti peradaban yang pernah diukir oleh masyarakat Banten dalam lintasan siklus: muncul, berkembang, dan mundur. Melalui pendekatan siklus waktu, ada ekspektasi untuk dapat membandingkan zaman di mana kita hidup sekarang dengan zaman-zaman lain yang telah lewat, dan merenungkan kembali di mana tempat kita pada siklus muncul, berkembang dan menurun itu (cf. Ankersmit, 1987: 19-20).

Tentu saja, kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang pun, Banten sedang dan akan terus berhadapan dengan masalah krusial yang terkait langsung dengan sebuah pilihan peradaban: menolak atau menerima perubahan yang dimotori oleh kecenderungan global; sebuah ejawantah dari universalisme di segala bidang

kehidupan. Jika perhatian tercurah pada bagaimana perubahan-perubahan eksternal dapat diantisipasi dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pendahulu Banten, untuk dapat keluar dari krisis melalui tindakan proaktif dan inovasif yang merefleksikan mentalitas mereka, maka seperti pernah dinyatakan Taufik Abdullah (1991), kepedulian pada sejarah juga merupakan wujud penghadapan diri pada nasib bangsa, karena 'tegaknya sebuah negara bukan cuma adanya bangsa dan teritorial, tetapi juga memilih sejarah'.

Dalam kasus ini, peran yang dimainkan oleh salah seorang raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa adalah contoh kongkrit dari sebuah kebijakan politik yang hendak mempromosikan pentingnya melepaskan ketergantungan pada kekuatan asing yang berakibat pada monokultur lada; sebuah ketergantungan ekonomi yang pada akhirnya menghempaskan Banten pada situasi *chaos* sekitar empat abad lalu. Maka dapat dikatakan, Sultan Ageng adalah sosok raja Banten yang telah mencoba mengaktualkan kembali kebijakan swasembada pangan bagi tanah dan rakyat Banten melalui proyek-proyek besar di bidang pertanian. Tetapi sepenting itukah nilai kesejarahan Sultan Ageng?

Tulisan kecil ini akan mencoba mengulas kembali, apakah kebijakan itu mampu mengeluarkan Banten dari krisis multi-dimensi dan bagaimana gagasan-gagasan cemerlangnya dapat menjadi pelajaran berharga dalam kerangka mengisi kekosongan pengetahuan kita tentang mentalitas masa lalu bagi perencanaan pembangunan sekarang dan masa depan.

Jejak Peradaban Kota di Delta Cibanten

Membicarakan 'kota' seringkali orang terjebak pada diskursus formal: besaran, kumpulan pemukiman, jaringan jalan, jumlah penduduk dan elemen-elemen fisik lainnya. Belakangan, kajian dengan pendekatan seperti itu dianggap tidak representatif lagi untuk mengkategorikan kota dalam kerangka studi urbanisme, kendati sekedar untuk membedakannya dengan 'desa'. Maka muncul tawaran baru, bahwa mempelajari kota akan lebih komprehensif jika dengan pendekatan fungsional seperti pernah digagas oleh Paul Weatly (1983: 207-208; juga Miksic, 1989: 3-4) yang tidak hanya berbasis pada kriteria fisik melainkan juga pada watak aktivitas dan institusi yang tumbuh dalam sebuah pemukiman urban. Oleh karena itu, sebelum sampai pada pembahasan mengenai aktivitas, institusi dan organisasi sosial, perlu juga ada penggambaran fisik kota Banten sebagai sebuah entitas pemukiman urban dengan segala kompleksitasnya.

Namun keterbatasan akses untuk memperoleh sumber-sumber primer selalu menjadi kendala terbesar dalam membuat deskripsi lengkap tentang susunan ruang kota Banten. Artikel Claude Guillot, *'Banten en 1678'* (1989) di sini dapat dijadikan tumpuan utama dalam menuangkan berbagai kesaksian langsung atau struktur ruang dan fungsi kota Banten antara akhir abad XVI dan awal abad XVIII.

Seperti kota-kota lain yang sejaman di pulau Jawa, kepentingan Banten dalam kajian sejarah sosial pertama-tama ditunjukkan oleh pembagian ruang yang nyata antara pemukiman 'pribumi' (elit kerajaan dan pengikutnya) dan 'asing' (para pedagang) baik nusantara maupun mancanegara. Pemisahan ruang itu juga ditegaskan oleh tembok (dinding) kota yang mengesankan fungsi pelindung bagi eksistensi keraton sebagai simbol kekuasaan pribumi di bagian dalamnya. Sementara di bagian luar tembok kota terdapat kelompok-kelompok pemukiman para pedagang dengan berbagai fasilitas administrasi kepelabuhanan dan juga pasar besar.

Berangkat dari kategori ruang sosial itu, maka deskripsi pemukiman kota Banten akan dimulai dari pemukiman *intra-muros* (dalam benteng) dan kemudian akan dicoba meneropong entitas *extra-muros* (luar benteng) dalam karakteristik ruang dan fungsinya dalam keseluruhan sistem perkotaan Banten.

1. Kompleks Keraton sebagai Pusat Kota

Seperti telah menjadi kerangka umum di kepulauan Asia Tenggara, asal-usul sebuah kerajaan selalu dibangun dengan mitos-mitos supernatural (Saleh, 1999: 35-37). Demikian pula dengan Banten, tradisi 'bukan negeri' yang amat melekat pada setiap pengukuhan kekuasaan Islam di Nusantara seperti ditemukan pada berbagai manuskrip Melayu (Perret, 1999: 7-9) juga tidak luput diungkapkan di dalam manuskrip *Sajarah Banten*. Indikasi itu dapat dilihat misalnya pada kekuatan supernatural yang melingkupi pusat kota. Kendati titik pusat ditentukan oleh alun-alun yang dalam kesaksian orang-orang Eropa disebut *Paseban*, sedangkan dalam kronik *SB* dinamai *darparagi*, tetapi alun-alun, kecuali sebagai lapangan raja sesungguhnya tidak memiliki makna mendalam jika tidak ada *batu gigilang* (batu bercahaya) di salah satu sisinya. Justru berkat kesakralan batu ini, pusat kerajaan dimulai dari alun-alun tersebut.

Dengan alasan itulah Guillot (1989: 121) demikian terkesan dengan keberadaan *batu gigilang*. Alasan utamanya karena pada pupuh 18 dan 19, *SB* menceritakan bagaimana Maulana Hasanuddin menaklukkan ibukota tua, *Wahanten Girang* atas nama agama baru (Islam), dan bagaimana pula bapaknya

Syarif Hidayatullah, memerintahkan membangun kota baru di delta sungai Cibanten, yang ditandai oleh batu persegi empat panjang, yang rupanya tempat kedudukan Batara Guru Jampang. Kemenangan Hasanuddin atas penguasa Wahanten Girang diikuti oleh sirnanya Batara Guru Jampang dan kemudian Syarif Hidayatullah menasehati anaknya bahwa dengan alasan apa pun, batu itu tidak boleh dipindahkan, dan jika melanggar larangan itu kerajaan akan hancur. *Watu gigilang* kemudian menjadi tempat pentasbihan Hasanuddin dan para penggantinya.

Kronik Banten itu dengan sendirinya menunjukkan kekunaan 'batu pelantikan' tersebut. Berdasarkan perbandingan dengan batu sejenis yang dinamai *sela gilang* (*sela*=kata jawa kromo untuk batu) sebagai tempat pelantikan raja-raja Surakarta dan Yogyakarta, yang terasosiasi dengan sebuah kompleks keraton dengan nama *pagelaran*, Guillot (1989: 121) sampai pada kesimpulan bahwa batu itu memiliki signifikasi paling penting dari *regalia* lainnya. Dalam konteks mitologi Banten, dengan menjadikannya sebagai tempat pelantikan, dapat diartikan bahwa Hasanuddin telah menempatkan diri dalam posisi Batara Guru Jampang (batara Guru=gelaran Siwa), yang melakukan meditasi untuk selanjutnya menduduki tahta Banten. Dengan batu sakral itulah, Hasanuddin memperoleh legitimasi kekuasaan spiritual atas kota di mana ia sendiri menjadi pusatnya sedangkan istana hanya memiliki aspek fungsional.

Kronik *SB* pula yang menerangkan aspek fungsional itu, bahwa Sunan Gunung Jati sesudah memastikan tempat untuk ibukota, kemudian memberikan petunjuk kepada anaknya agar di tempat itu dibangun: (1) keraton, (2) alun-alun dan (3) pasar. Ketiga elemen itulah yang menjadi fondasi terbangunnya sebuah kota-raja. Maka bukan kebetulan jika tata ruang kota itu membentuk sebuah poros (*axis*) utara-selatan, karena prototipe seperti itu dapat dijumpai pada kota Majapahit (Pigeaud, 1963: V, peta I), Surabaya pada awal abad XVII dan juga Yogyakarta pada akhir abad XVIII (de Graaf, 1958: 14).

Orientasi ruang kota Banten tampak ditunjukkan oleh penataan empat jalan utama (kanal-kanal) mengikuti titik kardinal yang mengarah ke semua tempat, sehingga membentuk sebuah persilangan dengan titik pusatnya: keraton. Hal itu diperkuat lagi dengan tembok keliling kota berdenah empat persegi panjang yang pada kedua sudut luarnya berujung pada pelabuhan. Dengan denah kota seperti itu, Guillot (1992: 127) mengusulkan untuk melihat Banten sebagaimana halnya *mandala;* sebuah pusat dengan keempat titik kardinal, yang bahkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, setiap titik itu secara simbolis dijaga oleh

empat pejabat (penguasa): Pangeran Kidul, Pangeran Lor, Pangeran Wetan, Pangeran Kulon.

Keraton Surosowan. Keraton sendiri yang berada di sebelah selatan alun-alun, sebagai tempat kedudukan raja, ditempatkan dalam sebuah perlindungan tembok yang tinggi, merupakan kompleks hunian yang terdiri dari sejumlah bangunan dan paviliun. Kendati tidak terlalu jelas, tetapi kronik *SB* cukup memberi gambaran sebuah kompleks keraton dalam arti keseluruhan yang terdiri dari: (1) struktur yang disebut *made*, (2) sebuah kompleks dengan nama *candi raras*, (3) gedung penyimpanan pusaka, (4) masjid pribadi raja dengan sebuah menara, (5) meriam terkenal Ki Jimat, (6) istal, dan (7) gardu-gardu jaga hampir di semua tempat. Semua elemen itu mengindikasikan Surosowan sebagai prototipe kota raja tipikal Jawa.

Uraian yang lebih lengkap diperoleh dari catatan seorang ahli bedah Denmark, Cortemunde dalam perjalanan ke pulau Jawa, singgah dan bertemu dengan raja Banten mendampingi utusan dagang Kerajaan Denmark. Pada tahun 1673 itu, ia menggambarkan keberadaan alun-alun yang pada salah satu sisinya terdapat paviliun yang dalam *SB* disebut *Sri Manganti* dan di belakangnya ada dinding batu yang mengitari istana. Di balik dinding keraton itu, ada dua bangunan tinggi dan kokoh, yang satunya memiliki atap bergaya rumah Cina dengan sebuah cerobong asap dari perapian menonjol di atas atap. Namun, pada tahun 1678 keraton megah ini secara definitif ditinggalkan oleh Sultan Ageng untuk kemudian mendiami keraton baru di Tirtayasa, pada sebuah jaringan muara sungai Ciujung, dekat Pontang (cf. Sakai & Naniek H. Wibisono, 2000). Keraton yang lebih dikenal dengan nama Surosowan di Banten Lama sejak itu tidak lagi menjadi kedudukan raja, tetapi sekedar tempat kediaman anak sulungnya (Abdul Khahar), sebagai 'raja muda'. Meskipun demikian alun-alun tidak segera kehilangan fungsinya sebagai titik pusat pertemuan masyarakat Banten.

Alun-alun Keraton. Terletak di depan (sebelah utara) istana dengan bentuk memanjang sampai ke kanal yang melintasi kompleks istana, baik Schouten (1707, II: 302) yang berada di Banten tahun 1661 maupun Cortemunde (1953: 126) tahun 1673 mencatat pohon-pohon besar masih tumbuh mengelilingi alun-alun dan memberikan rasa nyaman pada pusat kota. Sejumlah bangunan resmi yang dibangun di sekeliling alun-alun memberi karakter kota sebagai pusat administrasi dan politik, karena di samping sebagai tempat raja manampakkan diri di depan rakyatnya, alun-alun juga menjadi tempat dilangsungkannya proses peradilan

dengan raja sebagai hakim tertinggi (Valentijn, 1724-1726, IV: 214-215). Di lapangan ini pula, para pembesar kerajaan wajib melakukan *seba* menghadap raja. Di situ juga tempat dipukulnya gong atau tembakan meriam untuk menandai pengumuman akan keputusan penting pemerintah (*DR*, 6 Mei 1672 dan 7 Februari 1678).

Selain difungsikan untuk kegiatan politik administratif, alun-alun juga digunakan sebagai tempat kegiatan budaya. Berbagai peristiwa penting yang berhubungan dengan keluarga raja, misalnya pesta perkawinan atau khitanan, dilangsungkan di alun-alun (DR, 1 September 1672; Scott, 1943: 152-162). Sedangkan untuk perayaan umum, kesaksian orang Eropa menerangkan bahwa selama berhari-hari malahan bisa berminggu-minggu, alun-alun menjadi tempat keramaian besar seperti perayaan *Sekaten* di Jawa Tengah. Bahkan dalam arsip *India Office Record* (IOC/G/21/3/III, 13.5.1659) seperti dikutip C. Guillot (1989: 131) tercatat bahwa di lapangan kraton itu seluruh penduduk datang memberi hormat kepada raja dan membagi hadiah yang merupakan kewajiban pada akhir Ramadhan. Akhirnya di sana pula orang dapat menyaksikan raja dan para pembesar saling berhadapan dalam pertandingan berkuda pada hari Sabtu (*Sasapton*) (*DR*, 3 Desember 1659).

Peta Banten yang dibuat tahun 1659 menunjukkan di selatan alun-alun, istana raja dikelilingi oleh rumah-rumah para penasehat dekat, terutama dua menteri utama: *Mangkubumi* dan *Kiai Arya*, membentuk kantor administrasi bersama tempat beraktivitasnya berbagai jenis pelayanan publik oleh misalnya juru tulis, penterjemah dan pekerjaan lainnya. Tetapi pada tahun 1678 dengan kepindahan Sultan ke Tirtayasa, tokoh-tokoh besar tersebut membongkar kediaman mereka. Demikian pula paviliun-paviliun ikut dibongkar untuk dipindahkan ke kraton baru di Tirtayasa (*DR*, 27 Juli 1678). Cortemunde (1953: 126) juga mencatat bahwa tidak jauh dari istana, ada kompleks arsenal (gudang senjata) yang tetap dijaga, di mana tersimpan meriam-meriam, senjata api dan pedang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan tentara.

Bangunan lainnya di sekitar alun-alun itu adalah penjaga seperti dicatat oleh Cortemunde (1953: 126). Dari catatan orang-orang asinglah kita mengetahui bahwa di setiap sudut kota selalu ada penjaga yang ternyata masih dipelihara sampai kekalahan Banten dari Batavia tahun 1682. Akhirnya perlu disebutkan bahwa di tepi sebelah utara alun-alun bersandar perahu-perahu raja dan aparat kerajaan pada tepian kanal di sekitar dermaga khusus untuk akses ke kompleks keraton.

Mesjid Agung dan Menara. Di sebelah barat alun-alun terdapat sebuah mesjid. Masyarakat Banten biasa menyebutnya dengan "Mesjid Agung Banten'. Dalam tradisi lisan diakui bahwa mesjid tersebut dibangun oleh Maulana Yusuf pada tahun 966 H (1559 M), tetapi menurut C. Guillot (1989: 131), jika dilihat pada sketsa tahun 1678, masjid tersebut baru mencapai bentuknya seperti yang tampak sekarang sesudah tahun 1615. Banyak pendatang Eropa mengagumi mesjid tersebut dan menyebutnya sebagai *tempel* (kuil). Deskripsi yang dibuat oleh Bogaert (1711: 134) pada akhir abad XVII dianggap Guillot (1989: 132) paling lengkap: "Kuil itu hampir berbentuk persegi empat dan terbangun dari balok-balok besar yang banyak terdapat di Pulau Jawa (...). Atapnya berbentuk *tower* (...) yang memiliki lima atap yang satu dan lainnya saling bertumpuk; atap yang pertama dan paling besar menutup seluruh badan bangunan, atap berikutnya makin ke atas makin mengecil dan terakhir membentuk runcingan (limasan)".

Menaranya sendiri yang sekarang menjadi simbol Provinsi Banten, tampaknya tidak terlalu banyak menarik perhatian orang Barat. Stavorius (1798: 55) menerangkan dalam catatan perjalanannya bahwa "menara berada di dekat mesjid, sebuah menara runcing tetapi tinggi seperti menara-menara di Turki". Sayangnya belum ada sumber paling tua yang menerangkan keberadaan menara. Tanpa sumber yang jelas, Ismail (1956: 6) menyebutkan bahwa menara dibangun pada tahun 1620 oleh seorang Manchuria (Mongol) bernama Cek Ban Cut. Tetapi pada peta-peta Banten tua, menara ini belum cukup tampak. Baru pada peta 1659 (Ijzerman, 1923: XXIII) disebutkan bahwa "di dekat mesjid atau 'gereja' mereka terdapat menara putih (tingginya) melewati pepohonan".

Sabakingking Nekropolis Banten. Masih di sekitar mesjid terdapat kompleks makam raja (*necropole*) yang disebut *Sabakingking*. Pada tahun 1678 hanya dua orang raja yang dikubur di sana: Maulana Hasanuddin dan cucunya, Maulana Muhammad, yang tewas dalam perang melawan Palembang, dan karenanya disebut *Seda-ing-rana* (wafat di tempat yang jauh). Maulana Yusuf sendiri dimakamkan di Pakalangan, di sebelah selatan kota, sedangkan raja-raja lainnya dimakamkan di Kenari, dekat tamansari (Tasikardi).

Di kompleks mesjid juga tempat dikuburnya orang-orang besar yang diberi kehormatan oleh raja, seperti Syahbandar Banten keturunan Cina, *Kiyai Ngabehi Kaytsu* (DR, 10 Juni 1674). Akhirnya perlu disebutkan kompleks pemukiman khusus di dekat masjid sebagai tempat kediaman beberapa ulama penting. Bogaert (1711: 134) menyatakan di antaranya terdapat rumah seorang *Qadi* yang dikenal

dengan gelaran *Kiai Pekih* (Arab: Figh). Tokoh itu memainkan peran penting sebagai 'menteri kehakiman' (*Algemeen Rijksarchief*, VOC 1440, f° 2440, 20 Januari 1688, dikutip dari C. Guillot, 1989: 134).

Kapalembangan, Pasar dalam Kota. Karakter klasik kota Banten juga ditandai oleh adanya pasar yang terletak di antara mesjid dan sungai. Disebut *Kapalembangan* (*SB* pupuh 26) karena tempat itu dijadikan pasar pertama di kota Banten. Tetapi dalam perkembangannya, pasar itu tidak representatif lagi karena ketiadaan ruang yang cukup sesuai dengan kenaikan populasi dan membesarnya aktivitas perdagangan dalam kota.

Ketika orang Belanda pertama datang ke Banten tahun 1596, pasar utama sudah dipindahkan di sebelah luar (sisi timur laut) benteng kota, sekitar Karangantu, sedangkan pasar yang terletak di dekat masjid hanya buka pada pagi hari. Pada tahun 1596, pasar itu tetap penting karena di sana orang masih menjual lada, sejak tahun 1661, menurut Schouten (1707), II: 304) orang tidak pernah lagi membeli lada ke sana, kecuali untuk kebutuhan harian. Tahun 1673, menurut kesaksian Cortemunde (1953: 125-126), pasar besar hanya ada di dua tempat: sebuah di sebelah timur benteng (Karangantu), lainnya di sebelah barat yang disebutnya sebagai *Kineserkuarter* (Pacinan).

Perkampungan dalam Benteng. Data pemukiman penduduk dalam kota memang penting untuk menggambarkan lapisan-lapisan sosial, tetapi informasinya kurang rinci. Kekurangan data itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang Eropa pada perkampungan dan lebih tercurah pada kalangan perkampungan elit dengan pusatnya di sekitar alun-alun dan kraton. Kendati begitu, pelancong Belanda pertama (cf. Rouffaer & Izjerman, 1915: 107) memberi keterangan agak jelas tentang struktur perkampungan dalam benteng.

Menurut kesaksian orang asing itu, bagian timur kota terbagi ke dalam banyak pemukiman dan pada masing-masing pemukiman terdapat seorang 'pembesar' yang selalu siap dalam keadaan perang, kebakaran dan bahaya lainnya. Setiap kampung mempunyai sekat pemisah (pagar) dan masing-masing memiliki gardu jaga di setiap pintu masuk (gapura) yang dilengkapi dengan sebuah bedug besar yang siap dibunyikan jika ada serangan atau kebakaran. Schouten (1707, II: 328-329) mencatat bahwa hal seperti itu sangat umum di Jawa, bahwa kota terbagi ke dalam kampung-kampung yang masing-masing mengurus diri sendiri dan berada dalam pengawasan 'orang kaya' yang mempunyai hubungan dekat dengan

raja atau mereka yang mewakilinya. Ketika ada serangan dari luar atau kebakaran, orang menabuh bedug dengan pemukul kayu besar.

Krapyak dan Tamansari. Dua tempat yang disebut *krapyak* dan *tamansari* di dalam SB sesungguhnya berada di luar benteng kota, tepatnya di sebelah barat daya kota Banten. Namun kepentingan dua tempat ini terletak pada fungsinya bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan air penduduk kota. Seperti juga biasa ditemukan pada pusat kerajaan lain di Jawa Tengah, kota Banten juga memiliki areal yang disebut *krapyak* (kandang ternak) dan *tamansari* (taman air) sebagaimana disebutkan dalam *SB* (pupuh 44). Juga ada sebuah tempat bernama *pupungkuran*, dekat Kenari sekarang. Ini berkenaan dengan kompleks sumber air yang sekarang disebut Tasikardi, yang pada waktu itu disebut *kebon alas* dan merupakan 'danau' yang di tengahnya terdapat sebuah pulau. Di tempat inilah pada tahun 1702, Cornelis de Bruin (1725, V: 53) diterima oleh Sultan dalam kunjungannya ke Banten. Menurutnya, Tasikardi merupakan daerah penampungan air untuk kraton yang dihubungkan dengan sebuah pengatur batu (pengindelan) dan pipa air yang masih bisa kita lihat sekarang.

2. Pemukiman Extra-muros

Peta tahun 1630-an (ARA, den Haag VEL 1175; Guillot, 1989: 126), peta tahun 1659 (Cortemunde, 1953: 125), dan sketsa Banten tahun 1725 (Valentijn, 1724-1726), menunjukkan pertumbuhan kota Banten yang meluas mengikuti aliran kanal dan tepian benteng kota. Demikian pula pemukiman di luar benteng (*extra-muros*) semakin membesar sejalan dengan kemajuan yang didorong oleh peningkatan perdagangan lada.

Perubahan signifikan dialami oleh kawasan tepian luar benteng, baik di sebelah barat maupun timur. Kedua sayap sungai Cibanten itu tampaknya merupakan akses utama yang membolehkan masuknya orang asing ke areal luar benteng. Stimulan utama dari pertumbuhan permukiman itu adalah kegiatan perdagangan besar di dua pelabuhan Pabean di sayap barat dan Karangantu di sayap timur.

Pabean, Pelabuhan Internasional. Pelabuhan utama Banten sering disebut dalam sumber-sumber Barat berada di sekitar Pacinan. Di kompleks pelabuhan ini telah dibangun loji-loji pedagang Eropa dan sekaligus pemukiman mereka yang pengelompokannya didasarkan pada asal-usul etnik dari mayoritas

penduduknya. Terletak di sebelah barat kota, bangunan-bangunan itu dipisahkan baik oleh dinding kota bagian barat maupun oleh kanal. Menurut Cortemunde (1953: 124), dua kelompok permukiman *intra* dan *extra-muros* itu hanya dihubungkan dengan sebuah jembatan yang dapat dinaik-turunkan itu. Dari keletakannya itu, bisa dikatakan bahwa pelabuhan utama Banten memang sengaja dijauhkan dari kota raja.

Keberadaan pemukiman para pedagang itu menjelaskan sebagai *out-sider* dari kelompok sosial Banten yang berdiam di dalam Benteng. Kenyataannya, Pacinan ini hanya dikhususkan bagi populasi asing yang terasosiasi kuat dengan pusat perdagangan internasional. Oleh karena itu, ke tempat inilah berdatangan perahu-perahu dari tempat sejauh daratan Cina dan Eropa, tetapi di situ juga mendekat perahu-perahu lokal membawa produk-produk ekspor yang kemudian berdiam secara temporer atau permanen untuk ikut ambil bagian dalam perdagangan di bawah orde ekonomi internasional. Beberapa sketsa menunjukkan adanya jalan sepanjang sungai sampai jauh ke selatan. Schouten menyebutnya sebagai 'jalan Cina' yang dibentuk oleh fasilitas administrasi pelabuhan (pabean), perkampungan Cina dan juga pergudangan orang-orang Eropa (*India Office Records*, 21/4, 27 Oktober 1670).

Karangantu, Pelabuhan Lokal dan Kampung Pinggiran. Pelabuhan lain terletak di sebelah timur pusat kota yang dikenal dengan nama Karangantu. Seperti juga di Pacinan, pelabuhan ini juga dipisahkan oleh tembok kota dan sungai. Aktivitas kepelabuhanan dikontrol oleh sebuah kantor pabean dan diawasi oleh kelompok penjaga serta juga didiami orang asing. Karangantu merupakan kampung 'pinggiran' yang belum benar-benar memiliki karakter urban, di samping karena letaknya jauh ke timur laut sepanjang pesisir utara, juga meluas sepanjang tepi sungai. Karakter pemukiman pinggiran ini juga dicirikan oleh jenis aktivitas yang mengkhususkan diri pada usaha kerajinan perahu, pengeringan ikan serta tambak-tambak garam.

Fungsi pelabuhan ini yang terpenting adalah menjadi pasar besar dengan toko-toko yang mengitari pelabuhan dan membentuk 'jantung' pemukiman. Di pasar inilah berlangsung perdagangan eceran. Lagi pula, pasar selalu buka setiap hari mulai pagi sampai malam hari, bahkan sampai dini hari. Sesungguhnya banyak orang asing dari daerah Nusantara, tetapi yang terutama bermukim di situ adalah komunitas Cina dan India. Menurut Schouten (1707, II: 304-5) dan juga De Bruijn (1725, V: 51) di sebelah timur Karangantu terdapat kampung nelayan

(Bugis, Makassar, dan suku lainnya): "jumlahnya tidak terhingga, dari rumah-rumah kecil dan gubuk-gubuk orang miskin membentuk perkampungan nelayan dan pelaut (tetapi) sangat berguna bagi negara, (karena) di zona ini ada lokasi pembuatan kapal tradisional dimulai *jongue* sampai *pirogue*, yang dibutuhkan Banten untuk semua aktivitas maritim".

Kawasan Pertanian di Pedalaman Selatan. Di luar kompleks perkotaan, jauh ke selatan terdapat permukiman *'sub-urban'* di sepanjang sungai Cibanten ke arah hulu sejauh bekas ibukota lama di Banten Girang. Dengan adanya jalan dari Pacinan ke selatan, orang memiliki akses untuk sampai ke areal pertanian subur sampai ke hulu Cibanten. Kurang lebih 7 km dari Pacinan, orang akan sampai di Kelapa Dua, sebuah areal pertanian tanaman pangan yang dapat menyuplai kebutuhan penduduk kota dan sekaligus untuk ekspor. Menurut Guillot (1989: 145) Kelapa Dua merupakan 'desa besar' yang sangat berbeda dengan lainnya karena rumah-rumah di sana dibangun dengan bata dan istimewanya mayoritas penduduk berasal dari Cina (India Office Records, H 628, f° 187-194). Di daerah inilah penduduk Cina menanam pohon tebu untuk diproses menjadi gula, lebih-lebih ketika ada larangan menanam pohon lada (Cortemunde, 1953: 126).

Tidak jauh dari kampung Kelapa Dua, terdapat sebuah tempat yang disebut Serang. Seperti diingatkan oleh namanya (*serang* [Sunda]=sawah), daerah ini merupakan areal persawahan yang dibangun Sultan Abulmafakhir Abdul Kadir (*SB* pupuh 46). Dari Serang ke arah selatan, kita sampai ke ibukota lama Banten Girang. Kendati pernah dihancurkan pada awal berdirinya kesultanan, namun tempat itu masih difungsikan untuk kunjungan sultan atau tempat berkumpulnya penasehat rahasia terutama untuk mempersiapkan peralatan dalam masa peperangan (*DR*, 23 Januari 1674). Pada tahun 1679, bahkan sebuah bangunan baru dibangun di Banten Girang untuk menampung pengungsi perempuan ketika kota Banten dilanda perang, dan untuk mobilitas pasukan, pemerintah Banten telah membangun jalan darat yang menghubungkan Banten Girang dengan Tirtayasa yaitu keraton Sultan Ageng yang baru (*Dr*, 28 Desember 1679).

3. Struktur Sosial Politik

Ditinjau dari struktur ruang kota, Banten merupakan pemukiman kota yang dibangun pada sebuah delta yang secara alamiah dibentuk oleh sungai Cibanten. Pada bagian muara itu dua aliran sungai membentuk tiga komponen ruang mengikuti jalur sepanjang teluk Banten dari pesisir barat ke pesisir timur. Bagian

tengah yang dikelilingi dinding (tembok kota dari bata) hanya didiami oleh orang Banten dalam kantung-kantung pemukiman yang masing-masing dikepalai oleh seorang bangsawan bersama 'pengikut' mereka yang hidup dari tanah pertanian.

Dalam bagian kota itu, tak ada praktek perdagangan kecuali di pasar sebelah utara alun-alun kraton. Sementara di sebelah barat yaitu *Pacinan* atau *pabean*, terdapat konsentrasi pemukiman orang asing (Cina, India dan Eropa) dengan aktivitas utama perdagangan internasional. Di sebelah timur kota juga ada perkampungan orang asing (Nusantara) untuk mendukung perdagangan eceran (Karangantu). Dengan karakter fisik seperti ini, Banten telah mengenal perkampungan elit yang mengisolasi diri pada areal *intra-muros*, sedangkan para pendatang asing yang hidup dari perdagangan berdiam di kawasan *extra-muros* (Guillot, 1992), dan tentu saja periferik dilihat dari sudut pandang pusat kota.

Struktur kota semacam ini mencerminkan situasi masyarakat yang membedakan diri dalam kategori etnik dan profesi: di satu pihak ada golongan 'orang Banten' yang sebagian besar bangsawan pemilik lahan pertanian (*apanage*) dan di lain pihak terdapat golongan 'bukan orang Banten' (asing) yang umumnya pedagang. Sudah tentu kondisi ini menyebabkan penduduk kota *vis-a vis* tidak saling mengenal dan memahami aspirasi masing-masing. Lebih dari itu, kedua golongan selalu memiliki pandangan yang secara diametrikal beroposisi dalam hal kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan otoritas Banten (Guillot, 1992: 57-58).

Demikian pula dilihat dari struktur politiknya, dualitas sosial seperti di atas, tampak juga pada hierarki kepemimpinan negara. Bahwa di puncak kekuasaan, Banten memiliki seorang raja, memang lazim seperti umumnya pada kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah yang memakai gelar *Pangeran Ratu*, sebelum mengadopsi gelar sultan sejak 1638. Tetapi dengan keberadaan dua perdana menteri yang disebut *Patih Jro* untuk perdana menteri internal dan *Patih Jaba* yang berperan sebagai perdana menteri eksternal, dalam praksis, dualisme kepemimpinan eksekutif itu akan selalu menimbulkan benturan kepentingan (cf. Vorstenlanden, 1926: 277-300). Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa kedua pejabat tinggi itu dibedakan bukan saja oleh kapasitas dan status sosial, tetapi yang terpenting oleh kepentingan individu atau kelompok. *Patih Jro* misalnya harus selalu berasal dari keturunan bangsawan, karena tuntutan fungsinya sebagai penasehat khusus. Selain itu, ia juga harus mengatur semua kepentingan internal kraton dan *ruling family* terkait langsung atau tidak dengan birokrasi.

Kontras sekali dengan *Patih Jro* yang biasa digelari *Mangkubumi* atau *upapatih*, perdana menteri eksternal (*Patih Jaba*) diangkat dari 'orang biasa' dengan kewenangan luas untuk mengelola semua urusan 'luar'. Termasuk ke dalam wewenangnya adalah mengurus soal-soal perdagangan internasional. Dengan kedudukannya itu, maka seorang *Patih Jaba* yang lazim disebut *tumenggung* atau juga *kiai patih* (pedagang asing menyebut *admiral*) memainkan kekuasaan yang luas dalam perannya sebagai 'kepanjangan tangan' orang-orang asing di Banten, karena seperti dikatakan Guillot (1982: 58-59) baik syahbandar (kepala pelabuhan), *tandha* (duane) dan *andamohi* (juru runding) maupun *juru dacin* (penaggung jawab timbangan) dan seluruh pejabat pelabuhan itu berada di bawah jurudiksinya.

Dualisme politik ini terbukti menjadi salah satu titik lemah Banten dalam menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi. Pada intinya benturan kepentingan itu selalu dipicu oleh tarik-menarik dua isme: nasionalisme dan internasionalisme, antara konservativisme dan liberalisme, *autochtone* dan *allochtone*, atau antara pribumi dan non-pribumi. Dualisme kepentingan itu tampak nyata ditunjukkan oleh permainan peran figur-figur yang saling beroposisi; *santana* yang mempresentasikan feodalisme petani sebagai pemegang kekuasaan politik (warisan?) dan *ponggawa* yang mempresentasikan 'orang biasa' yang mendominasi kekuatan ekonomi negara pada sistem birokrasi Banten sesuai dengan kompetensinya.

4. Fragilitas Ekonomi Lada

Ekonomi Banten menjelang abad XVII, seperti dipresentasikan oleh banyak sumber, terutama berbasis pada tanaman dan ekspor lada yang diproduksi di pedalaman dan di tanah jajahan Sumatera Selatan (Lampung dan Bengkulu). Masalah utama yang dihadapi 'negara kota' Banten adalah karena ekonomi itu didasarkan pada kebijakan monokultur. Kemakmuran penduduk juga digambarkan demikian kuat terasosiasi dengan keuntungan dari ekspor lada, yang telah membuat Banten mencapai reputasi sebagai negara pengekspor lada kedua terbesar setelah Aceh di Asia Tenggara.

Kenyataannya, *boom* ekonomi itu tidak diikuti dengan penyediaan bahan pangan yang cukup untuk ibukota berpenduduk hingga 10.000 jiwa. Ketergantungan pada ekonomi lada ternyata ekivalen dengan ketergantungan penduduk pada impor beras dari pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa Tengah, padahal sebelumnya - bahkan sampai akhir abad XV - seperti dinyatakan oleh

Tome Pires (1512-1513) Banten dikenal para pedagang Portugis sebagai salah satu pelabuhan yang mengekspor beras dan bahan pangan lain (Cortessao, 1944: 226).

Boleh dikatakan sesudah mangkatnya Maulana Yusuf, tidak satu pun perhatian diberikan pada aspek pertanian karena perdagangan lada memonopoli kekuasaan Banten antara 1580 dan 1620. Celakanya, para *ponggawa* Banten selalu bersekutu dengan kaum pedagang untuk mengambil alih mesin kekuasaan pada setiap periode pergantian raja, terutama setelah Maulana Muhammad gugur dalam peperangan melawan Palembang, sementara putera mahkota masih kanak-kanak yang mengharuskan kekuasaan dipegang oleh seorang *regent* (wali).

Dengan bantuan seorang Qadi, otoritas agama paling tinggi di kerajaan dan juga sebagai pemegang kekuasaan peradilan, perdana menteri eksternal yang populer dengan gelaran *Kiai Mas Patih* pada periode Muhammad berhasil menduduki jabatan *Regent*. Lodewijkz, penulis *D'Eerste Boeck* (1598) melukiskan bahwa sang Perdana Menteri sebagai seorang berpengalaman dalam urusan politik wajar memakai gelar itu. Maka dilihat dari usia dan pengalaman serta aliansinya dengan keluarga raja, membuat tokoh ini pantas untuk memimpin perwalian. Dengan keberadaannya di pucuk pimpinan negara, menjadikannya sebuah 'kebaruan besar', karena Banten dengan mitos kebangsawanan warisannya, ternyata bisa diperintah oleh golongan *ponggawa*, yang notabene 'orang biasa' seperti dijelaskan oleh sebutannya, *Kiai Mas patih*.

Periode perwalian itu berlangsung cukup lama, sekurang-kurangnya telah dua kali pergantian, dan memberi peluang pada golongan *ponggawa* untuk mengambil peran politik dominan. Tetapi banyak bangsawan menganggap perdagangan hanya menguntungkan orang asing. Dalam beberapa catatan *Controleur* Belanda seperti direkam pada *Dagh Register* (1624-1661), dinyatakan bahwa beberapa dari mereka mencoba mengambil kekuasaan di bawah kepemimpinan Pangeran Ranamanggala yang menganggap perdagangan lada sebagai sumber konflik dan bahkan penyebab utama 'perang saudara' di Banten. Sejak keberhasilannya memegang jabatan 'wali raja' Ranamanggala segera memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan perdagangan di seluruh teritorial Banten dan mewajibkan penduduk untuk kembali menanam padi dan umbi-umbian akibat ketidakmampuan negara mengekspor beras. Keputusan yang tidak populis itu amat dirasakan akibatnya oleh seluruh populasi Banten, karena dengan tangan besinya ia memerintahkan untuk membabat habis tanaman lada.

Tentu saja perubahan orientasi ekonomi yang diaplikasikan secara brutal itu membawa konsekuensi dramatis terhadap populasi secara keseluruhan. Perang kota pun tidak dapat dihindarkan. Kronik *SB* menyebutnya *Geger Pailir* (huru-hara di hilir sungai). Dalam beberapa tahun, produksi lada menurun tajam, meskipun sejumlah petani masih tetap menjual lada secara sembunyi-sembunyi, tetapi harga lada di pasaran amat rendah. Pada tahun 1618, harga sekarung lada masih berkisar antara 5,5—6,5 real, namun setahun sesudah kampanye pencabutan pohon lada (1620), harga di pasaran jatuh menjadi 0,75 real, bahkan tiga tahun kemudian hanya 0,5 real. Akibatnya sangat fatal, sekitar 6000 pedagang meninggalkan Banten dan mencoba peruntungan baru di Batavia yang baru saja dibangun oleh VOC (Guillot, 1995: 105).

Menghadapi kebijakan itu, dan akibatnya yang ditimbulkan, seluruh elemen masyarakat menuntut Ranamanggala segera melepaskan jabatan sebagai 'wali raja' dengan harapan Banten dapat kembali ke politik ekonomi lama. Tahun 1624, Ranamanggala menyerahkan kekuasaan kepada putera mahkota yang sudah dewasa (28 tahun), tetapi kenaikan tahta Abdul Kadir yang ditunggu-tunggu bukan sesuatu yang cepat menyelesaikan masalah.

Beberapa pendatang Eropa mencatat, betapa penduduk tidak sanggup lagi mengikuti perubahan-perubahan yang begitu radikal. Kesengsaraan penduduk diperparah lagi oleh epidemi yang melanda Banten tahun 1625. Menurut estimasi saksi Belanda, selama 5 bulan sepertiga penduduk kota musnah. Situasi politik semakin memburuk, ditambah lagi dengan blokade jalur laut oleh Batavia untuk memastikan perjanjian monopoli, dan tekanan Mataram dengan politik 'unifikasi' seluruh Jawa yang menuntut pengakuan Banten atas kedaulatan raja Jawa itu tahun 1626 (Guillot, 1992; Guillot, 1995).

Krisis kepercayaan segera dialami pemerintah Banten, seperti ditandai oleh pengabaian untuk menanam lada kembali. Sebagian besar penduduk sudah terlanjur melanjutkan usaha pertanian mereka dengan mencoba membuka lahan baru dan irigasi untuk padi dan tebu. Anjuran pemerintah untuk kembali menanam lada menjadi tidak efektif. Tetapi tahun 1636, pemerintah terpaksa mewajibkan menanam lada.

Selama lebih dari satu dasawarsa, berbagai huruhara, pemberontakan, dan gerakan perlawanan lainnya bermunculan. Kebijakan penanaman kembali lada membangkitkan berbagai pemberontakan di pedalaman, yaitu daerah yang justru

dahulu secara tradisional merupakan produsen lada. Banten harus mengirim tentara 6.000 orang untuk menghentikan perlawanan mereka. Di jajahan Sumatera, situasi lebih tajam. Kepala-kepala lokal di Silebar, Bengkulu, dan Lampung memanfaatkan kelemahan pemerintah pusat akibat kesulitan-kesulitan internal untuk terus menentang kebijakan Sultan. Tanpa kendali yang ketat dari otoritas Banten, mereka dapat leluasa menjual lada langsung ke pedagang asing, Namun, untuk memastikan haknya, Banten mengirim tentara ke teritori jauh itu, dan memberi sanksi kepada para pembangkang.

5. Menuju Masyarakat Agraris

Barangkali karena kompleksitas masalah tersebut banyak perhatian sejarawan difokuskan pada orde ekonomi perdagangan Banten dengan berbagai konfliknya yang nyaris tanpa penyelesaian. Sementara itu berbagai kebijakan sultan yang terkait dengan bidang pertanian menjadi kurang diungkapkan. Dalam hal ini, Claude Guillot (1995: 83-117), melalui sebuah artikelnya, *"La politique viviriere du Sultan Ageng"*, mungkin menjadi ahli pertama yang mencoba mengingatkan kita untuk mengenang kembali sejumlah proyek besar Sultan Ageng Tirtayasa dalam kebijakan pertanian di hampir seluruh pesisir utara Banten. Untuk mendapatkan informasi rinci di bawah ini diringkaskan beberapa catatan dari *DR* yang selalu tertarik untuk mendokumentasikan kebijakan Sultan Ageng melalui *controleur* residennya di Banten.

Proyek pertama, Sultan dalam bidang pertanian dimulai pada bulan September 1569 dengan memerintahkan Kiai Arya Mangunjaya, salah seorang menterinya, mengumpulkan kepala-kepala masyarakat untuk mengumpulkan bibit pohon kelapa sebanyak 100 unit/orang. Pohon-pohon itu harus ditaman sepanjang sungai *Ontong Java* (Cisadane), tapal batas timur dengan Batavia.

Proyek kedua berlangsung sejak tahun 1663. Proyek ini harus diselesaikan selama empat tahun, yaitu penggalian kanal yang menghubungkan sungai Tanara ke sungai Pasilian (Cimanceuri) melewati Balaraja. Sultan sendiri memimpin keberangkatan 150 kapal dengan 500 orang pekerja.

Proyek ketiga terjadi tahun 1664. Sultan merealisasikan dua proyek hidraulik besar. Selama musim kering mengerjakan pembangunan bendungan. Sayangnya kita tidak tahu di mana lokasinya. Hanya diketahui pembangunan itu disertai oleh pelarian dari Batavia.

Proyek keempat (1670-1672), dimulai pada bulan Oktober 1670. Sultan memutuskan untuk menggali kanal baru antara Pontang dan Tanara. Dalam

proyek itu dilibatkan tentara 16.000 orang, di antara mereka ada 200 pelarian Batavia. Sultan menempatkan saudara iparnya, Kiai Ngabehi Wangsanala,untuk memimpin pekerjaan itu. Kurang dari satu bulan kemudian—sementara kanal lainnya sedang digali—Sultan didampingi beberapa pembesar kerajaan berangkat ke lokasi proyek besar itu memimpin 10.000 orang.

Proyek kelima (1675-1677) membangun bendungan di atas sungai Pontang, agar air Ciujung dapat dialirkan ke kanal Tirtayasa. Selama itu pula dibangun pekerjaan irigasi di bagian barat Banten, memperbaiki irigasi sawah di daerah Anyer. Pada saat yang sama, Sultan Ageng memerintahkan penggalian kanal 3 km panjangnya di daerah Tirtayasa, dekat Tanara di mana Sultan mendirikan istana. Di dekat lokasi proyek Tirtayasa, raja sepuh itu memutuskan untuk menggali lagi kanal baru. Sebanyak 2/3 populasi laki-laki dari ibukota mengikuti operasi dan adanya larangan 1/3 penduduk meninggalkan kota untuk alasan keamanan. Pekerjaan terbesar terakhir adalah membuat bendungan selama musim kering di sungai Tanara di mana keluarga raja dan pembesar kerajaan dapat bersenang-senang di air kanal Tirtayasa. Realisasi proyek itu dipercayakan kepada saudaranya, Pangeran Kidul.

Banyak data mengungkapkan betapa luasnya realisasi Sultan Ageng dalam bidang petanian. Kebijakan Sultan Sepuh itu harus dilihat sebagai sebuah 'gerakan nasional' yang pernah dikampanyekan seorang pemimpin Banten. Ada selusinan proyek besar dilaksanakan selama pemerintahan Sultan Ageng dengan memakan waktu 30 tahun dan melalui koherensi berbagai pekerjaan. Secara geografis dapat dicermati bahwa proyek-proyek susksesif itu tercatat sebagai kebijakan publik yang sesungguhnya sudah dielaborasi sebelum tahun 1659, artinya sejak awal pemerintahannya, yang mencanangkan penataan semua daratan pantai yang luas, dari Anyer sampai ke Tangerang.

Proyek besar itu bertujuan bukan hanya untuk pengembangan tanaman pangan tetapi juga untuk memenuhi rencana pemerintah untuk restrukturasi semua teritori. Estimasi sementara untuk menunjukkan hebatnya realisasi pekerjaan itu dapat ditunjukkan oleh lamanya dan besaran pekerjaan yang didukung oleh para pejabat tinggi dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam jumlah besar. Selama tiga dasawarsa itu, kanal yang sampai sekarang masih dikenang masyarakat sebagai 'terusan Sultan' atau 'parit pangeran' mencapai panjang total antara 30-40 km. Dengan dukungan tiga buah 'dam' yang diperkirakan berada pada tiga sungai utama, pekerjaan hidraulik itu dapat mengairi 30.000-40.000 ha sawah disertai dengan ribuan ha untuk perkebunan

kelapa. Perlu ditambahkan sejak proyek dimulai sampai selesai pekerjaan, terjadi migrasi 30.000 penduduk Banten menempati daerah pertanian baru.

6. Urbanisasi dan Transmigrasi Pertama di Banten

Sumber-sumber sejarah Eropa mengindikasikan bahwa sampai pertengahan abad XVII, dataran rendah sepanjang pantai utara Banten adalah 'lahan tidur' yang kurang penduduk. Bahkan, sebelum proyek besar Sultan, sebagian besar daratan itu masih tertutup oleh semak-belukar dan hutan hujan dataran rendah. Lain halnya dengan daerah pegunungan bagian tengah Banten, selain dimukimi penduduk asli yang dahulu berada di bawah kontrol kerajaan Sunda-Hindu, lebih dari setengahnya menjadi tempat bermukim para penentang kebijakan penguasa pesisir. Jadi, teritori Banten dengan dataran rendah yang luas, hanyalah lahan subur kurang penduduk.

Sebaliknya, populasi lebih terkonsentrasi di Banten, ibukota negara dengan dua pusat perdagangan di pelabuhan pabean dan karangantu. Di luar ibukota, hanya ada tiga kota utama: Pontang, Tanara, dan Tangerang, sedangkan lainnya hanya setingkat dusun saja. Pertumbuhan populasi mulai tercatat tahun 1596. Pendatang Belanda pertama-tama terkagum-kagum menyaksikan keramaian Banten, dan coba membandingkan Banten dengan kota Amsterdam yang sudah berpenduduk 100.000 jiwa.

Pembesaran komunitas kota itu diindikasikan oleh tiga peta Belanda (1596, 1630, 1659) yang menunjukkan okupasi kota selama satu abad, tetapi hanya tiga dasawarsa terakhir menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kota. Pembesaran ruang kota itu sangat kuat terasosiasi dengan pertumbuhan penduduk. Sayangnya tidak ada data statistik berapa penduduk Banten saat itu, tetapi setelah pengambilan kekusaan oleh Ranamanggala (1609), disebutkan ada 7.000 orang mengasingkan diri ke Batavia, cukup kiranya bagi kita untuk memperkirakan kepadatan penduduk Banten.

Sesudah 1619, bencana politik terjadi dengan mempromosikan anti perdagangan. Kebijakan itu mendorong banyak penduduk lari ke pedalaman dan menekan pedagang Cina untuk pergi ke kantor VOC atau ke pelabuhan lain. Tahun 1625, karena wabah penyakit, diperkirakan kota Banten kehilangan separuh atau bahkan 2/3 penduduk. Dan tahun 1630 kota hanya dihuni ½ dari total populasi. Jika dihitung dari tahun 1596, penduduk kota tinggal sekitar 50.000 orang.

Tahun 1659, ketika kekuasaan sudah berada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa, bagian tengah (*intra-muros*) kota membesar ke arah selatan mendekati dinding kota. Ini mengindikasikan Banten mulai mengalami penambahan

penduduk. Hal ini amat terkait dengan restorasi ekonomi dengan kembali normalnya kekuasaan Banten.

Tahun 1659-1682 Banten mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi setelah kembali menjadi negara pengekspor lada dengan fasilitas pelabuhan besar yang ditangani oleh seorang pejabat profesional di bidang perdagangan. Pertumbuhan ekonomi ini mau tidak mau memberi stimulan pertambahan penduduk. Tahun 1673 saja, Banten telah memiliki tentara sebanyak 55.000 orang. Dari jumlah itu, bila setiap orang mempunyai isteri dan dua anak, penduduk Banten bisa lebih dari 150.000 orang. Dengan perhitungan kasar itu, maka populasi di kota Banten meninggat 300% selama 50 tahun. Kuantitas itu pasti disebabkan oleh kedatangan pedagang terus-menerus yang mencari peruntungan di Banten setelah penaklukan pelabuhan Malaka, Palembang, Banjarmasin, dan Makassar oleh Batavia karena monopoli perdagangan pada tahun 1640-1665.

Tahun 1670, Banten semakin padat karena kebanjiran pengungsi yang datang baik dari pantai utara Jawa akibat perang tahta di Mataram maupun dari daratan selatan Cina yang mengalami perang sipil serta penempatan kelompok-kelompok Bugis, Makassar, Madura, dan Bali yang terdiri dari para bekas prajurit dalam semua konflik di daerahnya.

Jadi mudah dimengerti jika populasi Banten antara 1673 dan 1682 mengalami peningkatan puluhan ribu. Pada tahun terakhir itu populasi kota mencapai 200.000 jiwa (Anthony Reid, 1982). Data demografis itu sudah pasti menjadi masalah besar yang harus bisa dicari solusinya dengan hanya satu kebijakan: pemindahan paksa oleh pemerintah Banten di bawah Sultan Ageng. Pada gilirannya, transmigrasi 30.000 orang ke daerah-daerah pertanian baru menjadi alternatif strategis, karena bukan saja mereka dapat dipekerjakan di bidang pertanian, tetapi juga menekankan pentingnya penduduk menjaga wilayah kekuasaan Banten sepanjang pantai utara.

Maka, sebelum pengambilan kesimpulan, kita dapat mengajukan sebuah interpretasi, bahwa realisasi proyek besar Sultan Ageng adalah fungsi menghilangkan penyumbatan kota dan menyeimbangkan kembali hubungan antara kota yang padat dengan daerah yang kurang penduduk. Sultan Ageng, bersama para elit kerajaan dari berbagai kelas sosial, telah mampu memanfaatkan sumberdaya manusia yang begitu besar untuk mendukung pekerjaan jangka panjang itu. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dengan semua dukungan infrastrukturnya itu kini harus dicatat sebagai sebuah integrasi masyarakat ke dalam kesatuan sosial, politik dan ekonomi Banten pada belahan kedua abad XVII.

Sesungguhnya periode kemerdekaan Banten hanya berlangsung selama 150-an tahun (1527-1682). Pada periode itu, Banten diperintah oleh lima orang raja: (1) Maulana Hasanuddin (1527-1570?), (2) Maulana Yusuf (1570?-1580?) yang diselingi oleh pemerintahan perwalian (1580-1594), (3) Maulana Muhammad (1594-1596), diselingi oleh pemerintahan perwalian (1596-1624), (4) Sultan Abdul Kadir (1624-1651), (5) Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682).

Benar bahwa pemerintahan Hasanuddin dan Yusuf agak kabur selama periode cukup panjang dalam sumber-sumber sejarah kita. Sumber sejarah lokal pun (*SB*) lebih terkonsentrasi pada masalah kekerabatan raja dan mengenang uniknya peristiwa-peristiwa politik yang mengungkapkan: (1) penaklukan spiritual daerah Banten Girang, (2) penaklukan militer yang disponsori oleh Demak, (3) perjalanan ke provinsi Sumatera untuk perkenalkan penguasa baru, dan (4) perpindahan ibukota dari hulu ke muara Cibanten, (5) penaklukan kerajaan tua Pakuan.

Kita dapat memperkirakan bahwa pada periode awal kesultanan, produksi pertanian lebih dari cukup untuk menghidupi kota dengan penduduk yang masih jarang. Maulana Yusuf adalah raja pertama yang sejak pertengahan abad XVI, mengimplikasikan bermulanya politik pembangunan bidang pertanian pada sekitar tahun 1550. Dalam kronik lokal, sang raja mendapat sanjungan melalui ungkapan: *kuat nambut karya* (...) *kathah karya kabecikan, asusuk, abendung kali karana aweh manpaat* (*SB*, pupuh 22). Sumber itu menunjukkan bahwa raja Banten kedua telah memiliki investasi di sektor pertanian. Tetapi sepeninggalnya, setelah diselingi pemerintahan Muhammad yang hanya 2-3 tahun, ada periode perwalian yang panjang di mana para pedagang menguasai pos-pos penting pemerintahan antara 1580-1609.

Tampak sekali, periode sebelum Sultan Ageng naik tahta, elit kota terbagi ke dalam dua kelompok besar. Para pedagang tentu saja hanya berpikir untuk mengembangkan perdagangan dengan mengesampingkan semua intervensi kekuasaan politik. Mereka tampaknya selalu memandang penting produk-produk *importable* dan *exportable*.

Sementara itu kebangsawanan tampak mempunyai visi berbeda dengan selalu memikirkan masalah pertanian. Tampak jelas bahwa dalam kronik *SB*, mereka lebih terpusat untuk memperjuangkan pemberdayaan trilogis: kekerabatan, kesatuan agama dan pertanian, yang cenderung memperjuangkan swasembada pangan. Kecenderungan autarkis itu amat kontradiktif dengan semangat *burjuis* yang dianut para pedagang dalam eksportasi lada. Bagian dalam

kota (*intra-muros*) hanya didiami oleh orang Banten yang harus Islam, sedangkan warga dari bangsa-bangsa lain tampak didorong ke luar tembok kota bahkan sampai ke permukiman pinggiran yang terletak sejauh dua sungai di mana mereka dapat mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk perdagangan.

Jadi kita berhadapan dengan masalah urbanisme di Banten antara abad XVI dan XVII. Dalam ruang pemukiman kota Banten tampak adanya sebuah masyarakat kota yang benar-benar kontras: kelompok elit bangsawan dan administratif di satu pihak, yang dikarakterisasikan oleh identitas 'pribumi', dan secara etnik homogen serta terikat pada tanah. Sementara di lain pihak, hidup pula sebuah komunitas niaga orang asing dari berbagai bangsa, yang secara simbolik, mendapat penolakan untuk haknya memiliki tanah. Pemisahan yang tegas tidak ragu-ragu lagi menjelaskan betapa Banten mengalami situasi instabilitas sebagai negara yang berbasis pada perdagangan semata, karena para pedagang dapat dengan mudah pergi ke pelabuhan lain.

Dengan kondisi itu, tidak terlalu sulit untuk dimengerti bahwa menghadapi situasi politik yang rentan konflik itu, Sultan Ageng harus dengan tegas menentukan sebuah kebijakan yang menguntungkan semua pihak dengan cara tetap menghidupkan perdagangan, tetapi diperkuat dengan pertahanan pangan dalam negeri. Kebijakan ekonomi pasar kemudian diserahkan kepada seorang Syahbandar Cina, Kiai Ngabehi Kaytsu yang dengan kesetiannya kepada sultan telah benar-benar memainkan peran dalam mengefektifkan perdagangan maritim Banten.

Dalam kerangka operasionalisasi kebijakan pertaniannya, Sultan Ageng masih tetap dengan semangat petani warisan Jawa, ingin mengembalikan Banten pada konsep 'negara agraris', yang memang feodal tetapi efektif dalam pengerahan sumberdaya. Kelihatannya, Sultan Ageng memiliki pandangan yang tegas, bahwa penyediaan pangan dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dengan kebijakan itu, kesenjangan ekonomi dan politik yang telah menjadi sumber malapetaka, dapat diatasi secara menyeluruh.

Sekarang, kita tidak dapat menyangkal bahwa selama tiga puluh tahun, Sultan Ageng telah berhasil mewujudkan 'idealisme' untuk mencapai sebuah harmoni sosial di seluruh teritorial Banten, untuk sebuah kehidupan yang makmur dan damai. Kebijakan Sultan telah mampu merealisir sebuah tipe masyarakat yang sinergis dalam sebuah negara agraris yang diidealkan memiliki kearifan lokal menghadapi persaingan ekonomi global pada akhir abad XVII. Sebuah masyarakat

autarkis memang harus didahului dengan swasembada pangan sebelum model ekonomi makro berjalan dengan segala konsekuensi sosial dan politiknya di Banten.

Keseimbangan ekonomi, dalam konteks Banten ini, bergantung bagaimana usaha pemerintah mampu membangun konsiliasi antara kepentingan internasional dan kepentingan negara. Fakta-fakta sejarah itu dengan sendirinya merupakan sebuah refleksi dari sebuah masyarakat agraris dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi dunia yang kerap sulit diterka.

Maka, barangkali ada benarnya apa yang dikatakan Claude Guillot (1995) bahwa ketidakberdayaan Sultan Ageng menghadapi kekuatan militer Belanda pada tahun 1682 adalah cerita lain dari episode sejarah Banten. Tetapi, kekalahan Banten itu harus dicatat sebagai sebuah perjuangan hidup-mati untuk mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan Banten sejauh Cisadane di timur dan Anyer di pesisir barat telah ditentukan oleh integritas masyarakat ke dalam semangat trilogi pembangunan yang mempersatukan berbagai ikatan genealogis, semangat keagamaan, dan kekuatan agraris dalam sistem sosial dan ekonomi politik yang berimbang antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyatnya di seluruh wilayah Banten.

Dari sudut apa pun pandangan kita, karya monumental Sultan Ageng Tirtayasa yang sekarang namanya diabadikan untuk sebuah universitas negeri di Banten, sepatutnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi dapat menjadi bahan pengkajian berbagai disiplin ilmu untuk mengungkapkan kembali orisinalitas gagasan, pemikiran, tindakan dan semangat kenegarawanannya sebagai investasi besar dalam mengatasi masalah urbanisasi dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya dari perspektif sejarah politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dan juga bagi kawasan Asia Tenggara lainnya.

Moh. Ali Fadillah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Bab II

Banten Masa Awal

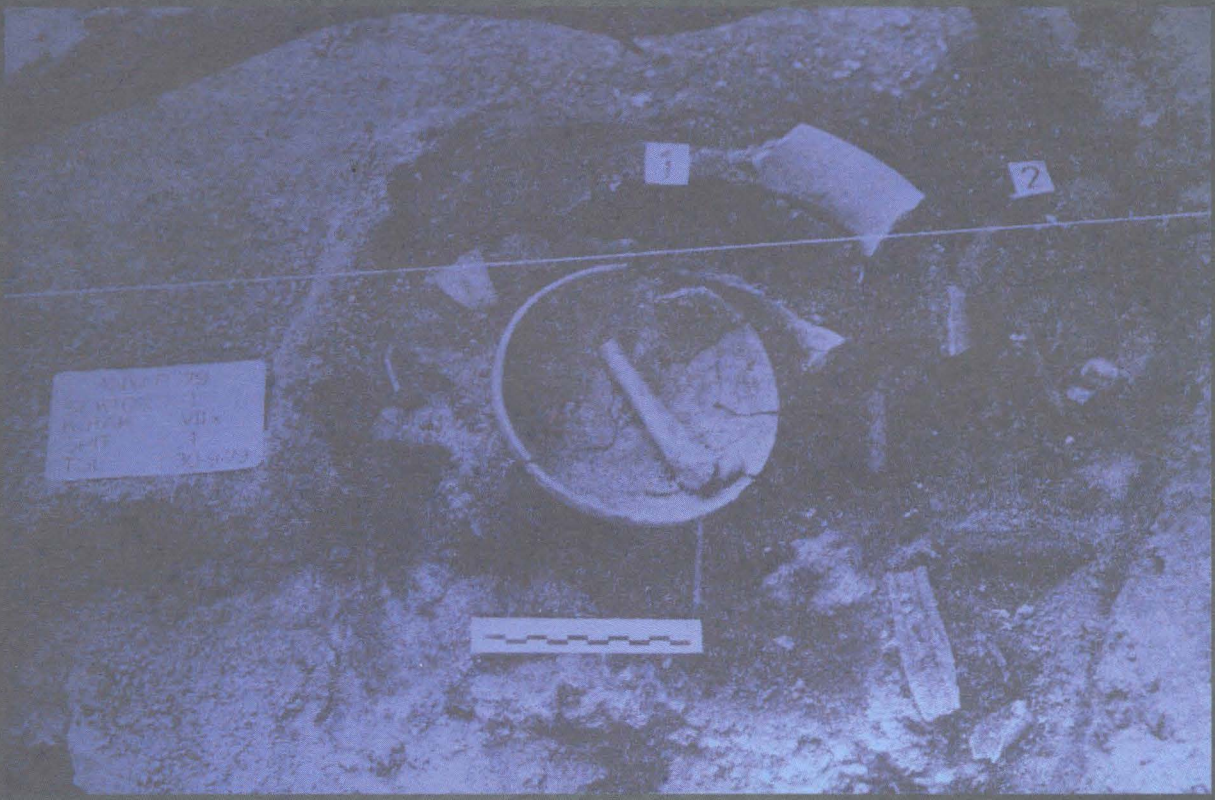

Kubur Anyer Lor

Bab II

BANTEN MASA AWAL

Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan

Di situs Cigeulis di Desa Marapat, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang ditemukan tinggalan berupa serut samping (*side scrapper*), kapak perimbas (*chopper*), kapak penetak (*chopping tool*), serpihan batu rejang dan andesit yang sudah mengalami patinasi berwarna kuning. Tinggalan dari situs Cigeulis tersebut merupakan gejala dari aktifitas kehidupan purba di Banten. Meskipun sampai kini penelitian fosil kerangka manusia prasejarah belum pernah menemukan fosilnya dari zaman pleistosen maupun awal Holosen di daerah Banten.

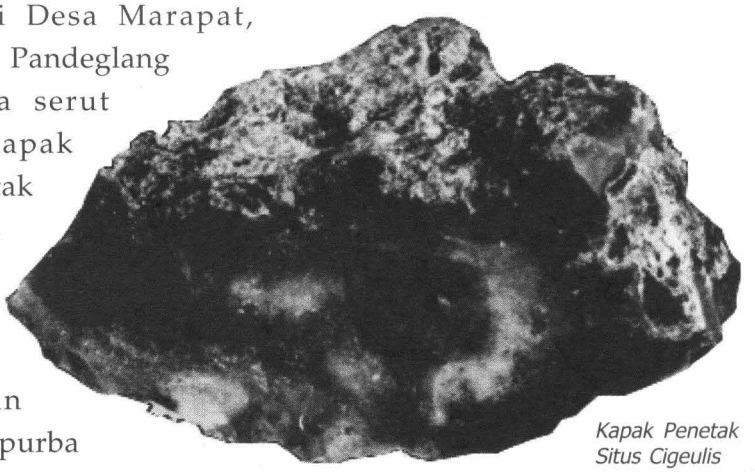

Kapak Penetak Situs Cigeulis (Sukendar,1982)

Jika dibandingkan dengan situs prasejarah lain di Indonesia, situs Cigeulis memiliki ciri yang hampir serupa dengan situs Sangiran (Jawa Tengah), Punung (Jawa Timur) dan Paroto (Sulawesi Selatan) (Sukendar, 1982 : 2-3). Berdasarkan temuan dan persamaan cirinya tersebut, maka situs Cigeulis dikategorikan sebagai situs paleolitik, masa ketika manusia hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, alat-alat keperluan hidup umumnya dibuat dari batu dengan cara pembuatan yang sederhana, sekedar untuk memenuhi tujuan pemakaiannya. Alat-alat batu

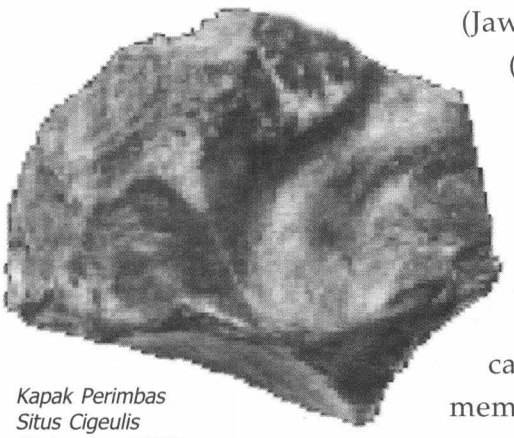

Kapak Perimbas Situs Cigeulis (Sukendar, 1982)

tadi digunakan untuk pencarian dan pengolahan bahan makanan berupa daging binatang dan umbi-umbian.

Masa Bercocok Tanam dan Beternak

Gejala dari masa bercocok tanam timbul sekitar 6000 tahun SM. Masa ini ditandai dengan penemuan baru oleh manusia berupa penguasaan sumber alam. Berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai dipelihara dan dijinakkan. Masa bercocok tanam ditandai pula dengan cara hidup menetap di perkampungan yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini teknologi semakin maju dengan berkembangnya kemahiran mengupam alat-alat batu dan mulai dikenalnya pembuatan gerabah. Alat-alat batu yang umumnya diupam berupa beliung atau kapak persegi dan kapak lonjong. Alat-alat batu yang telah diupam tersebut dikenal dengan alat batu neolitik.

Di Banten, tinggalan berupa alat batu dari masa bercocok tanam ini ditemukan di Dusun Nyawana, Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Tinggalan dari masa ini berupa beliung persegi.

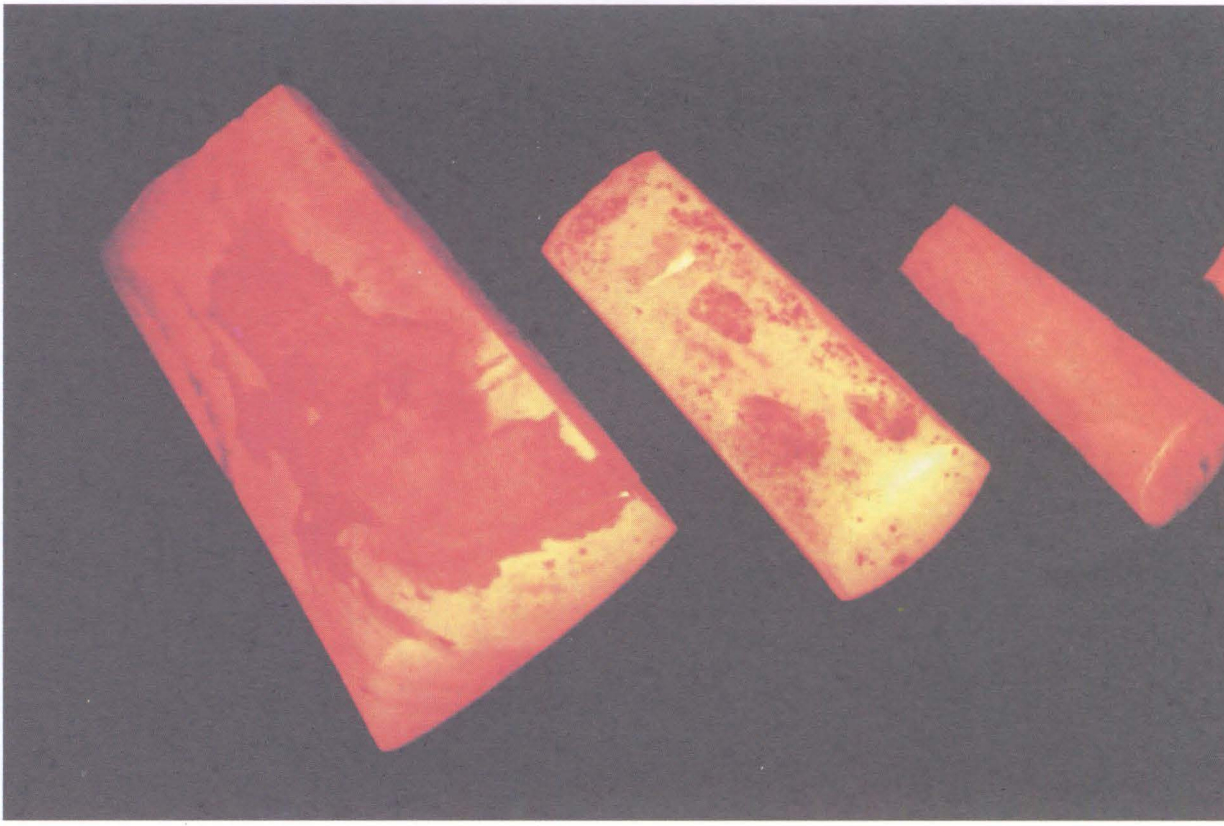

Selain itu, di situs Odel yang berada di Kampung Odel, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang ditemukan pula peninggalan prasejarah dari masa bercocok tanam Situs Odel pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika Dinas Pekerjaan Umum melakukan perluasan irigasi sungai Cibanten Ilir di Kampung Odel (Indraningsih, 1986: 238). Sangat disayangkan, kegiatan proyek irigasi tersebut telah mengakibatkan sebagian temuan masa prasejarah di situs Odel teraduk dan bercampur dengan artefak dari jaman Islam. Peninggalan di situs ini yaitu alat serpih, bilah, batu inti, beliung persegi, fragmen keramik lokal dan manik-manik.

Pengertian *keramik* dalam tulisan ini adalah barang pecah belah yang terbuat dari bahan baku kaolin dan bahan batuan, berglasir dan diperkirakan berasal dari luar Banten. Dalam penelitian arkeologi, artefak semacam itu kerap disebut *keramik asing* (Ambary dkk, 1988; Mundardjito dkk, 1978, Untoro, 1990). Penambahan kata "asing" di belakang kata keramik untuk membedakan antara barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat, tidak berglasir, dan diduga bukan barang impor yang kemudian disebut dengan *keramik lokal*. Terkadang keramik disebut sebagai porselin (*porcelain*) dan yang terbuat dari tanah liat dinamakan gerabah (*pottery*) (Adhyatman dkk. 1984; Djuwita 1984).

Bentuk beliung persegi dari situs Odel terdiri dari beberapa variasi, dan salah satu variasi yang menonjol adalah belincung yaitu beliung berpunggung tinggi, yang penampang lintangnya berbentuk segi tiga.

Sementara itu, sebagian temuan keramik lokal situs Odel berasal dari tradisi masa bercocok tanam. Ciri keramik lokal Odel dari masa bercocok tanam berbeda dengan ciri keramik lokal dari masa sesudahnya. Perbedaan tersebut dapat diamati dari bahan yang digunakan, sistem pembakarannya, teknik pembuatan dan teknik hias. Teknik pembuatan keramik lokal Odel

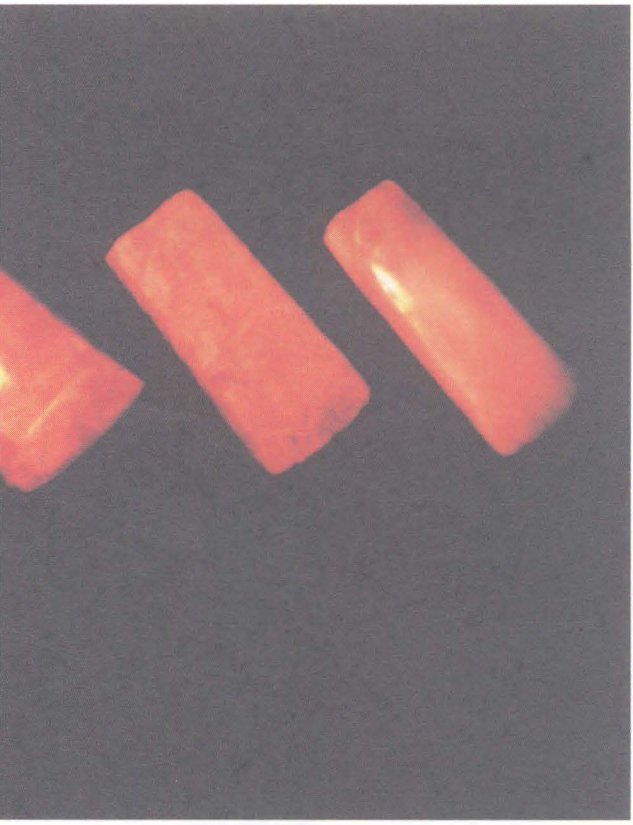

Beliung persegi dari Nyawana, bentuknya memanjang dengan penampang lintang persegi, permukaan batuan diupam halus dengan sisi yang tajam dibuat seperti tajaman pahat yang dibuat pada masa kini (koleksi BP3 Serang).

1 2

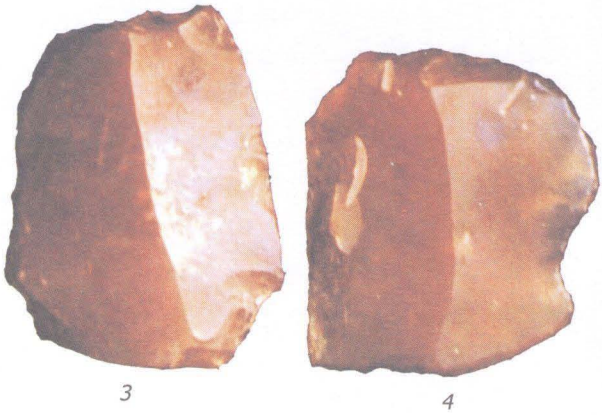

3 4

Beberapa alat batu dari Sit us Odel :
1. Belincung
2. Batu inti
3. Serpih - bilah
4. Serpih - bilah

sebagaimana keramik lokal prasejarah pada umumnya menggunakan teknik tatap batu (*paddle anvil technique*). Adapun hiasannya dibuat dengan menggunakan teknik tera (*inpressed*) dan sebagian kecil menggunakan teknik gores (*incised*). Ragam hiasnya memakai pola hias segitiga, tumpal, belah ketupat yang lazim disebut pola hias ilmu ukur.

Salah satu jenis tinggalan lain yang jumlahnya banyak ditemukan di situs Odel adalah manik-manik. Hingga kini belum dapat diketahui secara pasti apakah manik-manik ini berasal dari masa prasejarah atau sesudahnya (Indraningsih, 1986: 245).

Masa Perundagian

Penguburan di Situs Anyar Lor

Pada tingkat perkembangan budaya berikutnya yang hadir di Banten yaitu berkembangnya tradisi logam yang dikenal dengan masa paleometalik. Peninggalan dari tradisi logam ini mulanya ditandai dengan temuan situs kubur Anyar Lor. Pada tahun 1955, H.R. van Heekeren dan Basuki untuk

Manik-manik Odel

pertama kalinya melakukan penelitian di situs ini. Hasil penelitiannya, menemukan rangka manusia yang ditempatkan dengan posisi jongkok di dalam keramik lokal tipe tempayan. Oleh karena rangka dikuburkan di dalam tempayan maka sistem penguburan seperti itu dikenal dengan penguburan tempayan. Sistem penguburan dalam tempayan juga pernah dijumpai di situs Plawangan, Rembang.

Di samping sistem penguburan dalam tempayan, di situs Anyar Lor juga ditemukan sistem penguburan di luar tempayan, sebagaimana dibuktikan dari hasil penelitian arkeologi tahun 1979. Rangka-rangka yang ditemukan dari sistem penguburan ini berupa rangka orang dewasa dan anak-anak. Sistem penguburan seperti ini juga diketemukan di Gilimanuk, Bali.

Temuan rangka dalam tempayan Situs Anyar Lor (Sukendar, 1982)

Pada kedua sistem penguburan tersebut di atas semuanya disertai bekal kubur. Bekal kubur yang ditemukan dalam penguburan tempayan berupa periuk kecil (dulang), pedupaan, kendi, sedangkan bekal kubur pada penguburan di luar tempayan berupa cawan, periuk kecil, manik-manik kalsedon atau kaca.

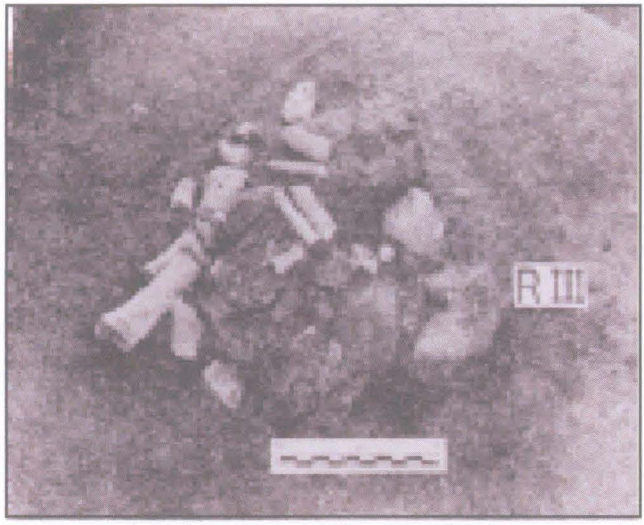

Temuan rangka di luar tempayan Situs Anyar Lor (Sukendar, 1982)

Sebagian besar tinggalan bekal kubur pada kedua sistem penguburan di Anyar Lor adalah keramik lokal. Jenis-jenis keramik lokal yang digunakan sebagai bekal kubur terdiri dari bermacam-macam wadah: mangkuk (cawan), periuk, kendi dan pedupaan. Wadah-wadah tersebut dibuat baik dengan tangan maupun dengan roda putar.

Selain keramik lokal, di dalam kubur Anyar Lor ditemukan pula bekal kubur yang terbuat dari bahan logam, pada umumnya

berbentuk gelang perunggu. Gelang perunggu tersebut dihias dengan pola hias pilin. Van der Hoop berpendapat bahwa gelang perunggu dengan pola hias pilin masuk ke Indonesia sejak masa prasejarah bersama dengan tinggalan berupa bejana perunggu, nekara dan lain-lain (Van der Hoop, 1949).

Sementara itu, para ahli berbeda pendapat tentang kronologi situs Anyar Lor atas dasar bekal kubur yang ditemukan. Beberapa pakar menggolongkannya ke dalam masa paleometalik, masa perundagian (Soejono ed, 1992) dan sebagian menyatakan situs Anyar Lor ada sekitar tahun 200-500.

Nekara Perunggu Tipe Heger IV

Di Banten pernah ditemukan sebuah nekara perunggu yang dalam wacana arkeologi disebut tipe Heger IV, yang diperkirakan didatangkan dari daratan Asia. Ciri nekara tipe Heger ini, bentuknya seperti dandang terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka, mempunyai bidang pukul yang menutup badan nekara, bahu berbentuk cembung dan bagian tengahnya hanya sedikit yang membentuk pinggang kemudian melurus ke bawah seolah-olah bagian atas lebih besar dari pada bagian bawah dan dihias antara lain dengan bintang bersudut 12 dan pita. Tipe Heger IV disebut juga tipe Cina (Soejono, ed., 1992: 246, 253-254).

Penelitian terhadap kebudayaan perunggu pada awalnya lebih dipusatkan pada nekara. Hal ini disebabkan karena nekara merupakan unsur penting di dalam kebudayaan perunggu di Asia Tenggara, khususnya Dong Son (Haryono, 2001: 58).

Mengenai asal usul kebudayaan perunggu di Indonesia, ada beberapa pendapat. Worsaae mengatakan bahwa asal-usul budaya perunggu di Indonesia tanah asalnya adalah dari India Belakang (Heekeren, 1958). Pendapat berbeda diungkapkan oleh Mayer dan Richer yang mengatakan bahwa kebudayaan perunggu di Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi, Flores dan Kalimantan ada hubungannya dengan daratan Asia Tenggara, dan lebih jauh dikatakan bahwa asal-usul kebudayaan perunggu tersebut adalah Eropa Timur (Heekeren, 1958:4). Sementara itu H. Parmienter lebih khusus menyatakan bahwa berdasarkan perbandingan seni hias nekara, nekara di Indonesia mirip dengan nekara yang ditemukan di Vietnam (Haryono, 2001: 57-58).

Bab III

Tinggalan Tradisi Megaliti

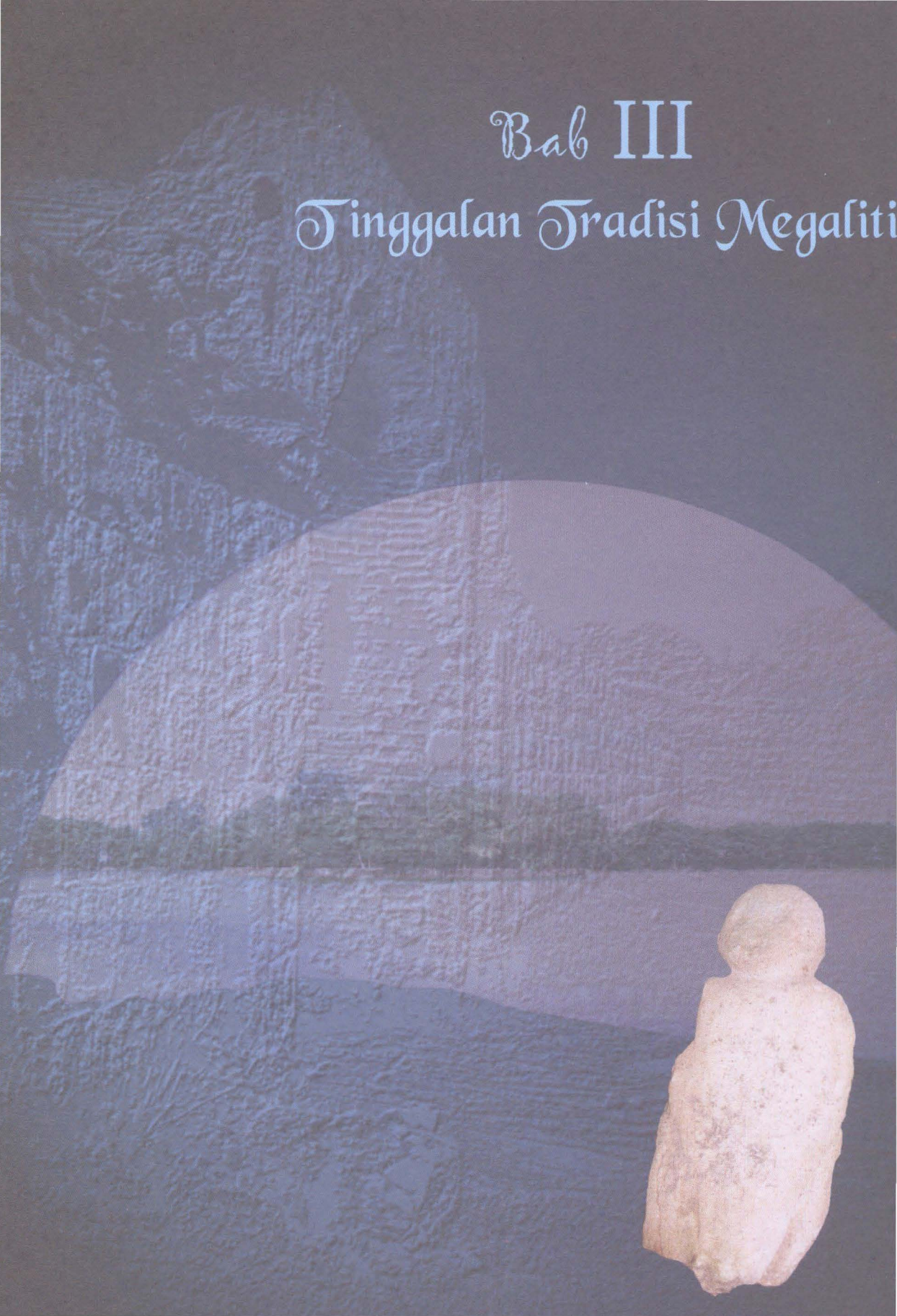

Pemukiman Baduy Luar

Bab III

TINGGALAN TRADISI MEGALITIK

DINAMIKA TRADISI MEGALITIK: KONSEP AWAL PEMUJAAN

Pada bab III ini akan diuraikan beberapa tinggalan tradisi megalitik di daerah Banten. Bila merunut kronologi sejarah budaya Indonesia, awal tradisi megalitik telah ada sejak masa prasejarah atau masa awal budaya Indonesia, akan tetapi di dalam buku ini uraian tinggalan tradisi megalitik sengaja dipisahkan dari bab II yang membahas Banten masa awal dengan alasan bahwa tinggalan tradisi megalitik cukup banyak dan beragam bentuk serta jenisnya, sehingga dalam pembahasannya dianggap perlu bab tersendiri.

Kata megalitik berasal dari dua suku kata yaitu ***mega*** berarti besar dan ***lithos*** berarti batu. Pengertian ini didasarkan pada kepercayaan adanya hubungan antara hidup dan mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh dari yang mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Seseorang yang dianggap berpengaruh pada saat hidupnya dan ketika meninggal maka untuk menghormatinya didirikanlah bangunan atau batu besar sebagai media penghormatan, tempat singgah sekaligus menjadi lambang si mati.

Kehidupan tradisi megalitik dimulai ketika manusia dengan pola hidup berpindah-pindah tempat tinggal dengan mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan mulai meninggalkan pola hidup tersebut menjadi pola hidup menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Dalam pola hidup menetap tersebut hidup kepercayaan bahwa manusia setelah mati tergantung pada alam, segala sesuatu di muka bumi ada penjaganya. Dalam kepustakaan masa ini dikenal dengan Masa Megalitik.

Pola hidup menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam dan beternak dalam masyarakat agraris adalah salah satu ciri dari masyarakat pendukung tradisi Megalitik. Dalam pola kehidupan masyarakat agraris, terdapat hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Sebagai contoh ada orang yang bekerja di ladang atau persawahan, ada yang mengatur orang yang bekerja tersebut, yang membimbing masyarakatnya, dan ada pula yang memperbaiki kerusakan kerusakan ladang/sawah.

Sistem sosial masyarakat seperti ini selalu dijaga agar tetap harmonis. Mereka yang bekerja di ladang mengolah lahan untuk menghasilkan panen yang akan dimakan oleh seluruh anggota masyarakat. Selain kepada seluruh anggota masyarakat, ada pula pemberian "makan" atau ucapan terimakasih yang diberikan kepada "pemberi" hasil panen yang mereka anggap sebagai dewa-dewi atau arwah para leluhur. Semua ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada yang memberikan hasil panen agar panen berikutnya dapat berhasil dan kesuburan tanaman selalu terjaga. Apa yang mereka persembahkan kepada dewa-dewi dan arwah leluhur itu dikaitkan dengan sumber kehidupan dan mereka meyakini akan diberikan kembali untuk menjaga kelestarian siklus kesuburan dalam tatanan alam (Dillistone, 2002: 45-47).

Persebaran tradisi megalitik menurut H.R. von Heine Geldern dibawa oleh bangsa Austronesia yang datang ke Indonesia melalui India dan Malaka. Diduga Indonesia menerima tradisi megalitik dalam dua gelombang. Pertama, tradisi megalitik-tua yang menghasilkan dolmen, menhir, dan tahta batu pada masa bercocok tanam sekitar 2500-1500 SM. Kedua, dikenal dengan tradisi megalitik-muda yang menghasilkan sarkofagus, kubur batu, arca nenek moyang yang diduga berkembang pada masa perundagian (Soejono. ed, 1992).

Pada masa berkembangnya tradisi megalitik, bentuk-bentuk kepercayaan berkembang menjadi pemujaan kepada arwah nenek moyang, kekuatan alam seperti kekuatan gunung atau kekuatan laut, dan kepercayaan kepada kekuatan pemberi kesuburan atau pemberi kemakmuran. Arwah nenek moyang dianggap berada di puncak gunung, sehingga gunung dipandang sebagai dunia arwah yang menyimpan kekuatan magis yang besar. Dengan cara pandang seperti itu maka gunung dianggap keramat dan merupakan pusat sumberdaya alam (seperti air), dan sumberdaya non alami (arwah nenek moyang) yang maha dahsyat yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran (Wales, 1953: 92–119; Stutterheim, 1926: 333-149; Sutaba, 2001:224).

Pengkultusan nenek moyang sebagaimana diuraikan di atas ternyata bertahan hingga masa Hindu akhir. Ketika pengaruh Agama Hindu telah meluas, kultus nenek moyang berkembang menjadi pemujaan *dewaraja* yaitu penghormatan kepada raja yang disamakan dengan dewa. Sementara itu, fenomena pemujaan kepada kekuatan atau penguasa gunung masih tampak berpengaruh sehingga di lereng-lereng gunung dibangun tempat-tempat suci.

Di samping itu, masyarakat pendukung tradisi megalitik juga percaya bahwa di tempat-tempat tertentu, roh leluhur dapat menolong dan sebaliknya dapat mencelakakan manusia. Roh atau arwah leluhur tersebut memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan roh leluhur, masyarakat melakukan kontak di tempat-tempat tertentu yang

dipandang suci atau di tempat yang dibuat untuk tujuan tersebut seperti punden berundak, dolmen, dan menhir.

Menhir Baros, Sirit Baduy dan Pasir Peuteuy

Bentuk tinggalan megalitik yang banyak ditemukan adalah menhir. Menhir berasal dari bahasa Breton (di Inggris) yang terdiri dari kata ***men*** artinya batu dan ***hir*** artinya berdiri, secara keseluruhan berarti batu tegak. Menhir ada yang berdiri tunggal tetapi pada umumnya didirikan bersama dengan bangunan megalitik lain dalam satu kompleks seperti: dolmen, peti kubur batu, dan batu altar. Menurut Haris Sukendar, fungsi menhir dapat dibedakan menjadi dua, yakni menhir sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang (religi) dan menhir sebagai batu tegak yang bersifat profan (Sukendar, 1985).

Di Kabupaten Serang, menhir dapat ditemukan di Kecamatan Baros dan di Kampung Badug, Desa Waringin, Kecamatan Mancak. Penduduk setempat menyebutkan dengan nama "Sirit Baduy". Selain menhir di Kampung Badug juga pernah ditemukan batu lumpang berlubang tujuh yang terletak di atas sebuah bukit. Penduduk setempat mengenal sebagai batu panisan, berfungsi untuk mendinginkan logam. Di Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang juga terdapat satu kompleks menhir. Secara keseluruhan jumlah menhir di situs ini ada 9 buah dengan tata letak terpola berdasarkan ukuran menhir. Menhir yang paling besar berada paling timur dan yang berukuran kecil di sebelah barat.

Menhir Baros

Situs Sirit Gopar

Balai Arkeologi Bandung tahun 2002 melakukan penelitian di lereng Gunung Pulosari pada ketinggian 600 m dpl, 1 km dari Kampung Gombrang, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Salah satu peninggalan yang paling menonjol di situs ini adalah menhir. Menhir tersebut berukuran panjang 85 cm berbentuk

Sirit Gopar

ini berada di atas teras berundak, tersusun dari batu kali. Melihat bentuknya, menhir Sidomukti tampak lebih sempurna menggambarkan alat kelamin laki-laki karena pengerjaannya tampak lebih halus dibanding dengan menhir Sirit Gopar.

Selain itu, di situs Batu Mayat Pugungraharjo, Lampung Timur juga ditemukan menhir dalam bentuk serupa. Menhir tersebut berbentuk phallus berada di tengah-tengah batu yang melingkar dalam formasi temu gelang. Di antara batu penyusun dari susunan batu temu gelang tersebut ada sebuah batu bergores berbentuk huruf T. Menurut Soejono, huruf T sesungguhnya menggambarkan alat kelamin *phallus* atau setidaknya sangat jelas menggambarkan bentuk alat kelamin laki-laki (Fadillah, 2002: 20). Masyarakat setempat menyebutkan dengan nama *"Sirit Gopar"* (Sirit dalam bahasa lokal berarti alat kelamin laki-laki) (Djaenuderadjat, 2003). Sirit Gopar tampaknya dibuat melalui proses dengan cara pengurangan material batuan. Bagian bawah menhir ini lebih kecil dan di sekitarnya terdapat batu-batu kecil yang berfungsi sebagai penyangga.

Bentuk tinggalan yang serupa juga ditemukan di Sidomukti, Metro, Lampung Tengah. Peninggalan tersebut diduga merupakan sebagai sarana pemujaan. Posisi batu yang dikenal dengan *"menhir Sidomukti"*

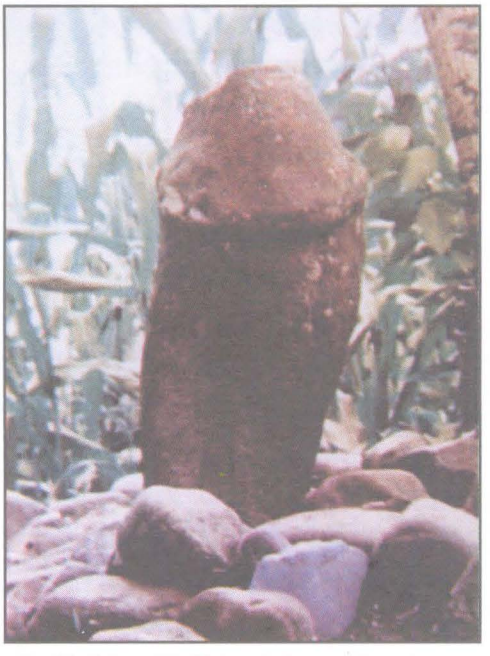

Menhir Sidomukti, Metro, Lampung Tengah

wanita yang disamarkan. Perpaduan dua unsur *phallus* dan alat kelamin wanita diyakini sebagai lambang kesuburan. Diperkirakan, ketika upacara pemujaan di lokasi tersebut berlangsung, pendukung kebudayaan yang bersangkutan memohon kepada arwah leluhur untuk diberikan kesuburan agar hasil panen melimpah.

Situs Sanghyang Heuleut dan Sanghyang Dengdek

Di Banten, tinggalan tradisi megalitik dengan beberapa bentuk banyak ditemukan di sekitar lereng Gunung Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Survei Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1970-an di sekitar lereng Gunung Pulosari menemukan kompleks menhir yang disebut Sanghyang Heuleut, terletak di Desa Sanghyang Dengdek, Kecamatan Cisata, Pandeglang. Secara geografis letak situs berada di antara dua sungai yaitu Sungai Cisirah Agung dan Sungai Cisata. Sanghyang Heuleut adalah sebuah menhir yang memiliki ukuran tinggi 139 cm. Di dekat menhir Sanghyang Heuleut adalah sebuah arca perwujudan nenek moyang yang dikenal dengan sebutan Sanghyang Dengdek, terbuat dari batu andesit, berukuran tinggi 95 cm, keliling badan 120 cm, dan keliling kepala 20 cm. Sebenarnya arca ini sudah lama diketahui. Pleyte, misalnya, pada tahun 1913 mengisahkan Sanghyang Dengdek yang sumber ceritanya berasal dari Achmad Djayadiningrat. Sementara Claude Guillot (1994) menyebutkan Sanghyang Dengdek adalah arca primitif tipe Polinesia yang menyandang nama "Dewa" yang dipuja. Arca ini didirikan di atas sebuah timbunan tanah

Sanghyang Heuleut

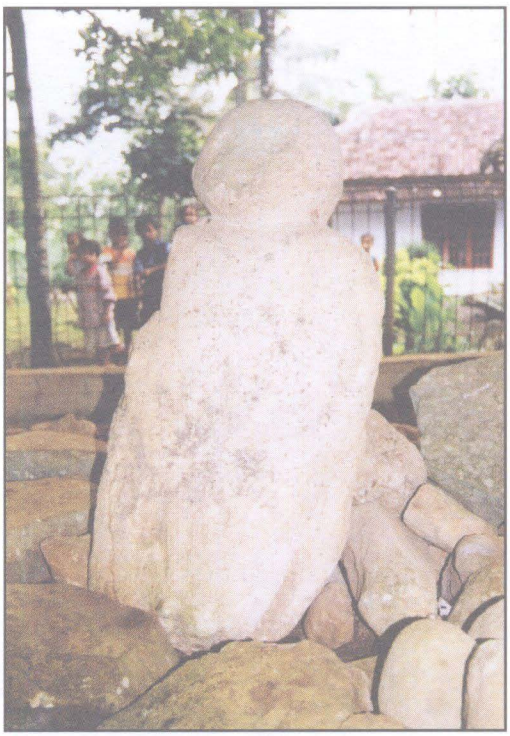

Sanghyang Dengdek

Kolam megalitik Citaman

Gunung Pulosari: Ekspresi Idealisme Yang Sakral

Peninggalan tradisi megalitik di sekitar Gunung Pulosari memberi gambaran bahwa sebuah peradaban pernah ada di lokasi tersebut. Gejala perkembangan peradaban manusia dari tingkat berburu dan mengumpulkan makanan beralih ke pola kehidupan menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam di sekitar gunung Pulosari perlu diamati karena pada penelitian Balai Arkeologi Bandung tahun 2002 di lereng Gunung Pulosari menemukan beberapa keping batuan *chert*, tatal-tatal batu sisa pembuatan perkakas neolitik (Fadillah, 2002: 40) yang setingkat dengan kehidupan manusia ketika mulai menetap dengan mata pencaharian bertani dan beternak (Soejono, ed., 1992), yang mana pada masa ini juga berkembang tradisi megalitik.

Dalam tradisi megalitik, tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu kondisi tanah harus diperlakukan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan agar "penjaga" dan pemberi kesuburan selalu berkenan untuk memberikan hasil panen yang baik. Melalui upacara tradisi megalitik, roh seseorang yang telah meninggal terutama pemimpin masyarakat sangat dihormati. Penghormatan itu melalui upacara tertentu dengan tujuan agar roh leluhur memberikan sesuatu, misalnya kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah (Djaenuderadjat, 2001: 15).

Roh nenek moyang dipahami sebagai media untuk menghubungkan generasi terdahulu dengan sekarang dan juga menghubungkan dewa-dewa, dalam konsep kepercayaan lokal disebut sebagai Sanghyang, yaitu sumber

yang dikelilingi batu sungai. Kepala arca dibuat secara kasar, lengan dan bentuk kelamin laki-laki kelihatan tetapi hampir tidak menonjol. Karena bentuk arca ini secara alami agak membungkuk maka orang memberi nama "si bungkuk yang terpuja" (Guillot, 1994: 100; Djaenuderadjat, 2001: 24-25).

Dalam "Inventaris der Hindoe-oudheden", *R.O.D.* 1914 dicatat pula adanya arca Polinesia di daerah Banten di: (1) Tendjo, Pandeglang berupa sebuah arca yang hampir tidak berbentuk, menggambarkan orang sedang duduk. Arca ini telah dipindahkan ke Museum Pusat (no. 4350 = cat. Groenevelt no.480 n); (2) Candi, Lebak berupa 11 arca yang dipindahkan ke Museum Pusat (no. 4222 – 4232, cat.Gr.no. 480 a-i); (3) Kerta, Parengkujang, Lebak berupa arca dari tanah liat yang dipindahkan ke Museum Pusat

kekuatan spiritual yang memiliki kekuatan pada bumi, tanah dan air (Fadillah, 2001). Tradisi ini pada setiap daerah memiliki masa awal yang berbeda-beda, tetapi umumnya dimulai sejak 6000 sampai dengan 2000 SM (Fadillah, 2002: 40).

Gunung Pulosari dan daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian 400 – 600 m dpl banyak ditemukan tinggalan tradisi megalitik sangat berpotensi sebagai lahan pertanian. Kondisi ini didukung juga dengan tersedianya sumber air yang cukup. Atas pertimbangan keletakannya maka tempat tersebut sangat ideal sebagai tempat berkembangnya sebuah peradaban yang berbasiskan budidaya tanaman.

Gambaran Kawah Gunung Pulosari abad ke-17, dilukis oleh Van de Velde (Guillot, 1990)

(no. 3865, cat. Gr. No.474 a); dan ***(4)*** Kosala, Lebak berupa arca yang dikenal dengan arca Kosala, dipahat dalam batu seperti relief sedang duduk (Mulia, 1980: 609).

Arca-arca semacam ini di Indonesia dikategorikan ke dalam tipe arca Polinesia. Para peneliti menamakannya pula dengan arca megalitik, arca menhir atau arca primitif. Penamaan arca seperti ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan arca Hindu-Buda dari masa kemudian (Mulia, 1980). Tipe arca Polinesia merupakan media pemujaan yang dianggap sebagai perwujudan dari nenek moyang yang meninggal. Tradisi pemujaan seperti ini masih dijumpai sekarang di beberapa daerah antara lain pemujaan *tau-tau* (patung) nenek moyang orang Tana Toraja di Sulawesi Selatan (Kadir, 1980).

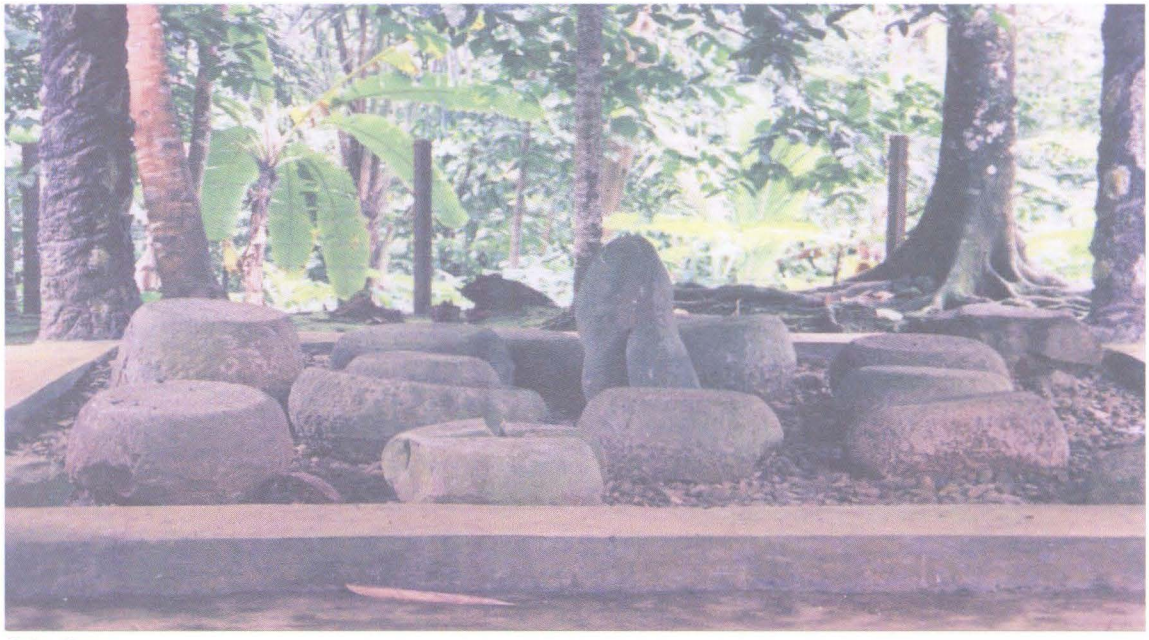

Batu Goong

Situs Batu Goong-Citaman

Tidak jauh dari arca Sanghyang Dengdek atau sekitar 4 km di sebelah baratnya, di atas Bukit Kadu Guling, Desa Sukasari, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang terdapat kompleks megalitik yang disebut situs Batu Goong-Citaman. Situs Batu Goong-Citaman terdiri dari dua lokasi yang menjadi satu kawasan di lereng barat Gunung Pulosari atau di lembah perbukitan Kaduguling (Fadillah, 2002). Di situs ini terdapat: (1) ***Batu Goong*** yaitu sebuah menhir sebagai pusat yang dikelilingi oleh batu-batu berbentuk gamelan atau gong dan batu pelinggih dalam formasi temu gelang; (2) ***Citaman***, yaitu sebuah kolam megalitik berukuran lebih dari 350 m^2. Di dalam kolam ditemukan batu-batu berlubang, batu lumpang, batu bergores, batu dakon, pecahan batu pipisan, pecahan alu dan pecahan keramik asing.

Batu Berlubang Citaman

Kolam Citaman terbagi menjadi dua bagian. Menurut penuturan masyarakat setempat satu bagian digunakan untuk kaum pria dan lainnya untuk kaum wanita. Dalam tradisi

megalitik, kolam Citaman diduga dipakai sebagai tempat awal mengsucikan diri sebelum upacara berlangsung. Pusat ritual dilakukan di atas bukit di tempat Batu Goong berada (Djaenuderadjat, 2001: 25-26).

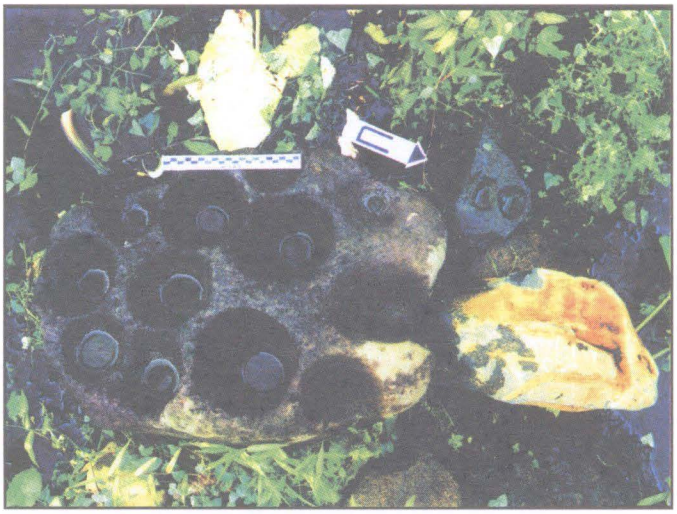

Batu Berlubang Citaman

Meskipun situs Batu Goong-Citaman tampak terbagi dua, namun berdasarkan penelitian Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang tahun 1998 dan Direktorat Purbakala tahun 1999 menyimpulkan bahwa situs tersebut merupakan sebuah punden berundak yang memanfaatkan beda tinggi permukaan tanah. Punden dibentuk berdasarkan garis kontur bukit Kaduguling yang bertingkat, kemudian di beberapa bagian dilakukan pemangkasan sehingga menampakkan punden bertingkat dari paling rendah di sisi barat dan makin tinggi di timur (Djaenuderadjat, 2001: 25-26).

Situs Batu Goong-Citaman nampaknya digunakan pula dalam masa Hindu-Buda yang dibuktikan dari penelitian yang berhasil menemukan fragmen kaki arca dari masa Hindu-Buda, keramik asing dari Dinasti Sung (abad 10-13) dan Yuan (abad 13-14).

Situs Cihunjuran

Situs yang berkarakter sama dengan situs Batu Goong-Citaman adalah situs Cihunjuran, terletak di tepi bukit Pulasari di Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang. Di situs ini terdapat kompleks mata air yang di sekitarnya terdapat kelompok menhir, batu lumpang, batu berlubang dan batu monolit. Adanya tinggalan tersebut menandakan bahwa tempat itu pernah digunakan sebagai tempat

Kolam megalitik Cihunjuran

pemujaan (Fadillah, 2002). Di samping itu situs Cihunjuran diduga kuat pernah dihuni oleh kelompok masyarakat agraris yang telah mengenal barang impor. Indikasi tersebut diperlihatkan dengan temuan fragmen keramik asing, fragmen keramik lokal, dan manik-manik.

Situs Batu Ranjang

Masih di sekitar Gunung Pulosari, yaitu di Kampung Batu Ranjang, Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, terdapat sebongkah batu andesit dengan bagian atas rata menyerupai tempat tidur atau biasa disebut sebagai dolmen. Dalam tradisi megalitik, dolmen memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai kuburan dan tempat pemujaan. Namun sampai saat ini, belum diketahui secara pasti fungsi dolmen di Batu Ranjang karena belum ditemukan data pendukung dalam bentuk unsur megalitik lain seperti menhir (Sukendar, 1982: 5; Djaenuderadjat, 2001: 30-31). Namun dugaan sementara, dolmen Batu Ranjang terkait dengan aktivitas pemujaan arwah leluhur.

Dolmen Batu Ranjang

Jika dilihat dari bentuknya, dolmen Batu Ranjang tampak lebih sempurna dari dolmen-dolmen yang pernah ditemukan di Indonesia. Hal ini dilihat dari teknologi pengerjaannya yang lebih halus dengan bagian atas cukup rata. Batu Ranjang ditopang oleh empat buah batu, dikerjakan cukup rapi dengan pahatan pelipit melingkar. Di bawahnya terdapat pondasi untuk menahan batu penyangga agar Batu Ranjang tidak terbenam ke dalam tanah. Bentuk dolmen seperti ini hampir sama dengan dolmen di daerah Sumba yang digunakan sebagai kubur. Di dekat dolmen Batu Ranjang terdapat dua buah batu lumpang yang diduga berfungsi sebagai sarana pemujaan arwah leluhur (Djaenuderadjat, 2001: 30-31).

Situs Batu Tumbung

Di Kampung Cidaresi, Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang ditemukan batu monolit bergores. Goresannya membentuk pola segi tiga

dengan lubang di tengah-tengah. Fenomena ini cukup unik karena menggambarkan kemaluan wanita. Oleh karena itu masyarakat setempat menamakannya batu *"tumbung"* (tumbung= kemaluan wanita). Kemaluan wanita dapat ditafsirkan sebagai simbol kesuburan atau lambang kesucian (Sukendar, 1982: 5; Djaenuderadjat, 2001).

Batu bergores Cidaresi

Situs Lebak Kosala

Di sekitar pegunungan Kendeng, Kampung Lebak Sangka, Desa Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak terdapat situs yang memiliki ikatan dengan masyarakat Baduy, dikenal dengan nama situs Lebak Kosala. Karakter situs Lebak Kosala tampaknya sama dengan Situs Batu Goong-Citaman. Penelitian permukaan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang tahun 2001 mengungkap situs Lebak Kosala adalah sebuah situs dari tradisi megalitik yaitu, punden berundak dengan lima undakan, berorientasi timur-barat dengan arah utama menghadap puncak Gunung Kosala. Tidak jauh dari situs terdapat kolam tempat mereka mengsucikan diri sebelum melakukan aktivitas ritual. Hal yang menarik untuk diamati adalah adanya jalan setapak yang terbuat dari batu pipih bahkan ada yang dibuat membentuk tangga, menghubungkan antara satu undakan ke undakan berikutnya.

Lebak Kosala

Di situs Lebak Kosala juga ditemukan batu bulat, oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan "batu pelor" karena bentuknya yang bulat menyerupai peluru. Penelitian Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang tahun 2001 menemukan beberapa

fragmen keramik lokal dan fragmen keramik asing. Dilihat dari teknik pengerjaanya, fragmen keramik lokal dibuat dengan teknik roda putar dan hiasannya dibuat dengan teknik tera atau tekan. Para keramolog berpendapat teknik semacam ini digunakan dari masa prasejarah hingga saat ini, sedangkan pecahan keramik asing tersebut diketahui berasal dari sekitar abad ke 14 – 15 M.

Arca "primitif" setinggi 50 cm juga pernah ditemukan di situs Lebak Kosala yang dikenal dengan Arca Kosala. Arca batu ini seperti posisi orang duduk (Mulia, 1980: 609). Penelitian Rumbi Mulia terhadap Arca Kosala menyimpulkan bahwa Arca Kosala menyerupai arca perwujudan pada masa Hindu-Buda akhir, yang melambangkan pengruwatan atau mungkin menggambarkan arca leluhur (Mulia, 1980: 616-618). Bahkan Agus Aris Munandar (1992: 284) menafsirkan arca Kosala sebagai arca Buda yang lipatan tangannya seolah-olah menggambarkan *mudra* tertentu dari Sang Buddha (Michrob, 1993: 6-7). Satyawati Sulaeman (1991: 318) mengingatkan bahwa di antara arca-arca yang disebut dengan tipe Polynesia tidak selamanya ditafsirkan sebagai arca prasejarah. Oleh karena itu penafsiran arca-arca yang dikatakan arca tipe Polynesia yang di"*claim*" sebagai arca prasejarah, khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Barat perlu disikapi dengan hati-hati (Michrob, 1993: 6). Hal ini juga berdampak pada arca Kosala. Sebagai contoh, pernah ditemukan arca yang katanya arca prasejarah namun ternyata berangka tahun 1263-1314 M dengan guratan huruf Pallawa atau Jawa/Sunda Kuna (Michrob, 1993: 6).

Situs Lebak Sibedug

Bergeser ke arah selatan dari situs Lebak Kosala atau tepatnya di Kampung Sibedug, Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak dijumpai bangunan punden berundak yang berukuran besar dengan luas sekitar 2 ha. Punden tersebut disebut Punden Lebak Sibedug, berdenah segi empat, terbagi dalam beberapa tingkatan ruang atau halaman dengan pola bangunan dibuat semakin ke belakang semakin tinggi. Terdapat jalan atau pintu masuk di sebelah barat melalui anak tangga yang berjumlah sekitar 30-an. Pada pintu masuk tersebut ditempatkan menhir. Menarik untuk dikaji bahwa saat ini situs punden Lebak Sibedug masih digunakan sebagai tempat upacara penghormatan dan pemujaan arwah leluhur oleh masyarakat Lebak

Menhir Lebak Sibedug

Punden Lebak Sibedug

Sibedug. Upacara ini berlangsung sehabis panen sebagai tanda syukur kepada Yang Maha Pencipta dan leluhur mereka yang dianggap turut menjaga tanaman dan ternak sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Walaupun demikian, sebagian besar masyarakat Lebak Sibedug beragama Islam.

Punden berundak Lebak Sibedug dan punden berundak lainnya berada setingkat dengan masa kehidupan manusia hidup menetap, bercocok tanam, dan beternak atau setingkat masa neolitik (2500-1500 SM). Berarti jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buda. Namun, konsep yang menyangkut bentuk atau pola bangunan pemujaan masih terus digunakan dan berkembang hingga pengaruh Hindu-Buda masuk ke Indonesia.

W.F. Stutterheim mengatakan bahwa candi-candi di Indonesia berbeda dengan candi-candi di India meski sekilas tampak sama. Candi di Indonesia diilhami oleh arsitektur bangunan prasejarah khususnya punden berundak. Pendapat lain diungkapkan oleh Von Heine Geldern yang menyatakan bahwa tradisi megalitik berada dalam seni bangunan maupun seni pahat Jawa Hindu-Buda. Dengan kata lain, terjadi perpaduan pandangan masyarakat Indonesia asli dengan kebudayaan Hindu-Buda (Soejono. ed., 209), sehingga pendirian beberapa candi di Indonesia merupakan refleksi dari kelanjutan tradisi megalitik.

Secara arsitektural, Candi Borobudur adalah salah satu contoh bangunan yang bertingkat-tingkat mulai dari kaki hingga ke bagian puncak. Gaya bangunan seperti ini tidak ditemukan di India. Dapat diasumsikan, bentuk fisik Candi Borobudur merupakan adaptasi dari kebudayaan asli dengan mengakomodasi pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan agama Buda (Djaenuderadjat, 2001: 21).

Selain Candi Borobudur, candi lain yang jelas menggambarkan bangunan punden berundak adalah Candi Sukuh dan Candi Ceto. Kedua candi tersebut berbentuk seperti punden berundak namun dilengkapi dengan ornamen. Quaritch Wales menyatakan bahwa pendirian bangunan di tempat-tempat tinggi seperti Candi Sukuh merupakan satu tingkat perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan kebudayaan Jawa yang bersumber pada megalitik tua (Soejono, 1992: 209).

Tradisi Megalitik Dalam Kehidupan Masyarakat Baduy

Cerminan perilaku budaya tradisi megalitik yang masih hidup di daerah Banten dapat dilihat pada masyarakat Baduy. Halwany Michrob berpendapat punden berundak Lebak Cibedug dan Arca Domas di Banten Selatan merupakan tinggalan tradisi megalitik yang masih dipuja oleh para pendukungnya yaitu masyarakat Baduy (Michrob, 1993:4).

Masyarakat Baduy adalah satu dari sekian suku bangsa di Indonesia yang menganut kepercayaan dan pemujaan terhadap roh atau arwah leluhur. Kepercayaan orang Baduy tersebut dikenal dengan agama ***Sunda Wiwitan***. Konsep dasar agama Sunda Wiwitan adalah *karuhun* dan *pikukuh*. ***Karuhun*** adalah generasi pendahulu yang sudah meninggal (nenek moyang orang Baduy) yang sewaktu-waktu datang mengunjungi keturunannya, sedangkan ***pikukuh*** adalah aturan adat mutlak yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Baduy. Salah satu penerapan konsep kepercayaan agama *Sunda Wiwitan* adalah aktivitas ritual dan penghormatan pada roh nenek moyang yang mereka sebut Batara Tunggal. Pusat pemujaannya adalah Arca Domas atau disebut juga Sasaka Domas atau Sasaka Buana (Purwitasari, 2000).

Arca Domas dipublikasikan pertama kali oleh Koorders yang mendatanginya pada tanggal 5 Juli 1864 (Djeowisno, 1987: 34). Arca Domas berada di sebelah selatan Kampung Cikeusik di hulu Sungai Ciujung, pegunungan Kendeng bagian selatan

(Djoewisno, 1987). Arca Domas sebenarnya sebuah menhir berukuran besar yang terletak pada undakan paling atas punden. Bangunan punden berundak ini juga dilengkapi dengan beberapa menhir di sekitarnya. Orang Baduy percaya menhir yang berada di atas adalah Arca Domas, yaitu lambang Batara Tunggal, pencipta roh, dan kepadanya roh-roh tersebut kembali. Hingga saat ini masyarakat Baduy sangat menjaga, melindungi dan memuja Arca Domas, karena dianggap sebagai pusat bumi atau tempat diturunkannya manusia pertama yang menjadi cikal bakal orang Baduy dan juga menjadi tempat berkumpulnya roh leluhur (*karuhun*). Karena itu, Arca Domas dianggap tempat paling suci dan menjadi daerah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh orang awam (Purwitasari, 2000).

Begitu penting kedudukan Arca Domas sehingga membentuk ajaran tentang cara hidup orang Baduy yang harus berpedoman pada satu aturan yang disebut *pikukuh*. Cara hidup tersebut antara lain penggunaan lahan, tata letak rumah, pola permukiman, struktur sosial, nilai budaya dan sistem ekonomi.

Pemukiman Baduy Luar Kampung Kaduketug, Desa Kanekes, Kec.Leuwidamar, Lebak

Jembatan Sasakrawayan di Baduy Luar, Gajebo, Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Lebak

Bab IV

Tinggalan Hindu-Buda

Lapik Arca dari Pulosari

Bab IV

TINGGALAN BUDAYA HINDU-BUDA

AWAL BUDAYA HINDU-BUDA DI BANTEN

Pembabakan atau kronologi tingkat budaya di daerah Banten tidak terlepas dari pembabakan yang secara umum berlaku di Indonesia. Tingkat budaya awal dimulai dari masa kehidupan prasejarah sebagaimana digambarkan dalam beberapa bentuk tinggalan pada bab sebelumnya. Pada masa selanjutnya, perkembangan kebudayaan Indonesia ditandai dengan hadirnya unsur-unsur dari kebudayaan India. Pengaruh India membentuk suatu masyarakat yang lebih kompleks dibanding dari masa sebelumnya. Muncul kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teratur bahkan kemudian terbentuk beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buda. Masa pengaruh Hindu-Buda ini dikenal juga dengan masa Klasik. Dalam masa ini masyarakat menyatakan pikiran-pikirannya dengan tulisan, baik pada prasasti dari batu atau logam maupun pada naskah cerita yang ditulis pada daun lontar.

Pengaruh Hindu-Buda juga ditemukan di daerah Banten. Bukti-bukti pengaruh tersebut kini hanya dalam bentuk tinggalan, seperti arca Ganesha yang ditemukan di Pulau Panaitan dan Arca Dwarapala dari daerah aliran Sungai Cibanten. Patut dicermati, meskipun budaya Hindu-Buda telah mempengaruhi perilaku dan pola hidup sebagian masyarakat Banten masa lalu, namun budaya dan tradisi sebelumnya yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun tetap dipraktekkan dalam aktivitas hidup dan tidak ditinggalkan begitu saja.

BUKTI-BUKTI TINGGALAN DARI MASA HINDU-BUDA

PRASASTI MUNJUL

Sampai saat ini, belum ditemukan data pasti yang dapat mengetahui bila pengaruh Hindu-Buda masuk ke daerah Banten. Namun, diduga sebelum abad ke-5 pengaruh itu sudah ada di daerah Banten. Dugaan ini berdasarkan atas sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1947 di aliran Sungai Cidanghyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Karena ditemukan di daerah Munjul maka prasasti ini dinamakan Prasati Munjul. Prasasti Munjul berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta.

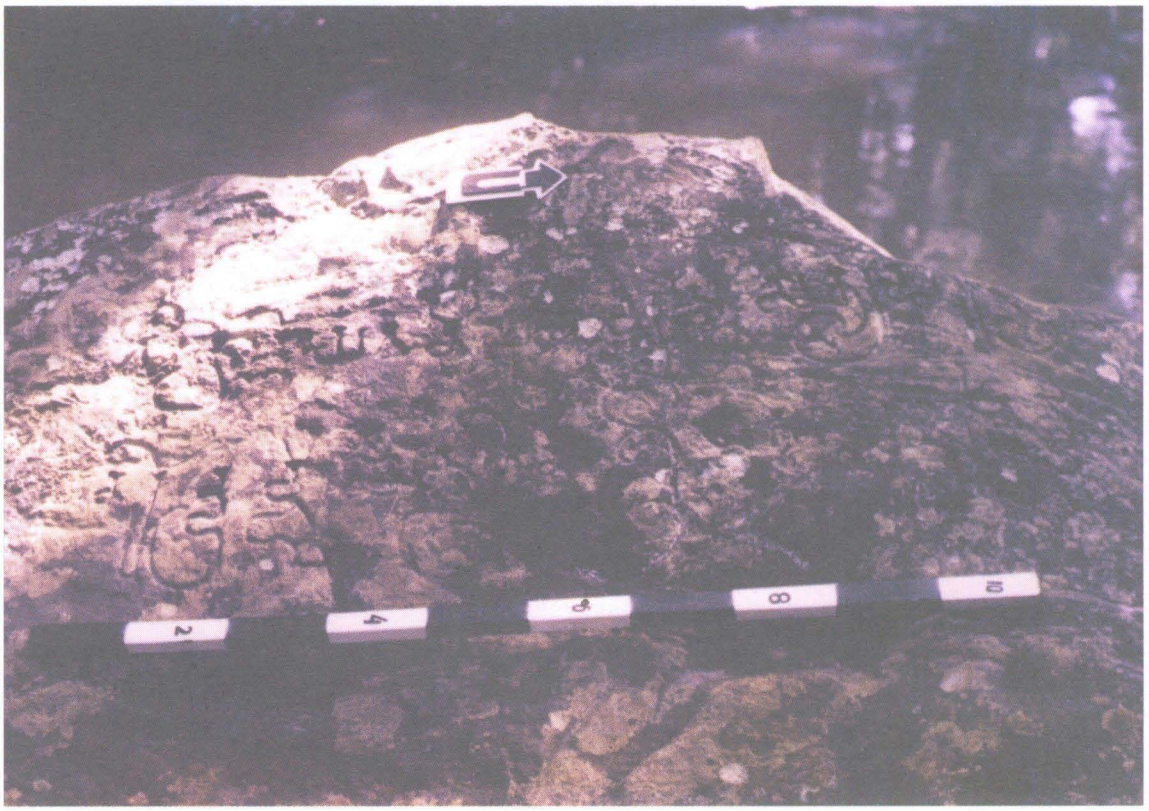

Prasasti Munjul

Dipahat pada sebuah batu andesit yang berukuran panjang 3,2 m dan lebar 2,25 m. Prasasti ditulis dengan teknik tatah dengan kedalaman gores kurang dari 0,5 cm, sehingga antara permukaan batu asli dengan tulisannya hampir sama.

G. J. de Casparis bersama Boechari berhasil membaca Prasasti Munjul pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1954 Dinas Purbakala R.I. melakukan transkripsi Prasasti Munjul berbunyi sebagai berikut:

> *"vikranto 'yam vanipateh prabhuh satyapara (k) ra (mah) narendraddvajabhutena srimatah purnnavarmmanah"*

Artinya:

"Inilah (tanda) keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari raja dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja"

Dari hasil pembacaan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa daerah Banten pernah termasuk dalam wilayah kekuasaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang berlatar belakang agama Wisnu. Wilayah Kerajaan Tarumanegara

mencakup seluruh dataran rendah dari muara Sungai Citarum sampai ke Selat Sunda. Sekitar abad ke-7 Kerajaan Tarumanegara berakhir, dan sesudah itu tidak ada bukti atau berita yang menyatakan kerajaan tersebut masih ada (Guillot, 1996: 109-110).

Arca-arca dari Pulosari

Pada pertengahan abad ke-19, Brumund dan van Hoevell menyebut tentang arca-arca yang menjadi hiasan di taman Residen Caringin. Arca tersebut terdiri dari arca Brahma, Siwa, Agastya, Durga dan Ganesha.

Arca Siwa (kiri) dan Arca Durga (kanan) dari Pulosari (Guillot, 1992).

Beberapa tahun kemudian, arca tersebut dipindahkan ke Museum Bataviaasch Genootschap yang sekarang menjadi Museum Nasional, kecuali salah satu arca yang terlalu berat ditinggalkan di tepi Sungai Labuan. Setelah diamati beberapa bulan kemudian arca yang ditinggalkan tersebut ternyata sebuah yoni sehingga perlu diamankan pula di museum (Guillot, 1996: 102).

Arca Ganesha dari Pulosari

Arca-arca yang disebutkan di atas, memiliki gaya yang sama dengan gaya arca masa Jawa Tengah Akhir atau berasal dari pertengahan pertama abad ke-10. Arca-arca tersebut juga menggambarkan kelompok arca (pantheon) yang terdapat dalam setiap candi bersifat Siwa yaitu Dewa Siwa, Agastya (titisan Siwa), Durga (yaitu Parvati, sakti Siwa) dan Ganesha (putra Siwa) serta Yoni. Diduga ditempat ini terdapat lingga-yoni. Wahana atau kendaraan Siwa yaitu Nandi mungkin sudah hilang, sedangkan hadirnya arca Brahma barangkali seperti candi Siwa di Prambanan yang diapit oleh candi Brahma dan candi Wisnu. Dalam laporan Asisten Residen Caringin disebutkan bahwa semua arca itu terdapat di daerah Cipanas, dekat kawah Gunung Pulosari (Guillot, 1996: 102).

Setelah dilupakan sekian lama, pada tahun 1850 R. Frederich mengkaji arca-arca tersebut dan menyebutnya dengan nama arca Caringin khususnya arca Ganesha. Ia berpendapat dengan ditemukannya arca-arca di Gunung Pulosari berarti pengaruh kebudayaan Hindu-Buda telah tersebar sampai ke pantai barat Pulau Jawa. Frederich juga memperkirakan tinggalan kuno itu, bukan berasal dari Kerajaan Pajajaran. Frederich menduga bahwa Kerajaan Pajajaran terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni, sehingga temuan arca-arca di Gunung Pulosari merupakan tinggalan kerajaan bercorak Hindu di barat Pulau Jawa pada abad ke-10 atau sebelum masa Kerajaan Pajajaran (Guillot, 1996: 103-104).

Arca Brahma dari Pulosari

Arca Ganesha dari Pulau Panaitan

Bukti adanya pengaruh Agama Siwa di Banten dapat dilihat dari tinggalan purbakala di Pulau Panaitan yang terletak di selatan Selat Sunda. Di pulau Panaitan terdapat Gunung Raksa dengan ketinggian 320 m dpl. Di gunung ini ditemukan situs dengan tinggalan berupa beberapa arca Hindu yaitu arca Siwa dan arca Ganesha. Situs ini pertama kali ditemukan oleh Bupati Caringin R. Adipati Koesoemaningrat pada tahun 1894.

Arca Ganesha dari Panaitan

Pada tahun 1977, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung melakukan penelitian di pulau ini. Pada penelitian tersebut menemukan 2 buah arca batu yakni sebuah arca Ganesha dan sebuah arca tipe Polinesia/tipe Pajajaran. Kemudian pada Agustus tahun 1992 tim gabungan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang, dan Taman Nasional Ujung Kulon melakukan ekskavasi untuk menyelamakan arca Ganesha tersebut.

Berdasarkan gaya seni pahatannya, arca Pulau Panaitan diperkirakan semasa dengan puncak perkembangan seni Hindu di Jawa Barat, seperti yang terlihat pada gaya

seni pahatan arca dari pantai utara Jawa. Oleh karena itu, pertanggalan sementara ditetapkan yakni antara abad 7-9, disesuaikan dengan pertanggalan arca Wisnu Cibuaya (Karawang), Candi Cangkuang (Garut), gugusan candi-candi Batujaya (Karawang), candi Pananjung, dan Pangandaran (Ciamis).

Arca Nandi dari Karangantu

Di timur pelabuhan Karangantu, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang pernah ditemukan Arca Nandi yang merupakan *wahana*/kendaraan Dewa Siwa. Arca ini kini disimpan di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Adanya temuan arca Nandi Karangantu memperkuat indikasi bahwa Agama Siwa menjadi agama yang dianut di bagian barat Pulau Jawa pada pertengahan pertama abad ke-10 sampai awal abad ke-16. Dilihat dari gayanya, arca Nandi Karangantu diduga berasal dari akhir abad ke-13 atau abad ke-14.

Arca Nandi Karangantu

Tinggalan Genta Pendeta

Pengaruh agama Siwa di Banten selain ditandai dengan tinggalan arca juga ditandai dengan tinggalan berupa genta pendeta. Dua genta pendeta ditemukan di situs Salangari di lereng Gunung Pulosari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang (Fadillah, 2002). Selain itu, di kaki pegunungan selatan, daerah Kosala, Kabupaten Lebak ditemukan sebuah genta pendeta yang terbuat dari perunggu. Genta Kosala tersebut berbentuk *vajra* di atas tubuh Nandi, sehingga Hazeu menegaskan bahwa genta itu sudah pasti dari agama Siwa. Tidak jauh dari lokasi temuan genta, pada pertengahan abad ke-19, R. Friederich dan Rigg memeriksa sisa struktur sebuah candi Siwa di Sajira, di daerah yang dinamakan Candi. Di daerah itu mereka meneliti arca Agastya, Ganesha, lapik arca dan sebuah arca yang langka berupa kepala harimau. Arca-arca tersebut dipahat secara kasar, oleh Friederich ditafsirkan sebagai wahana Parwati (Guillot, 1996: 106-107).

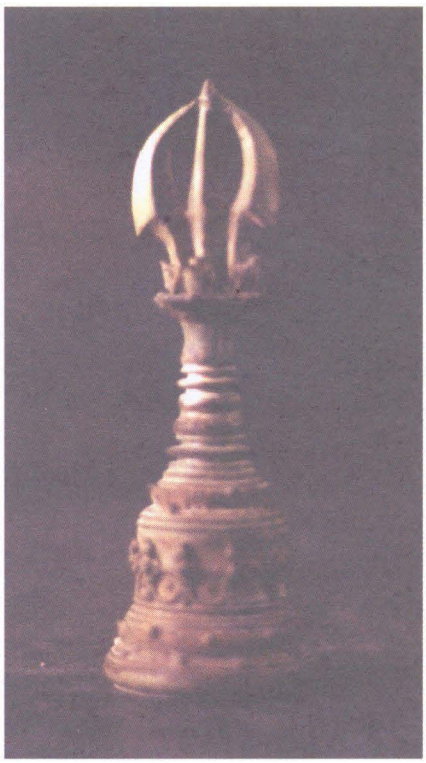

Genta Pendeta dari Mandalawangi

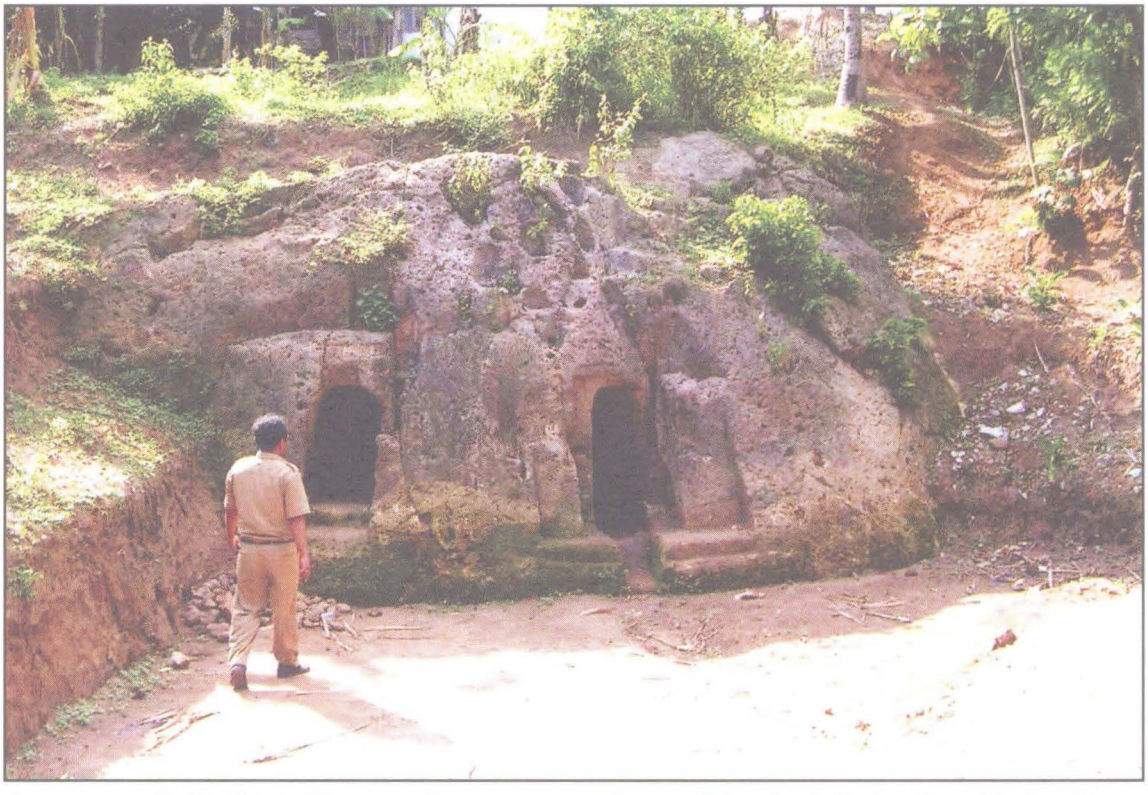

Gua pertapaan Banten Girang, dibangun pada masa sebelum Islam masuk ke wilayah Banten. Tempat bertapa ini dibentuk di batuan sisi tebing daerah aliran Sungai Cibanten. Wilayah Banten Girang berlatar belakang Agama Hindu-Siwa. Beberapa peninggalannya mendukung pernyataan tersebut, terbukti dengan tinggalan gua pertapaan ini

Situs Bekas Kerajaan Banten Girang

Bila Kerajaan Banten Girang berdiri? Berkenaan dengan ini F.D.K Bosch mengaitkannya dengan Prasasti Kebonkopi II yang ditemukan di Bogor. Bosch menafsirkan angka tahun Prasasti Kebon Kopi II berdasarkan candrasangkala yaitu tahun 932 M (854 Saka) berhubungan dengan keberadaan situs Banten Girang yang terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Pendapat Bosch tidak berbeda dengan Guillot yang menafsirkannya dari abad ke-10 atas dasar temuan-temuan yang digalinya (1988-1992) berupa: keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu-batuan dan manik-manik.

Dalam penelitiannya, Claude Guillot berhasil mengungkap bahwa situs Banten Girang merupakan situs permukiman/perkotaan. Ini dilihat dari struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Model pertahanan semacam ini dapat dilihat di daerah Melayu, Lobuh Tua (Barus), Pugungraharjo, Negarasaka, dan Benteng Sari (Lampung). Diperkirakan sistem

pertahanan terebut digunakan semasa abad 10-16. Di Jawa Barat sendiri, sistem pertahanan serupa juga ditemukan di dua kota yaitu di bekas peninggalan Kerajaan Kawali dan Pakuan sekitar abad 14-15.

Informasi lain tentang Banten Girang yang berfungsi sebagai situs permukiman/ perkotaan dapat dilihat dalam Babad Banten. Dalam babad tersebut diceritakan bahwa penaklukan seluruh wilayah Banten oleh bala tentara Islam diceritakan sebagai perebutan kota Banten Girang. Informasi dari babad Banten sejalan dengan hasil penelitian Lukman Nurhakim di situs Banten Girang dan menyatakan bahwa tempat ini merupakan situs permukiman dalam skala kota pra industri. Untuk keperluan pertahanan, permukiman tersebut dikelilingi benteng yang terbuat dari tanah, baik pada sisi dalam maupun luar tanggul. Penggunaan tanggul tanah sebagai benteng sudah dikenal sejak Masa Prasejarah Akhir, kemudian Masa Hindu-Buda dan berlanjut pada kota-kota kuno Masa Islam seperti di Pugungraharjo (Lampung), Pasir Angin (Bogor), Aceh, Barus (Sumatra Utara), Rao (Sumatra Barat), Muara Jambi (Jambi), Biting (Lumajang) dan Surosowan (Banten)..

Situs Banten Girang yang menjadi pusat kota kerajaan diduga terdapat hubungan dengan Gunung Pulosari sebagai gunung yang sakral (Guillot, 1996: 104). Kesakralan Gunung Pulosari telah diyakini jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banten Girang. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Gunung Pulosari telah dijadikan pusat bagi pemujaan arwah atau roh nenek moyang. Hal ini ditandai dengan penemuan peninggalan yang bercorak tradisi megalitik di seputar lereng gunung.

Kaitan keagamaan di Banten Girang dengan Gunung Pulosari juga diberitakan dalam babad Banten, yaitu ketika Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin singgah di Banten dan Banten Girang, kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke Gunung Pulosari yang menjadi tujuan utama mereka. Menurut Sunan Gunung Jati, Gunung Pulosari merupakan wilayah Bhramana Kandali. Di atas gunung itu hidup delapan ratus "ajar-ajar" (pendeta) yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Hasanuddin diberitakan tinggal bersama mereka selama sepuluh tahun lebih. Ketika Hasanuddin meng-Islamkan para pendeta, maka pendeta yang telah memeluk Islam disarankan hidup menetap di Gunung Pulosari, sebab jika tempat itu sampai kosong akan menjadi tanda berakhirnya

Arca Dwarapala Cibanten

Tanah Jawa (Guillot, 1996: 98-99). Dalam Babad Banten diceritakan pula bahwa setelah kemenangan Hasanuddin, sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau masuk Islam melarikan diri ke pegunungan selatan yang sampai sekarang dihuni oleh keturunan mereka yaitu orang Baduy. Kenyataan ini didukung kebiasaan orang Baduy berziarah ke Banten Girang.

Pada pertengahan tahun 1990-an ditemukan sebuah arca Dwarapala di Sungai Cibanten, tidak jauh dari Situs Banten Girang. Ini menunjukkan bahwa Banten Girang sebenarnya masih menyimpan banyak pertanyaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebagaimana dalam catatan sejarah bahwa Sungai Cibanten dahulu kala berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman .

Situs Patapan

Di Kampung Patapan Pasir, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang terdapat sebuah tinggalan berupa bangunan yang sebagian besar masih terpendam dalam tanah. Tinggalan ini dikenal dengan nama situs Patapan. Situs ini diperkirakan merupakan temuan pasca kemerdekaan, karena dalam buku inventaris kepurbakalaan yang disusun N.J. Krom tahun 1914, di wilayah Kabupaten Serang tidak ada situs bernama Patapan. Pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang melakukan upaya perlindungan dengan cara pemagaran situs Patapan. Baru pada tahun 1996, Balai Arkeologi Bandung melakukan peninjauan dan pemotretan yang ditindaklanjuti dengan penelitian pada tahun 1997-1998. Pada tahun 2003 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang melakukan studi teknis di situs ini.

Pada awalnya situs Patapan diduga sebagai tinggalan tradisi megalitik, karena dari bentuk bangunannya menyerupai punden berundak yang lazim dijumpai pada bangunan peninggalan tradisi megalitik. Bangunan di situs ini diduga pula digunakan pada masa-masa berikutnya atau setelah ditinggalkan masyarakat pendukung tradisi megalitik. Ketika pengaruh kebudayaan Hindu datang, bangunan di situs Patapan digunakan sebagai bangunan sakral, dan

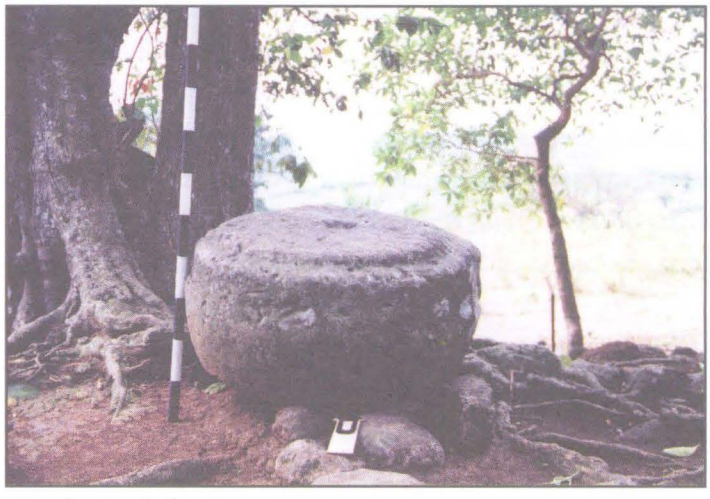

Umpak batu di situs Patapan

ketika kebudayaan Islam datang kemudian, bangunan ini dipergunakan sebagai tempat pengasingan diri (tirakat) (Djaenuderadjat, 2001: 33-35). Hal semacam ini seringkali terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Altar situs Patapan

Perhatikan cerita rakyat setempat. Dalam Cerita rakyat diceritakan bahwa situs Patapan dibuat pada masa pemerintahan Kesultanan Banten. Pada saat itu digunakan sebagai tempat bertapa, sesuai dengan namanya "patapan/pertapaan" yang berasal dari kata ***tapa*** atau ***semedi***. Diceritakan pula bahwa dahulu pernah digunakan sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan santri yang bertugas mensyiarkan ajaran Islam di wilayah Banten. Cerita rakyat yang lainnya menyebutkan Prabu Pucuk Umun penguasa Banten Girang dan para pengikutnya sedang membuat meja dan kursi untuk bermusyawarah, Sultan Banten mengetahui hal tersebut dan berniat menangkapnya. Pucuk Umun dan pengikutnya kemudian melarikan diri dan melompat ke rawa Ciateul untuk menghindar dari kejaran Sultan Banten. Pucuk Umun kemudian menghilang. Rawa Ciateul tempat melompat dan menghilangnya Pucuk Umun kini disebut Kampung Bunian.

Namun, berdasarkan dari hasil penelitian Balai Arkeologi Bandung (1996 dan 1997-1998) serta hasil studi teknis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (2003), secara arsitektural dan teknologi, situs Patapan diperkirakan sebuah bangunan candi. Bangunan situs Patapan membentuk sebuah batur bujursangkar yang berukuran 10 x 10 m (Balai Arkeologi Bandung menyebut ukuran 15 x 15 m). Batur ini terbuat dari susunan satu lapis batu pasir berwarna putih di bagian luar, sedangkan di bagian dalamnya terdiri dari pengerasan tanah bercampur tatal-tatal batu pasir. Di tengah batur terdapat altar pemujaan .

Bangunan di Situs Patapan dapat dibandingkan dengan peninggalan masa Hindu abad ke-8 seperti candi Sambisari di Kabupaten Sleman dan Candi Tengaran di Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah. Pada saat ditemukan kedua candi tersebut berbentuk sebuah batur yang di tengahnya terdapat candi kecil dan di tepi batur terdapat umpak-umpak tiang. Adanya umpak-umpak pada kedua candi tersebut ditafsirkan bahwa candi kecil dibangun setelah batur didirikan. Kemudian memakai atap dan tiang kayu. Dinding

batur bukan bareh atau miring melainkan berundak. Hubungan antara undak satu dengan undak yang lainnya diikat dengan takikan mendatar pada sudut masing-masing batu. Melalui pengupasan yang dilakukan Balai Arkeologi Bandung (1997-1998), diketahui konstruksi dinding utara bangunan berupa susunan batu tanpa perekat (lepa) dengan pengikat menggunakan teknik batu kunci atau teknik yang lazim yang dipakai pada konstruksi bangunan candi. Dari perbandingan tersebut diperoleh gambaran bentuk bangunan Patapan (Fallah, 1998).

Di bagian atas bangunan terdapat lantai terbuat dari bahan yang sama. Pada lantai terdapat 10 buah umpak berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah bervariasi antara 50-68 cm. Umpak semacam ini biasanya berada di tepi bangunan, dan diperkirakan berfungsi sebagai penyangga tiang kayu yang cukup besar.

Pada bagian tengah bangunan situs Patapan terdapat tinggalan batu yang ditafsir sebagai altar berbentuk persegi dan berprofil yoni. Kini altar tersebut berada di bawah pohon dalam kondisi terbalik, tidak jauh dari titik pusat bangunan. Dilihat dari bentuknya, altar situs Patapan mirip yoni, namun tidak memiliki lubang tempat lingga dan cerat seperti halnya yoni. Namun fungsinya diduga tidak jauh dari aktivitas ritual Agama Hindu. Bila melihat bagian atasnya yang datar, kemungkinan pernah digunakan untuk meletakkan sesuatu yang berhubungan dengan upacara keagamaan, sebagaimana altar yang biasa dipakai dalam upacara Agama Hindu.

Berdasarkan analogi bentuk bangunan maupun profil yoni pada altar, untuk sementara dapat dikatakan bahwa bangunan di situs Patapan merupakan sebuah candi Hindu, sedangkan untuk menentukan kapan candi ini digunakan belum dapat dipastikan karena belum ada data arkeologi dan data sejarah yang jelas. Namun, daerah Cikande yang tidak jauh dari situs Patapan pernah disebut dalam catatan Tom Pires ketika mengunjungai Banten pada tahun 1513. Disebutkan bahwa Cheguide (Cikande?) merupakan sebuah kota dagang pada masa Hindu di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran dan dikatakan juga bahwa barang dagangannya sama dengan Banten dan Pondang (Pontang?) (Fallah, 1998). Secara geografis dan administratif dahulu situs Patapan di Desa Nagara masuk wilayah Kecamatan Cikande, namun karena adanya pemekaran wilayah tahun 2001 maka saat ini lokasi situs berada di wilayah ujung selatan Kecamatan Kibin.

Bab V

Masa Kesultanan dan Pengaruh Islam di Banten

Memolo

Bab V

MASA KESULTANAN DAN PENGARUH BUDAYA ISLAM

Berdasarkan sumber sejarah, Banten telah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Sunda yang memiliki peran sangat besar dalam menunjang perekonomian, karena merupakan pusat perdagangan yang bersifat lokal, interlokal maupun internasional. Di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, Banten merupakan "negara bawahan", namun sebagai bandar pelabuhan, kedudukan Banten hanya menempati posisi kedua setelah Sunda Kelapa (Ayatrohaedi 1993: 8). Meskipun Kerajaan Sunda mengandalkan kehidupannya dari hasil pertanian, namun sektor perdagangan juga dikembangkan dengan cara membangun beberapa bandar untuk menyalurkan produksinya ke berbagai tempat melalui jalan laut.

Banten, sebuah kawasan yang dikenal dengan sebutan Banten Girang atau Wahanten Girang, terletak di tepi sebuah sungai, yang saat ini berada sekitar 3 km sebelah selatan Kota Serang atau kira-kira 13 km dari Banten Lama. Wahanten Girang merupakan penyebutan dalam naskah (Carita Parahyangan,1518) untuk Banten Girang, sedangkan Banten Lama adalah nama yang diterjemahkan dari *Oud Bantam* yang disebutkan dalam kepustakaan orang-orang Belanda. Wilayah ini mempunyai keletakan di pesisir utara Laut Jawa, sehingga sangat berpotensi secara geografis untuk dikembangkan sebagai bandar. Namun hal itu belum begitu terlihat sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ke ibukota yang baru, yaitu Surosowan.

Terdapat enam bandar perdagangan di Kerajaan Sunda, yaitu Banten, Sunda Kelapa, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Berdasarkan berita tertulis, melalui bandar-bandar tersebut berbagai sumber daya yang dihasilkan di kawasan pedalaman dialirkan ke penjuru dunia. Di Banten diperdagangkan barang-barang seperti beras, bahan makanan, serta lada, yang wilayah perdagangannya mencapai Sumatera dan Kepulauan Maladewa. Sunda Kelapa memiliki jalur perdagangan yang lebih luas lagi, karena merupakan bandar internasional. Bandar lainnya, seperti Pontang dan Tamgara memperdagangkan komoditas serupa dengan Banten, sedangkan Cimanuk yang

letaknya paling timur termasuk pula sebagai kota besar, banyak berhubungan dengan pedagang dari Jawa (Soemadio, 1976: 242-4).

Pesatnya aktivitas niaga yang berlangsung di berbagai bandar tersebut, terutama di Sunda Kelapa dan Banten tidak terlepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Pedagang-pedagang Islam yang semula berdatangan ke Malaka, enggan berhubungan dengan pedagang Portugis yang beragama Kristen. Demikian pula orang Portugis lebih suka berdagang dengan orang yang beragama Hindu. Akibatnya tidak sedikit pedagang Islam yang mengalihkan jalur dagangannya dari Selat Malaka ke arah Selat Sunda melalui Jawa Barat (Burger 1962: 44-5).

Islam telah masuk di Banten sekitar tahun 1524-1525, semasa Banten masih di bawah pemerintahan Kerajaan Sunda yang dipimpin Prabu Pucuk Umun dan anaknya yang bernama Prabu Seda. Pada awal kedatangan Islam di Banten, Sunan Gunung Jati atau Syech Syarif Hidayatullah menjadi penguasa pertama di Banten, tetapi ia tidak mengangkat dirinya sebagai sultan, melainkan diserahkan kepada anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin. Hasanuddin menikah dengan putri Sultan Trenggono dari Demak pada tahun 1526, dan diangkat sebagai Sultan Banten yang pertama pada tahun 1552.

Semenjak Banten Girang berhasil dikalahkan oleh penguasa Islam, terjadilah peralihan kekuasaan. Kekuasaan Islam bertambah jaya ketika pusat Kesultanan Banten dipindahkan ke Banten Lama yang terletak di kawasan pesisir pantai di pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Pemindahan itu merupakan suatu pilihan penting untuk mengembangkan perdagangan, sehingga bandar Banten di pesisir yang berfungsi sebagai pusat politik maupun ekonomi berkembang dengan pesat. Pemindahan kota pusat kerajaan itu dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera bagian barat melalui Selat Sunda dan Samudera Indonesia. Oleh karena Selat Malaka dengan kota Malaka pada masa itu telah dikuasai Portugis, dan kekuasaan Pasai di pesisir utara Sumatera pada awal abad ke-16 sudah di bawah pengaruh Portugis, maka tidak sedikit para pedagang datang untuk mengadakan transaksi jual beli berbagai komoditas. Sumber tertulis menyebutkan para pedagang itu berasal dari Arab, Abesinia, Belanda, Cina, Denmark, Gujarat, Inggris, Prancis, Persia, dan Turki (Leur 1955: 3-5; Roelofsz 1962: 235, 253).

Selain faktor politik, ekonomi dan geografi, pertumbuhan beberapa kota di Indonesia mungkin tidak dapat dilepaskan dari faktor yang berhubungan dengan kosmologi serta faktor magis-religius. Berdasarkan beberapa bukti dari kepustakaan lama dan prasasti di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Robert Heine-Geldern menduga bahwa hubungan antara pendirian suatu pusat kerajaan dengan kosmologi bukan hanya dalam pendirian kerajaan saja, tetapi juga dalam penobatan raja, gelar ratu-ratu, menteri-

menteri, pendeta-pendeta keraton, pembagian provinsi-provinsi, upacara-upacara adat, dalam pekerjaan pembuatan denah kota dan struktur ibukota atau pusat kerajaan, kota besar lainnya, keraton dan kuil. Menurut pendapatnya, di daratan Asia Tenggara tradisi tersebut masih hidup sampai sekarang, sedangkan di Indonesia tradisi tersebut sudah mulai samar karena adanya pengaruh budaya Eropa dan Islam (Notosusanto, 1992: 215-216). Latar belakang pendirian kota Surosowan sebagai ibu kota kerajaan Banten selain berdasarkan faktor politis dan ekonomis. Berdasarkan Hikayat Hasanoeddin pendirian Surosuwan di dasarkan atas petunjuk dan nasihat Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah kepada Maulana Hasanuddin. Selain itu dinasehatkan agar *watugilang* yang berada di tengah kota tidak boleh digeser, karena pergeseran akan merupakan pertanda keruntuhan kerajaan (Edel, 1938: 51-52).

Kerajaan Banten Dan Masyarakatnya Dalam Kilas Sejarah

Banten dalam masa perkembangan awalnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang bercorak maritim. Dilihat dari sudut itu, maka Banten menitikberatkan kehidupannya pada perdagangan, sedangkan kekuatan militernya lebih dititikberatkan pada kekuatan angkatan laut.

Perkembangan selanjutnya dari kota Banten adalah memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Seperti halnya kota-kota pada masa awal perkembangan Islam di Jawa, keraton pada umumnya mengarah ke utara. Kompleks bangunan yang termasuk keraton, biasanya dipisahkan dari bangunan-bangunan lainnya oleh tembok keliling, parit atau kanal. Bangunan mesjid didirikan di sisi barat alun-alun. Sesuai dengan fungsinya, mesjid yang terletak di tengah kota tersebut dipergunakan untuk sembahyang Jum'at dan sembahyang hari-hari raya Islam, sehingga disebut dengan Mesjid Agung atau Mesjid Raya. Di Banten, selain Mesjid Agung didapatkan juga mesjid di dekat Kampung Pacinan, namun kini hanya tersisa reruntuhannya. Selain itu terdapat mesjid lain, yang menurut gambaran dan berita orang Belanda yang datang pertama kali ke Banten pada tahun 1596, dikatakan berada di dekat pasar.

Ciri lain kota Islam adalah keberadaan pasar, yaitu sebagai tempat berhimpunnya masyarakat dari berbagai tempat untuk melakukan transaksi. Keberadaan pasar dalam kehidupan perekonomian masyarakat suatu kerajaan sangatlah penting. Sekitar abad ke-16 di kota Banten dan sekitarnya terdapat lebih dari satu pasar yang letaknya tidak berdekatan dengan alun-alun, tetapi ada di dekat perkampungan para pedagang, seperti pasar yang terletak di Pacinan dan Karangantu. Menurut berita Cina pada tahun 1618, guna keperluan perdagangan raja telah menunjuk dua tempat di luar kota untuk dibangun toko-toko. Pada pagi hari setiap orang dapat pergi ke pasar dan pada petang

hari semua kegiatan di pasar tersebut berhenti. Di Banten setiap hari raja menarik cukai dari pasar. Willem Lodewyckz pada tahun 1596 memberikan beberapa gambaran tentang pasar di Banten. Di pasar sebelah timur kota (Karangantu), baik pagi maupun siang terdapat pedagang-pedagang dari beberapa tempat di Indonesia dan luar Indonesia melakukan perdagangan sampai pukul sembilan malam. Pasar yang lain terdapat di Paseban yang menjual segala keperluan sehari-hari. Aktivitas pasar tersebut berlangsung sampai dengan siang hari dan bahkan sepanjang hari. Sementara pasar di Kampung Pacinan diselenggarakan satu hari sebelum dan sesudah pasar-pasar yang lain.

Pada waktu siang hari para pedagang Cina di Karangantu memperdagangkan bermacam kain sutra, *laken*, beludru, sutra, benang emas, piring porselen, taplak, bejana dari tembaga, panci besar dan kecil dari tembaga cor dan tempaan, air raksa, peti yang indah, kertas tulis berwarna, almanak, emas tempaan, cermin, sisir, kacamata, belerang, pedang, sarung pedang dengan lak, akar-akaran, kipas angin, dan payung. Pedagang dari Gujarat banyak menjual jenis tekstil sementara pedagang berasal dari Persia menjual bermacam batuan delima.

Di dalam kota terdapat perkampungan-perkampungan pribumi yang umumnya didasarkan pada status sosial-ekonomi, keagamaan, dan kekuasaan. Sementara perkampungan orang asing yang umumnya pedagang, ditentukan oleh masing-masing penguasa kota. Di Banten hingga kini masih ada perkampungan lama, misalnya Kampung Pakojan yang terletak di sebelah barat bekas Pasar Kuno Karangantu, Kampung Kemasan, dan Kampung Kebalen. Terdapat pula Kampung Pacinan yang merupakan tempat bermukim masyarakat Cina.

Dari jumlah penduduk dan sistem yang ada dalam pemerintahan kerajaan Banten, dapat dilihat penggolongan masyarakat kota yang menggambarkan masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Pembagian golongan tersebut terdiri atas: golongan raja dan keluarganya, golongan elit, dan golongan non elit. Pembagian golongan atau lapisan penduduk kota seperti itu tidak lain untuk memungkinkan keleluasaan dalam mengklasifikasikan golongan pejabat pemerintahan, ulama, tukang, pedagang, serta petani.

Banten merupakan kerajaan maritim sehingga kekuasaan politik maupun ekonomi dipegang oleh kaum bangsawan yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Hubungan antara sultan, keluarga sultan, para bangsawan, pejabat elit birokrat dengan perekonomian dan perdagangan erat sekali. Dengan demikian, golongan tersebut bukan hanya mempunyai status sosial yang tinggi di bidang politik dan sosial saja, tetapi juga di bidang ekonomi.

Golongan non elit merupakan golongan yang paling besar jumlahnya. Termasuk dalam golongan ini adalah para pedagang, petani, pejabat birokrat golongan bawah, golongan keagamaan yang hanya melayani orang-orang biasa, tentara dan seniman. Sesuai dengan keletakannya yang berada di pesisir, maka banyak penduduk Banten yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Golongan pedagang asing yang tinggal di Banten antara lain orang Melayu, Benggala, Gujarat dan Abesinia. Mereka bertempat tinggal di sepanjang pantai. Pedagang-pedagang Cina juga memiliki perkampungan tersendiri yang terletak di sebelah barat, bergabung dengan orang-orang Portugis.

Golongan petani tidak banyak yang bertempat tinggal di dalam kota. Namun demikian ada sebagian petani yang berada di dalam kota untuk melakukan perdagangan. Golongan tukang atau pekerja bertempat tinggal di dalam kota. Nama-nama bekas kampung sekarang ini, seperti Kasunyatan (tempat tinggal ulama), Kapandean atau Kampung Pande (tempat tinggal pandai besi), dan Pagongan (tempat tinggal pembuat gong), mengingatkan kita pada tempat bermukimnya golongan tukang atau pekerja itu pada masa lalu.

Pada awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kerajaan Demak yang pada tahun 1500-an mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Pada tahun 1521, Pangeran Trenggono diangkat menjadi Raja Demak dan pengaruh Islam mengalami kemajuan yang pesat di Jawa. Tahun 1527 Demak memperluas pengaruhnya dan berhasil menguasai Jawa Barat. Namun setelah pemerintahan Pangeran Trenggono, keadaan Demak menjadi tidak terkendali karena adanya krisis kepemimpinan yang disebabkan perebutan kekuasaan. Adanya kemelut berkepanjangan menjadikan Kerajaan Demak lemah dalam segala bidang kehidupan. Pada waktu yang bersamaan, Banten mengalami kemajuan melalui perdagangan. Situasi ini dimanfaatkan Hasanuddin untuk melepaskan diri dari pengawasan Demak.

Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya. Ia diangkat menjadi raja dengan gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan. Sultan adalah sebutan yang lazim digunakan dalam masyarakat Islam untuk menyebut seorang raja, sedangkan Maulana adalah gelar yang berarti tuan atau penguasa. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten, Jayakarta sampai Karawang, Lampung, Indrapura sampai Solebar (Djajadiningrat, 1983: 181). Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin pembangunan kerajaan lebih dititikberatkan pada bidang keamanan kota, perluasan wilayah perdagangan, serta penyebaran dan pemantapan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam. Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570. Pengganti Maulana Hasanuddin adalah putranya yang bernama Maulana Yusuf. Strategi pembangunan yang dilaksanakan Maulana Yusuf

dititikberatkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian. Pada masa Maulana Yusuf, perdagangan di Banten mengalami kemajuan yang pesat. Berkembangnya perdagangan di Banten, menarik minat banyak pendatang dari negeri lain untuk datang dan berdagang di Banten (Ambary, 1977: 446). Pada tahun 1580 Sultan Maulana Yusuf wafat.

Sultan Banten yang ketiga adalah Maulana Muhammad Kanjeng Ratu Banten Surosowan yang memerintah sejak tahun 1580 hingga tahun 1596. Namun karena usianya yang masih relatif terlalu muda untuk memegang pemerintahan, maka pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi sebagai walinya. Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang amat taat kepada agama. Ia banyak mengarang kitab-kitab agama. Sultan juga diketahui sangat menghormati gurunya yang bernama Kyai Dukuh yang bergelar Pangeran Kasunyatan yang tinggal di Kampung Kasunyatan (Djajadinigrat, 1983: 39 dan 164). Mesjid Agung Banten diperindah olehnya dengan melapisi tembok mesjid dengan menggunakan porselen dan tiangnya dibuat dari kayu cendana (Michrob, 1981: 32). Ia juga membuat satu tempat khusus untuk tempat shalat kaum perempuan yang disebut dengan *pawestren* atau *pawadonan* (Tjandrasasmita, 1975: 131-132).

Peristiwa yang menonjol dari masa pemerintahan Maulana Muhammad adalah adanya penyerbuan ke Palembang. Pada peristiwa ini, Sultan Maulana wafat akibat tertembak (Djajadiningrat, 1983: 41-42 dan Hamka, 1982: 74,84). Peristiwa gugurnya Maulana Muhammad ini terjadi pada tahun 1596 berdasarkan pembacaan candrasengkala *prabu lepas tataning prang* (Djajadiningrat, 1983: 168). Maulana Muhammad meninggal dalam usia yang sangat muda, kurang lebih 25 tahun dengan meninggalkan seorang putra berusia lima bulan dari permaisuri Ratu Wanagiri, putri dari Mangkubumi. Anak inilah yang menggantikan pemerintahan Maulana Muhammad. Setelah meninggal, Sultan Maulana Muhammad diberi gelar *Pangeran Seda Ing Palembang* atau *Pangeran Seda Ing Rana* dan dikuburkan di serambi Mesjid Agung (Djajadiningrat, 1983: 169).

Sehubungan dengan usia Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (anak Sultan Muhammad) masih sangat muda, maka untuk menjalankan pemerintahan ditunjuk Mangkubumi Jayanagara. Pada masa pemerintahannya banyak kemajuan di bidang perdagangan, dan untuk pertama kalinya kapal dagang Belanda mendarat di Pelabuhan Banten (Michrob, 1993: 92). Namun pada masa tersebut terjadi konflik di antara anggota keluarga kerajaan yang hendak merebut tahta kerajaan karena usia sultan masih sangat muda.

Mangkubumi Jayanagara meninggal dunia pada tahun 1602, kemudian digantikan oleh adiknya yang tidak lama kemudian diberhentikan karena berkelakuan

tidak baik. Setelah itu tidak ada mangkubumi yang diangkat lagi. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada ibunda sultan yaitu Nyai Gede Wanagiri yang kemudian menikah lagi serta mengangkat sang suami menjadi mangkubumi. Namun cara pemerintahan yang dilakukan mangkubumi ini banyak menimbulkan masalah dan tidak berkenan di hati rakyat. Akhirnya terjadi pertentangan di antara para pembesar keraton yang puncaknya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Mandalika, putra Maulana Yusuf pada bulan Oktober 1604. Pemberontakan ini mendapat banyak simpati dari rakyat, namun pada akhirnya dapat dipadamkan (Djajadiningrat, 1983: 170).

Konflik di antara pembesar keraton tidak kunjung usai, sampai pada akhirnya timbul pemberontakan pada bulan Juli 1608 yang dikenal dengan Peristiwa Pailir. Pertanggalan lengkap dari Peristiwa Pailir ini didapatkan dari candrasengkala *tanpa guna tataning prang* atau tahun 1530 Çaka yang bertepatan pada tanggal 8 Maret 1608. Pada tanggal 23 Oktober 1608, mangkubumi terbunuh. Namun hal tersebut tidak segera menyelesaikan masalah, karena setelah itu muncul Pangeran Kulon yang berambisi untuk naik tahta sebagai sultan. Pangeran Kulon merasa paling berhak memegang kekuasaan di Banten, dibandingkan dengan Sultan Abdul Kadir, karena ia adalah cucu Maulana Yusuf, putra dari Ratu Winaon dengan Pangeran Gabang dari Cirebon. Ratu Winaon adalah putri pertama Maulana Yusuf dari permaisuri, dan kakak kandung Maulana Muhammad. Sementara Sultan Abdul Mufakhir Muhammad Abdul Kadir adalah anak Sultan Muhammad dari seorang istri yang lain, karena permaisuri tidak berputra. Keinginan Pangeran Kulon didukung oleh beberapa pangeran dan bangsawan Kesultanan Banten serta mendapat simpati dari sejumlah rakyat. Dengan dukungan itu maka Pangeran Kulon membentuk pasukan (Djajadiningrat, 1983: 176).

Apa yang terjadi kemudian? Peperangan tidak dapat lagi dihindarkan. Pasukan Pangeran Kulon dapat bergerak mendekati pusat kerajaan sebelum akhirnya dipukul mundur. Pada saat itu datang Pangeran Jayakarta yang membawa pasukan cukup besar. Ia berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Akhirnya peperangan dapat dihentikan dan perjanjian perdamaian disepakati bersama. Atas jaminan Pangeran Jayakarta, para tokoh pemberontakan tidak dihukum mati melainkan diasingkan ke Jayakarta selama empat tahun. Setelah peristiwa tersebut, Pangeran Arya Ranamanggala diangkat menjadi mangkubumi sekaligus sebagai Wali Sultan Muda (Djajadiningrat, 1983: 43, 46 dan 169-179; Michrob, 1993: 97-99). Pangeran Arya Ranamanggala adalah Putra Maulana Yusuf dari istri bukan permaisuri. Tindakan pertama yang dilakukannya sebagai mangkubumi adalah menertibkan keamanan negara, yaitu dengan memberikan hukuman tegas kepada pangeran atau ponggawa kerajaan yang melakukan penyelewengan. Pada masa pemerintahannya, Pelabuhan Jayakarta mulai menunjukkan potensi sebagai pelabuhan yang besar.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perselisihan antara Belanda dan Kesultanan Banten. Akibatnya Banten diblokade oleh pihak VOC selama empat bulan. Hal ini menyebabkan Pelabuhan Banten semakin sepi, sedangkan Pelabuhan Jayakarta makin ramai. Pada tahun 1618 terjadi peperangan antara Inggris dan Belanda karena memperebutkan benteng di Jayakarta. Belanda dapat dipukul mundur oleh Inggris. Setelah peristiwa itu, Banten mengadakan perjanjian tentang hak atas benteng dan harta rampasan. Pangeran Arya Ranamanggala tetap bersikeras bahwa Belanda dan bentengnya harus dilenyapkan dan meminta orang-orang Belanda yang masih bertahan di dalam benteng untuk segera menyerah, namun mereka menolak dan tetap bertahan menunggu bala bantuan datang. Pada tanggal 30 Mei 1619 benteng dan sekitarnya dikuasai Belanda dan kemudian wilayah itu dinamakan Batavia sebagai peringatan kepada nenek moyang bangsa Belanda, yaitu suku Bataaf. Pada bulan April 1619 Jan Pieterszoon Coen merampas daerah—daerah di sekitar Sungai Ciliwung yang masih termasuk wilayah Banten sehingga seluruh wilayah kota Jayakarta dapat dikuasainya.

Pada bulan Januari 1624, Mangkubumi Pangeran Arya Ranamanggala meletakkan jabatan karena sakit. Diserahkannya kewenangan pemerintahan kepada Sultan Abdul Kadir yang mulai berangkat dewasa sebagai penasehat raja. Barulah pada tanggal 16 November 1624, Pangeran Arya Ranamanggala menyerahkan pemerintahan seluruhnya kepada sultan. Dua tahun kemudian, pada tanggal 13 Mei 1626 ia meningal dunia.

Masa pemerintahan Sultan Abdul Kadir penuh dengan ketegangan antara Banten dan Belanda. Banyak terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara pihak Banten dan Belanda. Sultan Abdul Kadir memiliki 5 orang anak dari permaisurinya, yaitu Pangeran Pekik, Ratu Dewi, Ratu Mirah, Ratu Ayu, dan Pangeran Banten. Sementara dari istri lainnya ia memiliki lebih dari 30 anak. Pangeran Pekik diasuh oleh paman tuanya, yaitu Mangkubumi Arya Ranamanggala, dan ia diangkat menjadi putra mahkota.

Pada tahun 1633 atau 1634, diutuslah beberapa pembesar istana ke Mekkah. Dalam rombongan ini disertakan pula Pangeran Pekik sebagai wakil ayahnya sekaligus untuk ibadah haji. Setelah pulang dari Mekkah, ia memperoleh gelar kebangsawanan untuk sultan yaitu, Sultan Abdulmafakir Mahmud Abdul Kadir, sedangkan Pangeran Pekik mendapat gelar Sultan Ma'ali Ahmad. Tidak lama setelah itu ibunda Sultan yaitu Nyai Gede Wanagiri meninggal dunia, yang kemudian dimakamkan di Kenari. Pada tahun 1650 terjadi peristiwa penyerbuan orang-orang Cirebon yang meminta agar Banten tunduk pada Mataram. Peristiwa peperangan ini kemudian dikenal dengan peristiwa Pagarege atau Pacerebonan. Banten dapat memenangkan peperangan. Tidak lama setelah peristiwa ini, Pangeran Pekik sebagai putra mahkota meningal dunia karena sakit yang lama dan dimakamkan di Kenari. Putra mahkota diserahkan kepada anaknya, yaitu Pangeran Surya, dengan gelar Pangeran Adipati Anom. Pada tanggal 10 Maret 1651,

Sultan Abumafachir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia dan dimakamkan di Kenari. Diangkatlah kemudian Pangeran Adipati Anom sebagai sultan.

Siapakah Sultan Banten yang menjadi raja ke-6? Pengganti selanjutnya yang memerintah adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam masalah politik kenegaraan, ia dengan tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Mengembalikan Jayakarta ke dalam kekuasaan Banten adalah cita-cita utama, dan karenanya ia tidak pernah berkeinginan untuk berkompromi dengan Belanda. Pada tahun 1645 hubungan Banten dengan Belanda semakin panas. Pada tahun 1656 pasukan Banten bergerilya di sekitar Batavia. Pada tahun 1657 Belanda menawarkan perjanjian damai, namun perjanjian itu hanya menguntungkan Belanda, sehingga ditolak oleh sultan. Pada tahun 1580 mulailah perang besar. Perang ini berakhir pada 10 Juli 1659 dengan ditandai penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

Sultan memiliki putra mahkota yang bernama Abdul Kohar. Ia diangkat menjadi putra mahkota pada tanggal 16 Februari 1671 dengan gelar Sultan Abu'n Nasr Abdul Kohar. Putra mahkota inilah yang akhirnya menjadi jalan bagi Belanda untuk menundukkan sultan yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Bujukan dan rayuan terus dikerahkan oleh pihak Belanda kepada sang putra mahkota, dan hasilnya adalah Belanda mendapat banyak kemudahan dalam urusan niaga. Sultan Ageng Tirtayasa, sang ayah merasa sangat prihatin kemudian dibujuklah sang pangeran untuk ibadah haji pada tahun 1674. Kedudukan sementara dalam jabatan putra mahkota diserahkan kepada adiknya, yaitu Pangeran Purbaya. Hal inilah yang kemudian dijadikan suluh permusuhan yang dikobarkan oleh Belanda untuk menghasut pangeran mahkota yang kemudian dikenal sebagai Sultan Haji.

Sultan Haji menginginkan perdamaian dengan Belanda dengan mengirimkan surat pada tahun 1680 dan menyatakan bahwa ia adalah penguasa Banten sepenuhnya, bukan lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tanggal 26 dan 27 Februari 1682, Sultan Ageng Tirtayasa menyerbu Surosowan tempat Sultan Haji berkedudukan. Serangan tersebut berhasil, namun kemudian Surosowan dapat direbut oleh Belanda di bawah pimpinan Kapten Tack. Pada akhir tahun 1682 daerah Tirtayasa dapat dikuasai oleh Belanda, namun daerah itu kosong karena semua mengikuti Sultan Ageng Tirtayasa bergerilya. Setelah sekian tahun dibujuk untuk keluar dari hutan dan kembali ke Surosowan. Pada tanggal 14 Maret 1883 Sultan Ageng Tirtayasa datang ke Surosowan. Setelah tinggal beberapa waktu lamanya, ia kemudian dibawa oleh Belanda ke Batavia dan dimasukkan ke penjara hingga wafat pada tahun 1892. Ia kemudian dimakamkan di sebelah utara Mesjid Agung Banten.

Siapakah pengganti Sultan Ageng Tirtayasa? Pemerintahan Banten selanjutnya dipegang oleh Sultan Haji. Setelah ia meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Belanda ikut campur tangan melalui Van Imhoff yang mengangkat anak pertamanya yaitu Pangeran Ratu menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Abu'I Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690). Ia membenci Belanda, tapi setelah tiga tahun memerintah ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sultan tersebut tidak memiliki anak, sehingga adiknya menggantikan dirinya, yaitu Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin atau juga disebut *Kang Sinuhun Ing Nagari Banten* (1690-1733). Ia digantikan oleh putra keduanya yang bergelar Sultan Abulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733-1747). Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan.

Setelah pemerintahan Zainul Arifin, sultan berikutnya adalah Pangeran Syarif Abdullah yang diangkat dengan persetujuan Belanda dengan gelar Sultan Syariffuddin Ratu Wakil pada tahun 1750. Pemberontakan rakyat terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang ada. Untuk menenangkan keadaan, maka Belanda menangkap sultan dan mengasingkannya ke Banda. Penggantinya adalah Pangeran Arya Adisantika, adik Sultan Zainul Arifin dengan gelar Sultan Abuma'ali Muhammad Wasi' Zainul 'Alimin pada tahun 1752 dan putra mahkotanya adalah Pangeran Gusti.

Pada tahun 1753, Sultan Abulma'ali Muhammad Wasi' Zainul 'Alamin menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Gusti yang kemudian bergelar Abu'l Nasr Muhammad "Arif Zainul "Asiqin. Ia wafat pada tahun 1773 yang kemudian digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Abu'l Mafakih Muhammad Aliyuddin (1773-1799). Sultan ini tidak memiliki putra sehinga ia diganti oleh adiknya, Pangeran Muhiddin dengan gelar Sultan Abu'lfath Muhammad Muhiddin Zainushalihin (1799-1801). Sultan Muhidin dibunuh oleh Tubagus Ali seorang putra Sultan Aliyuddin. Pengganti selanjutnya adalah putra Sultan Aliyuddin dari selir dengan gelar Sultan Abu'l Nasr Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802).

Pada tahun 1802 kesultanan dipegang oleh Sultan Wakil Pangeran Natawijaya. Pada tahun 1803 digantikan oleh putra kedua Sultan Abul Mafakih Muhammad Aliyuddin dengan gelar Sultan Abu'l Nasr Muhammad Ishak Zainul Muttaqin atau Sultan Aliyuddin II (1803-1808). Pada tahun 1813, ketika Kesultanan Banten diperintah oleh Sultan Muhammad Syafiuddin, ia dipaksa turun tahta dan kemudian Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintahan Inggris yang menggantikan Belanda di Banten di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Sejak saat itulah Banten berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda sepenuhnya.

SILSILAH RAJA YANG MEMERINTAH DI BANTEN

1. Syarif Hidayahtullah Susuhunan Gunung Jati *)	
2. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan	1552-1570
3. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede	1570-1580
4. Maulana Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten	1525-1552
5. Sultan Abul Mafachir Mahmud Abdul Kadir Kenari	1580-1596
6. Sultan Abul Ma'ali Ahmad	1596-1651
7. Sultan Ageng Tirtayasa-Abul Fath Abdul Fattah	1651-1672
8. Sultan Abun Nasr Abdul Kahhar-Sultan Haji	1672-1687
9. Sultan Abdulfadhl	1687-1690
10. Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin	1690-1733
11. Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin	1733-1750
12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil	1750-1752
13. Sultan Muhammad Wasi Zainul Alimin	1752-1753
14. Sultan Muhammad Arif Zainul Asyikin	1753-1773
15. Sultan Abul Mafakih Muhammad Aliyuddin	1773-1799
16. Sultan Muhyiddin Zainussholihin	1799-1801
17. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin	1801-1802
18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya	1802-1803
19. Sultan Agilludin (Aliyuddin II)	1803-1808
20. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala	1808-1809
21. Sultan Muhammad Syafiuddin	1809-1813
22. Sultan Muhammad Rafi'uddin	1813- 1820

Keterangan: *) Penguasa pertama yang tidak mentasbihkan diri menjadi raja

Nama sultan yang dicetak tebal dibahas dalam buku ini

Sumber: Ismail Muhammad, 1983

Banten sebagai Kota Peninggalan Kesultanan

Pembangunan kota Banten sebagai Negara-Kota (*city state*) sekaligus sebagai Kota-Bandar (*harbour city*) dilakukan sejak Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kebesaran Kesultanan Banten pada masa ini ditunjang oleh beberapa faktor, seperti letak geografis yang strategis, kondisi lingkungan (ekologis) yang menguntungkan, struktur masyarakat, dan pemerintahan yang kuat.

Keberadaan Banten Lama sebagai pusat kesultanan dan kota bandar yang dilengkapi dengan berbagai sarana diberitakan jelas oleh Belanda ketika mengirimkan ekspedisi pertamanya menuju Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Houtman menggambarkan keberadaan kota dengan keraton, mesjid, alun-alun, pasar, pelabuhan, jalan, perdagangan di pasar Karangantu, perkampungan penduduk dari berbagai tempat di Indonesia, struktur masyarakat, dan pemerintahan Banten pada akhir abad ke-16. Pada masa itu terdapat kelompok masyarakat yang berasal dari Melayu, Benggala, Gujarat, Abesenia, Cina, Arab, Pegu, Turki, Persia, Belanda, Portugis dan para pedagang dari Nusantara, seperti dari Ambon, Banda, Maluku, Selor, Makasar, Sumbawa, Jaratan, Gersik, Pati, Sumatera, dan Kalimantan (Rouffaer-Ijzerman, 1915: 108-121). Keletakan keraton, alun-alun, mesjid, pasar, dan jaringan jalan menunjukkan pola morfologi kota yang hampir sama dengan kota-kota Islam lain di Jawa, seperti

Peta kota Banten yang paling awal, dibuat pada saat pelayaran Belanda yang pertama ke wilayah timur pada tahun 1596.

Cirebon dan Demak (Wertheim, 1956: 147; Uka, 2000: 49,56).

Kajian tentang kota Banten dapat dijelaskan berdasarkan peta-peta lama yang sayangnya tidak berskala. Pada waktu kota Banten menjadi pusat pemerintahan, kota ini banyak didatangi oleh para pedagang asing maupun Nusantara. Kota Banten menjadi ramai karena terletak pada jalur perdagangan internasional dan merupakan penghasil komoditas lada. Para pedagang asing yang datang ke Banten, selain berdagang juga mencatat keadaan kota. Catatan yang dibuat mereka kadangkala disertai gambar, peta atau sketsa tentang kota Banten.

Berdasarkan peta tahun 1596 yang dibuat Willem Lodewijckz, dapat diketahui bahwa kota Banten mempunyai batas-batas sebagai berikut :

⌘sebelah utara oleh Laut Jawa dan dua kelompok pemukiman yang ada di tepi laut.

⌘sebelah timur oleh bangunan yang diduga mesjid, los panjang dan tanah kosong.

Di sebelah selatan kelompok ini terdapat lahan dengan pepohonan.

⌘sebelah barat oleh pemukiman berpagar di sisi utara, barat, dan selatan sedangkan

⌘sisi timur ada pengaliran air dari Sungai Cibanten ke dalam pemukiman tersebut.

⌘sebelah selatan tidak diketahui jelas karena tidak digambar dalam peta.

Selain itu, kota Banten dilintasi oleh dua sungai yang saling berpotongan sehingga dalam wilayah kota Banten terdapat tiga muara sungai. Muara sungai tersebut berada di sebelah barat kota, di timur kota, dan di antara kedua muara tersebut. Pada keterangan

Peta yang dibuat Belanda yang menggambarkan Banten antara tahun 1635-1639. peta ini kemudian menjadi sangat populer di Benua Eropa. Peta menggambarkan situasi kota Banten dari atas (bird's eye view). dalam peta terlihat dua buah pelabuhan, kota yang terbagi menjadi tiga bagian, dan pagar berbentuk zig-zag yang mengelilingi daerah pusat kota dimana terdapat istana dan mesjid kerajaan.

peta tahun 1596 disebutkan bahwa sungai tersebut adalah Cibanten. Kota Banten pada masa itu telah dikelilingi tembok kota dengan jalur berbentuk *zig-zag*. Di luar tembok kota terdapat sungai Cibanten yang diduga sebagai pengaman kota Banten.

Pemukiman yang terdapat di kota Banten mengalami perkembangan, baik dalam sebaran maupun dalam jumlah. Penjelasan tentang adanya pemukiman di dapat dari peta yang dibuat pada tahun 1900. Berdasarkan peta itu, diketahui beberapa bangunan yang merupakan kelengkapan kota Banten. Bangunan tersebut antara lain, (1) kompleks Pakuwon/Surosowan, (2) kompleks Keraton Kaibon, (3) Mesjid Agung Banten, Mesjid Pacinan Tinggi, Mesjid Koja dan Mesjid Karangantu, serta Mesjid Kasunyatan, (4) menara mesjid, (5) rumah para bangsawan, (6) penjara, (7) tiang bendera, (8) sumur, (9) tempat rekreasi dan (10) makam bangsawan, (11) pergudangan, (12) Benteng Speelwijk, (13) bangunan penahan gelombang/air laut, serta (14) jalan darat.

Selain itu terdapat juga nama-nama pemukiman yang ada di Banten. Jumlah pemukiman yang dibedakan berdasarkan suku bangsa dan jenis pekerjaan tersebut berjumlah 33 buah. Pemukiman-pemukiman itu antara lain (Serrurier, 1902) : (1) Kefakihan, kampung para ulama; (2) Pamarican, kampung penimbun merica dan barang-barang lain; (3) Pabean, kampung tempat pemungutan bea masuk dan bea keluar; (4) Kaloran, kampung tempat tinggal Pangeran Lor; (5) Kawangsan, kampung tempat tinggal Pangeran Wangsa; (6) Kapurban, kampung tempat tinggal Pangeran Purba; (7) Penjaringan, kampung para nelayan; (8) Pakojan, kampung tempat tinggal orang-orang India; (9) Pratok, kampung pengrajin alat-alat yang terbuat dari tempurung kelapa; (10) Pasulaman, kampung pengrajin sulam; (11) Karangantu, kampung orang-orang asing lainnya; (12) Pamaranggen, kampung para pembuat keris; (13) Pawilahan, tempat pembuatan barang-barang dari bambu; (14) Pakawatan, kampung tempat pembuatan alat-alat renda dari kuningan, terutama untuk membuat jala; (15) Kampung Karoya; (16) Kamendalikan, pemukiman Pangeran Mandalika; (17) Kampung Camara; (18) Kampung Tambak; (19) Kampung Kajoran; (20) Kebalen, pemukiman orang-orang Bali; (21) Kampung Kasemen; (22) Kawiragunan, pemukiman Pangeran Wiraguna; (23) Pajantran, kampung pengrajin tenun; (24) Kepandean, kampung pandai besi; (25) Kasantrian, kampung para santri; (26) Kampung Karangsepaten; (27) Keraton, kampung para ratu; (28) Kampung Pasar Anyar; (29) Kampung Pangembangan; (30) Kabupaten, kampung tempat tinggal Pangeran Banten; (31) Kampung Langenmaita; (32) Kasunyatan, kampung tempat tinggal orang-orang suci; dan (33) Kagongan, kampung tempat pembuat gong.

Tembok keliling kota diperkuat dan dipertebal, demikian juga tembok benteng di sekeliling istana. Tembok benteng diperkuat dengan lapisan luar yang terbuat dari bata dan karang dengan parit-parit di sekelilingnya. (Michrob, 1983: 31). Perbaikan

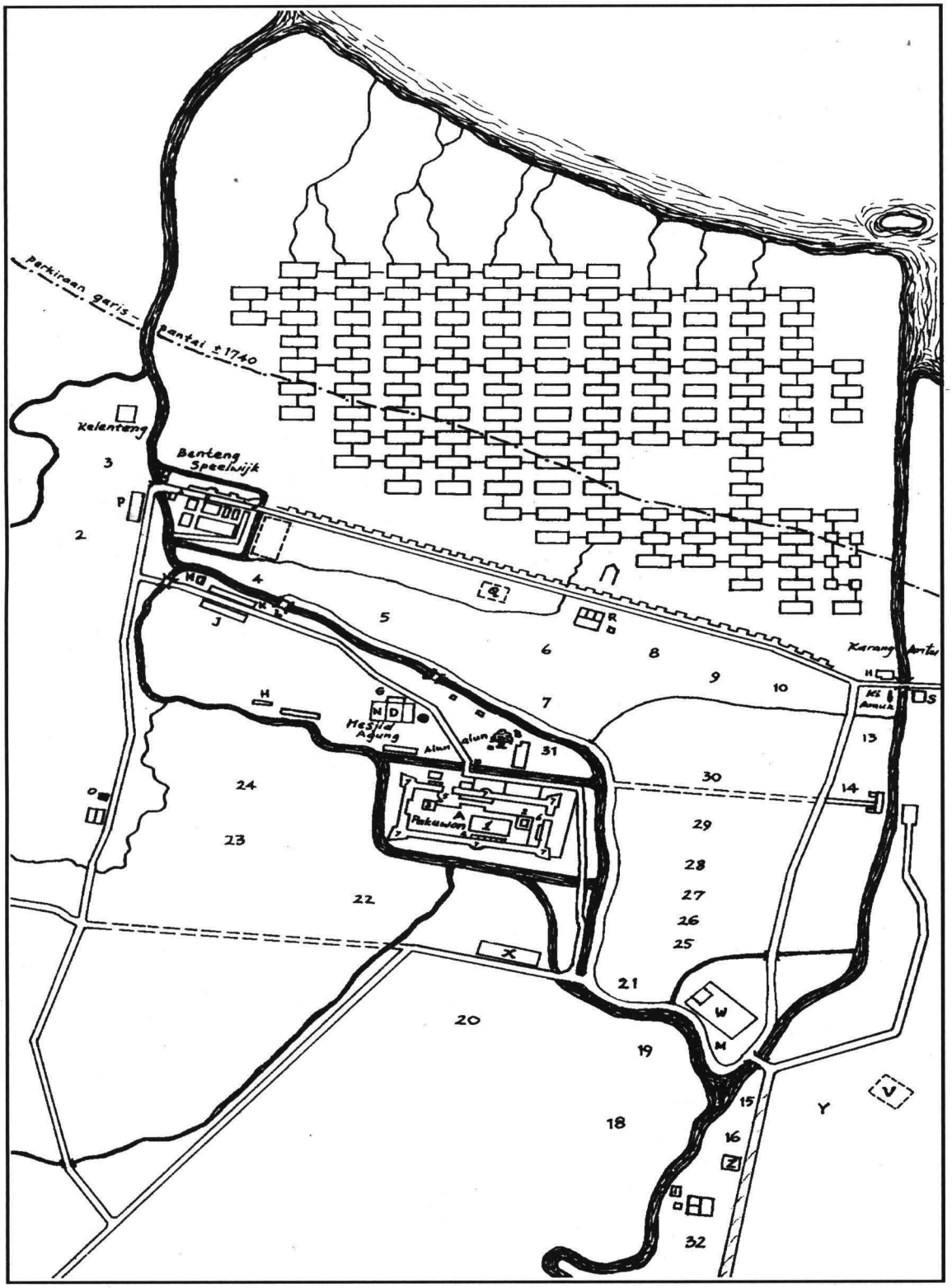

Peta Kota Banten pada tahun 1900 (Serrurier, 1902)

PEMANFAATAN FOTO UDARA DALAM PENELITIAN ARKEOLOGI DI BANTEN

Pemahaman Banten secara kewilayahan dapat dilakukan dengan mengenali keadaan wilayah geografis Banten, termasuk perkembangan wilayah secara utuh, karena mampu menghubungkan dan menggabungkan bagian-bagian/temuan-temuan yang letaknya tersebar dalam satu kawasan. Salah satu sumber data untuk memahami suatu wilayah adalah peta seperti peta topografi terbitan US Army tahun 1942/1943 saja (cf. peta terbitan *Topografische Dienst* tahun sebelumnya).

Selain peta topografi, data kewilayahan dapat pula diperoleh dari foto udara, baik hitam-putih (pankromatik) maupun berwarna. Kelebihan foto udara dari peta topografi ialah keakuratan data permukaan dalam kawasan yang luas, sehingga data yang diperoleh dapat diidentifikasikan, diukur dan dihubungkan dengan keadaan ekologinya. Foto udara mampu merekam data arkeologi yang berukuran relatif besar.

Penggunaan foto udara terhadap data arkeologi-sejarah dalam suatu kawasan, ternyata telah dapat membantu memahami keadaan kawasan ibukota Kerajaan Majapahit di Trowulan (1978), dan ibukota Kerajaan Mataram Islam di Plered (1982). Penggunaan foto udara di dua kawasan tersebut mampu mengenali konfigurasi sebaran temuan arkeologi, sehingga dapat diinterpretasikan hubungannya satu sama lain. Hasil interpretasi tersebut dapat mengefisienkan survei permukaan dilihat dari segi hasil kerja, waktu dan tenaga.

Pada 1984/1985 foto udara digunakan pada kawasan Kesultanan Banten untuk memberi tafsiran atas rona, tekstur, bentuk, dan asosiasinya, sehingga diperoleh gambaran umum kota Banten dan sekitarnya. Pencocokan foto udara dengan peta kuna kota Banten (tak berskala) buatan orang Eropa menghasilkan pembabakan waktu dari tinggalan-tinggalan arkeologi Banten. Keberadaan kerajaan Banten dimulai dari daerah pedalaman (Banten Girang) yang terletak di tepi sungai Cibanten, yang menghubungkan daerah pedalaman yang subur dengan daerah pantai yang merupakan lokasi perdagangan internasional. Sungai Cibanten dengan demikian manjadi sarana pendistribusian sumber bahan/komoditas perdagangan dari pedalaman menuju daerah pesisir/pelabuhan, selain jalan setapak dan jalan tanah lainnya. Gambaran orang Eropa menjelaskan adanya penduduk berjalan kaki seraya memikul barang di jalan darat. Mungkin jalur-jalur tersebut tetap dimanfaatkan setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Banten Girang ke pesisir utara di Teluk Banten, yang mungkin masih dimanfaatkan penduduk hingga

kini. Mungkin suplai barang lokal juga diperoleh dari pelabuhan kecil yang terletak di sekitar pelabuhan Banten. Mereka menggunakan perahu seperti yang terlihat hingga kini di pelabuhan Karangantu, Banten. Suplai barang lokal dari pedalaman dan pantai inilah yang antara lain menjadikan pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dan konsumen, seperti yang digambarkan oleh orang Eropa tentang keramaian pasar Karangantu.

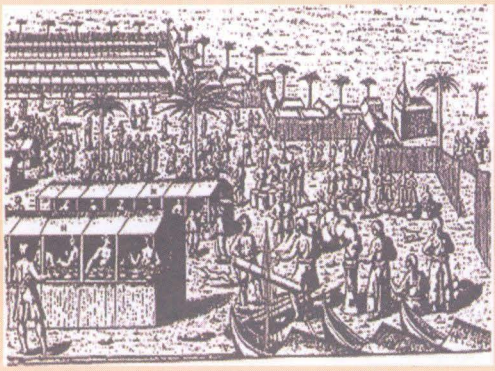

Keramaian Pasar Karangantu tahun 1590-an menurut gambaran orang Eropa. terinterpretasi bahwa Pasar ini terletak di sisi utara tembok keliling kota Banten yang berbentuk zigzag

Pemindahan pusat pemerintahan dari pedalaman ke pesisir, mungkin disebabkan oleh faktor keamanan, sosial, politik dan ekonomi. Banten sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan internasional, tidak dapat dipisahkan dari pasar sebagai tempat interaksi para pedagang dan konsumen, pelabuhan, dan galangan kapal. Semua ini menghendaki pengelolaan kawasan beserta penduduknya dengan kemampuan tinggi.

Berdasarkan interpretasi foto udara, kota Banten dikitari oleh tembok keliling yang memisahkan daerah pusat pemerintahan dengan daerah luar. Tembok kota Banten ini—yang tidak ditemukan di Banten Girang—dimaksudkan untuk melindungi pemerintahan dan penduduk kota dari serangan musuh. Tembok kota yang melintang di sepanjang pantai Banten berbentuk zigzag (yang menjadikan kekuatannya jauh lebih kuat) sebagaimana terlihat pada peta kuna tahun 1624 dan 1659. Di sisi selatan, berbatasan dengan areal persawahan; di sisi timur dan barat sejajar dengan sungai. Keletakan tembok kota di tepi sungai tersebut menjadikan kekuatan pertahanan kota berlapis. Pemukiman kota yang dikelilingi tembok memungkinkan penduduk menikmati fasilitas kota dengan baik dan aman.

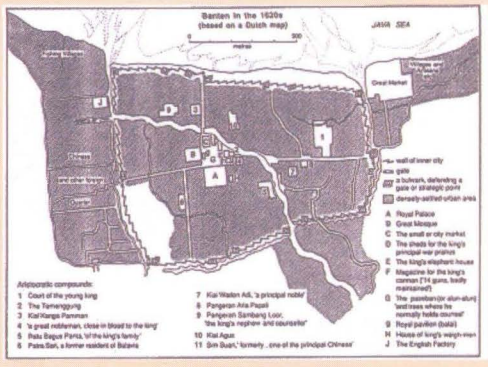

Peta Banten tahun 1624
Tembok keliling kota yang berbentuk zig zag tergambarkan tegas pada peta ini.
Jalur yang sama dengan bentuk yang sama juga terinterpretasi secara jelas dari foto udara.

Keraton, Masjid Agung, Masjid Pecinan, dan alun-alun dapat dilihat pada foto udara. Tampak pula bangunan Pangindelan yang menghubungkan keraton dengan danau Tasikardi, dan kanal yang merupakan parit kota Banten. Kesemua itu dapat dilacak di lapangan, dan dengan mudah dapat dikaitkan hubungannya satu dengan yang lain dalam satu kesatuan wilayah. Lahan perkotaan dikelola atas dasar fungsi masing-masing bagian kota dengan mempertimbangkan fungsi sekitarnya.

Adanya tembok keliling kota Banten membuktikan bahwa ada perbedaan fungsi lahan. Dalam kota merupakan daerah pusat pemukiman, sedangkan di luar tembok kota merupakan daerah penyangga kehidupan perkotaan, terutama berkaitan dengan sumber makanan maupun sumber komoditas. Dapat diinterpretasikan bahwa wilayah Banten yang merupakan daerah pedalaman dikelola dengan baik oleh pusat pemerintahan yang terletak di pantai. Pusat pemerintahan merupakan pintu ke luar bagi komoditas pedalaman, dan juga menjadi pintu masuk bagi komoditas non-lokal ke pedalaman. Jalur sungai, dan jalan tanah merupakan salah satu sarana penghubung antara pusat dengan daerah penyangganya.

Keberadaan jalur-jalur air yang mungkin digunakan sebagai parit di dalam kota Banten, dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Jalur air yang mengelilingi keraton Surosowan mungkin berfungsi sama dengan jalur air yang mengelilingi benteng Speelwijk sebagai sarana pertahanan. Jalur air tersebut pernah dipakai sebagai alat politik penguasa Banten untuk menekan pedagang Belanda yang tinggal di Benteng Speelwijk. Politik semacam ini juga pernah dilakukan oleh tentara Mataram ketika menyerang Batavia, yang mengakibatkan banyak orang Belanda meninggal karena kolera.

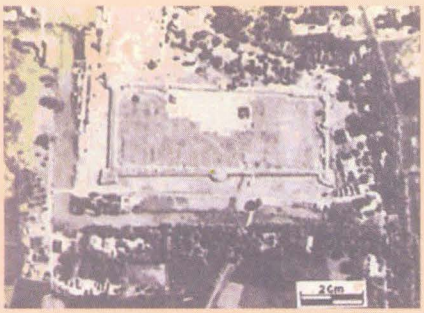

Jalur air di sekitar benteng Surosowan dari Foto Udara

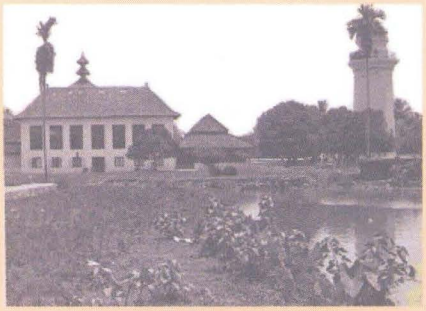

Kenampakan sisa jalur air di sekitar Mesjid Agung Banten pada tahun 1985

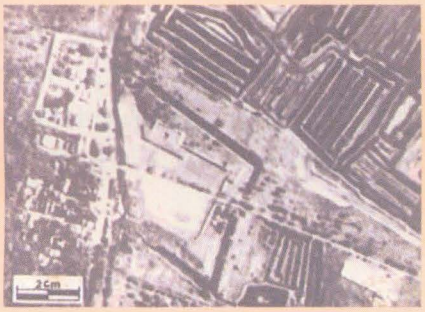

Jalur air keliling Speelwijk dan sisa tembok keliling kota sisi utara kota Banten terinterpretasi dari foto udara

Salah satu sudut bastion Speelwijk pada tahun 1985

Kemungkinan para pengelola kota Banten tetap memanfaatkan jalur sungai yang ada tanpa mengubah jalur sungai seperti terlihat pada peta 1624 dan 1900. Bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya antara lain masjid Agung, alun-alun, serta pemukiman penduduk, diletakkan dan disesuaikan dengan kondisi jalur air tersebut. Padahal berdasarkan pengamatan pada sungai dan anak sungai Cibanten dan Ciujung, dapat ditengarai bahwa teknologi pemindahan alur sungai telah mampu dilakukan. Demikian pula pengelolaan air minum dengan menggunakan sistem filter seperti ditunjukkan tiga bangunan pangindelan.

Pengaturan pemukiman penduduk asing dan lokal sangat diperhatikan oleh penguasa Banten. Adanya tembok keliling kota serta jalur air memungkinkan penguasa setempat memisahkan antara penduduk lokal dengan non-lokal. Berdasarkan data sejarah dan toponim setempat, dapat ditengarai bahwa lokasi pemukiman Cina, Inggris, Denmark dan Belanda berada di luar tembok kota sisi barat (walaupun pada masa kemudian pedagang Belanda membangun Speelwijk di sudut barat laut kota). Sementara penduduk nusantara dari Mataram dan Bugis-Makasar tinggal di sisi timur tembok kota. Keberadaan orang-orang non-Banten

di kota Banten terkait dengan fungsi Banten sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan rempah di Asia Tenggara bersama-sama dengan Gresik.

Keberadaan Banten sebagai pelabuhan juga terinterpretasi dari foto udara. Ada tiga pelabuhan di sepanjang pantai Banten, yaitu di muara sungai Cibanten (sisi barat), di sisi timur, dan di tengah. Pelabuhan sisi timur, yang hingga kini masih dipakai, berasosiasi dengan pasar Karangantu, sedangkan pelabuhan sisi barat berasosiasi dengan benteng Speelwijk serta pemukiman asing yang ada di sisi barat kota Banten. Sementara pelabuhan di sisi tengah memang sudah tidak difungsikan lagi, tetapi terinterpretasi seperti bentuk ikan pari. Pelabuhan berbentuk seperti 'ikan pari' tersebut dapat teramati pada peta tahun 1596. Akan tetapi pada peta-peta yang lain, pelabuhan ini tidak terlihat lagi. Kalau disejajarkan dengan peta tahun 1900, bentuk 'ikan pari' tersebut diperkirakan terletak di daerah rawa yang digambarkan pada peta itu berbentuk kotak kosong. Berdasarkan pengamatan ini, maka diduga pada awal abadXVII pelabuhan 'ikan pari' sudah tidak difungsikan lagi.

Dari hasil interpretasi tentang adanya pelabuhan di Banten, dapat diketahui pasang-surut pelabuhan di Banten pada masa lalu. Pasang surut pelabuhan di Banten dikaitkan dengan pendangkalan pelabuhan, seperti terlihat jelas adanya penambahan pantai yang tampak pada peta 1900. Daerah penambahan pantai tersebut sejak tahun 1900-an digunakan sebagai empang. Keberadaan pelabuhan Cibanten dan Karangantu didukung oleh 'rumah penjaga' yang terletak di muara seperti yang terinterpretasi pada foto udara. Hanya saja, pengujian arkeologis atas interpretasi ini tidak dapat dilakukan pada saat pengamatan berlangsung (tahun 1984-1985), sehingga hasil interpretasinya hanya sampai pada taraf dugaan. Dapat diduga dari pemukiman Pecinan (dan Kelenteng) serta benteng Speelwijk, bahwa pelabuhan kerajaan Banten awalnya ada di sisi barat sungai Cibanten. Pada saat itu, diduga ada pelabuhan lainnya, yaitu pelabuhan 'Ikan Pari'. Akan tetapi, karena adanya pendangkalan, pelabuhan 'Ikan Pari' dan pelabuhan di muara Cibanten tidak berfungsi dan digantikan oleh pelabuhan Karangantu. Dari data di atas, dapat diperoleh gambaran perubahan pemukiman yaitu pusat aktivitas menjadi surut, seperti di Pecinan dan Speelwijk, dari kampung menjadi pusat kegiatan, seperti di Karangantu, atau pun dari pelabuhan menjadi empang seperti 'Ikan Pari'.

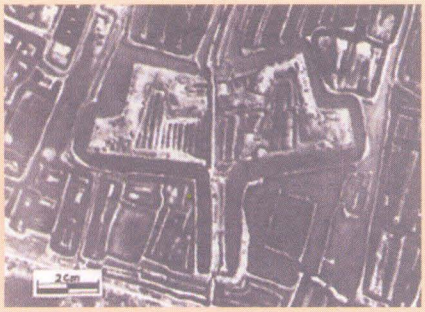

Sebelah kiri—Bentuk 'Ikan Pari' yang diduga merupakan pelabuhan hingga awal abad 17, sedangkan sisi kanan adalah struktur bata yang ditemukan di situs 'Ikan Pari' pada tahun 1984. Struktur ini kemungkinan merupakan bangunan yang ada di tepi pantai seperti yang terlihat pada peta tahun 1596.

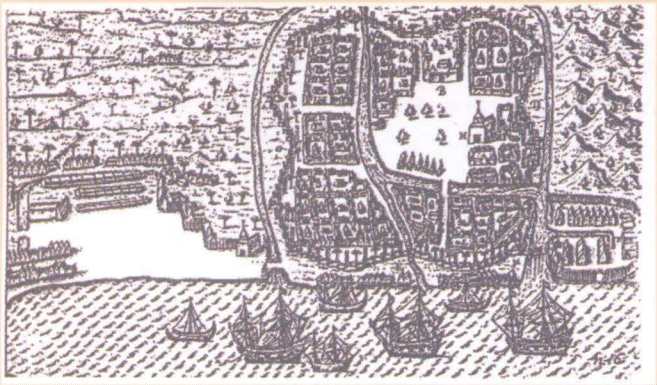

Peta Banten tahun 1596. Terinterpretasi tiga muara sungai yang dipakai sebagai pelabuhan Banten.

Selain itu, Banten mempunyai galangan kapal yang dikenal hingga akhir abad 17 (Reid 2002). Berdasarkan interpretasi foto udara, diduga galangan kapal tersebut ada di sisi barat muara Cibanten, dan di sebelah timur muara sungai Ciujung—ditimur Karangantu. Saat ini pengamatan lapangan tahun 1985, bekas galangan kapal abad 17 tersebut telah berubah fungsi dan digunakan sebagai empang ikan, seperti juga pada situs pelabuhan 'Ikan Pari'.

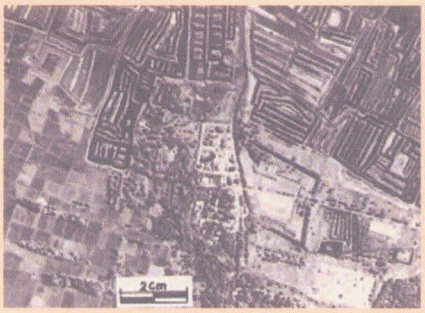

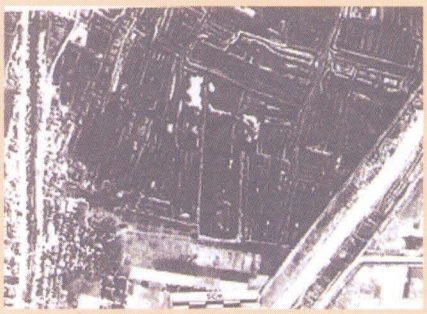

Situs yang diduga sebagai Galangan Kapal. Gambar kiri-situs yang diduga sebagai galangan kapal, terletak di sebelah barat Klenteng/Speelwijk, sedangkan gambar kanan—terletak diantara muara sungai Ciujung (Karangantu) dan Ciujung baru. Pada tahun 1985 bekas galangan kapal digunakan sebagai empang ikan.

Berdasarkan sarana perkotaan yang ada di kota Banten, dapat disimpulkan bahwa kota Banten lama merupakan kota pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan kota pelabuhan dan pasar internasional. Fasilitas sebagai pasar sangat memungkinkan karena suplai barang tidak saja tergantung dari luar Banten, akan tetapi juga dapat secara rutin mendapat suplai dari daerah pedalaman yang merupakan penghasil lada. Adanya suplai barang yang terjaga, menjadikan banyaknya pedagang yang singgah dan melakukan transaksi di pasar Banten. Hanya saja, karena pedagang-pelaut banyak tergantung pada angin *monsoon*, maka keberadaan pemukiman dan galangan kapal menjadi penting bagi pedagang-pelaut tersebut. Ketersediaan fasilitas bagi pedagang-pelaut serta adanya inovasi teknologi yang mendukung, menjadikan kota Banten menjadi kota yang ramai. Hanya saja, persaingan perdagangan dan konflik internal menjadikan surutnya kejayaan kota Banten. Surutnya kebesaran Banten bertambah cepat dengan semakin rusaknya kawasan Banten. Perubahan fungsi lahan yang dahulu merupakan bagian dari permukiman Banten kuna terjadi semakin cepat, tanpa mengingat kita telah merusak kejayaan Banten. Untuk itu, penanganan kawasan Banten secara terpadu perlu dilakukan secepatnya.

Hasil interpretasi foto udara kota Banten 20 tahun yang lalu di atas, jelas sudah ketinggalan jaman. Akan tetapi data arkeologi dapat ditambah dengan data terbaru dan data lainnya—misalnya hidrologi dan geologi— memungkinkan data tersebut dapat dipakai sebagai sistem informasi terpadu. *Database* tersebut dapat digunakan untuk memadukan segala keinginan, harapan, atau apapun yang berkaitan dengan pengelolaan Banten. Yang jelas, usaha pemintakatan daerah Banten dapat dilakukan berdasarkan sistem informasi terpadu tersebut sehingga dapat dipakai sebagai acuan Perencanaan Pengelolaan Banten secara berkelanjutan tanpa ada tumpang tindih kerja, ketaktersentuhkan, dan dengan menghindari konflik yang mungkin muncul. Pelaksanaan dan Evaluasi pengelolaan pun dapat dilakukan secara lebih mudah dengan adanya sistem informasi terpadu yang diperbarui secara rutin. Sifat data yang terbuka—dapat diakses oleh berbagai departemen yang memerlukan—diharapkan dapat dilakukan untuk menghindari penghilangan budaya tinggalan Banten secara beruntun. Untuk itu, data foto udara daerah Banten yang pernah digunakan 20 tahun lalu, masih dapat dimanfaatkan bagi pengelolaan Banten masa kini dan yang akan datang.

Widya Nayati, Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM

Mesjid Agung dilakukan oleh Maulana Yusuf, dan dilengkapi dengan bangunan menara, yang menurut cerita rakyat dibangun atas bantuan Cek Ban Cut (versi lain menyebutkan Cek Ban Cun), seorang arsitek Islam asal Mongolia (Ismail, 1983). Selain itu sultan juga membuka daerah persawahan baru, hingga daerah Serang sekarang. Pemenuhan kebutuhan air dilakukan dengan membuat terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan (Djajadiningrat, 1983: 38,59). Kebutuhan air untuk persawahan yang ada di daerah pinggiran kota, disuplai oleh danau buatan yang dinamakan Tasikardi. Danau ini juga difungsikan sebagai pemasok air bersih bagi masyarakat kota melalui pipa-pipa saluran yang terbuat dari terakota. Setelah disaring di Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas, air tersebut dialirkan ke keraton dan ke tempat-tempat lain di dalam kota. Di tengah danau buatan ini terdapat pulau kecil yang digunakan untuk tempat rekreasi keluarga kesultanan (Michrob, 1981: 56-58).

Dalam perkembangannya sebagai kesultanan dan pusat perdagangan, maka tidak mengherankan jika Banten merupakan salah satu tempat yang banyak memiliki tinggalan purbakala.

Keraton Surosowan

Keraton merupakan kumpulan bangunan tempat tinggal raja dan keluarganya. Keraton pada umumnya juga dijadikan pusat kerajaan dan merupakan pusat dari segala kegiatan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Para pejabat tinggi kerajaan, bangsawan dan keluarga raja biasanya juga tinggal di sekitar istana (Chaerosti, 1990; 21). Selain itu, sesuai dengan pandangan kosmologis dan religio-magis yang bersumber pada tradisi bangsa Indonesia, keraton merupakan pusat kekuatan gaib yang berpengaruh pada seluruh kehidupan masyarakat.

Keraton yang disebut dengan nama Surosowan diperkirakan berdiri pada abad ke-17. Keraton ini bukanlah tempat tinggal sultan yang pertama didirikan di Banten. Tempat tinggal sultan Banten yang pertama, diduga didirikan di dekat Karangantu. Keraton Surusowan dibangun antara tahun 1552 sampai dengan 1570 dalam beberapa tahap dan sedikitnya melalui empat fase. Menurut keterangan sumber sejarah, disebutkan bahwa dinding Surosowan tingginya sekitar 2 m dan lebar 5 m. Panjang pada sisi timur dan barat adalah sekitar 300 m, sedangkan pada bagian utara dan selatan adalah 100 m. Luas keseluruhan yang dibentengi adalah sekitar 3 ha. Pada tiap sudut benteng terdapat bastion yang berbentuk intan, dan di tengah dinding utara dan selatan berbentuk setengah lingkaran.

Pada mulanya Benteng Surosowan memiliki tiga pintu gerbang, yaitu pintu utara, timur, dan selatan. Gerbang timur dan utara dibuat dalam bentuk lengkung, dimaksudkan untuk mencegah tembakan langsung bila pintu gerbang dibuka. Kedua

Tinggalan struktur bangunan Keraton Surosuwan

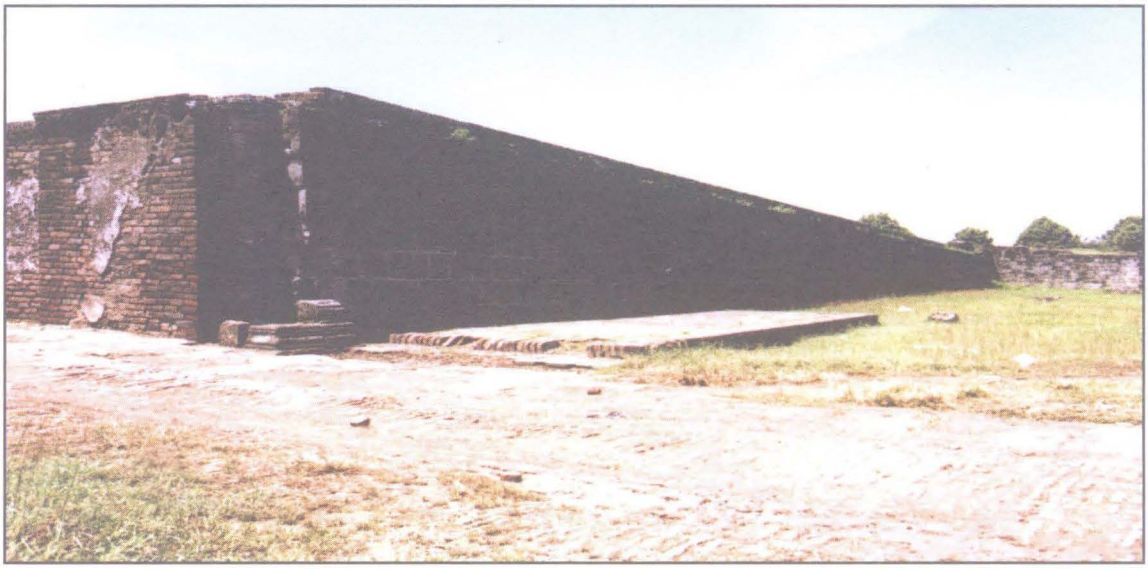

Dinding benteng Keraton Surosowan

gerbang dibuat dengan atap setengah silinder. Di luar benteng dibuat kanal yang menyatu dengan Sungai Cibanten, sehingga mengelilingi Keraton Surosowan.

Berdasarkan penelitian arkeologis, diduga terdapat beberapa tahap pada pembangunan Keraton Surosowan. Pada fase pembangun awal, dinding yang mengelilingi istana lebarnya antara 100 m sampai 125 m. Dinding tersebut dibuat tanpa bastion dan dibangun dari susunan bata berukuran besar yang dicampur dengan adonan tanah liat (lempung). Fase pembangunan pertama mungkin terjadi pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin (1552 -1570). Pada masa pembangunan fase kedua, didirikan dinding bagian dalam dan bastion. Dinding bagian dalam berfungsi sebagai penahan tembakan. Jadi, antara fase pertama dan kedua telah terjadi perubahan fungsi dinding, yaitu dari yang berfungsi sebagai tembok keliling kemudian menjadi tembok pertahanan dengan unsur-unsur Eropa (Nurhadi, 1982). Perubahan ini mungkin terjadi pada tahun 1680, dengan bantuan arsitek Hendrik Lucaszoon Cardeel (Ambary dkk, 1988: 35; Michrob,

Pintu gerbang timur benteng Surosuwan

Tinggalan struktur bangunan Keraton Surosuwan

1993:311). Sesudah masa ini, Surosowan disebut sebagai *Fort Diamant* (*fort*=benteng, *diamant*=intan) oleh pihak Belanda. Pembangunan fase ketiga adalah tahap pendirian kamar-kamar di sepanjang dinding utara, penambahan lantai untuk mencapai dinding penahan tembakan (*parapet*). Pada pembangunan fase keempat, dilakukan perubahan pada gerbang utara dan mungkin juga pada gerbang timur. Pada lapisan luar dinding keraton, susunan bata dilapis secara merata dengan menggunakan batu karang. Pada fase pembangunan yang terakhir, terjadi penambahan banyak kamar di bagian dalam dan penyempurnaan isian dinding.

Keraton Surosowan mengalami beberapa kali penghancuran. Kehancuran yang pertama kali terjadi pada tahun 1680. Kehancuran kedua, dan ini yang terparah, adalah pada tahun 1813, ketika Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Daendels memerintahkan penghancuran keraton.

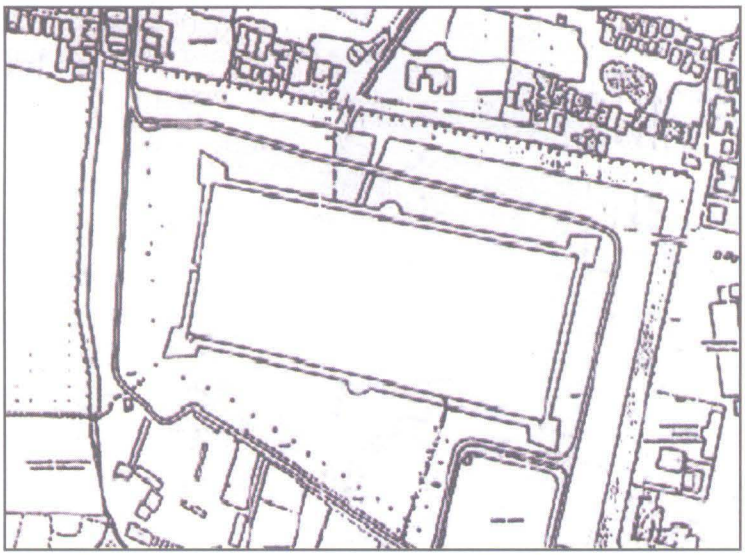

Denah Surosuwan yang berbentuk seperti intan (Subdit Pemugaran, 1996)

Setelah itu, keraton ini kemudian ditinggalkan penghuninya (Michrob, 1993: 312).

Kolam Pancuran Mas di Keraton Surosuwan

Saat ini, Keraton Surosowan dengan perbentengannya hanya menyisakan reruntuhannya saja. Bangunan yang masih nampak adalah tembok benteng yang mengelilingi sisa-sisa bangunan. Sisa bangunan tersebut berupa fondasi, dan tembok dinding yang sudah hancur, sisa bangunan petirtaan dan bekas kolam taman dengan bangunan Bale Kambang (Rara Denok). Keraton Surosowan berbentuk empat persegi panjang dengan panjang 305 m, lebar 130,5 m, dan tinggi 4, 5 m.

Dinding Benteng Surosowan tebalnya 7, 25 m, terdiri dari dua lapis pasangan bata, satu lapis tanah isian dan dua lapis pasangan batu karang. Lapisan pertama (dari dalam), dengan susunan bata menggunakan perekat yang merupakan campuran dari semen, pasir, kapur dan batu karang. Ketebalan struktur lebih kurang 67 cm. Lapisan kedua, adalah tanah isian dengan tebal struktur mencapai 4,73 m. Lapisan ketiga, berupa susunan bata yang menggunakan perekat dari tanah liat dengan ketebalan struktur 1,3 m. Lapisan keempat, adalah susunan batu karang berbentuk segi empat yang rata-rata berukuran 38 x 38 x 30 cm. Lapisan ini diperkuat dengan perekat yang terbuat dari campuran pasir, semen merah, kapur, dan satu lapis batu karang dengan ketebalan struktur 30 cm.

Pada Benteng Surosowan terdapat dua pintu besar sebagai gerbang masuk. Satu pintu terdapat pada dinding utara, dan satu lagi pada dinding timur. Benteng ini memiliki empat bastion. Tiap bastion memiliki ruangan di dalam dindingnya. Ada dua tangga naik untuk menuju bagian atas benteng yaitu tangga di dinding utara bagian dalam sebelah barat pintu, dan satu lagi pada bastion timur laut.

Di luar dinding benteng keraton sebelah utara, di samping sebelah kanan masih dapat ditemukan sisa fondasi dan reruntuhan dari bangunan *srimanganti*, yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat bagi para tamu bertemu sultan. Keraton dan unsur bentengnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena konsep pembangunan benteng diperuntukkan bagi pertahanan keraton. Sisa-sisa dari benteng inilah yang dapat memberikan gambaran dari satu bagian kehidupan masyarakat Banten saat itu.

Keraton Kaibon

Kaibon berasal dari kata ka-ibu-an, yaitu tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda Sultan. Kompleks ini terletak di Kampung Kroya, sekitar 500 meter sebelah tenggara Keraton Sorosowan dan berada di sisi jalur Jalan Serang-Banten Lama. Di sisi selatan kompleks bangunan ini mengalir Sungai Cibanten. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiuddin, seorang sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 – 1815. Sultan wafat dan kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 bulan. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya yaitu Ratu Aisyah. Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda, yaitu Aria Adi Santika, sebagai ganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816.

Bentuk arsitektur Keraton Kaibon lebih menonjolkan gaya *archais* dibandingkan dengan Keraton Surosowan. Hal ini terlihat dari bentuk pintu-pintu gerbang dan tembok keraton. Jika diurut dari depan, keraton ini memiliki empat pintu gerbang yang berbentuk *bentar*.

Dilihat dari bentuk pintu gerbangnya, Keraton Kaibon menunjukkan ciri keraton yang bergaya tradisional. Hal ini diperlihatkan oleh susunan pintu gerbang dan halamannya. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk *bentar*, yang menunjukkan bahwa halaman tersebut bersifat profan. Pada halaman kedua, pintu gerbang berbentuk *paduraksa*, yang berasosiasi dengan sifat sakral. Satu hal yang menunjukkan perbedaan dengan bangunan keraton di Jawa adalah letak *sitihinggil* yang umum berada di halaman pertama sebelah timur. Di Keraton Kaibon terdapat bangunan mesjid. Dengan demikian, bangunan mesjid pada Keraton Kaibon diletakkan pada bagian utama keraton. Pada tahun 1832, bangunan Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh Belanda, dan sekarang hanya tersisa bagian fondasinya, runtuhan dinding dan sisi kiri dari bagian pintu masuknya.

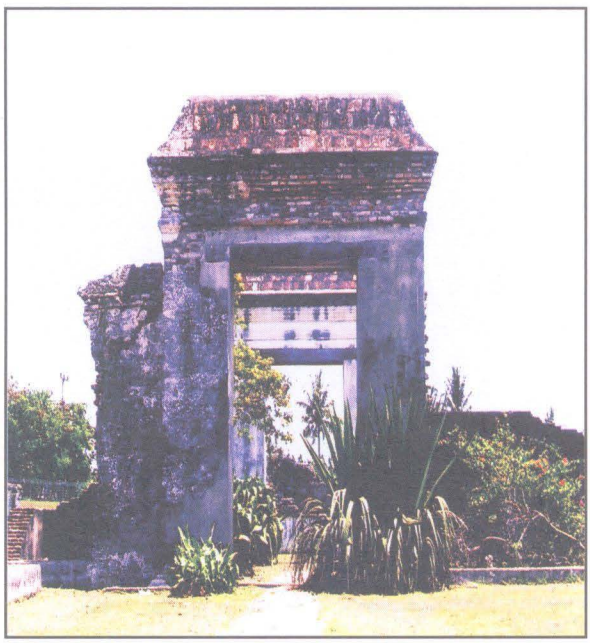

Pintu gerbang paduraksa

Pintu gerbang mesjid Keraton Kaibon

Tinggalan struktur bangunan Keraton Kaibon

KERATON TIRTAYASA

Situs Tirtayasa yang terletak di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Situs ini diperkirakan merupakan bekas keraton sebagai tempat tinggal Sultan Ageng Tirtayasa pada akhir abad ke-17. Dugaan ini bukan hanya didasarkan pada catatan sejarah, tetapi juga didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang pada tahun 1993.

Menurut sejarahnya, pada saat mulai berkurangnya peran Sultan Abul Fathi Abul Fattah dalam menjalankan tugas, ia memilih tinggal di Keraton Tirtayasa. Sejak itu pula ia dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masanya, letak Keraton Tirtayasa cukup strategis, karena terletak di tepi pantai dan jalan kuna. Selain itu dari keraton ini Sultan Ageng Tirtayasa dapat mengawasi gerak-gerik putranya yang berdiam di Keraton Surosowan. Di sepanjang jalan kuna dibangun kanal yang digunakan sebagai jalur lalu lintas air. Pembuatan kanal ini dimulai dari Sungai Untung Jawa (Cisadane), Tanara sampai ke Pontang.

Salah seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Pangeran Gusti atau dikenal sebagai Sultan Haji, memiliki sifat yang mudah dipengaruhi oleh Belanda, dan bahkan tidak segan untuk memihak pada Kompeni bila terjadi satu konflik. Sifat Sultan Haji inilah yang pada akhirnya menyulut konflik antara ayah dan anak. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan penyerbuan mendadak ke Keraton Surosowan sehingga mengakibatkan jatuhnya Surosuwan. Namun kemudian dapat direbut kembali oleh

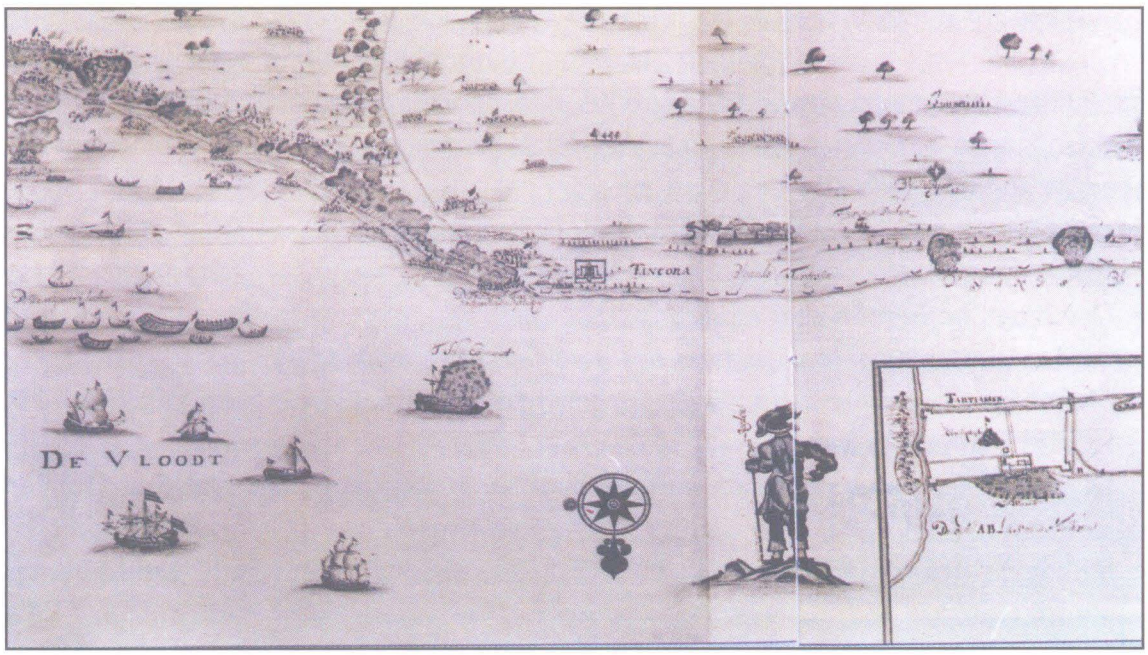

Lukisan yang menggambarkan penyerangan Kapal Belanda dibawah pimpinan Kapten Tack ke Tirtayasa pada tahun 1682, yang digambarkan terjadi dekat dengan daerah Tangkurak (Tancora).

pihak Sultan Haji yang mendapat bantuan pihak Kompeni Belanda. Pada akhir konflik dengan perang terbuka itu, pada tanggal 28-29 Desember 1682 daerah Tirtayasa dapat dikuasai oleh Kompeni, namun Kompeni Belanda tidak mendapatkan pampasan perang yang berarti karena Sultan telah memerintahkan agar Keraton Tirtayasa dibumihanguskan. Pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa ditahan oleh Kompeni Belanda dan dibawa ke Batavia. Pada tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia, dan sejak saat itu pengaruh politik Kesultanan Banten mulai surut, dan secara politis Kesultanan Banten dan kekuasaan pemerintahannya beralih dari pihak keraton ke tangan Belanda.

Berdasarkan data arkeologis yang ada, diperkirakan bahwa situs Tirtayasa dengan bangunan-bangunannya didirikan pada lahan kosong yang memang sama sekali belum pernah digunakan sebagai daerah pemukiman. Pembangunan dan perkembangan situs Tirtayasa itu kemungkinan berlangsung pada akhir abad ke-17. Kesimpulan itu didasarkan pada temuan-temuan keramik asing yang banyak berasal dari masa akhir abad ke-17 yang diduga semasa dengan pembangunan situs Tirtayasa. Perkiraan masa berlangsungnya tempat ini dihuni dapat dilihat dari klasifikasi secara kronologis terhadap temuan keramik yang ditemukan di situs Tirtayasa. Diperkirakan daerah ini berkembang selama kurun waktu 1660 sampai dengan 1680-an, dan setelah itu lahan tersebut tidak dipergunakan lagi (Sakai *et al.*, 2000: 34).

Kompleks Mesjid Agung Banten

Mesjid menjadi sebuah hasil karya yang sangat monumental sepanjang masa (*living monument*), berbeda dengan beberapa komponen kota lain yang telah hancur karena perkembangan situasi sosial politik dan perekonomian. Salah satu kota pusat perkembangan peradaban Islam di Jawa adalah Banten yang mulai berkembang pada abad ke-16 yang memiliki tinggalan mesjid.

Ciri-ciri mesjid tradisional di Indonesia menurut G. F Pijper (1947: 275) adalah :

a. Denahnya berbentuk segi empat.
b. Berdiri di atas fondasi pejal (*massive*) yang letaknya agak tinggi.
c. Memiliki atap tumpang, terdiri dari dua sampai lima tingkat yang semakin mengecil ke atas.
d. Di sisi sebelah barat atau barat laut terdapat bangunan yang menonjol yang disebut *mihrab*.
e. Di bagian depan dan kadang-kadang di kedua sisinya ada serambi yang terbuka atau tertutup.
f. Halaman sekitar mesjid dikelilingi oleh tembok dengan satu atau dua pintu gerbang.

Kemudian Pijper (1985: 15, 16, 19, 23, 46) menambahkan beberapa ciri-ciri mesjid lainnya, yaitu:

a. Dibangun di sebelah barat alun-alun.
b. Arah *mihrab* tidak tepat ke kiblat.
c. Dibangun dari bahan yang mudah rusak.
d. Terdapat parit air yang mengelilinginya atau hanya terdapat di bagian depan mesjid saja.
e. Pada awalnya dibangun tanpa serambi.
f. Dibangun di atas tiang (bangunan panggung).

Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa terdapat indikasi tentang adanya mesjid di kawasan Banten Lama sebelum kawasan ini menjadi pusat ibukota Kesultanan Banten (Djajadiningrat, 1983; Michrob, 1993; Mundardjito dkk, 1978; Ambary, t.t). Dasar penafsiran ini adalah Peta Banten tahun 1596 yang memuat gambar satu mesjid di daerah pelabuhan Karangantu. Kawasan pelabuhan Karangantu memiliki mesjid berdasarkan catatan Tome Pires yang mengunjungi Banten pada tahun 1513. Selain mesjid di Karangantu, diketahui pula adanya mesjid di daerah pemukiman Cina (Pecinan) yang lebih dikenal dengan nama Mesjid Pecinan Tinggi, dan satu lagi adalah mesjid yang terletak di Kasunyatan yang juga diduga merupakan mesjid-mesjid awal yang berdiri di Banten.

Dinamakan Kompleks Mesjid Agung Banten karena mesjid ini berasosiasi dengan beberapa bangunan lain seperti menara, makam, tiyamah, kolam, *istiwa*, dan bangunan bekas tugu. Pada dasarnya, Mesjid Agung Banten memiliki ciri seperti umumnya bangunan mesjid tradisional lainnya yang berada di Jawa. Bagian-bagian yang merupakan keistimewaan dari mesjid ini adalah bagian *pawestren* yang merupakan bangunan khusus untuk wanita. Pawestren Mesjid Agung Banten diperkirakan dibuat dalam masa pemerintahan Maulana Muhammad (1580-1586). Bagian lain yang istimewa adalah bagian serambi yang terdapat di keempat sisi dari ruang utama.

Serambi selatan dijadikan tempat pemakaman yang memuat 15 makam dengan letak yang tidak beraturan. Serambi timur adalah tempat yang terluas, dan dibangun pada masa pemerintahan Maulana Yusuf (1570-1580) (Mundardjito, 1978). Atap serambi timur terpisah dengan bangunan utama. Atap tersebut berbentuk limasan dengan dua tingkat, sedangkan serambi sebelah barat dan utara adalah serambi yang berada di bawah naungan atap bangunan utama.

Fenomena yang menarik dari Mesjid Agung Banten adalah jumlah atap tumpangnya. Peta tahun 1596, 1624, lukisan tahun 1661, dan peta tahun 1726 menggambarkan atap mesjid yang tidak lebih dari tiga tingkat. Data ini juga didukung oleh de Graaf yang mengunjungi Jepara pada tahun 1686. De Graaf mendeskripsikan

bahwa mesjid di Jepara memiliki atap tumpang bertingkat tiga dan menganalogikan atap mesjid tersebut menyerupai atap Mesjid Agung Banten (Pijper, 1985). Kenyataan ini bertentangan dengan laporan yang ditulis oleh Valentijn (1858) yang menyebutkan bahwa atap Mesjid Agung Banten bertingkat lima sesuai dengan yang terlihat hingga saat ini. Permasalahan ini belum mencapai titik terang sehingga perdebatan tentang data-data tersebut masih berlanjut (Graaf dan Pigeaud, 1984). Mesjid-mesjid yang memiliki atap bertingkat lima biasanya merupakan mesjid kerajaan, sebagai contoh selain Mesjid Agung Banten adalah mesjid di Jepara dan mesjid di Ternate. Menurut Pijper, mesjid dengan atap lima tingkat merupakan hak istimewa kerajaan.

Kolam Mesjid Agung Banten yang dahulunya difungsikan sebagai tempat untuk bersuci (*wudhu*) terletak di sebelah timur serambi depan, berbentuk empat persegi panjang dengan kedalaman sekitar 75-100 cm. Kolam dibagi dalam empat petakan yang masing-masing dihubungkan oleh dinding tembok. Di luar kolam terdapat pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar 1,2 m. Pada lukisan Mesjid Agung Banten pertengahan abad ke-19, terlihat bahwa pagar kolam tersebut berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa itu digambarkan pagar tembok keliling kolam diperkirakan mencapai lebih dari 3 m. Kondisi demikian masih ditemukan pada lukisan tahun 1930-an. Air kolam berasal dari kanal yang berada sekitar 30 m di sisi selatan mesjid. Kolam dihubungkan dengan dua buah saluran. Saluran pembuangan dialirkan melalui saluran lain ke arah kanal yang terletak di sebelah utara.

Foto Mesjid Agung Banten

Bangunan lain yang termasuk dalam Kompleks Mesjid Agung Banten adalah menara. Menara ini terletak di halaman sisi timur mesjid atau sekitar 10 meter dari pagar tembok kolam. Menara dibangun dengan konstruksi tembok dengan tinggi puncak 23 m dari permukaan tanah. Bagian dasar menara atau *sub basement* berdenah segi delapan seperti juga bagian tubuhnya. Pintu masuk terdapat di bagian tubuh sisi utara. Pintu menara memiliki penampil dan di bagian atas pintu merupakan bidang lengkung yang di tengahnya terdapat panel segi empat. Pada langit-langit bidang lengkung tersebut terdapat ornamen mirip kepala peluru, namun mempunyai segi delapan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa ornamen yang terdapat pada pintu masuk menara merupakan bentuk hiasan *kala* yang distilir, dianalogikan dengan pintu masuk ke candi-candi Hindu-Buda, sedangkan Crucq (1939) menyebutnya sebagai hiasan teratai. Bagian bangunan yang paling puncak adalah kepala menara yang terdiri dari dua tingkat. Tingkat pertama berbentuk kubah yang bagian atasnya terpenggal, tingkat kedua adalah kubah yang lebih kecil. Di bagian teratas, yaitu di puncak menara terdapat *memolo* atau *mustoko* berwarna merah hati, dibuat dari tanah liat bakar menyerupai bunga yang sedang mekar. Untuk naik hingga ke atas menara, seseorang dapat melalui lorong tangga dengan konstruksi melingkar.

Pada bagian sisi timur halaman Mesjid Agung Banten terdapat *istiwa*, yaitu penunjuk waktu untuk shalat yang menggunakan bantuan sinar matahari. Dalam Bahasa Arab alat ini disebut dengan nama *mizwala*. Bentuknya segi delapan yang makin ke atas makin melebar dengan tinggi 76 cm dari permukaan tanah. Di titik pusat teratasnya

Foto Mesjid Agung Banten saat ini

Tampak atas Kompleks Mesjid Agung Banten

Menara Mesjid Agung Banten

terpancang satu besi dengan tinggi hampir 20 cm. Bayangan dari besi inilah yang digunakan sebagai dasar penunjuk waktu shalat. Di sebelah selatan *istiwa*, terdapat konstruksi tembok yang berbentuk mirip *istiwa*. Konstruksi tersebut berbentuk trapesium. Pada permukaan trapesium tersebut terdapat semacam umpak yang di keempat sudutnya terdapat sekrup. Pada foto lama Mesjid Agung memperlihatkan bahwa di atas permukaan konstruksi ini dahulu berdiri bangunan semacam tugu, sehingga bangunan trapesium tersebut merupakan penggalan konstruksi tugu (Herrystiadi, 1990: 196).

Di sisi selatan Mesjid Agung Banten terdapat bangunan yang disebut Tiyamah. Bangunan ini berlantai dua yang secara arsitektur mendapat anasir Eropa pada konstruksi langit-langit, jendela, dan atap (Ambary, 1982; Tjandrasasmita, 1984; Yudoseputra, 1986). Bangunan ini pada masanya digunakan sebagai tempat pertemuan untuk membahas masalah-masalah keagamaan dan kehidupan sosial. Menurut sejarahnya, Tiyamah ini dibangun oleh Hendrick Lucas Cardeel, seorang Belanda beragama Islam yang kemudian diberi gelar oleh sultan dengan nama Pangeran Wiraguna. Pembangunan tersebut atas perintah Sultan Abdul Kohar atau yang juga dikenal sebagai Sultan Haji (1651-1672).

Mesjid Kasunyatan

Mesjid Kasunyatan terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Lokasi mesjid ini sekitar 1 km di selatan agak ke timur dari kompleks Mesjid Agung Banten. Tidak terdapat data mengenai tahun pembangunan mesjid, namun

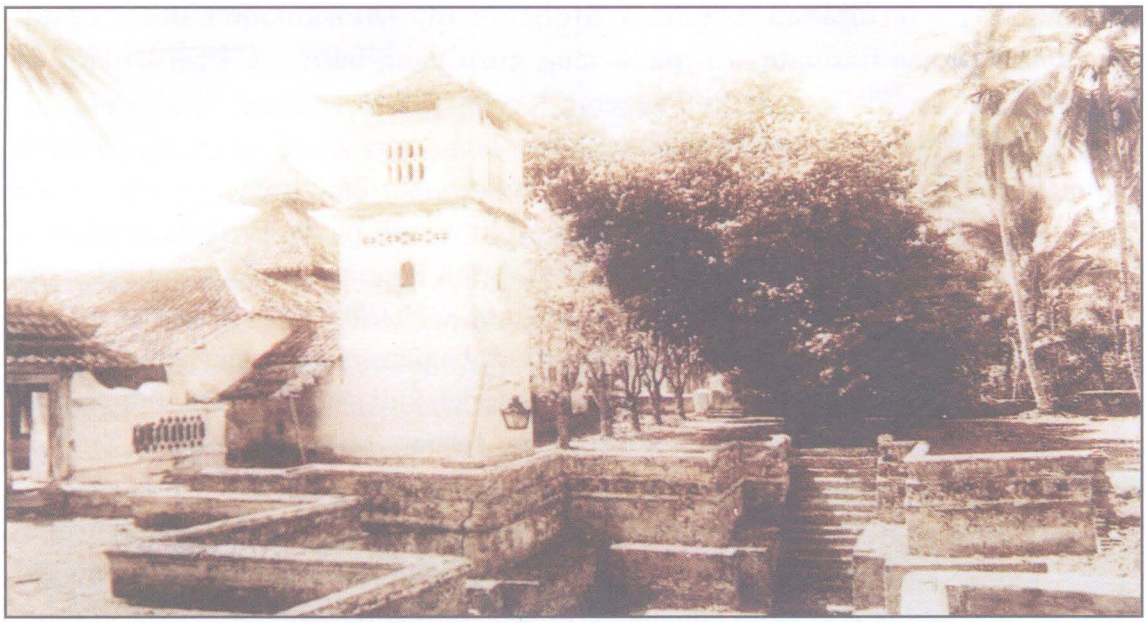

Menara dan Kolam Mesjid Kasunyatan

Mesjid Kasunyatan sekarang

berdasarkan cerita masyarakat mesjid ini didirikan oleh guru spiritual Maulana Muhammad sekitar pertengahan abad XVI.

Pemberian nama Kasunyatan tidak terlepas dari latar belakang sejarah kampung Kasunyatan sendiri yang dahulunya merupakan tempat tinggal para alim ulama. Keberadaan desa dan Mesjid Kasunyatan tidak lepas dengan sejarah Banten, terutama pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Dikisahkan bahwa untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang guru yang bernama Kyai Dukuh, ia memberi gelar kepada sang guru, Pangeran Kasunyatan.

Mesjid Kasunyatan merupakan kompleks bangunan yang mempunyai tembok keliling. Terdapat lima buah pintu masuk, empat buah diantaranya terdapat pada tembok sisi selatan dan satu lagi merupakan pintu masuk utama (berbentuk gapura) terdapat pada sisi timur. Di dalam kompleks Mesjid Kasunyatan terdapat beberapa bangunan, yaitu bangunan mesjid, kolam, makam, menara, dan gapura.

Ruang utama bangunan mesjid letaknya di bagian tengah, sementara serambi terdiri dari empat ruangan yang masing-masing terletak di sisi utara dan timur ruang utama, sedangkan yang dua ruangan lagi di sisi selatan. Mihrab terletak di dinding sisi barat ruang utama yang menjorok ke luar, sedangkan menara terletak pada dinding barat. Di dalam mesjid terdapat mimbar kuna dengan ragam hias berupa ukiran yang sangat indah dan hingga kini masih digunakan. Struktur atap bangunan mesjid bersusun tiga, paling atas lebih banyak berfungsi sebagai hiasan.

Berdasarkan foto mesjid yang dibuat tahun 1926, di depan atau halaman luar mesjid timur laut, ada sebuah kolam yang digunakan untuk *wudhu*, denahnya berbentuk silang yang disebut dengan *pakulahan*. Pada bagian kolam terdapat tangga di setiap sisinya. Bangunan kolam ini ditutupi dengan struktur bangunan yang beratap. Atap dibangun di atas konstruksi kayu dengan tinggi sekitar 1,5 m dengan delapan belas buah tiang bata.

Hal yang menarik dari Mesjid Kasunyatan ini antara lain menara mesjid yang memiliki gaya perpaduan Eropa dan Jawa Kuna. Bangunan menara merupakan bangunan tiga tingkat, bagian atapnya terbuat dari konstruksi kayu yang berbentuk seperti payung yang terbuka dengan ditutupi genteng. Pada bagian atap terdapat hiasan *memolo* (mustaka).

Mesjid Kenari

Mesjid Kenari terletak di Kampung Kenari, sekitar 6 km dari Kota Serang. Menurut cerita, kampung ini pada masa lalu merupakan tempat tinggal para keluarga sultan. Mesjid ini merupakan mesjid peninggalan Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir Kenari (1596-1651) yang merupakan penguasa pertama yang mendapat gelar 'Sultan' dari Mekah. Beliau adalah putera Sultan Muhammad Pangeran Ratu ing Banten.

Hal yang menarik dari Mesjid Kenari ini adalah gapura pintu masuk ke makamnya yang terbuat dari bata yang ditumpuk sedemikian rupa yang diletakkan hanya dengan menggunakan perekat sehingga gapura tersebut tampak sangat kuat dan menarik. Gapura tersebut berbentuk *bentar*.

Mesjid Pacinan Tinggi

Disebut Mesjid Pacinan Tinggi karena dahulunya banyak orang-orang Cina berdagang dan bertempat tinggal di sekitar mesjid. Mesjid ini terletak di Desa Pacinan. Bangunan tersebut kini tinggal puing reruntuhan. Bagian yang tersisa dari mesjid ini adalah bagian *mihrab* dan fondasi bangunan mesjid. Di samping itu, di sisi depan bangunan utama terdapat bangunan menara dengan bentuk persegi empat. Bangunan ini terbuat dari bahan bata dan batu karang untuk bagian fondasinya. Bagian atas dari bangunan menara tersebut telah mengalami kerusakan.

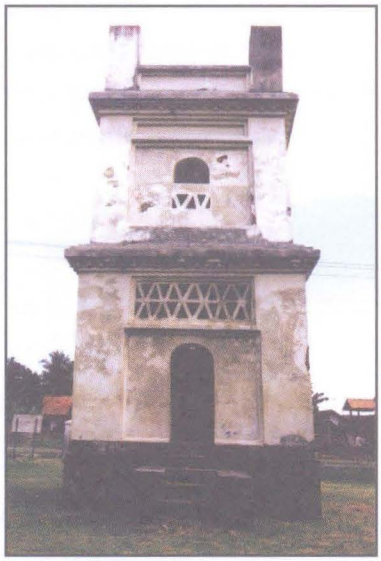

Menara Mesjid Pacinan Tinggi

Mesjid ini merupakan mesjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin.

Mesjid Koja

Saat ini, Mesjid Koja hanya tersisa reruntuhannya. Mesjid ini terletak di sisi selatan jalan yang menghubungkan Karangantu dan Benteng Speelwijk. Pada masa lalunya mesjid ini digunakan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan masyarakat Koja.

Makam Kenari

Banten Lama merupakan satu lokasi bekas Kesultanan Banten pada masa berkembangnya Islam di Indonesia. Salah satu peninggalan dari masa itu adalah beberapa makam raja dan keluarganya serta pejabat pemerintahan Kesultanan Banten. Bentuk peninggalan berupa makam ini tidak terkonsentrasi di satu tempat, tetapi tersebar di beberapa wilayah di sekitar lokasi bekas Kesultanan Banten. Halina Budi Santoso Azis membedakan makam-makam di Banten berdasarkan bentuknya sebagai berikut :

Tipe pertama, adalah tipe yang memiliki bentuk *kijing* berundak dua, bagian kaki dari nisan terdiri dari pelipit halus dan bingkai lengkung dua tingkat. Sementara pada bagian bawahnya terdapat panil di empat sisi yang memuat inskripsi huruf Arab. Nisannya beratap lima tingkat dan empat panel yang berisi inskripsi huruf Arab. Tipe ini terdapat pada makam Maulana Hasanuddin.

Tipe kedua, adalah tipe yang tidak memiliki hiasan sama sekali (polos). Penampang bagian badan berbentuk segi empat, namun sudut-sudut bagian atasnya sudah tidak jelas karena bentuk yang semakin cembung membesar ke atas. Bagian puncak bertingkat tiga, dua tingkat berbentuk lengkung sempurna dan bagian teratas kembali berpenampang empat persegi yang makin mengecil. Tipe makam seperti ini terdapat pada makam yang berada di sisi sebelah kanan makam Maulana Hasanuddin.

Tipe ketiga, adalah tipe berbentuk segi lima, bagian kaki, badan dan puncaknya menyatu. Hiasan yang tertinggal hanyalah berupa bentuk, karena keseluruhan permukaan telah tertutup oleh laburan semen dan kapur. Tipe ini terdapat pada makam Pangeran Anglingkusumah yang ada pada bangunan Tiyamah.

Lokasi makam Kenari terletak di Kampung Kenari, sekitar 3 km dari Mesjid Agung Banten di sebelah selatan. Kompleks makam ini merupakan makam Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir Kenari (1596-1651). Di tempat ini terdapat pula makam putranya, yaitu Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sementara di sekitar makam bangunan makam Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir Kenari terdapat makam-makam kerabat dan relasi dari sultan.

Kompleks makam Kenari memiliki gerbang berbentuk *bentar* yang terbuat dari bata. Peziarah kompleks makam Kenari ini tidak hanya kaum muslim, tetapi juga peziarah Tionghoa yang banyak mengunjungi dua makam kuna yang terletak di dalam lingkungan kompleks makam.

Pintu gerbang Makam Kenari

Makam Pangeran Arya Mandalika

Makam ini terletak di seberang Kampung Kroya. Berdasarkan pada latar belakang sejarahnya, Pangeran Mandalika adalah putera Sultan Hasanuddin dari ibu yang bukan permaisuri.

Makam-makam di Mesjid Banten

Makam-makam yang berada di sebelah utara lingkungan Mesjid Agung Banten dapat disebutkan berturut-turut dari kiri ke kanan, sebagai berikut;

a. Makam Sultan Abdul Fathi Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa)
b. Makam Sultan Maulana Muhammad Nasaruddin
c. Makam Pangeran Ratu (istri Sultan Maulana Hasanuddin)
d. Makam Sultan Maulana Hasanuddin
e. Makam Sultan Abdul Abdul Fadhal
f. Makam permaisuri Sultan Abdul Fadhal
g. Makam Sultan Abu Nasir Abdul Kohar yang juga dikenal sebagai Sultan Haji

Pada sisi sebelah barat dari makam-makam yang berada di luar kamar terdapat pula makam Sultan Zainal Abidin. Sementara di sebelah selatan Mesjid Agung Banten terdapat pula makam-makam yang terletak dalam satu ruang, berturut-turut dari kiri ke kanan sebagai berikut :

a. Satu makam dengan nama yang kurang jelas terbaca
b. Makam Pangeran Aria

Makam-makam di utara Mesjid Agung Banten

c. Makam Sultan Maulana Mukhamad
d. Makam Sultan Mukhyi
e. Makam Sultan Abdul Mufakir
f. Makam Sultan Zainul Arifin
g. Makam Sultan Zainul Asikin
h. Makam Sultan Syarifudin
i. Makam Ratu Salamah
j. Makam Ratu Latifah
k. Makam Ratu Mosmudah

Makam-makam di Kasunyatan

Di situs Kasunyatan terdapat mesjid dan makam. Makam-makam yang terdapat di Kasunyatan berada di dalam dan di luar ruang mesjid. Makam-makam yang banyak diziarahi oleh para pengunjung di antaranya adalah:
a. Makam Ratu Asyiah
b. Makam Tubagus Mukhyidin
c. Makam Tubagus Suta
d. Makam Syeh Abdul Syukur Anem
e. Makam Pangeran Aria Luding
f. Makam Tubagus Urip

Makam Pangeran Mas

Makam ini terletak di Kampung Pangkalan Nangka. Pintu gerbang menuju makam tersebut bergaya kolonial, sedangkan di depan pintu gerbang terdapat makam Singajaya. Berdasarkan data sejarah, Pangeran Mas adalah seorang pangeran dari Demak, Aria Pangiri, putra dari Sunan Prawoto atau Pangeran Mu'min. Aria Pangiri tersisih dua kali dari haknya menjadi raja di Demak. Pangeran ini diketahui memiliki niat untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram sehingga Sutawijaya sebagai Raja Mataram hendak membunuhnya. Namun hal itu urung dilakukan karena bujukan istrinya. Aria Pangiri kemudian berjanji tidak akan kembali ke daerah Mataram untuk selamanya. Akhirnya dia menetap di Banten sampai wafat.

Pangeran Mas adalah pembuat "Kreta Singa" yang dipergunakan untuk sultan-sultan di Cirebon (di Keraton Kasepuhan). Pengeran Mas dikenal dalam sejarah Banten berkaitan dengan peristiwa peperangan ke Palembang. Pangeran Mas membujuk Sultan Maulana Muhammad agar menyerang Palembang. Dalam peperangan menyerbu Palembang itulah sultan wafat akibat terkena tembakan meriam. Peristiwa gugurnya Mauḷana Muhammad ini terjadi pada tahun 1596 berdasarkan candrasengkala *prabu lepas tataning prang* (Djajadiningrat, 1983: 168). Penyerbuan itu tidak membawa hasil

apa-apa untuk Banten. Pasukan ditarik mundur, begitu pula Pangeran Mas kembali ke Banten, namun tidak berdiam lama di Banten karena masyarakat Banten tidak menerimanya dengan baik. Hal itu disebabkan masyarakat Banten menganggap bahwa Pangeran Mas adalah penyebab dari wafatnya Maulana Muhammad. Pangeran Mas kemudian pergi ke Jayakarta, tetapi di sana pun ia tidak diterima dengan baik, sehingga akhirnya pada satu malam ia ditemukan terbunuh oleh anaknya sendiri.

Makam Maulana Yusuf (Pekalangan Gede)

Makam ini terletak di sebelah timur jalan raya menuju Banten, tidak jauh dari Kampung Kasunyatan, Kasemen. Kompleks bangunan makam berada di tengah area persawahan yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Kuburan Pekalangan. Sebutan itu melekat padanya sehingga setelah meninggal ia disebut sebagai Panembahan Pekalangan Gede. Ia banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya Banten. Letak makam yang berada di tengah area persawahan mengingatkan kepada jasanya di bidang pertanian. Selain makam Maulana Yusuf, di dalam kompleks pemakaman tersebut juga terdapat makam para anggota keluarga sultan dan pengikutnya. Pada sisi sebelah selatan kompleks makam Maulana Yusuf terletak pemakaman lain yang disebut dengan nama Pekalangan Cilik yang lokasinya masih berada di dalam satu desa.

Makam Pangeran Astapati

Makam ini terletak di tepi Jalan Raya Banten, tepatnya di Kampung Odel. Hal yang menarik dari makam ini adalah pintu masuknya yang berbentuk bangunan bergaya Eropa dengan sedikit perpaduan dengan motif Jawa Kuna.

Menurut sejarahnya, Pangeran Astapati adalah seorang panglima perang Banten semasa pemerintahan Sultan Tirtayasa. Ia adalah seorang keturunan para pemimpin suku Baduy di Kanekes, Banten Selatan, yang kemudian menikah dengan Ratu Dahlia, salah seorang puteri sultan. Pangeran Astapati atau dikenal juga sebagai Pangeran Wirasuta ditugaskan untuk menggempur tentara kompeni di Teluk Banten.

Makam Kuno Katengahan

Makam ini terletak di Kampung Katengahan, Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Makam ini terbuat dari bahan batu, bata, kapur dan pasir dengan ukuran panjang 11 m dan lebar 9 m. Menurut cerita rakyat, yang disebut sebagai makam Katengahan adalah makam Arya Tengah Pangeran Jayawikarsa, putra Ratu Pambayun dengan Ki Gede Bagus Angke atau cucu Maulana Hasanuddin.

Pada masa hidupnya, Ki Arya Tengah memiliki keris emas yang diberi nama "Ki Brogol", dan tumbak yang disebut "Ki Getem" yang dipakai utuk menaklukkan

"Ula Lanang" (Ular Jantan) besar di hutan Wanasaba. Beliau pula yang membuka hutan Wanasaba. Tugas utama beliau pada masa hidupnya adalah mengumpulkan orang-orang di waktu *saba besar* (kumpulan negeri). Untuk meringankan tugasnya itu beliau selalu memukul gong besar yang bunyinya terdengar ke pelosok daerah Banten, sehingga orang-orang berkumpul di Paseban.

Jembatan Rante

Jembatan Rante didirikan di atas kanal kota Banten Lama yang terletak 300 m di sebelah utara Surosowan. Jembatan Rante yang kini hanya tesisa 2 bagian sisinya dahulunya adalah jembatan yang menghubungkan jalan dari luar kota menuju pusat kota Banten. Diduga bentuk masa lalunya adalah seperti jembatan kota intan yang ada di Jakarta. Jembatan itu berada di atas sungai/kanal yang juga digunakan sebagai jalur lalu lintas kapal/perahu, sehingga dapat dinaik-turunkan dengan menggunakan rantai.

Tahun pembangunanya belum diketahui secara pasti. Cornellis de Houtman telah menggambarkan kota Banten pada tahun 1596 dan jembatan rantai ini telah ada dalam peta tersebut. Dalam Babad Banten disebutkan bahwa pada tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf telah membangun fasilitas kota dengan segala macam kebutuhan untuk perdagangan. Ia membangun 'pintu pajak' bagi setiap kapal asing pengangkut barang dagangan yang masuk.

Jembatan Rante

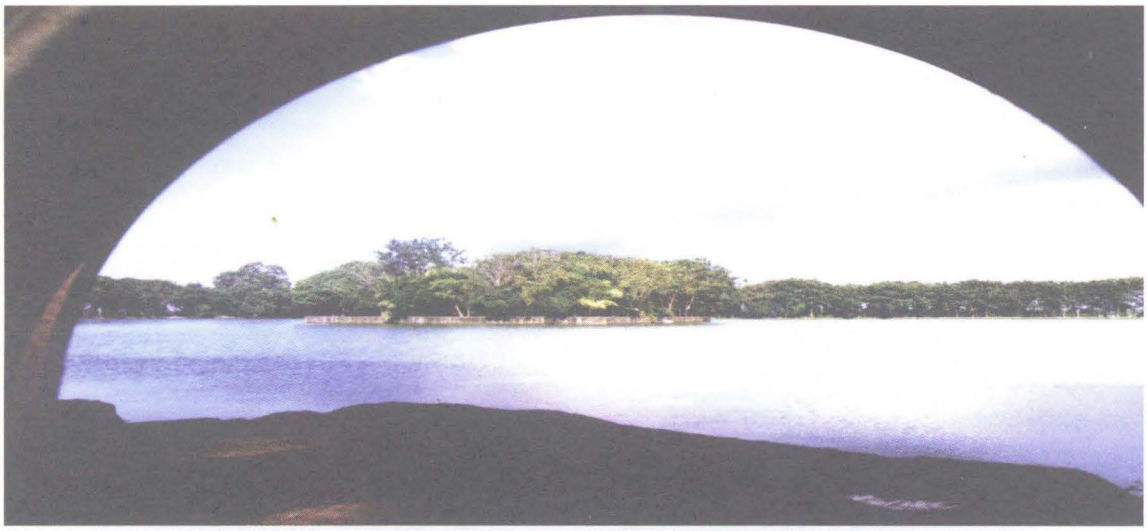

Danau Tasik Ardi dengan latar belakang pulau buatan yang digunakan tempat istirahat sultan dan keluarganya

Situs Danau Tasikardi dan Pengindelan

Tasikardi adalah danau buatan dengan luas kira-kira 6,5 ha yang seluruh alasnya dilapisi ubin bata. Secara administratif terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, kira-kira 2 km di sebelah tenggara Keraton Surosowan. Lokasi objek dipinggir jalan utama, kira-kira 1 km ke arah utara dari jalan Serang-Cilegon. Danau ini dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf (1570-1580). Di tengah danau dibangun sebuah pulau yang disebut pulau Kaputren yang semula diperuntukkan khusus bagi ibu Sultan Maulana Yusuf untuk bertafakur mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya pulau ini digunakan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga kesultanan. Pada tahun 1706 Sultan Banten menerima seorang tamu Belanda yaitu Cornelis de Bruin di tempat ini. Ketika Daendels membuat jalan dari Merak ke Karangantu, danau ini tidak dirusak.

Danau Tasikardi berfungsi untuk menampung air dari Sungai Cibanten yang kemudian disalurkan ke sawah-sawah dan ke Keraton Surosowan untuk keperluan air minum dan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga sultan di Keraton Surosowan. Di pulau yang terletak di tengah Danau Tasikardi, terdapat sisa bangunan yang terdiri atas 3 bangunan, yaitu bangunan turap, bangunan kolam, dan sisa-sisa fondasi. Bangunan turap yang mengelilingi situs berukuran 40 x 40 m; tinggi terendah 2 m; dan tertinggi 3 m. Bangunan kolam berukuran 6 x 4,7 m; tinggi sayap atas 80 cm; kedalaman 3 m; bangunan tambahan di samping kolam sebelah utara berukuran 12,2 x 6 m; di samping kolam sebelah selatan berukuran 13,35 x 6 m. Sisa-sisa fondasi terdiri dari bangunan induk termasuk bagian serambi berukuran 18,45 x 18,10 m; bangunan lorong sebelah barat berukuran 8,25 x 18,10 m dengan lebar fondasi 50 cm; bangunan lorong sebelah timur berukuran 4,90 x 18,10 m dengan lebar fondasi 50 cm.

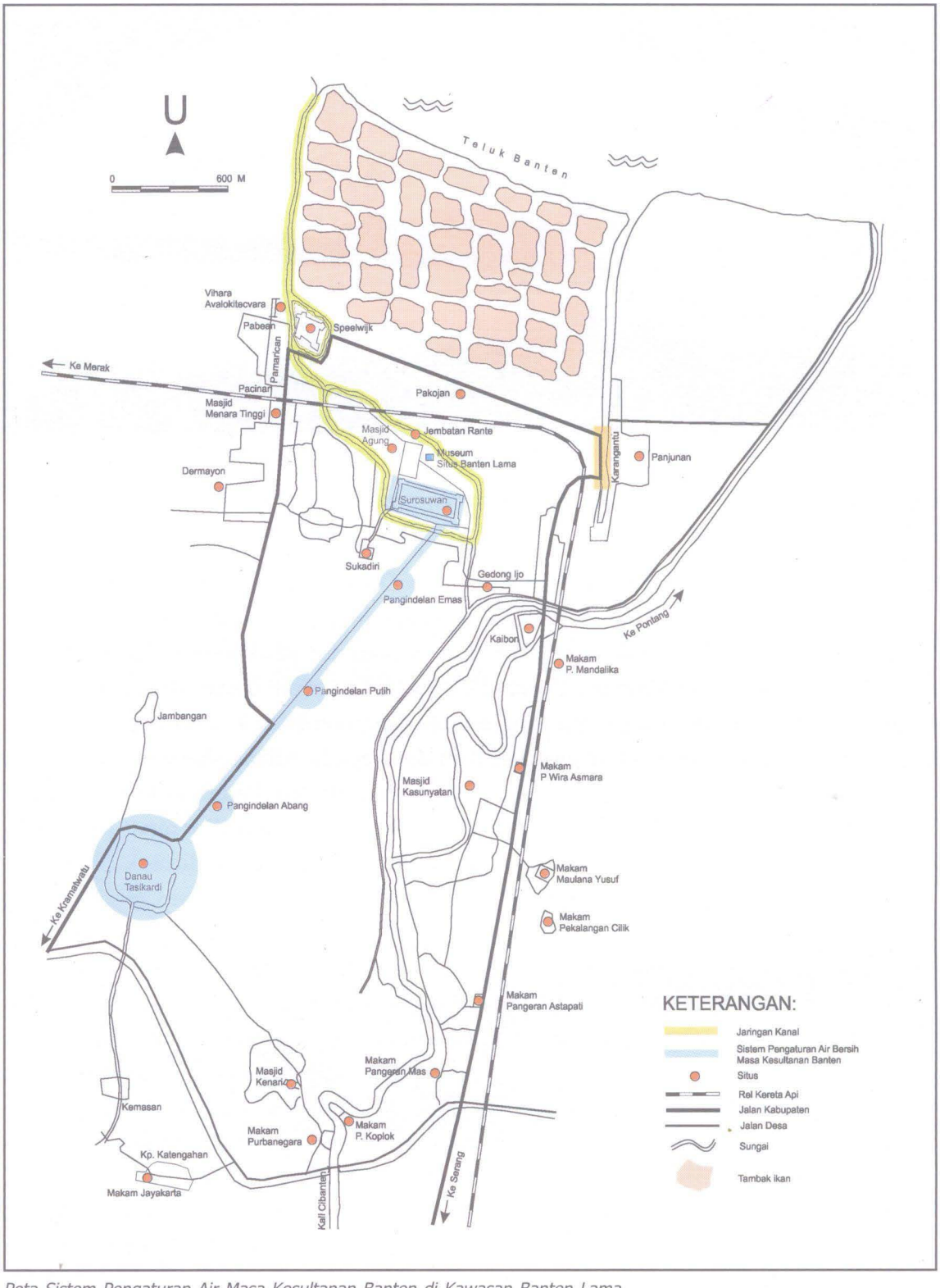

Peta Sistem Pengaturan Air Masa Kesultanan Banten di Kawasan Banten Lama

PANGINDELAN

Air dari Danau Tasikardi yang semula keruh dan kotor sebelum masuk ke kota kerajaan di Surosowan terlebih dulu dijernihkan di suatu tempat. Penjernihan dilakukan dengan teknik penyaringan air yang khas dan kompleks yang disebut dengan Pangindelan, yaitu suatu bangunan berbentuk semacam bungker yang berfungsi sebagai penyaring air (*filter station*). Untuk menghubungkan Danau Tasikardi, Pangindelan dan Keraton Surosowan digunakan saluran air/pipa dengan berbagai ukuran (garis tengah 2 sampai 40 cm) yang terbuat dari terakota.

Teknik penjernihan air di bangunan pangindelan ini menggunakan teknik pengendapan dan penyaringan dengan pasir dan ijuk. Ada tiga buah pangindelan, yaitu Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas. Ketiga pangindelan ini mempunyai struktur dan bahan bangunan yang sama, yakni dari pasangan batu bata dengan memakai spesi adonan yang terbuat dari batu bata,pasir, dan kapur (*tras barter*). Bagian luar bangunan juga diplester dengan spesi yang sama. Bangunan pangindelan dibangun oleh Hendrik Lucaszoon Cardeel.

PANGINDELAN ABANG

Pangindelan Abang secara administratif terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Jarak dari Danau Tasikardi kira-kira 200 m ke arah utara menyusuri jalan utama.

Pangindelan Abang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang pertama. Air dari Danau Tasikardi yang masih keruh diendapkan di tempat ini. Panjang bangunan ini 18,20 m; lebar 5,64 m; tinggi 3,45 m; tebal dinding 80 cm; dan luas bangunan 102, 64 m^2. Kedalaman lantai sekitar satu meter dari ketinggian setempat dan mempunyai empat tiang penyangga di dalamnya.

Pangindelan Abang

Pangindelan Putih

Pangindelan Putih secara administratif terletak di Kampung Sukadiri, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Jarak dari Pangindelan Abang kira-kira 200 m ke arah utara menyusuri jalan utama, kemudian dilanjutkan dengan jalan setapak sejauh kira-kira 100 m.

Pangindelan Putih

Pangindelan Putih merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang kedua. Air yang sudah diendapkan di Pangindelan Abang dialirkan ke Pengindelan Putih untuk disaring dan dijernihkan lagi, selanjutnya air hasil saringan tersebut dialirkan ke Pangindelan Emas. Panjang bangunan ini 17,80 m; lebar 7,20 m; tinggi 2,5 m; tebal dinding 80 cm; dan luas bangunan 128,16 m^2. Kedalaman lantai satu meter dari ketinggian setempat, mempunyai sayap/pilar di samping bagian luar.

Pangindelan Emas

Pangindelan Emas terletak secara administratif di Kampung Sukadiri, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Jarak dari Pangindelan Putih sekitar 500 m ke arah utara melalui jalan pematang sawah. Sedangkan bila di tempuh dari Keraton Surosowan berjarak 500 m ke arah selatan.

Pangindelan Emas

Air hasil penjernihan dan penyaringan dari Pangindelan Putih selanjutnya diendapkan lagi di Pangindelan Emas, yang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang terakhir (ketiga). Dari Pangindelan Emas, air bersih langsung dialirkan ke Pancuran Mas yang ada di Keraton Surosowan untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga Sultan dan masyarakat di Keraton Surosowan. Panjang bangunan ini 17,35 m; lebar 5,50 m; tinggi 1,40 m; dan tebal dinding 80 cm; dan luas bangunan 95,425 m^2. Keadaan bangunan ini sudah tidak utuh, seluruh atapnya runtuh total tetapi bagian dindingnya masih tertinggal.

Meriam Ki Amuk

Pada tahun 1637 Kesultanan Banten mendirikan perbentengan baru di sekeliling Banten untuk melawan serangan yang diduga akan berasal dari Mataram. Untuk tujuan pertahanan itu, diduga telah dipasang sebuah meriam di depan gerbang sebelah selatan (Crucq, 1938; 373). Sedangkan latar sejarah meriam Ki Amuk lebih banyak didapatkan dari legenda yang berkembang di masyarakat. Meriam ini diletakkan di sisi benteng berdekatan dengan kanal di satu gubug beratap tanpa dinding. Arah hadapnya ke utara seakan dipersiapkan untuk menembak kapal musuh yang hendak merapat ke pantai.

Pada bagian atas mulut meriam ini terdapat prasasti berbahasa Arab yang berbunyi "aqibatul khoirrissalamatuliiman". Menurut Krucq, prasasti tersebut merupakan candrasengkala yang menunjukkan angka tahun 1450 Çaka yang bersamaan dengan tahun 1528 – 1529. Ia juga menyatakan bahwa meriam tersebut masih ada hubungannya dengan meriam 'Ki Jimat' yang merupakan hadiah Sultan Trenggono dari Demak kepada Sunan Gunung Jati.

Meriam Ki Amuk

Sebuah daftar nama meriam yang ditemukan di Banten pada tahun 1790, menyebutkan bahwa di sudut timur laut *Fort Diamant* atau Pakuwonan yang oleh Belanda disebut dengan *Flag Point*, terdapat sejumlah meriam yang uraiannya sebagai berikut

⌘Dua meriam kuningan yang dibuat di Inggris untuk *John First Lord Berkly of Startton, Master of Ordonance* pada tahun 1663. Meriam-meriam itu dibeli dengan harga 10.000 Real Spanyol dan tiba di Banten pada tahun 1680.

⌘Terdapat pula meriam Inggris yang lain dengan Prasasti *William Wightman, London*1678.

⌘Satu meriam lokal yang kemungkinan dibuat di Kawiragunan.

Pada sepanjang sisi timur *Fort Diamant* didapatkan :

⌘Meriam Belanda dari bahan kuningan yang dibuat di Enkhuzen untuk cabang VOC di Amsterdam, tahunnya 1623.

⌘Meriam dari bahan kuningan lainnya yang berasal dari Inggris, dibuat oleh Wightman pada tahun 1677.

Sementara itu pada sudut tenggara yang disebut dengan *South Point* didapatkan data:

⌘ Dua meriam dari bahan kuningan buatan lokal dengan lima tanda pada larasnya.

⌘ Satu meriam dari bahan kuningan dengan tulisan *Lamberts Amsterdam* 1638.

Watugilang

WATUGILANG

Watugilang atau *batugilang* adalah batu berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 190 cm, lebar 121 cm dan tebal 16,5 cm, terbuat dari batu andesit. Menurut cerita batu ini dipergunakan sebagai tempat pentahbisan para sultan Banten. Babad Banten pupuh XVIII menyebut benda ini *watugigilang*, yaitu batu besar dan rata yang berfungsi sebagai singgasana Hasanuddin. Ada dua Watugilang.

Watusingayaksa

Batu pertama terletak di depan Keraton Surosowan disebut *watugilang*, dan yang kedua di sisi utara alun-alun disebut *watu singayaksa*. Menurut legenda batu ini adalah tempat

bertapa Batara Guru Jampang. Begitu lamanya ia bertapa sehingga menyempatkan burung pipit membuat sarang (Djajadiningrat 1983: 35-36,128).

Pelabuhan Karangantu

Karangantu menjadi pelabuhan utama dan pasar, yang difungsikan sebagai pelabuhan dagang bagi lingkup lokal maupun internasional. Kunjungan Tome Pires ke Karangantu pada tahun 1513 belum melihat pentingnya pelabuhan ini, karena Pelabuhan Sunda Kelapa masih merupakan pelabuhan yang utama. Sejak akhir abad XVI, Karangantu menjadi bandar internasional utama untuk Indonesia Bagian Barat, terutama akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dari peta kuno yang dibuat de Houtman ketika mengunjungi Banten pada tahun 1598, memperlihatkan bahwa kota Banten dikelilingi tembok kota dan tampak pula pasar Karangantu yang dikelilingi oleh pagar kayu dan bambu. Pada saat itu perluasan kota Banten mengarah ke bagian timur. Sementara itu, berdasarkan peta yang dibuat Valentijn pada tahun 1725, terlihat bahwa Pasar Karangantu masih ditempat semula dan mulai dipenuhi dengan rumah pemukiman.

Pada sekitar abad 17-19, seperti tampak pada peta Serrurier, Karangantu tidak lagi ditandai sebagai pasar, tetapi sebagai pelabuhan yang dikelilingi oleh tambak ikan. Semula pelabuhan ini merupakan pelabuhan lokal dan berkembang menjadi pelabuhan nasional dan internasional. Di sini pula terdapat pemukiman para nelayan, dok kapal, dan tempat pembuatan garam. Menurut catatan Jan Jansz Kaeral (1596) disebutkan bahwa kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Banten harus mendapat izin syahbandar.

Mata uang masa Kesultanan Banten

PELAYARAN DAN MATA UANG KESULTANAN BANTEN

Kesultanan Banten di kawasan pesisir utara pulau Jawa dikenal sebagai pusat perdagangan internasional sejak abad XVI. Para pedagang asing yang meramaikan perdagangan di sana antara lain: orang Arab, Cina, India, Gujarat, Turki, Belanda, Inggris, Denmark, Prancis, dan Portugis. Guna menunjang kelancaran aktivitas perdagangan di Banten, pihak kesultanan membangun sarana dan prasarana pendukung seperti: pasar, pelabuhan, gudang, penginapan dan pembuatan mata uang. Sementara itu Kesultanan Banten memiliki sejumlah kapal umtuk mendukung perdagangan luar negerinya.

Kota Banten yang dikenal sebagai pelabuhan niaga banyak menghimpun kapal dagang. Willem Lodewycksz yang berkunjung ke Banten tahun 1596 menyatakan bahwa kesultanan ini memiliki beberapa jenis angkutan air antara lain: kapal perang bertiang layar dua dan berserambi sempit. Digambarkannya para budak dan pengayuh berada di ruang bawah kapal, sedangkan tentara berada di geladak. Untuk perjalanan jauh digunakan *jung* yang memiliki ruang penyimpanan barang, dan layar kecil di bagian muka. Untuk mengamankan daerah laut digunakan perahu bercadik maupun tidak bercadik. Kapal-kapal itu memakai atap dan bertugas mencegah barang yang keluar tanpa membayar cukai. Kecuali itu dikenal pula perahu lesung kecil yang dapat berlayar dengan cepat.

Penyebutan berbagai alat angkutan air yang beraneka ragam menunjukkan bahwa armada laut milik kesultanan cukup lengkap. Selain kapal-kapal niaga, Banten memiliki pula kapal perang untuk mengamankan kawasan perairan laut. Kapal-kapal milik Banten konon dibuat di Tuban, Lasem, Jepara dan Kalimantan. Tidak diperoleh keterangan apakah Banten memproduksi kapal sendiri, tetapi yang jelas di Banten terdapat tempat perbaikan kapal yang tentu diperlukan oleh kapal dagang yang datang membawa komoditas yang guna perbaikan sebelum kembali ke negerinya.

Secara fisik, kebesaran pelayaran kesultanan tercermin, baik dari armada kapal yang dimiliki maupun pelabuhan yang dibangunnya. Gambar kuna yang melukiskan kota Banten memperlihatkan letak pintu masuk ke pelabuhan di tepi aliran Cibanten. Kapal-kapal dagang yang besar menggunakan perahu kecil untuk merapat ke pantai, bahkan tidak sedikit perahu dan kapal kecil berlayar hingga masuk ke pedalaman lewat Cibanten. Kecuali tempat perbaikan kapal, kesultanan membangun dan mempersiapkan berbagai kebutuhan kapal seperti tambat kapal, penghadang ombak, tempat perbaikan kapal, gudang, tempat timbangan umum, dsb. Dalam kota Banten banyak dibangun saluran atau kanal yang menghubungkan kawasan pesisir dengan pedalaman. Lokasi pusat kota Banten yang ada di tengah teluk Banten menjadikan laut merupakan pintu gerbang masuk utama ke kawasan ini.

Melalui laut kesultanan Banten mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Pengiriman pejabat ke berbagai negara seringkali dilakukan dalam masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang merupakan masa keemasan Banten. Sultan mengirimkan dua orang utusan ke Inggris sebagai duta besar yang ditugasi juga membeli senjata. Kecuali itu, Sultan menggalang hubungan baik dengan Aceh, Makassar, India, Mongol, Turki dan Arab. Para penguasa Banten

yang pergi ke Arab untuk menunaikan ibadah haji dan ke Inggris untuk menunaikan tugas sebagai utusan, menggunakan kapal milik pedagang Inggris atau Belanda.

Sarana pendukung perdagangan dibangun oleh pihak kesultanan maupun pihak swasta. Saudagar dari Cina, Belanda, Inggris, Arab dsb., memiliki gudang di sekitar pelabuhan untuk menyimpan barang dagang yang akan diperjual belikan di Banten. Salah satu di antaranya ialah lokasi penyimpanan sejumlah besar barang keramik impor dari masa dinasti Ching berbentuk piring dan mangkuk, yang masih tersusun rapi ketika ditemukan dalam penggalian arkeologi tahun 1978 di situs Pabean (yang dikenal sebagai salah satu pintu masuk ke pelabuhan Banten). Ribuan pecahan keramik impor semacam ini dapat ditemukan di permukaan maupun di dalam tanah hampir di seluruh wilayah kota lama Banten, baik yang berasal dari Cina dan Jepang maupun dari beberapa negara Eropa. Sumber tertulis menyatakan bahwa pada tahun 1602 pedagang Belanda menyewa gudang dan toko milik orang Cina. Tahun 1603, saudagar Belanda diijinkan mendirikan bangunan di dalam kota Banten, membangun rumah batu untuk menyimpan barang dagang dan uang. Sebuah gudang terbuat dari bata, berjendela besar dan bertralis besi milik pedagang Inggris digambarkan berada di wilayah kota.

Agar kelancaran perdagangan berjalan baik, disediakan pula tempat timbangan umum yang dapat dipergunakan untuk menentukan satuan berat barang dagang yang diperjual belikan. Satuan berat bagi barang dagang memang berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Brierley (1994) dalam bukunya *Spices. The Story of Indonesia's Spice Trade* menguraikan bahwa setiap tahun pedagang Cina mampu mengekspor 1.500 ton lada dari Banten ke negerinya. Sebaliknya Meilink-Roelofsz (1962) dalam bukunya berjudul *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, menyebut tahun 1629 Inggris membeli cengkeh sebanyak 120.000 pon yang dalam tahun 1636 meningkat menjadi 300.000 pon. Dari sumber tertulis banyak dijumpai kata-kata lain yang menunjukkan satuan berat yang digunakan di kesultanan Banten seperti *gantang, kati, koyan* dan *pikul.* Disediakannya tempat timbangan umum yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah satuan tertentu bagi barang dagang tentu akan sangat memudahkan kaum padagang terutama pedagang asing. Kesepakatan satuan berat memang sangat penting bagi kelancaran sebuah transaksi.

Pengaturan pelabuhan Banten agaknya memenuhi persyaratan, terbukti silih bergantinya kapal berdatangan, ramainya kapal dagang merapat hingga di pinggiran laut bebas, bahkan tidak sedikit perahu dan kapal kecil yang berlayar

hingga masuk ke pedalaman. Memang lokasi kesultanan yang berada di tengah teluk Banten, menjadikan laut merupakan pintu gerbang masuk utama ke kawasan ini.

Guna menunjang berbagai aktivitas untuk memajukan perdagangan, kesultanan Banten bukan hanya mendirikan sarana berupa bangunan akan tetapi juga menerbitkan mata uang. Dari hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di situs Banten Lama berhasil ditemukan mata uang logam berbentuk utuh maupun pecahan. Setelah dianalisis melalui proses elektrolisa di laboratorium, temuan mata uang yang terbungkus pekat bergumpal tanah diketahui mata uang terdiri dari beberapa bentuk. Ada mata uang berbentuk bulat tanpa lubang, berbentuk bulat dengan lubang segi enam dan berlubang bulat, serta berbentuk bulat dengan lubang segi empat. Khusus mata uang yang dibuat dan diedarkan sebagai alat pembayaran sah oleh pihak kesultanan, menggunakan bahan baku tembaga, perunggu dan timah hitam. Mata uang tersebut memuat huruf dan kata dalam tulisan Jawa yang berarti "Pangeran Ratu" serta ada yang dituliskan dari huruf Arab pada salah satu sisinya yang berarti "Pangeran Ratu ing Banten". Walaupun kedua mata uang tersebut tidak menerakan angka tahun, namun dari nama yang tertulis dapat dipastikan bahwa mata uang tersebut dibuat dan diedarkan semasa pemerintahan Maulana Muhammad Pangeran Ratu Banten yakni dari tahun 1580-1596. Mata uang tersebut dapat dikategorikan sebagai mata uang lokal, yang diasumsikan dibuat di dalam negeri Banten. Penekanan penyebutan mata uang lokal ini sangat penting untuk membedakan dengan mata uang asing yang juga ditemukan di situs seperti mata uang *VOC*, *dolar* Spanyol dan mata uang Cina yang dikenal dengan *cash*.

Heriyanti O. Untoro, Departemen Arkeologi,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI

VIHARA AVALOKITEÇVARA

Secara administratif, Vihara Avalokiteçvara berada di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Posisi astronomisnya berada pada 106^0 08′ 97" Bujur Timur dan 06^0 01′ 83" Lintang Selatan. Vihara ini berada sekitar 500 m sebelah barat Mesjid Agung Banten.

Pintu gerbang Vihara Avalokitecvara

Vihara Avalokiteçvara dibangun pada abad XVI atau sekitar tahun 1652 pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Latar belakang sejarah pendirian vihara dihubungkan dengan cerita masyarakat setempat. Pada zaman dahulu ada rombongan dari Cina yang akan pergi ke Tuban. Karena kehabisan bekal, mereka memutuskan untuk singgah di Banten tepatnya di kanal (Sungai Kemiri). Dari persinggahan tersebut terjadi perseteruan antara rombongan Cina dengan penduduk Banten. Perseteruan tersebut memuncak dengan perkelahian. Rombongan Cina yang dipimpin oleh Putri Ong Tien mengalami kekalahan. Melalui kemenangan tersebut, Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Banten pada saat itu menikahi Putri Ong Tien. Sebagai dampaknya, timbul perpecahan di kalangan Cina sendiri. Sebagian dari mereka memeluk agama Islam dan sebagian lagi tetap pada ajaran dari tanah leluhurnya. Mengantisipasi keadaan tersebut, Syarif Hidayatullah mengambil kebijakan untuk tetap menghargai kedua kubu yang bertikai dengan membangun sebuah mesjid di daerah Pecinan dan sebuah lagi Vihara Buda Aviloketeçwara di Dermayon. Berdasarkan informasi tersebut maka vihara ini termasuk dalam kategori vihara tertua di Pulau Jawa. Semula vihara ini dibangun di Desa Dermayon, kemudian dipindahkan ke Pamarican Banten pada tahun 1774.

Rumah Kuno Abad XVIII

Rumah kuno yang diperkirakan berasal dari abad XVIII terletak di antara Mesjid Pacinan Tinggi dan Benteng Speelwijk. Sampai sekarang rumah ini dihuni oleh keluarga Bapak Benjol secara turun-temurun. Untuk kawasan Banten Lama, rumah ini merupakan satu-satunya rumah kuno yang masih tersisa, belum mengalami perubahan struktur bangunan yang berarti.

Rumah Kuno Abad XVIII

Prasasti Muruy

Prasasti Muruy terletak di Desa Murni, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Prasasti ini belum terbaca secara keseluruhan, namun didapat angka tahun yang tertulis 1161 Hijriah. Prasasti ini dibuat di batu berbahan andesit dengan ukuran bagian atas 275 cm, lebar bawah 192 cm, tinggi 251 cm.

Prasasti Muruy

TINGGALAN BUDAYA BERTULIS DARI MASA KESULTANAN BANTEN: PRASASTI DAN NASKAH

Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di bagian barat Pulau Jawa yang telah muncul sejak sekitar pertengahan paruh pertama abad XVI dan berakhir sampai 1820. Sebagai sebuah kerajaan, Banten mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam jaringan politik dan ekonomi, baik dalam

hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, maupun dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Masa Kesultanan Banten yang berlangsung sekitar 300 tahun lamanya telah mewariskan kepada kita berbagai ragam tinggalan budaya bertulis berupa prasasti dan naskah, yang kini tersimpan di beberapa tempat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di bawah ini adalah ikhtisar deskriptif dari tinggalan budaya bertulis Banten yang terseleksi dari khasanah yang sementara ini dapat terjangkau.

1. Prasasti

Di bawah ini dikemukakan contoh tinggalan budaya bertulis Banten yang terdiri atas: (1) prasasti (*piagem*) dari Sultan Banten untuk para penguasa di Lampung, (2) tiga buah prasasti yang terdapat pada meriam Ki Amuk, (3) pertulisan-pertulisan pendek pada mata uang logam Kesultanan Banten, dan (4) cap dan meterai Kesultanan Banten.

Prasasti (Piagem) Sultan Banten. Di daerah Lampung ditemukan beberapa lembar *piagem* yang diterbitkan oleh Sultan Banten untuk para pejabat setempat. *Piagem-piagem* tersebut umumnya dipahatkan pada lempengan tembaga atau perunggu yang disebut *dalung*, ditulis dengan aksara Jawa atau aksara Arab (*pegon*), dan berbahasa Jawa dialek Banten. *Piagem* tersebut umumnya berisi perjanjian atau pengaturan perdagangan lada dengan sanksi-sanksinya yang ditetapkan Sultan Banten.

Selain itu ada sebuah *piagem* tembaga (disimpan oleh kerabat Raden Intan di Kuripan, Lampung), yang diterbitkan oleh adik Pangeran Sabakingking bernama Ratu Mas, dan Ratu Darah Putih. *Piagem* ini memuat perjanjian persahabatan antara Pangeran Sabakingking (Sultan Hasanuddin) Banten dengan Ratu Darah Putih, isteri almarhum raja Lampung yang bernama Menak Bay-bay Baluk. Teks lengkap dan terjemahan *piagem* ini terdapat pada tulisan Dr. G.A.J. Hazeu "Een beschreven koperen plaat uit de Lampoengs", *TBG*, XLVIII, 1905. Kemudian Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat membahasnya pula dalam disertasinya *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*, Haarlem, 1913:119-130, dan dalam tulisannya "Nog iets omtrent de Lampongsche oorkonden over de oorspronkelijke verhouding tusschen Lampong en Banten". Lihat *NBG* [= *Notulen van de Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*], 58, 1920:48-51.

Ada pula sebuah *piagem* tembaga beraksara Arab pegon dan berbahasa Jawa serta Melayu, yang diterima kantor *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) tahun

1927. *Piagem* ini diterbitkan oleh Kanjeng Sultan Ratu Ahmad Najemuddin untuk *prawitan* dan lurah-lurah di Sindanghulupana, Lampung. Isinya memuat aturan-aturan atau hukum tentang menyabung ayam, pencurian, dan orang-orang asing (lihat: *OV* [= *Oudheidkundig Verslag*] *1927*:110).

Ada pula *piagem* tembaga yang diterbitkan tahun 1104 (=1692 M) oleh Sultan Banten Jénal Ngabidin (Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin) untuk kepala daerah di Sukun, Lampung (Dr. H.C. Humme membicarakan *piagem* Lampung milik KITLV [=*Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden,* dalam majalah *BKI* [=*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*], 1884, IV(8)], bernomor inventaris *Or 43*. Kemudian, antara tahun 1887-1902 Dr. J.L.A. Brandes membahas beberapa *piagem* dari daerah Lampung dalam serangkaian tulisannya yang berjudul "Nogeenige Javaansche piagam's uit het Muhammedansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en Palembang", yang dimuat dalam majalah *TBG* [=*Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*], dl. 32-45.

Berapa jumlah seluruh prasasti atau piagem dari Sultan Banten yang ditemukan di daerah Lampung tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, menurut L.C. Damais prasasti-prasasti dari Lampung ini berjumlah 12 lembar. (lihat tulisan Damais tentang epigrafi Islam di Asia Tenggara, "L'Épigraphie musulmane dans le Sud-Est asiatique", yang dimuat dalam *BÉFEO* [= *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*], LIV, 1968:567-604, dan edisi bahasa Indonesianya dalam *Epigrafi dan Sejarah Nusantara: Pilihan Karangan Louis-Charles Damais*, Jakarta, 1995:187-222. Kedua belas prasasti tersebut adalah:

No	Nama Prasasti	Tahun Hijrah	Ekivalen Tahun Masehi
1	Prasasti "Lampung"	1073 H	14-II-1663 M
2	Prasasti Putih	1102 H	1-III-1691 M
3	Prasasti Krui	1102 H	1-III-1691 M
4	Prasasti Sukun[g]	1104 H	23-XII-1692 M
5	Prasasti Penet	1127 H	7-I-1715 M – 27-XII-1715 M
6	Prasasti Tulang Bawang	1150 H	2-V-1737 M – 20-IV-1738 M
7	Prasasti Teluk	1166 H	26-VIII-1753 M
8	Prasasti Pangeran Ropatala	1169 H	21-X-1755 M
9	Prasasti Kartanagara	1175 H	25-IX-1761 M
10	Prasasti Tegi Neneng	1185 H	1-II-1772 M
11	Prasasti Bujung Bakung	Tak berangka tahun	
12	Prasasti Pangeran Muh. Tahir	1188 H	14-III-1774 M – 3-III-1775 M

Prasasti pada Meriam Ki Amuk. Di Banten, bekas ibukota Kesultanan Banten, kini masih terdapat sebuah meriam besar, yang dikenal Meriam Ki Amuk. Pada meriam itu terdapat tiga prasasti, ditulis dengan aksara dan bahasa Arab. Ketiga prasasti ini telah dibaca dan diterbitkan oleh Dr. K.C. Crucq dalam tulisannya: "Een aequivalent van Ki Amoek te Batavia", *TBG*, LXXVI, 1936:576-578, dan "De geschiedenis van het heilige kanon te Banten", *TBG*, LXXVIII, 1939:359-391. Menurut Crucq Prasasti I yang terdapat pada bagian atas moncongnya, berbunyi: *'âiibatu'l khairi salâmatu'l 'imâni*, dan merupakan candrasengkala yang menunjuk pada angka tahun Jawa 1450 (= 1528/1529 M). Prasasti II yang terletak di tengah bagian atas meriam bersambung dengan Prasasti III yang terdapat di depan lubang penyulut mesiu, berbunyi: *lâ fattâh illâ 'Ali radiya 'llâhu 'anhu lâ saif illâ Dhû'lfaiâr illâ huwa lam kufû' ahad.*

Prasasti pada Mata Uang Banten. Walau pun mata uang termasuk ke dalam bidang numismatik, namun pertulisan yang ada pada mata uang dapat dianggap sebagai prasasti yang digolongkan ke dalam "prasasti pendek". Bahan mata uang dari masa Kesultanan Banten ini ada dua macam: tembaga dan timah. Prasasti pada mata uang itu dituliskan melingkar dengan aksara Arab dan bahasa Jawa Banten, mengelilingi lubang yang ada di tengah. Pertulisan ini biasanya hanya tertera pada satu sisi saja, berbunyi *Pangeran Ratu ing Banten.* Ada pula mata uang yang prasastinya dilengkapi dengan nama Sultan yang berkuasa pada waktu mata uang itu dikeluarkan, misalnya nama Sultan *Abul Mafakhir.* Sayangnya, pada mata uang Banten ini tak tercantum tahun terbit dan angka nilai nominalnya. Berbagai jenis mata uang Kesultanan Banten ini kini disimpan dalam koleksi Museum Situs Banten Lama, Banten, dan di Bagian Numismatik Museum Nasional, Jakarta. Lihat pula buku susunan C. Scholten, *De munten van Nederlandsche gebiedsdeelen oversee, 1601-1948*, Amsterdam, 1951.

Prasasti pada Cap dan Meterai. Penggunaan cap atau stempel (*stamp*) dan meterai (*seal*) di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dianggap sebagai suatu tradisi budaya dalam kehidupan pemerintahan. Cap dan meterai pada umumnya digunakan pada surat-surat resmi kerajaan. Kita tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan cap dan meterai digunakan dalam pemerintahan kesultanan Banten. Namun, sejumlah arsip surat-surat resmi kesultanan dan surat-surat perjanjian dengan pihak lain memperlihatkan penggunaan cap dan meterai. Biasanya pada cap dan meterai kerajaan, tertera nama kerajaan atau kesultanan dan nama

sultannya. Kadang-kadang pada cap itu terdapat pula lambang kerajaan. Cap umumnya menggunakan tinta untuk menerakannya pada kertas, sedangkan meterai diterakan pada permukaan lak (*lacquer*) yang dilelehkan di atas kertas.

Sultan-sultan Banten yang menggunakan cap pada surat-surat resmi di antaranya adalah Sultan Abul Fath Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683), seperti tertera pada dua buah suratnya yang dikirimkan kepada Raja Christian V di Denmark, pada tahun 1082 H (= 1671/1672 M) dan tahun 1085 H (= 1675 M) (lihat: Dr. F.H. Van Naerssen *et al.*, *Catalogue of Indonesian Manuscripts*, Copenhagen: The Royal Library, 1977, Pl. 39-40). Prasasti pada stempel Sultan Abul Fath tersebut lengkapnya berbunyi *al-Wâthiî billâh al-Sulþân Abû'l Fath ibn al-Sulþân Abû'l-Ma'âlî ibn al-Sulþân Abî'l-Mafâkhir ibn Muhammad ibn Yûsuf ibn Hasaniddin.* Sedangkan meterai lak dapat dilihat pada surat yang dikirim oleh Sultan Abul Fath kepada Raja Charles II di Inggris pada tahun 1683 (lihat: Annabel Teh Gallop dan Bernard Arps, *Golden Letters: Writing Traditions of Indonesia = Surat Emas: Budaya Tulis di Indonesia*, London/Jakarta, 1991:18, Fig. 4), dan pada surat akte persetujuan Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainal Abidin dengan VOC pada tahun 1684 (lihat: Arsip Nasional RI, *Pameran Seabad Kearsipan*, Jakarta, 1992:22, foto 19; Ann Kumar dan John McGlynn (eds.), *Illuminations:The Writing Traditions of Indonesia*, Jakarta/New York/Toronto, 1996:50, Fig. 54). Contoh bentuk-bentuk cap dan meterai dari kesultanan yang lain di Nusantara sebagai perbandingan, lihat: Annabel Teh Gallop, "Seals and Signature", dalam Ann Kumar dan John H. McGlynn (eds.), *Illuminations*, hal. 94-97; lihat pula: Annabel Teh Gallop dan Bernard Arps, *Golden Letters*, hal. 53-54.

2. Naskah

Kelompok naskah yang dikemukakan di sini terbatas pada naskah kesejarahan dalam bentuk: (1) karya sastra sejarah, (2) surat-surat resmi, dan (3) catatan administrasi hukum dan sensus penduduk.

Karya Sastra Sejarah. Dimaksudkan dengan karya sastra sejarah adalah bentuk karya sastra yang merupakan hasil historiografi tradisional. Bentuk karya sastra sejenis ini dikenal sebagai kitab *Sajarah*, yang masih dapat digolongkan ke dalam jenis kesastraan *babad*. Kelompok ini meliputi sejumlah naskah *Sajarah Banten* dan karya-karya sastra sejarah Banten lainnya yang sejenis, seperti *Sajarah Banten Ranterante*, *Wawacan Sajarah Haji Mangssur*, dan *Hikayat Hasanuddin*. Pada umumnya naskah-naskah *Sajarah Banten* ditulis dalam bahasa Jawa beraksara Jawa

atau Arab pegon. Namun di antaranya ada pula naskah *Sajarah Banten* yang beraksara Latin dan berbahasa Melayu, bahkan ada pula yang beraksara dan berbahasa Sunda. Sebagian besar naskah Sajarah Banten ditulis dalam bentuk *tmbang*, dan sebagian lagi dalam bentuk prosa (*gancaran*). Naskah-naskah itu kini tersimpan di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Isi Sajarah Banten pada umumnya hampir sama, yaitu menguraikan kisah sejarah Kesultanan Banten sejak awal kedatangan Syarif Hidayatullah bersama anaknya Hasanuddin di Banten yang kemudian mendirikan Kesultanan Banten, hingga masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Beberapa di antara naskah Sajarah Banten ada pula yang berisi silsilah keluarga sultan-sultan Banten. Selain itu, di antara naskah-naskah Sajarah Banten ini terdapat sebuah naskah yang oleh Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat disebut *Sajarah Banten Kecil*, yang sebenarnya mempunyai nama sendiri yaitu *Wawacan Sajarah Haji Mangsur* seperti dinyatakan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje dan Dr. J.L.A. Brandes. Naskah tersebut bertanggal lebih muda, menceriterakan sejarah Banten secara singkat sampai masa penguasaan Banten oleh Daendels pada tahun 1808. Sementara itu yang dimaksud *Sajarah Banten Rante-rante* menurut Hoesein Djajadiningrat tak lain adalah kumpulan tradisi berupa mitos dan legenda dari episode-episode tertentu dalam sejarah Banten dan *Hikayat Hasanuddin* merupakan versi Melayu dari suatu bagian *Sajarah Banten Rante-rante*.

Sebuah naskah lain dari Cibeber, Cilegon, yang digarap Munadi Padmadiwiria, merupakan sebuah versi lain dari Sajarah Banten yang isinya sekitar tokoh Hasanuddin. Naskah ini merupakan fragmen dari *Sajarah Banten Rante-rante* dan sejenis dengan Hikayat Hasanuddin. Pada bagian awal tertulis: *"Iki nuturaken lampah lakune Kangjeng Maulana Hasanuddin waktu mula-mula manjing nagara Banten"*. Hasil garapan Munadi diterbitkan berjudul "Tokoh Hasanuddin dan Pucuk Umun sebagai mitos dalam Hikayat Pengislaman di Banten berdasarkan Naskah Cibeber" dalam: S.W.R. Mulyadi (ed.), *Naskah dan Kita*, hal. 140-154 (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1991).

Menurut P.A. Hoesein Djajadiningrat naskah Sajarah Banten ditulis antara tahun 1662/1663 hingga ± 1725, tetapi yang versinya bahasa Melayu bentuk prosa, masih ditulis sampai akhir abad XVIII. Tak kurang dari 32 naskah Sajarah Banten dan sejenisnya yang kini tersimpan di berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri seperti tampak pada tabel di bawah ini.

No	Lokasi Penyimpanan Naskah	Jmlh
1	Perpustakaan Nasional RI, Jakarta (Naskah: Br 62, Br 62b, Br 86, Br 296a, Br 296b, Br 625, G 168a, G 168b, KBG101b, KBG 183, KBG 219, NB 130)	12
2	Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok (Naskah: SJ 224, SJ 225)	2
3	Universiteitsbibliotheek, Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland (Naskah: LOr 1982, LOr 2244A, LOr 4818, LOr 6460, LOr 6530, LOr 6532, LOr 7387, LOr 7389, LOr 7570, LOr 7724, LOr 8605)	11
4	Koninklijk Instituut voor Taal -, Land - en Volkenkun de, Leiden, Nederland (Naskah: KITLV Or 267, Or 6440, Or 6535)	3
5	Nederlands Bijbel Genootschap, Amsterdam (Naskah: NBS 236(2), NBS 239)	2
6	Bibliotheque Nationale, Paris (Naskah: no. 140 Manuscripts Malayo-Polynésiens")	1
7	British Library, London	1
	Total Naskah	32

Sepengetahuan kami hingga kini baru ada tiga buah hasil penelitian mengenai Sajarah Banten yang ditulis dalam bentuk disertasi, yaitu:

1. P.A. Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche geschiedschrijving.* Academisch Proefschrift, Rijksuniversiteit te Leiden. Haarlem: Joh. Enschede en Zonen, 1913. Penelitian disertasi Hoesein Djajadiningrat didasarkan atas 10 buah naskah Sajarah Banten yang dikelompokkannya ke dalam tiga redaksi. Disertasi ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten: Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa.* Jakarta: Djambatan, 1983.
2. Jan Edel, *Hikajat Hasanoeddin.* Academich Proefschrift, Rijksuniversiteit te Utrecht. Meppel: B.Ten Brink, 1938. Dalam penulisan disertasinya ini Jan Edel menggunakan 7 buah naskah Sejarah Banten. Tiga buah naskah berbahasa Melayu digunakan sebagai sumber utama, dan empat buah naskah berbahasa Jawa digunakan sebagai sumber pembanding. Pada bagian awal naskah-naskah berbahasa Malayu terbaca *"Inilah tjeritera toean kami Hasanoeddin namanja".*

3. Titik Pudjiastuti, *Sadjarah Banten: Suntingan Teks dan Terjemahan disertai Tinjauan Aksara dan Amanat.* Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok, 2000.

Untuk penelusuran informasi mengenai naskah-naskah Sajarah Banten dapat digunakan katalog-katalog berikut ini:

1. Dr. Th.G.Th. Pigeaud, *Literature of Java,* 3 vols. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967, 1968, 1970. [Vol. I: Synopsis of Javanese Literature 900-1900 A.D.; Vol. II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts; Vol III: Illustrations and Facsimiles of Manuscripts, Maps, Addenda and General Index of Names and Subjects]
2. T.E. Behren dan Titik Pudjiastuti (Penyunting), *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 3-B: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Ëcole Française d'Extrême-Orient, 1997.
3. T.E. Behren (Penyunting), *Katalog Induk Naskah–naskah Nusantara, Jilid 4:Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Ecole Française d'Extrême-Orient, 1998.

Naskah Surat-surat Resmi. Kelompok naskah surat-surat resmi ini terdiri dari empat buah arsip surat, yaitu dua surat dari Sultan Banten Abû'l Fath ibn al Sultan Abû'l-Ma'âlî kepada Raja Denmark Christian V, satu surat perjanjian antara Sultan Abul Mahasin dengan VOC pada tahun 1684, dan satu surat Sultan Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II.

Surat Sultan Banten Abu'l Fath ibn al Sultan Abu;l Ma'ali merupakan surat diplomatik yang dikirimkan kepada Raja Denmark, Christian V. Surat pertama ditulis pada tahun 1082 H (= 1671/1672 M) , surat kedua bertarikh 1085 H (=1675 M). Kedua surat itu juga menyinggung tentang hubungan persahabatan dan perdagangan antara kedua kerajaan. Surat-surat itu dipublikasikan dengan disertai transliterasi dari aksara Arab ke Latin, terjemahan dalam bahasa Inggris, dan disertai pula faksimilnya oleh Dr.P. Voerhoeve pertama kali di dalam *BKI,* 131, 1975:271-272. Tulisan P. Voerhoeve ini kemudian diterbitkan kembali dengan perbaikan dengan judul "Official Letters in Indonesian Languages", di dalam: F.H. van Naerssen *et al., Catalogue of Indonesian Manuscripts: Part 2* (Copenhagen: The Royal Library, 1977), hal. 157-164.

Surat Perjanjian antara Sultan Abul Mahasin dengan VOC ini kini tersimpan di Arsip Nasional, Jakarta. Isinya merupakan sebuah akte persetujuan Sultan Abul

Mahasin Muhammad Zainal Abidin dari Banten dengan para pembesar kesultanan Banten untuk berkewajiban menyerahkan uang sebesar 100.000 gulden kepada VOC. Surat ini dibubuhi meterai-meterai lak. Faksimil berupa foto surat akte perjanjian ini dipublikasikan di dalam: Arsip Nasional RI, *Pameran Seabad Kearsipan* (Jakarta: Arsip Nasional, 1992), hal. 22.

Surat diplomatik dari Sultan Banten Abdul Fatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa ini dikirimkan kepada Raja Inggris Charles II pada tahun 1683. Surat ini berisi permohonan bantuan militer yang diajukan kepada raja Inggris untuk meraih kembali takhta kesultanan Banten, karena Sultan Abdul Fatah telah digulingkan oleh anaknya, Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji) dengan bantuan Belanda. Surat dari Sultan Banten Abdul Fatah ini kini disimpan sebagai arsip di Public Record Office, di London. Foto surat ini dipublikasikan dalam katalog pameran yang diselenggarakan oleh British Library dan British Council di Jakarta dan Yogyakarta bulan September 1991, disusun oleh Annabel Teh Gallop dan Bernard Arps, *Golden Letters: Writing Traditions of Indonesia = Surat mas: Budaya Tulis di Indonesia* (London: The British Library/Jakarta: Yayasan Lontar, 1991) hal. 18.

Catatan Administrasi Hukum dan Sensus. Termasuk ke dalam kelompok naskah ini adalah dua naskah berisi arsip catatan administrasi hukum, dan sebuah naskah berisi hasil sensus penduduk yang dilakukan di Kesultanan Banten.

Naskah pertama, berupa arsip pencatatan pengadilan di *Kapekihan* Kesultanan Banten dari masa pertengahan dan paruh kedua tahun 1162 H (= 1748 M). Isinya antara lain tentang catatan perkara perdata seperti nikah, talak, rujuk, dan hutang-piutang. Arsip ini terdiri dari empat naskah, kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden (kode LOr 5628, LOr 5627, LOr 5626 dan LOr 5625). Seluruhnya meliputi 316 halaman, beraksara Arab pegon dan berbahasa Jawa Banten. Satu halaman dari naskah LOr 5628/8 fotonya dipublikasikan oleh Dr. Th.G.Th. Pigeaud, disertai transliterasi dan terjemahannya, dalam *Literature of Java*, vol. III, 1970, hal. 37, 77-80, Plate 40.

Naskah kedua, berisi catatan sensus penduduk di Surasowan yang dibuat pada tahun Jawa 1620 H (= 1696 M), pada masa pemerintahan Sultan Abdul Mahasin Muhammad Jainul Abidin. Disebutkan bahwa penduduk kota Surasowan ketika itu berjumlah 31.848 jiwa. Naskah ini yang tebalnya 189 halaman dan beraksara Arab ini kini disimpan di Universitas Leiden (kode LOr 2052). Foto dari satu

halaman naskah ini disertai transliterasi dan terjemahannya terdapat dalam katalog Dr. Th.G.Th. Pigeaud, *Literature of Java*, vol. III, 1970, plate 32, hal. 29 dan 68.

Hasan Djafar, Departemen Arkeologi,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI

[Kolofon]
Dirgahayu! Punika Sĕrat Paŋeliń Pañcawarsa niń Prajanĕgari Bantĕn. Tĕlas sinurat riń Dayöhmadya Depok, Jawa Kulwan, iń dina Saptu tańgal piń1, wulan Januwari iń warsa Masehi 2005. Wastanipun kań ŋañĕrat Ki Hasan Djafar, widyapurbawan sakeń FIB-UI.

KERAMIK MASA ISLAM DARI BANTEN LAMA

Letak Banten yang cukup srategis dalam jalur perdagangan, menjadikan Banten ramai dalam kegiatan perdagangan. Barang-barang komoditas dalam kegiatan perdagangan pada masa itu terutama berupa hasil bumi, hasil kerajinan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Lada dan rempah-rempah menjadi barang dagangan yang dieksport, sedangkan keramik merupakan salah satu barang import yang utama untuk Banten.

Data arkeologis menunjukkan bahwa gambaran barang kerajinan lokal yang terbuat dari tanah liat yang dibakar merupakan satu mata dagangan yang cukup diandalkan di Banten. Banyaknya temuan dan jenis gerabah memberi bukti ke arah tersebut. Gerabah-gerabah itu diduga dibuat di daerah Banten Lama, yaitu di situs yang disebut sebagai situs Panjunan.

Dilihat dari bentuknya, gerabah dari masa Islam tidaklah memperlihatkan banyak perbedaan dari gerabah-gerabah masa sebelumnya, namun gerabah Banten memiliki beberapa kekhususan dalam hal jenis maupun gayanya. Contoh kekhususan itu dapat terlihat dari jenis piring misalnya, mempunyai dua bentuk yang berbeda yaitu bulat dan persegi. Piring bulat bermulut lebar dan terbuka bahkan hampir datar, bagian dasar sedikit cembung dan tidak berkaki, umumnya berwarna merah kehitaman

Keramik dari Situs Banten Lama; (1) kowi; (2) hiasan atap; (3) memolo

dengan permukaan yang cukup halus. Dibuat dengan menggunakan teknik roda putar. Piring persegi memiliki pula bentuk yang cukup terbuka namun tidak terlalu datar. Mulutnya berbentuk persegi empat panjang dengan tepian (*rim*) yang melengkung bahkan hampir tegak, dibuat dengan teknik tekan jari pada bagian permukaannya. Wadah semacam ini memiliki dua jenis kaki, yaitu sepasang kaki yang sejajar dan kaki yang melingkar di sekeliling dasarnya, berwarna kecoklatan dengan permukaan yang agak kasar.

Jambangan yang ditemukan terdiri dari dua macam bentuk yaitu bulat dan silindris. Jambangan bulat memiliki bagian dasar dan badan yang membulat, memiliki kaki yang melingkar pada bagian dasarnya dan memiliki warna merah kekuningan dengan permukaan agak kasar. Bagian tepinya memiliki sedikit variasi. Sedangkan jambangan silindris memiliki bentuk badan seperti drum dengan dasar yang datar. Wadah semacam ini ada yang memiliki hiasan motif *tumpal* melalui teknik cap (tekan). Bagian tepiannya tidak memiliki variasi. Permukaannya ada yang kasar dan ada yang halus (diupam) dengan warna merah kekuningan. Baik yang berbentuk bulat maupun silindris keduanya dibuat dengan teknik roda putar.

Temuan gerabah lainnya yang berasal dari Banten Lama terdiri dari jenis periuk, kendi, *pasu*, wajan, kuali, vas bunga, dan tungku. Kendi adalah wadah tertutup dengan bentuk bulat berleher panjang, dan digunakan sebagai wadah air. Bagian tepi kendi memperlihatkan beberapa variasi. Bagian badan memiliki ukuran berkisar antara 20 x 30 cm, sedangkan bagian mulutnya berdiameter antara 3-6 cm. Vas bunga merupakan wadah terbuka dengan kaki-kaki pada bagian dasar dan tidak memiliki variasi pada tepiannya. Ukuran badan sekitar 30 x 20 cm dan diameter mulut kira-kira 18 x 20 cm. jenis ini dibuat dengan teknik roda putar. Pot merupakan wadah bulat tertutup dengan dasar cembung, dengan tepian yang tidak memiliki banyak variasi. Bentuk badan sulit diketahui, karena tidak ada cukup fragmen yang dapat direkonstruksi. Namun demikian, bagian tepi dapat diketahui memiliki variasi diameter antara 18-22 cm. Sebagian besar model ini dibuat dengan menggunakan teknik roda putar.

Kuali merupakan wadah terbuka dengan tepian bulat dan dasar cembung. Tidak banyak variasi untuk tepiannya. Diameter mulut bervariasi antara 54-74 cm yang dibuat dengan teknik roda putar. Wajan, wadah terbuka dengan dasar cembung, tidak banyak variasi untuk tepiannya. Diameter mulutnya bervariasi antara 40-50 cm dengan tinggi berkisar 15 cm. Dibuat dengan teknik *paddle* dan *anvil*. Pada bagian dasar gerabah dari jenis kuali, wajan, dan *pasu* memiliki ciri-ciri yang hampir sama yaitu mulutnya agak terbuka dan berbadan serta berdasar bulat tidak berkaki. Permukaannya halus berwarna kekuningan, sedangkan pot bunga memiliki bentuk bulat dan silindris, dasarnya rata dan memiliki empat buah kaki, permukaannya kasar berwarna merah kecoklatan.

Mangkuk merupakan wadah terbuka dengan ukuran kecil setengah lingkaran dengan dasar cembung. Bagian tepiannya tidak memiliki banyak variasi dengan diameter berkisar antara 9-10 cm. Tipe ini dibuat dengan teknik roda putar. Jenis gerabah yang tidak berfungsi sebagai wadah adalah jenis tungku. Tungku dari Banten memiliki bentuk silindris. Bagian badan berdiameter antara 20-30 cm. Permukaannya agak kasar dan berwarna kuning kecoklatan. Selain itu, ditemukan pula benda-benda tanah liat lain yang berupa arca binatang, serta unsur-unsur bangunan seperti: bata, ubin, dan genting.

Unsur dekoratif gerabah Banten memiliki banyak variasi motif. Motif dekoratif yang biasa ditemukan dalam pada gerabah Banten umumnya diproduksi dengan teknik tempel dan tekan. Kedua teknik itu kemudian menghasilkan berbagai jenis motif di atas permukaan gerabah.

RAGAM HIAS GERABAH DI BANTEN LAMA

Banten memiliki latar belakang sejarah yang gemilang. Selama kurang lebih tiga ratus tahun (1525-1825) eksistensi Banten sebagai sebuah kerajaan Islam besar serta berjaya dalam pengembangan perniagaannya, dan Banten menjadi sebuah emporium (pusat perdagangan) dan sekaligus imperium (kerajaan besar). Sebuah peristiwa sejarah ketika tahun 1511, kota Malaka diduduki dan dijajah Portugis, banyak para pedagang Islam yang menghindar dari kota Malaka dan mereka mengalihkan perniagaannya ke Bandar Banten, sesudah itu Bandar Banten menjadi ramai. Pada bulan November 1596 Belanda berhasil mengarungi jalur baru melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan berhasil mengarungi Samudera Hindia dan singgah di Pelabuhan Banten.

Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan bersama Willem Lodewijk yang menjadi salah seorang pedagang yang ikut de Houtman terheran-heran melihat kota Banten yang besarnya sejajar dengan kota Amsterdam. Ia lebih kagum lagi karena di pelabuhan Pabean Banten Lodewijk melihat paling tidak ada 36 kapal asing sedang singgah dan berlabuh di Banten. Ia juga melihat bahwa pasar Banten dibuka pagi dan sore yaitu Pabean dan Karangantu. Informasi dari Cornelis de Houtman yang ditulisnya dalam buku perjalanan berjudul: "De Eerste Schippvart naar Oost-Indie ini menjadi catatan penting untuk sejarah Banten abad XVI telah menjadi sebuah emporium besar.

Ragam hias gerabah di Banten Lama merupakan dasar dari pada dasar yang terdapat pada fragmen gerabah yang ditemukan dalam penelitian arkeologi yang dilaksanankan oleh Pusat Penelitian Arkeologi yang dilaksanakan mulai tahun 1976 dan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2004.

Ragam Hias Gerabah Banten Lama

Di antara 29.494 buah gerabah yang dikumpulkan selama ekskavasi berlangsung, terdapat 447 buah fragmen berhias (perbandingan antara kereweng tak berhias dan berhias). Sebagian besar merupakan bagian-bagian dari wadah, terdiri dari fragmen tepian, leher, badan, dan dasar, sedangkan sebagian kecil antara lain terdiri dari fragmen unsur bangunan seperti memolo (hiasan puncak atap bangunan).

Dari jumlah 447 buah itu seluruhnya dijadikan sampel. Sebagian ditemukan di permukaan situs dan sebagian lagi di dalam lubang ekskavasi, serta ditemukan pada 4 dari 5 situs yang diteliti. Perinciannya ialah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah	Perincian	
			Permukaan	Ekskavasi
1.	Sukadiri	351	146	205
2.	Panjunan	69	48	21
3.	Banten Lama	22	22	-
4.	Banten Girang	5	5	-
5.	Pakojan	-	-	-
	Jumlah	*447*	*221*	*226*

Persebaran kereweng hias di ke-13 kotak ekskavasi di Sukadiri adalah tidak merata, baik yang berasal dari permukaan maupun ekskavasi. Seperti ternyata dalam tabel di bawah, temuan kereweng hias yang terbanyak ialah dari SKD XII dan SKD XIV, sama seperti halnya dengan temuan kereweng tak berhias (Mundardjito, *et.al.*, 1980: 32)

Setelah dilakukan pengamatan terhadap ragam hias ini, maka dapat diketahui ada lima macam teknik menghias pada keramik lokal yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Teknik gores (*incised*) yaitu teknik menggoreskan suatu alat tajam terhadap permukaan keramik lokal baik yang masih basah maupun setelah kering.

b. Teknik tekan (*impressed*) yaitu teknik menekankan suatu alat pada permukaan keramik lokal yang masih basah. Alat yang digunakan ada 2 macam, yaitu: (1) dengan cap, dan (2) dengan bukan cap.
c. Teknik pukul, yaitu teknik memukulkan suatu benda terhadap permukaan keramik lokal yang masih basah.
d. Teknik cubit (*expressed*) yaitu teknik mencubit dengan jari bagian yang masih basah. Hiasan ini biasanya terdapat pada tepian wadah.
e. Teknik tempel (*applied*) yaitu teknik menempelkan tanah liat basah berbentuk hiasan pada permukaannya. Ada 2 jenis hiasan yang ditempelkan yaitu: (1) tempelan dari hasil cetakan. Hiasan ini dicetak dulu dengan cetakan tanah liat bakar, setelah terbentuk barulah ditempelkan pada bagian yang akan dihias. (2) Tempelan bukan hasil cetakan tetapi berupa tempelan biasa yang kemudian baru dihias. (Mundardjito, *et.al.*, 1980: 32)

Temuan ragam hias pada gerabah dari Situs Sukadiri

Berdasarkan pengamatan terhadap ragam hias yang ada di Sukadiri (SKD) dapatlah diklasifikasikan sebagai berikut (gambar 27-31):

a. Dari teknik gores yang menggunakan alat tajam menghasilkan hiasan dengan motif: daun (no. 62), tumpal (no. 61), dan anyaman (no. 72)
b. Dari teknik tekan:
   1) Cap, menghasilkan hiasan dengan motif:
      a) Ceplok, dengan variasi bentuk lingkaran polos dan bunga (no. 26)
      b) Belah ketupat, dengan variasi bentuk bunga (no. 10)
      c) Segi empat, dengan variasi bentuk geometris murni(no. 29), tumpal bergerigi bunga (no. 50) dan bergerigi ganda (no. 44)
      d) Kerang, yaitu hiasan yang diperoleh dengan cara menekankan badan kerang sehingga menimbulkan hiasan badan kerang (no. 60).
      e) Topeng dan manusia, tetapi sudah distilir hanya bentuk dasar masih jelas terlihat (no. 63).
   2) Bukan cap, menghasilkan hiasan dengan motif :
      a) Gerigi miring (no. 32).
      b) Segi empat yang dijajarkan miring (no. 35).
      c) Hiasan seperti bunga (no. 41).
c. Teknik cubit. Hiasan ini digunakan sebagai hiasan pokok dan hiasan tambahan (no. 64).

d. Dari teknik pukul dengan menggunakan alat sapu menghasilkan ragam hias no. 71.

e. Dari teknik tempel

1) Hasil cetakan, menghasilkan hiasan dengan motif bunga (no. 30 dan 66), dan gabungan bulat dan hiasan dari teknik tekan (no. 68).

2)Bukan hasil cetakan, menghasilkan hiasan dengan motif rangkaian ranting, no. 74 (Mundardjito, *et.al.*, 1980: 33).

Berdasarkan pengamatan dapatlah diketahui bahwa hiasan yang teramat populer dari wadah keramik lokal di Sukadiri ialah motif tumpal bergerigi dan ceplok dengan menggunakan teknik tekan cap (dari logam), serta motif yang dihasilkan dengan teknik cubit. Sementara yang paling tidak populer ialah motif yang dihasilkan dengan teknik pukul dari alat sapu dan motif yang dihasilkan dengan teknik tempel tanpa cetakan.

Temuan ragam hias dari Situs Panjunan

Mengenai ragam hias yang terdapat di Panjunan (PJN) pada dasarnya mempunyai persamaan. Hanya saja karena jumlah sampel yang jauh lebih sedikit dari SKD, maka ada beberapa teknik motif hiasan yang terdapat di SKD tetapi tidak di PJN. Teknik yang terdapat di PJN hanya tiga yaitu teknik a. Tekan, b. Cubit, dan c. Tempel. Klasifikasi di bawah ini didasarkan kepada seluruh teknik dengan motif hiasan yang ada di SKD.

a. Dari teknik tekan

1) Cap, menghasilkan hiasan dengan motif

a) Ceplok, dengan variasi bentuk lingkaran polos (no. 23), dan bunga (no. 28).

b) Belah ketupat dengan bentuk bunga (no. 5)

c) Segi empat dengan bentuk bunga (no. 14)

d) Segi enam dengan motif bunga atau hiasan mata buah manggis (no. 31).

e) Tumpal dengan variasi bentuk bergerigi yang membentuk segi empat (no. 59), bunga api (no. 52), dan jajaran hati (no. 36).

2) Bukan cap, menghasilkan hiasan dengan motif:

a) Gabungan dari gerigi miring dan gambar (1a) ialah ragam hias no. 33 dan 34

b) Segi empat berjajar (no. 38)

c) Bulat lonjong berjajar miring (no. 40)

d) Hiasan seperti bunga (no. 41)

b. Dari teknik tempel

1) Hasil cetakan menghasilkan motif bunga (no. 75)

2) Bukan hasil cetakan, menghasilkan motif rangkaian ranting.

Berdasarkan pengamatan kami dapat diketahui bahwa di PJN pun (seperti di SKD) ragam hias yang paling populer ialah tumpal bergerigi dan ceplok dari teknik tekan cap serta motif yang dihasilkan dengan motif cubit. Sementara yang tidak populer ialah motif bunga api dari teknik tekan cap.

Mengingat bahwa koleksi Banten Girang amat sedikit (lima buah) dan sukar dijadikan bahan untuk perbandingan jumlah yang setara dengan temuan di SKD dan PJN, kurang tepatlah jika dilakukan perbandingan tipologis. Tetapi dari sampel yang sedikit ini dan dianggap kurang representatif, dapatlah digambarkan secara sepintas teknik dan motif apa saja yang ada di BB, yaitu motif yang dihasilkan dengan teknik cubit ialah no. 64.

Masih ada temuan yang dianalisis dari Banten Lama (BL) yang ditemukan di daerah Banten Lama tetapi tidak diketahui pasti apakah berasal dari situs SKD atau dari luar SKD. Teknik menghias di sini hanya ada dua yaitu teknik gores dan teknik tekan, sedangkan motif yang dihasilkan adalah motif daun dari teknik gores (no. 62), motif tumpal bergerigi ganda (no. 47), gabungan tumpal bergerigi ganda dan ceplok lingkaran polos(no. 55), gabungan bergerigi ganda dan ceplok lingkaran serta setengah bulatan (no. 57), gabungan ceplok empat persegi, ceplok lingkaran polos dan bunga (no. 22) dan ceplok segitiga daun (no. 49) dari teknik tekan cap.

Ragam hias dari unsur bangunan yang terdapat di SKD diduga merupakan fragmen dari sudut bangunan dan ada juga ekor naga yang didapatkan dari hasil temuan permukaan, sedangkan temuan dari lubang ekskavasi tidak ada. Fragmen bangunan dari PJN adalah berupa memolo (gambar 48) dan unsur bangunan lain. Dari permukaan Bl ditemukan fragmen bangunan berupa kepala naga. Dari hasil pengamatan ini maka dapat dikatakan bahwa banyak persamaan dari teknik menghias pada kedua tempat tersebut, yaitu teknik tekan tanpa cap dengan motif bunga-bungaan dan teknik gores dengan motif sulur-suluran serta teknik tempel dengan dan tanpa cetakan bermotif bunga-bungaan dan dedaunan.

Sebagai akhir dari uraian mengenai ragam hias keramik lokal dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis ragam hias yang ada di SKD ialah 71 jenis dan di PJN ialah 40 jenis, atau di seluruh situs Banten Lama ada 75 jenis yang menunjukkan kegiatan artistik yang cukup tinggi dari para pembuat gerabah pada masa tersebut di Banten (Mundardjito, *et.al.*, 1980: 35).

Hasan Muarif Ambary, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran keterangan gambar pola hias gerabah

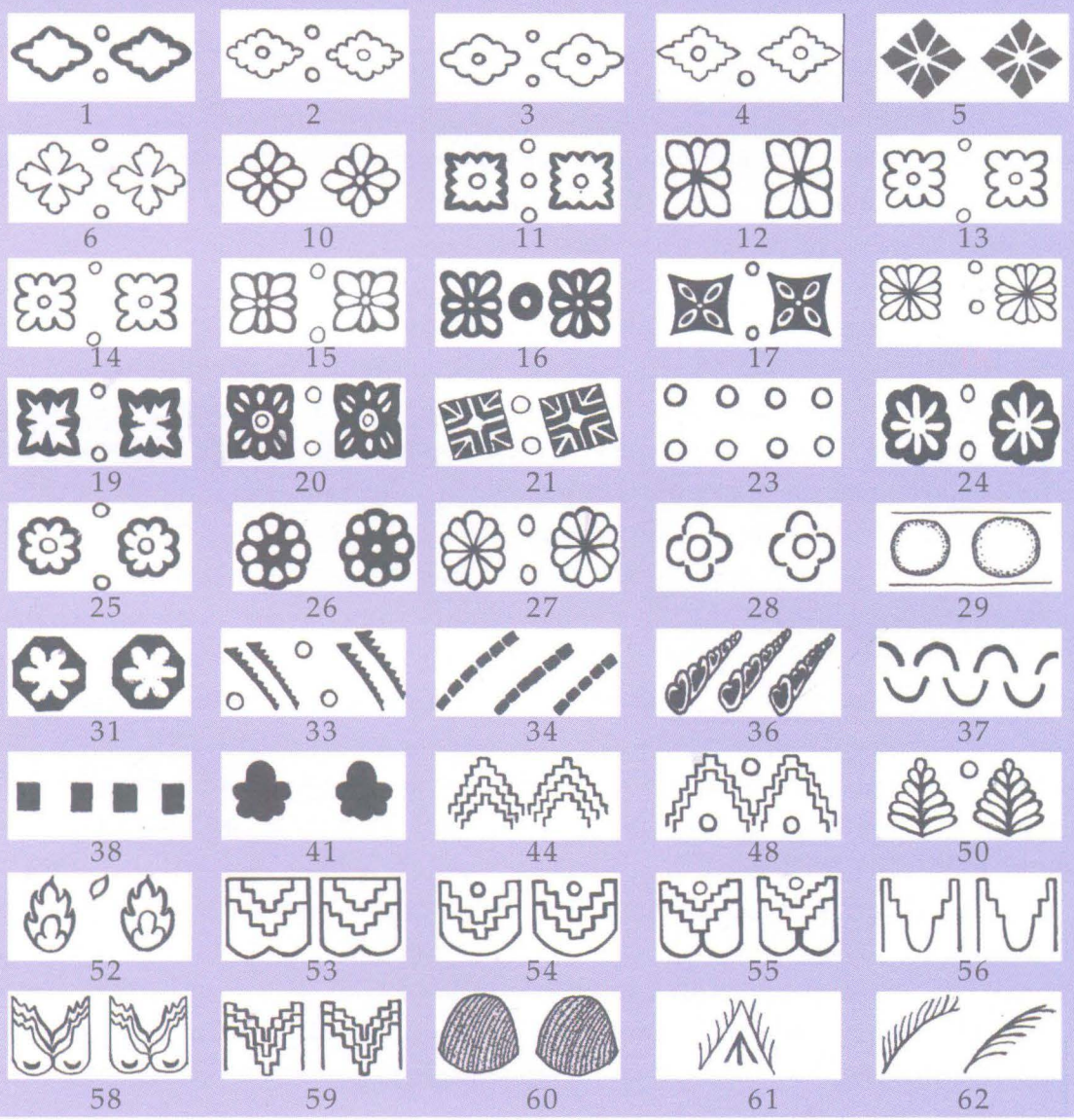

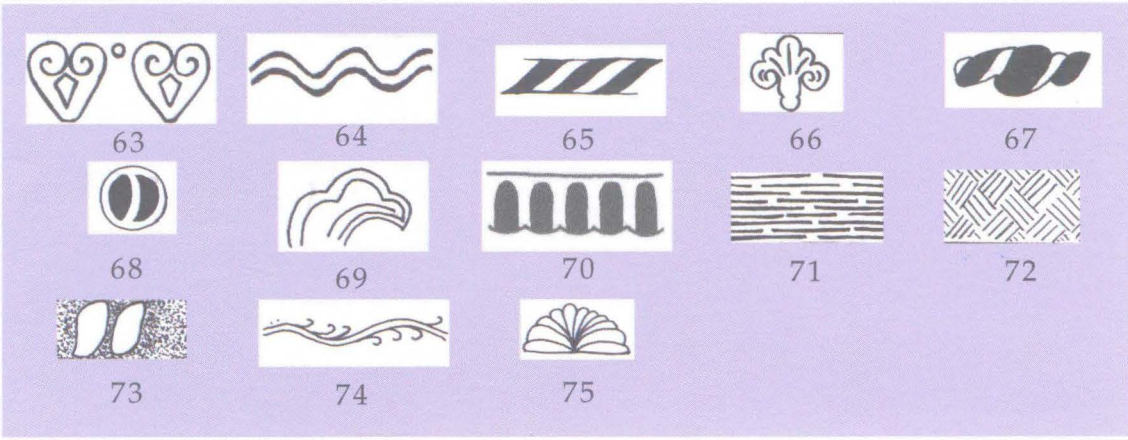

Temuan Keramik asing di Banten Lama

Di samping temuan arkeologis yang berupa monumen, Banten Lama juga menyimpan banyak temuan permukaan berupa sejumlah besar artefak seperti gerabah, keramik, dan mata uang (koin). Sisa-sisa tinggalan arkeologis ini memperlihatkan kebesaran Kesultanan Banten pada masa lalu.

Temuan keramik di Banten Lama antara lain piring, mangkuk, kotak kecil, gentong, vas bunga, cangkir, kendi, wadah teh (teko), sendok, dan ornamen-ornamen berbentuk kepala burung atau hewan lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat analisa kronologi dan tempat asal keramik-keramik itu dibuat. Klasifikasi berdasarkan kronologi terhadap keramik-keramik yang ditemukan di situs Banten Lama dapat memberikan keterangan untuk melengkapi dan membuktikan sejarah tertulis tentang Kesultanan Banten.

Material, bentuk, dekorasi dan warna keramik yang ditemukan hampir secara keseluruhan berasal dari Cina selama lima dinasti, yaitu: Dinasti Sung (960-1280 M), Yuan (1280-1368 M), Dinasti Ming (1368-1644 M), masa transisi (1640-1644 M) dan selama masa Dinasti Ching (1644-1912 M). Temuan keramik yang paling banyak ditemukan berasal dari masa Ching. Keramik-keramik yang ditemukan di Banten Lama ada yang berasal dari negeri lain di luar Cina, seperti dari Annam (abad XIV-XVI), Eropa (abad XVII-XIX), dan Jepang (abad XVII-XIX) (Ongkodharma, 1978: 55; Mundardjito *et.al*, 1978: 45).

Hasil dari pengklasikasian secara kronologis temuan keramik Banten, memperlihatkan bahwa banyak keramik yang berasal dari masa Ching, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Lama Banten telah dihuni sejak abad ke-17 hingga 19. Kesimpulan lainnya adalah keramik yang ditemukan di Banten Girang berasal dari masa Dinasti Sung. Data tersebut memperlihatkan bahwa Banten Girang adalah lebih

tua sebagai daerah pemukiman dibandingkan dengan Banten Lama. Data ini juga dapat diketahui dari catatan tertulis yang menyatakan bahwa setelah pendirian Kerajaan Islam Banten, pusat kekuatan dan kekuasaan yang dahulunya berada di Banten Girang dialihkan ke istana Surosowan di Banten Lama (Mundardjito *et.al*,1978: 1).

KERAMIK DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN NIAGA DAN KESULTANAN BANTEN

Keramik adalah benda tanahliat dari bahan porselin dan batuan yang dibakar dengan suhu lebih dari 1000° C. Sementara istilah "Keramik Banten" dalam tulisan ini mengacu kepada jenis barang keramik berglasir impor, yang ditemukan khususnya dalam penelitian arkeologi di situs-situs penting Sejarah Banten yaitu Banten Girang, Banten Lama, dan Tirtayasa. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Banten tidak hanya diketahui melalui sumber tertulis atau tinggalan arsitekturnya, tetapi dapat juga dari sejumlah besar temuan keramik.

Keragaman Keramik di Banten

Keramik impor tertua ditemukan di dua situs dari masa sebelum kesultanan Banten yaitu di: (1) Banten Girang, Desa Sempu, Serang, dan (2) Odel, Kasemen, Serang. Di Banten Girang temuan itu berasal dari abad X, dan berlanggam Yue (*Yue Ware*). Jumlahnya amat sedikit dibandingkan temuan keramik dari masa dinasti Song hingga Yuan abad XII-XIV, yang berjenis seladon dan berwarna hijau zaitun, serta bentuknya berupa piring, mangkuk, cepuk, *figurine*, tempayan, buli-buli dan guci. Di antaranya ada yang termasuk jenis keramik yang kualitasnya amat baik dan halus. Keramik seladon dari masa ini dikenal juga dengan nama *Longquan*, sedangkan yang berwarna putih disebut *Dehua*, dan yang berwarna putih kebiruan atau kehijauan disebut *Qingbai*. Selain itu di situs ini ditemukan keramik yang kualitasnya kasar buatan tungku-tungku di Guangdong/Fujian.

Keramik Seladon Cina Selatan Abad XII-XIII

Sekitar perempat pertama abad XVI, daerah pesisir Banten berubah fungsinya dari pelabuhan menjadi sebuah ibukota bertembok keliling dari bata. Dalam masa

Kesultanan Banten ini perkembangan tak hanya terjadi di Banten Lama tetapi juga di daerah Tirtayasa. Selain keramik biru-putih yang mendominasi populasi temuan, di kedua lokasi itu terdapat pula keramik satu-warna (*monochrome*) maupun banyak-warna (*polychrome*). Bentuk temuan keramik dari masa Dinasti Ming hingga Qing lebih banyak ragamnya daripada masa sebelumnya, karena di Banten ditemukan pula gelas sloki, botol, vas, pasu, cangkir, kendi, teko, dan sendok.

Seladon dari Dinasti Song, Cina

Sebagian besar temuan keramik masa Dinasti Ming abad XV-XVII berasal dari pelabuhan Swatow, yang kemudian didistribusikan ke pasar bebas. Produk keramik yang dikenal *Swatow* ini antara lain berupa piring, yang diproduksi secara massal, dan mutunya rendah karena penggarapannya kasar sebagaimana dicirikan terutama oleh adanya butiran-butiran pasir yang menempel pada bagian dasar.

Piring dan Mangkuk biru putih swatow,Dinasti Ming, Banten Lama

Selain ditemukan keramik berglasir biru-putih dari masa yang lebih muda, terdapat pula keramik *Batavian Ware* dari masa Dinasti Qing abad XVII-XVIII yang cirinya berwarna biru-putih-coklat, biru-putih-coklat-kuning emas (dipadu dengan medalion atau hiasan di dalam panel-panel), dan hijau-kuning-coklat-kuning merah, yang dihias dengan teknik hias bawah-glasir atau atas-glasir. Keramik yang berbentuk piring dan mangkuk kecil ini merupakan pesanan orang Belanda yang dikirim dari Swatow ke Belanda melalui Batavia.

Sebagian besar temuan keramik Cina berasal dari pabrik (*kiln*) Jingdezhen, salah satu pabrik besar yang memproduksi keramik halus, karena pada awalnya pabrik ini hanya membuat barang-barang untuk kepentingan kaisar dan penguasa pada masanya.

Fragmen kepala manusia, Qinbai, dari Dinasti Yuan, abad XIII-XIV, ditemukan di Banten Girang

Selain itu ada juga keramik buatan Fujian/Guandong yang penggarapannya lebih kasar dibandingkan dengan Jingdezhen, karena Fujian memproduksi keramik dalam partai besar sebagai komoditas dagang, yang dikirim ke kawasan Asia Tenggara (termasuk Nusantara) untuk digunakan masyarakat sehari-hari.

Di situs Kota Banten Lama ditemukan juga keramik dari Vietnam (*Annamese*) abad XV-XVII seperti mangkuk dan cepuk warna biru kehitaman (*dark blue*)-putih, yang pada bagian dasar luarnya ada yang diwarnai coklat oksidasi dan ada yang tidak, serta cepuk enamel banyak-warna dan satu-warna. Selain itu ditemukan pula keramik Thailand buatan tungku-tungku *Sukhotai* berupa cepuk bertutup dan vas warna biru-putih kehitaman, dengan hiasan sulur dan garis-garis vertikal maupun horisontal; keramik buatan *Sawankhalok* berupa piring, mangkuk, dan cepuk, berwarna hijau muda (sering disebut seladon Thailand), yang pada bagian dasar luarnya diberi oksidasi merah, berglasir tebal dan bintik-bintik hitam; serta keramik buatan tungku *Singburi* berupa tempayan dan guci warna coklat.

Sebelah kiri 3 fragmen keramik anamese, dan sebelah kaan adalah buli-buli Thailand

Keramik lain yang juga memiliki ciri sangat mirip dengan keramik Cina ialah keramik Jepang *Hizen Ware* dari abad XVII-XVIII, yang dari segi jumlah temuannya di Banten menduduki peringkat kedua setelah keramik Cina.

Keramik ini biasa disebut *Imari*, sesuai dengan nama pelabuhannya. Keramik Jepang diekspor pertama kali dari Imari ke Asia Tenggara (termasuk Indonesia) pada pertengahan abad XVII. Bentuk yang paling banyak ditemukan ialah piring biru-putih dengan pola *kraak* (*fuyohde*) yang beberapa di antaranya ditandai dengan tulisan VOC karena dipesan oleh Belanda, berasal dari awal abad XVIII. Ditemukan pula dalam jumlah banyak mangkuk biru-putih dengan hiasan ikan dan ombak yang biasa disebut *araisomon*, meniru keramik Cina; kemudian jambangan besar bertutup, dengan pegangan di kanan-kiri, dan hiasan *peony*-botan-pohon buah-buahan (Ohashi 1993). Temuan pecahan-pecahan jambangan ini dapat direkonstruksi menjadi utuh dan kini disimpan di Museum Situs, Banten.

Vas keramik Hizen, Jepang

Selain keramik Jepang biru-putih, di Banten banyak ditemukan juga jenis hijau seladon *Hasami* berupa piring, dan *Karatsu Ware*, yang berwarna coklat kehijauan bergurat putih dengan pola lingkar berasal dari abad XVII. Jenis ini jarang sekali ditemukan di luar Jepang, karena memang tidak untuk diekspor. Jika di Banten ada jenis semacam ini, mungkin benda itu merupakan pesanan khusus atau sebagai hadiah kepada sultan dan penguasa Banten pada waktu itu.

Dalam pada itu, di Banten ditemukan keramik Eropa berupa piring, cangkir, dan gelas sloki; sebagian besar berwarna biru-putih dengan motif hias khas Belanda berupa kincir angin yang dipadu dengan hiasan flora dan bentuk geometris. Di antara produk keramik Eropa, ditemukan sejumlah besar pipa keramik untuk alat merokok, produksi pabrik *Gauda* (Belanda), yang dijumpai tidak hanya di kompleks Benteng Speelwijk sebagai tempat pemukiman Belanda, tetapi juga di kompleks keraton kesultanan, yang dapat menjadi petunjuk tentang gaya hidup sebagian masyarakat Banten.

Temuan keramik yang paling sedikit dijumpai di Banten ialah keramik Persia dari abad XVIII-XIX berupa piring berwarna biru-putih.

Keramik dan Fluktuasi Perniagaan

Setelah keramik tertua abad X, di wilayah Banten ditemukan berbagai jenis keramik impor dari masa-masa selanjutnya yang berkesinambungan, dan jumlahnya semakin meningkat. Data ini tidak hanya menunjukkan semakin meningkatnya minat dan kebiasaan penduduk memakai barang ini, tertapi juga menjadi salah satu indikasi lebih nyata tentang aktivitas perniagaan di Banten.

Pada fase awal, keramik yang dipasok ke Banten hanya dari Cina, yang mencapai puncaknya pada sekitar abad XII-XIV. Keberadaan artefak keramik dari masa ini sudah tentu dapat mengisi kekosongan data yang selama ini belum begitu jelas terungkap dari sumber sejarah tertulis sebelum abad XVI. Oleh karena itu, tidak terlalu aneh bila berita Portugis awal XVI menyebutkan bahwa di Banten telah ada pelabuhan dan ibukota di pedalaman yang berperan dalam perniagaan lada, sebagaimana juga dibuktikan dalam penelitian di Banten Girang dan Odel.

Bergesernya ibukota Banten ke pesisir muara sungai Cibanten ditandai juga dengan peningkatan ragam keramik yang didominasi warna biru putih dari Dinasti Ming abad XVI-XVII. Dalam periode ini keterangan mengenai sejarah perniagaan di Banten semakin jelas. Banten yang menjadi kota niaga dikunjungi berbagai

pedagang asing. Karena itu di Banten hadir sejumlah besar keramik dari Vietnam, Thailand, dan Jepang dari abad XVII-XVIII.

Masuknya keramik bukan-Cina dan bersamaan dengan itu menyusutnya keramik Cina di Banten, khususnya pada masa transisi Ming-Qing abad XVII, terkait dengan pergolakan politik yang terjadi di Cina. Produksi atau pengiriman barang keramik dari Cina menurun, ketika permintaan barang ini meningkat di Banten. Kekurangan barang inilah yang kemudian digantikan oleh pemasokan produk keramik lain, khususnya dari Jepang untuk memenuhi permintaan pasar Asia Tenggara, Asia Barat, dan Eropa.

Setelah masa itu (terutama abad XVII-XVIII), Banten dibanjiri lagi oleh keramik Cina (khususnya dari masa Qing), di samping keramik Jepang. Kondisi ini agaknya dapat dikaitkan dengan masa puncak kejayaan Kesultanan Banten di bawah Tirtayasa. Dalam periode ini tergambar cukup jelas tentang jaringan perdagangan keramik melalui catatan muatan kapal-kapal dagang Eropa seperti dikemukakan oleh Volker (1954).

Sejak tahun 1610—1624 pengiriman keramik ke Eropa melalui Banten semakin banyak, antara lain pada tahun 1612-an kapal *Wapen van Amsterdam* memuat piring; kapal *Vlissingen* memuat berbagai jenis piring, mangkuk, kendi, cawan, teko, pot, dan botol; kemudian pada tahun 1614 kapal *Gelderland* memuat piring, mangkuk, dan cawan; kapal *Rotterdam* dan kapal *Mauritius* pada tahun 1616 memuat barang yang sama seperti cawan, piring, dan mangkuk; serta kapal *Dolphyn* dan kapal *Hart* juga memuat barang-barang serupa. Sampai dengan akhir tahun 1624 telah banyak keramik dari jenis kualitas harian dikirimkan dari Banten ke Eropa. Di sini dapat dilihat peran pedagang Eropa dalam mendistribusikan keramik, khususnya dari Jepang. Bukan pedagang Jepang yang membawa keramiknya ke Banten, karena dalam sejarah Jepang pada waktu itu ada larangan untuk berdagang keluar dari Jepang (Sakai dan Naniek 2000).

Sejak tahun 1634 pengiriman keramik ke Eropa melalui Banten mulai menurun bersamaan dengan pegeseran pusat dagang Eropa ke Batavia (Volker 1954; Naniek 1981). Namun demikian, di Banten perdagangan keramik masih tetap berlangsung sampai awal abad XVIX, walaupun perdagangan dan pengiriman keramik tidak lagi seramai abad-abad sebelumnya.

Jelaslah bahwa keramik yang ditemukan dalam penelitian di Banten telah memberikan sumbangan yang bermakna guna memperjelas gambaran tentang pertumbuhan peradaban Banten sebagai kota niaga dan negara kesultanan. Keragaman temuan keramik yang cukup lengkap jenisnya di Banten, kini telah

menjadi sebuah koleksi yang amat berharga, meskipun dalam wujud pecahan-pecahan. Sudah tentu sistematisasi koleksi di Museum Situs Banten diperlukan di masa depan karena merupakan aset yang dapat digunakan dan dikembangkan sebagai salah satu pusat studi keramik yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Naniek H Wibisono, staf Asdep Urusan Arkeologi Nasional ,
Kementerian Kebudayan dan Pariwisata

Bab VI
Masa Pengaruh Kolonial

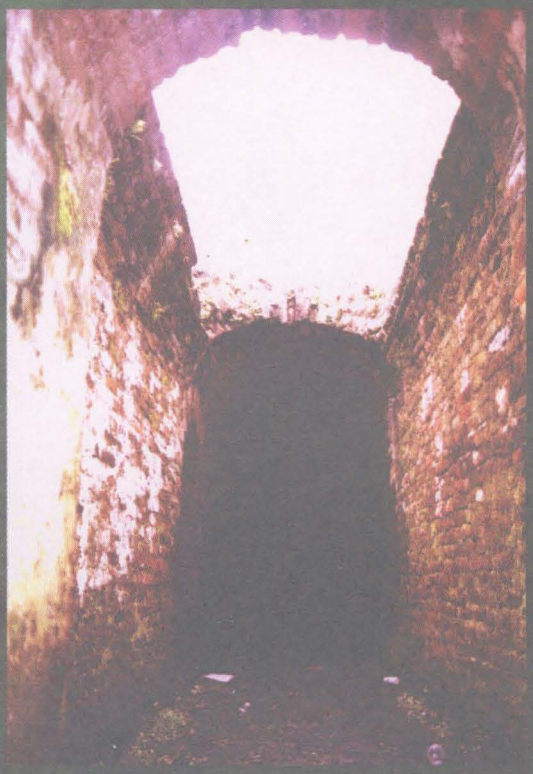

Lorong menuju gudang mesiu Benteng Speelwijk

Bab VI

MASA PENGARUH KOLONIAL

Tak dapat dipungkiri yang menjadi faktor keruntuhan Kerajaan Banten di antaranya ialah akibat ekspansi dan tekanan oleh pihak asing, dalam hal ini pendatang dari Benua Eropa yang bersaing memperebutkan komoditas dagang. Pada awalnya pendatang Eropa tersebut berupaya mencari asal sumber komoditas dagang melalui pelayaran dengan tujuan melakukan transaksi dagang. Namun upaya selanjutnya ialah menguasai perdagangan daerah sumber bahan baku dan menjadikan daerah tersebut menjadi koloninya sehingga muncul istilah kolonial.

Di dalam rentang waktu awal hadirnya bangsa kolonial di nusantara hingga terbentuk negara Republik Indonesia cukup banyak meninggalkan data sejarah (dalam bentuk tertulis) maupun data arkeologi (dalam wujud fisik/materi). Peninggalan kolonial dalam wujud data arkeologi yang dapat disaksikan hingga saat ini ialah bangunan gedung, benteng, jembatan, jalan, mesin-mesin pabrik, kereta api dan jaringan relnya, membuktikan bahwa bangunan *public service* maupun rumah huni pribadi yang didirikan oleh orang-orang Eropa – sebagian besar Belanda – di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Mereka tidak menerapkan konsep arsitektur Eropa seutuhnya dalam membangun melainkan mengakomodasi berbagai faktor dan lingkungan, di antaranya menyesuaikan dengan iklim, kondisi alam, lingkungan sekitar, dan budaya setempat.

Sejarah Kolonial di Banten

Wilayah Banten adalah salah satu kawasan yang dijadikan sebagai tempat hunian maupun pusat administrasi pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Letak daerah Banten tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Untuk mengetahui latar belakang keberadaan bangsa kolonial di Banten dapat dimulai dari sejarah masa jaya dan surutnya Kerajaan Banten.

Bangsa Eropa yang pertama kali mendapatkan tempat untuk berdagang di Banten ialah Portugis. Selanjutnya Inggris, juga mendirikan *loji* baru disusul kemudian oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Perancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antar pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenangnya dengan menerapkan strategi secara politik maupun militer (Ekadjati,

1995: 97; Lubis, 2003: 33).

Rombongan Belanda yang pertama kali mendarat di Banten tercatat pada tanggal 22 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, ekspedisi ini menemui jalan buntu dan tidak diperkenankan untuk terus tinggal di Banten oleh Sultan Banten saat itu, yaitu Sultan Banten ke enam, Abdul Mufakhir Mahmud 'Abdul Kadir Kenari. Tanggal 28 November 1598 ekspedisi dagang Belanda kembali mendarat di Banten dan mampu menarik simpati penguasa saat itu sehingga berhasil mengisi penuh tiga buah kapalnya dengan barang dagangan yang laku di pasaran Eropa (Kartodirjo, 1988:70-73). Hal ini diteruskan dengan pendaratan ekspedisi-ekspedisi pada masa selanjutnya.

Mengingat hasil perdagangan rempah-rempah yang begitu besar maka orang-orang Eropa secara terus menerus berdatangan dan bersaing untuk melakukan perdagangan. Ternyata terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tahun 1602 didirikanlah *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC mempunyai hak-hak khusus seperti monopoli untuk berdagang di wilayah antara Amerika dan Afrika, mengangkat pegawai, mempunyai mata uang sendiri, membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan peperangan, mendirikan benteng, bahkan menjajah. Sedangkan kewajiban VOC adalah bertanggung jawab kepada *Staten General*, dan harus membantu pemerintah Belanda dengan uang dan angkatan bersenjatanya bila terjadi perang (Lubis, 2003: 46). Harus menjadi perhatian ialah sebagian besar anggota VOC berasal dari para pedagang maupun pihak swasta yang memiliki reputasi buruk di Eropa.

VOC membuka kantor cabang di Banten pada tahun 1603 di bawah pimpinan Francois Wittert. Namun sikap tegas Sultan Banten memaksa kantor tersebut untuk dipindahkan ke Jayakarta pada tahun 1611. VOC mengangkat Jan Pieterszoon Coen sebagai Kepala Tata Buku VOC yang diberi kewenangan atas kantor dagang VOC di Banten dan Jayakarta. Namun perhatiannya dipusatkan terhadap Jayakarta. (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 67). Dari Jayakarta, VOC secara perlahan melakukan penetrasi terhadap perekonomian maupun politik di Pulau Jawa.

Banten menjelang abad ke–17 merupakan daerah yang memproduksi lada sebagai komoditas utama dan pemegang monopoli perdagangan lada di barat Pulau Jawa hingga daerah selatan Sumatera. Memasuki pertengahan abad ke-17, perdagangan lada di Banten mengalami kemunduran yang disebabkan pertentangan politik di kalangan keluarga sultan dalam memperebutkan tahta.

Dari pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-18 situasi politik, ekonomi, dan sosial Kerajaan Banten mengalami degradasi yang memprihatinkan. Pada kesempatan

itu, VOC mempengaruhi pihak kerajaan dan berhasil mengitervensi sultan untuk menghasilkan kebijakan yang sepihak menguntungkan VOC. Sebagai contoh, seperti pada masa pemerintahan Sultan Abdul Mafakih Muhammad Aliyuddin (1773-1799), VOC mewajibkan rakyat Banten yang berumur lebih dari 16 tahun dan berbadan sehat, untuk menanam 500 batang pohon lada. Hasilnya harus dijual kepada VOC melalui petugas kerajaan yang ditunjuk. Pembayaran dilakukan secara barter dengan bahan kebutuhan pokok yang dihargakan sangat tinggi. Dengan cara demikian, rakyat hampir tidak memperoleh keuntungan sama sekali (Michrob dan Chudari, 1993: 171-172).

Setelah pemerintahan Sultan Aliyuddin berakhir, tahta kerajaan kemudian beralih ke tangan Pangeran Muhyiddin. Peristiwa ini bertepatan dengan dibubarkannya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Kekuasaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda di nusantara.

Pemerintahan Hindia Belanda di Banten

Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama ialah H. W. Daendels (1808-1811). Pada tanggal 1 Januari ia mendarat di Anyer dan pada tanggal 5 Januari 1808 memutuskan Jayakarta menjadi pusat pemerintahan dengan nama Batavia. Peralihan ini membuat sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya dan secara administrasi melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Melalui sistem yang baru, Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung (*direct rule*). Daendels melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional, para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah dan menerima gaji.

Ketika terjadi perubahan politik, situasi Kesultanan Banten dalam keadaan lemah. Di saat yang bersamaan, Sultan Abunasar Muhammad Ishak Zainul Muttaqin tetap tidak mengakui kekuasaan Daendels. Puncak ketegangan antara Sultan Banten dan Daendels terjadi pada tanggal 21 November 1908, ketika seorang utusan Daendels yang dikirim ke Keraton Surosowan, Philip Pieter Du Puy, dibunuh di depan pintu gerbang keraton tersebut. Kejadian ini dibalas oleh Daendels dengan menyerang Keraton Surosowan pada hari itu juga (Chijs, 1881: 43). Keraton Surosowan berhasil dikuasai Daendels, Sultan Banten ditangkap dan ditahan di Batavia, kemudian diasingkan di Ambon (Michrob dan Chudari, 1993: 175).

Untuk melanjutkan roda pemerintahan, Daendels mengangkat putra Pangeran Ratu Aliyuddin sebagai sultan dengan gelar Sultan Abunasar Mufakir Muhammad Aliyuddin II (1808 – 1810) atau biasa dipanggil Sultan Aliyuddin II. Berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Daendels tanggal 27 November 1808, mengharuskan sultan Banten setia, taat, dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Lubis, 2003: 93). Berdasarkan hal itu, Sultan Banten dijadikan pegawai

pemerintah kolonial. Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan perlawanan yang dipimpin Pangeran Ahmad, putra Sultan Aliyuddin II (Michrob dan Chudari, 1993: 175). Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Ahmad menimbulkan kecurigaan bagi Daendels, bahwa Sultan Banten berada di belakang itu semua. Oleh karena itu, sultan Banten ditangkap dan dipenjara di Batavia. Benteng dan Keraton Surosowan dihancurkan dan dibakar. Peristiwa ini masih terjadi dalam tahun 1808 (Lubis, 2003: 94).

Sultan Muhammad Syafiudin (1809 – 1813), putra Sultan Zainul Shalihin diangkat pemerintah kolonial sebagai pengganti Sultan Aliyuddin II dan kepadanya diserahkan daerah Banten Hulu (Selatan). Pada masa pemerintahan Sultan Syafiudin pusat pemerintahan dipindahkan dari Keraton Surosowan ke Keraton Kaibon.

Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen, namun Jansen tidak mampu menghadapi serbuan armada Inggris ke Pulau Jawa yang terjadi pada Agustus 1811. Akibatnya Belanda menyerah kepada pihak Inggris di Salatiga pada tanggal 17 September 1811 melalui Kapitulasi Tuntang (Graaf, 1949: 372; Raffles I, 1978: xxvi-xxvii; Ricklefs, 1981: 108-109; Lubis, 2003: 89).

Pemerintahan Kolonial Inggris

Inggris menetapkan Thomas Stanford Raffles sebagai pejabat penguasa Pulau Jawa pada tahun 1811 (1811 – 1816). Beberapa istilah administrasi struktural mengalami perubahan, seperti *prefektur* diganti menjadi karesidenan, dan jabatan *prefek/landrostambt* diganti menjadi residen. Dibentuk jabatan struktural baru, yaitu asisten residen, dan wedana yang mengepalai distrik. Pada saat itu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan.

Kesultanan Banten pada saat itu dibawah kekuasaan Sultan Muhammad Syafiuddin. Akan tetapi, kondisi wilayah Banten jauh dari ketentraman sehingga pada tanggal 19 Maret 1813 Raffles mendatangi istana sultan untuk membuat sebuah perjanjian. Raffles memaksa Sultan Muhammad Syafiuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten kepada pemerintahan Inggris. Status sultan diubah menjadi "bupati sultan" dan mendapat tunjangan dari Pemerintah Inggris sebesar 10.000 ringgit setahun (Michrob dan Chudari, 1893: 176)

Seluruh daerah Banten telah dikuasai oleh Pemerintah Inggris dan dijadikan sebagai daerah karesidenan. Pada tahun 1813, Raffles juga membagi wilayah Karesidenan Banten menjadi empat kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Banten Lor (Banten Utara) diperintah oleh Pangeran Suramenggala.
2. Kabupaten Banten Kulon (Banten Barat) diperintah oleh Bupati Tubagus Hayudin.
3. Kabupaten Banten Tengah diperintah oleh Bupati Tubagus Ramlan.
4. Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan) diperintah oleh Bupati Tumenggung Suradilaga (Pemda Kabupaten Lebak, 1989: 10).

Kekuasaan Inggris di Pulau Jawa berakhir pada tahun 1816. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara pihak Inggris dan Belanda yang dituangkan dalam Traktat London tanggal 13 Agustus 1814, bahwa pihak Inggris harus mengembalikan Pulau Jawa kepada Pemerintah Hindia Belanda (VBG, XXXIX, 1880: 10; Lubis, 2003: 90). Serah terima kekuasaan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1816.

Kembali ke Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Pasca pengalihan kekuasaan, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellan (1819-1830). Di masa Van der Capellan menjabat sebagai Gubernur Jenderal, di Hindia Belanda terjadi beberapa kali perubahan administrasi kewilayahan. Pada tahun 1854 Pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang pemerintahan baru, yaitu *Regeerings-Reglement* (*RR*) 1854. Berdasarkan undang-undang ini wilayah Banten dibagi dalam empat kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Utara dengan ibukota Serang
2. Kabupaten Barat dengan ibukota Caringin
3. Kabupaten Tengah dengan ibukota Pandeglang
4. Kabupaten Selatan dengan ibukota Lebak

Regeerings-Reglement 1854 merupakan undang-undang yang menjalankan sistem pemerintahan sentralistis dikombinasikan dengan dekosentrasi. Sistem ini dimaksudkan agar efisiensi, efektivitas, dan keseragaman dalam pemerintahan terjamin. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tetap memikul beban berat karena daerah–daerah (karesidenan dan kabupaten/*afdeling*) tidak memiliki hak otonom. Atas dasar hal tersebut, dipersiapkan pemberian hak otonomi dan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) dalam rancangan Undang-undang Desentralisasi tahun 1902. Pada tanggal 23 Juli 1903 (*Staatsblad* 1903/329) keluarlah Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatiwet*). Pada pokoknya, Undang-undang Desentralisasi bertujuan untuk membuka kemungkinan adanya *gemeenschappen*, yaitu daerah yang mempunyai pemerintahan dan hak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasca Perang Dunia I, masyarakat Hindia Belanda merasakan pelaksanaan desentralisasi kurang berhasil. Hal itu, antara lain disebabkan karena uang/biaya yang diserahkan ke daerah sangat minim jumlahnya dan kewenangan yang dapat dijalankan daerah sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 1922 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang Perubahan Pemerintahan atau *Bestuurshervomingswet.* Undang-undang ini bertujuan membentuk kesatuan-kesatuan hukum yang lebih luas. Kesatuan-kesatuan hukum itu adalah bentuk baru, baik dari wilayah administratif (*gewest*) maupun bagian darinya. Dua macam bagian dari *gewest* (wilayah/daerah) yang sama luas dan batasnya disebut *province*, sedangkan bagian

darinya dinamakan *regentschap*. Untuk mengatur wilayah *regentschap*, pada tahun 1922, pemerintah mengeluarkan *Regentschap Ordonnantie*, sedangkan bagi wilayah kotapraja diatur dalam *Stadsgemente Ordonnantie*.

Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur atau sama dengan Provinsi Daerah Tingkat I saat ini. Gubernur berkuasa dalam mengawasi residen dalam menjalankan pemerintahan dan pemeliharaan ketertiban keamanan, sedangkan gubernur bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal (Lubis, 2003: 139).

Berdasarkan *bestuurshervormingswet* (1922), tiap karesidenan dibagi dalam beberapa *afdeling, controle-afdeling, regentschap* (kabupaten), *district, onderdistrict,* dan terakhir desa. Dalam perkembangan selanjutnya, provinsi tetap dibagi dalam beberapa *afdeling*, tetapi masing-masing dipimpin oleh seorang residen. Tiap *afdeling* dibagi ke dalam daerah-daerah yang disebut *onderafdeling*, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen. Biasanya tiap *afdeling* disebut juga *resident ressort* yang meliputi beberapa kabupaten. Secara hierarkis, asisten residen membawahi beberapa orang *controleurs* dan *adspirant-controleurs*.

Gubernur, residen, asisten residen, *controleur*, dan *adspirant-controleurs* merupakan korps *Nederlands Bestuur* atau *Nederlandse Binennlands Bestuur* (*NBB*) yang hanya bisa dijabat oleh orang-orang Belanda. Di samping itu, terdapat pula *Inlandse Binennlands Bestuur* (*IBB*) yang merupakan korps pejabat pribumi. Bupati adalah suatu jabatan rangkap, yaitu sebagai alat pemerintah pusat dan sekaligus sebagai kepala daerah (kabupaten). Kabupaten dibagi dalam beberapa distrik, masing-masing distrik dikepalai oleh seorang *districtshoofd* (wedana). Distrik dibagi lagi dalam beberapa *onderdistrict*, masing-masing diperintah oleh *onderdistricthoofd* (camat) yang membawahi beberapa desa. Bupati berada di bawah residen, sedangkan asisten residen biasanya bertindak sebagai penasehat bupati (Surianingrat, 1980: 134-135). Dengan demikian, terdapat jalur hubungan antara *NBB* dengan *IBB*. Asisten residen berkedudukan di *controle-afdeling* yang daerahnya bersatu dengan kabupaten (Lubis, 2003: 141).

Perkembangan Tinggalan Arsitektural Masa Kolonial Belanda

Keberadaan bangsa asing di Indonesia menghasilkan satu bentuk pembangunan dalam wujud struktur fisik. Peninggalan-peninggalan tersebut erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, maupun dinamika politik pada masanya. Latar belakang pembangunan struktur fisik di antaranya ialah kebutuhan akan adanya tempat atau ruang yang sesuai dengan keinginan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan maupun perlindungan.

Perbedaan iklim dan kondisi alam antara Eropa (sub-tropis) dan Asia Tenggara

(tropis) membawa dampak ketidaknyamanan bangsa Eropa di Indonesia yang bersifat sementara (*temporary*), maka para arsitek Eropa menerapkan struktur bangunan dengan model dinding yang tebal dan tinggi, pola sirkulasi udara yang cepat melalui ventilasi maupun pintu yang lebar, dan berteras. Selain itu, untuk melengkapi komponen arsitektur setiap bangunan dibuat memiliki corak tersendiri seperti digunakannya jendela atau pintu dalam jumlah yang banyak atau menonjolkan satu sisi tampilan dari bangunan itu sendiri. Seperti bagian sudut bangunan yang dibentuk struktur setengah lingkaran. Agar tercipta suatu kondisi yang lebih serasi dengan alam maka vegetasi di sekitar lingkungan ditata sedemikian rupa atau menciptakan kondisi iklim dalam skala mikro.

Berikut ini beberapa peninggalan dalam bentuk bangunan fisik maupun alat sebagai hasil dari perkembangan teknologi pada masa Kolonial di daerah Banten :

A. Serang

Benteng Speelwijk

Benteng Speelwijk adalah satu-satunya peninggalan struktur bangunan yang dibuat oleh Belanda ketika Kesultanan Banten masih berdaulat. Nama Speelwijk diambil dari nama Gubernur Jenderal VOC, Cornelis Jansz Speelman (1681-1684). Benteng ini didirikan oleh VOC pada tahun 1685-1686, struktur benteng dirancang oleh Hendrick Lucas Cardeel.

Kedudukan Benteng Speelwijk berada di sudut utara Kota Banten Lama dan langsung berhadapan dengan laut. Pintu utama benteng terdapat di tembok sisi utara. Di bagian barat benteng terdapat *bastion*, anak tangga yang terbuat dari batu dan sebuah

Bastion Benteng Speelwijk dari arah luar

Bastion Benteng Speelwijk dari arah dalam

menara pengintai. Tembok yang melintangi *platform bastion* adalah bekas tembok tertua dari kota Banten yang langsung mengarah ke pantai yang di bagian ujungnya terdapat sebuah *bolwerk* (kubu pertahanan awal). Di bawah *bastion* terdapat ruangan yang difungsikan sebagai tempat mesiu dan kamar penyimpanan senjata. Di bagian barat bastion terdapat sisa struktur fondasi bangunan yang letaknya langsung menghadap ke pintu gerbang utama di bagian utara benteng. Sisa struktur fondasi bangunan ini

Benteng Speelwijk bagian dalam

Kherkoff

diduga kuat adalah bangunan satu atap.

Disebutkan dahulunya terdapat jembatan gantung yang menghubungkan pintu gerbang utama di utara benteng dengan pintu gerbang lain, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja (Michrob dan Chudari, 2003: 320). Di bagian atas tembok benteng terdapat jendela-jendela penembak yang berfungsi sebagai peletak meriam tembak, tidak jauh dari sisi luar tembok benteng sisi selatan terdapat komplek pemakaman (*kerkhoff*).

Sebuah *makam* yang paling besar dan menarik karena dihiasi sebuah lambang adalah makam Komandan Hugo Pieter Faure (1717-1763). Di bagian makam yang lain disebutkan makam dari Jacob Wits, seorang pegawai pajak dan pembelian (*Kopman en Fiscaal Deserbezeting)*, wafat 9 Maret 1769; Catharina Maria van Doorn, istri Jan van Doorn, seorang letnan (30 April 1747-8 Desember 1769); Maria Susana Acher, istri Thomas Schipers, pegawai pajak dan pembelian, yang wafat pada tanggal 6 Juli 1743.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels atau sekitar tahun 1811, Benteng Speelwijk mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya ketegangan situasi politik dan keamanan (Michrob dan Chudari, 2003: 320).

Jalan Daendels (*Grote Postweg: Jalan Raya Pos*)

Pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels membangun prasarana komunikasi dan transportasi untuk kelancaran pemerintahan dalam bentuk jalan raya dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa sampai ke Panarukan di ujung timur, atau sepanjang lebih-kurang 1.000 Kilometer. Jalan tersebut melewati daerah Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon sampai dengan Panarukan. Tujuan utama pembangunan jalan tersebut adalah untuk kelancaran pengiriman surat antar daerah sehingga disebut jalan pos besar (*Grote Postweg*). Namun, jalan yang

dimaksud juga digunakan pula untuk kelancaran gerak militer.

Dalam pelaksanaan pembangunannya menjadi tanggung jawab bupati di daerah yang dilewati oleh jalan tersebut. Dengan cara demikian, pembangunan jalan hanya memerlukan waktu satu tahun saja (Cabaton, 1911: 206; Day, 1966: 160; Haan, IV, 1912: 897; Lubis, 2003: 94-95).

Mercusuar Anyer

Mercusuar Anyer dikenal karena Gubernur Jenderal Deandels pada tahun 1811 mengawali pembuatan jalan Pulau Jawa sepanjang 1.000 km, yang dimulai dari Anyer sampai Panarukan Jawa Timur, dengan mercusuar sebagai titik nol kilometer. Mercusuar Anyer yang ada sekarang dibangun tahun 1885 sebagai pengganti menara yang hancur pada tahun 1883 saat Gunung Krakatau meletus. Menara tersebut terdiri dari dua bagian bangunan, yaitu bangunan I dibuat dari bata sedangkan bangunan II dibuat dari konstruksi baja pada masa Raja Willem III. Bangunan mercusuar memiliki tinggi 75,5 meter, dengan dinding baja memiliki ketebalan 2,5 cm.

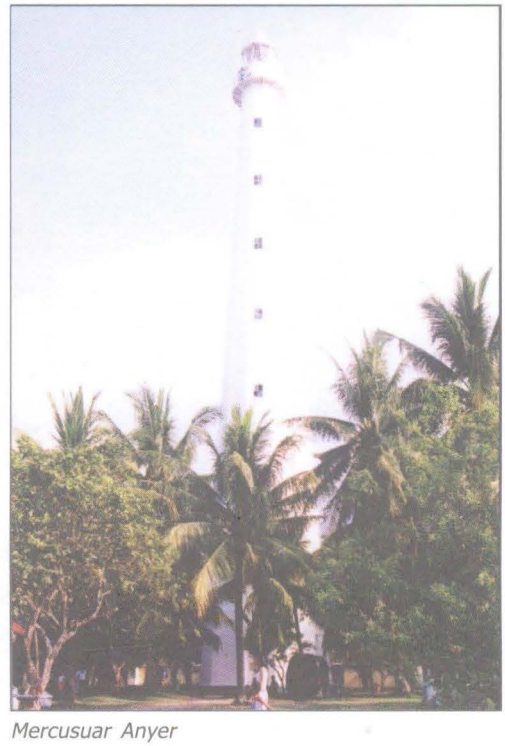

Mercusuar Anyer

Mesjid Cikoneng

Mesjid Darul Falah atau lebih dikenal dengan Mesjid Cikoneng adalah mesjid yang dibangun oleh masyarakat Lampung yang tinggal di Anyer. Pada peristiwa meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883 Mesjid Cikoneng bertahan sedangkan bangunan lain di sekitarnya hancur. Mesjid Cikoneng terletak di belakang lokasi Stasiun Kereta Api Anyer Kidul.

Mesjid Cikoneng

Gedung Karesidenan Banten

Karesidenan Banten

Terletak di Jalan K.H. Syam'un, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Baru Serang. Karesidenan Banten dibangun sekitar tahun 1814. Pada awalnya gedung ini dipakai sebagai kantor residen Banten dari tahun 1928 setelah pemindahan kantor residen yang sebelumnya berlangsung di Keraton Kaibon. Pada tahun 1974 Karesidenan Banten statusnya dirubah menjadi menjadi Wilayah I Propinsi Banten dan digunakan sebagai Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I Propinsi Jawa Barat. Setelah Propinsi Banten terbentuk, bekas kantor residen ini dipakai sebagai Kantor Gubernur Banten sampai sekarang.

Kantor Bupati Serang

Terletak di Jalan Veteran, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Baru Serang. Dibangun seiring dengan pemindahan kota dari Banten Lama ke Serang pada paro pertama 1800-an. Sejak awal dibangun sampai dengan sekarang sudah dijadikan sebagai Kantor Bupati Serang.

Kantor Bupati Serang

Hotel Vos

Terletak di Jalan Veteran, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Baru Serang. Bangunan ini mempunyai gaya arsitektur Indis dengan tiang-tiang silindris di bagian depan dan adanya jendela berukuran besar di samping kiri dan kanan bangunan. Bangunan ini pernah difungsikan sebagai hotel dengan nama Hotel Vos. Secara pasti bangunan ini belum diketahui tahun pendiriannya. Pada tahun 1945 pernah terjadi peristiwa heroik, yaitu penurunan bendera Jepang untuk pertama kalinya di kota Serang yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Banten. Kini gedung ini dipakai sebagai Kantor Kodim 0602 Serang.

Hotel Vos (Gedung Kodim 0602)

Gedung OSVIA

Terletak di Jalan Ahmad Yani, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Cipare, Serang. Bangunan ini mempunyai gaya arsitektur kolonial. Bangunan induk memanjang dari arah timur-barat dengan bagian *façade* bangunan yang masih memiliki unsur keaslian bangunan. Pada bagian depan terdapat tiga pintu masuk yang masing-masing memiliki atap. Pada bagian atas bangunan terdapat semacam menara yang memiliki jendela dengan penunjuk arah angin. Selain bangunan induk, terdapat bangunan-bangunan lain sehingga merupakan sebuah kompleks. Sekarang ini bangunan tersebut dipakai sebagai kantor POLRES Serang

Gedung OSVIA

GEDUNG JUANG 45

Gedung Juang 45

Terletak di Jalan Kimas Jong, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Baru Serang. Bangunan ini pada masa pendudukan Jepang merupakan markas Kempetai. Setelah kekalahan tentara Jepang gedung ini diambil alih menjadi markas Badan Keamanan Rakyat. Sebuah peristiwa besar pernah terjadi di gedung markas Kempetai, yaitu penyerbuan pemuda Banten untuk merebut kekuasaan dan markas tersebut pada tanggal 10 Oktober 1945. Pada peristiwa itu markas Kempetai berhasil diduduki oleh para pejuang Banten. Bangunan markas Kempetai terdiri dari tiga bangunan utama dan kini yang masih memperlihatkan keaslian tinggal satu bangunan, yaitu yang sekarang dipakai sebagai Kantor Dewan Harian daerah (DHD) 45. Bangunan ini mempunyai seni arsitektur bergaya Indis. Bentuk atapnya kerucut, pada bagian depan tampak teras yang atapnya ditopang oleh tiang-tiang berbentuk bulat sebanyak sembilan buah. Adapun dua bangunan lainnya, kini unsur keasliannya sudah tidak tampak lagi. Kedua gedung tersebut kini dipakai sebagai Kantor Kepolisian Wilayah Banten dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang atau lebih dikenal dengan Kantor Dokabu.

NOORMALE SCHOOL

Terletak di Jalan Maulana Yusuf, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Cimuncang, Serang. Bangunan induk merupakan bangunan yang memanjang dengan *façade* bertiang bulat berjumlah empat buah. Selain bangunan induk terdapat bangunan lain, seperti beberapa bangunan yang dipakai sebagai unit kerja, bangunan garasi dan gudang, sehingga membentuk sebuah komplek bangunan. Sekarang ini dipakai sebagai Kantor Korem Maulana Yusuf.

Noormale School (Gedung Korem Maulana Yusuf)

Gedung Percetakan Fritz Rozak

Terletak di Jalan Diponegoro, Serang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Baru Serang. Bangunan mempunyai seni arsitektur Cina yang pernah dipakai sebagai tempat percetakan mata uang Banten. Pada akhir tahun 1940-an ketika Indonesia mengalami krisis moneter, terjadi kelangkaan uang. Pemerintah RI kemudian mengeluarkan kebijakan dengan memberi kewenangan kepada beberapa daerah untuk menerbitkan mata uang yang diberlakukan di wilayah setempat. Di Banten pada tahun 1947 dikeluarkan mata uang khusus yang beredar di daerah Banten yang kemudian dikenal dengan nama Oeridab (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten).

Mesin cetak Oeridab

Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten

Permukiman (bangunan tempat tinggal)

Selain dari bangunan-bangunan yang merupakan bangunan kantor atau *public service*, di Serang terdapat pemukiman yang bercirikan bangunan tradisional maupun yang memiliki gaya bangunan masa kolonial. Pemukiman tersebut terdapat di daerah Cimuncang, Pegantungan, Kaloran, Kaujon, Walantaka, Pontang, dan Bojonegara.

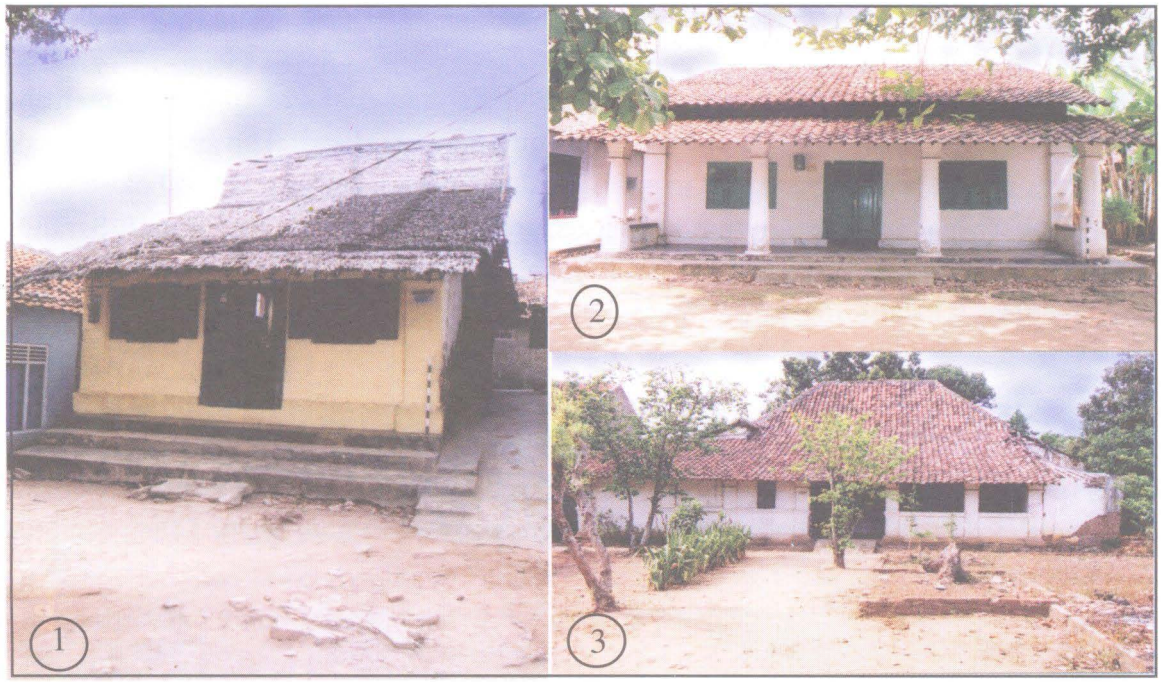

Rumah dengan unsur bangunan tradisional dan kolonial: (1) Kaujon Kidul; (2) Walantaka; (3) Kaloran

B. Cilegon

Letak Kota Cilegon pada masa pemberontakan atau geger Cilegon tanggal 9 Juli 1888 digambarkan dalam tulisan Nina. H. Lubis (2003: 109). Disebutkan Kota Cilegon diapit oleh dua jalan raya, yaitu jalan raya dari Serang menuju ke Anyer dan jalan lainnya menuju ke Mancak. Di tengah-tengah kota terdapat alun-alun sebagai pusat keramaian kota. Di utara alun-alun berdiri sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga Asisten Residen Gubbels, didekatnya terdapat rumah lain yang dihuni oleh *Aspirant Controuler*, Van Rinsum. Di sana terdapat juga kantor pos. Di sebelah selatan alun-alun terdapat gedung kabupaten dan kompleks penjara, sedangkan di sebelah barat alun-alun terdapat mesjid, rumah keluarga Bachet, sebagai kepala gudang garam. Di sebelah timur alun-alun terdapat persimpangan, tepat di persimpangan jalan tersebut berdiri rumah Groundhot dan Kantor Pos Cilegon. Di sebelah utara jalan menuju ke Serang terdapat gardu dan pasar, gudang garam, dan rumah Tan Keng Hok. Di sebelah timur dan barat jalan yang menuju ke Tanjung Kurung, masing-masing terdapat rumah-rumah keluarga Dumas, jaksa, ajun kolektor, wedana, penjara, penghulu, dan rumah Haji Ishak.

Deskripsi Kota Cilegon tersebut dijelaskan dalam rangka melihat situasi keadaan fisik kota sebelum pemberontakan atau Geger Cilegon terjadi. Berikut ini deskripsi beberapa bangunan lain yang masih berada dalam Kota Cilegon, yaitu :

Gedung Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*)

Sekolah ini didirikan pada tahun 1888 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat umum. Khusus disediakan bagi anak-anak bumiputra yang tujuannya untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Lokasi yang dijadikan tempat ialah bangunan bekas gedung penjara di Cilegon. Bupati Serang, Ahmad Djajadiningrat bersekolah disini dengan seorang guru Belanda yang bernama Engelenberg (Djajadiningrat, 1937: 73-74).

KANTOR DAN Rumah Bekas Asisten Residen Gubbels

Bangunan ini terletak di utara alun-alun Kota Cilegon. Gubbels menjabat sebagai Asisten Residen Cilegon pada saat terjadi pemberontakan atau geger Cilegon tahun 1888.

Kantor (kiri) dan rumah (kanan) Gubbels ketika menjabat Assisten Residen Cilegon

C. Pandeglang

Mesjid Caringin

Mesjid Caringin terletak di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Berjarak sekitar 43 km dari Kota Kabupaten Pandeglang atau sekitar 3 km dari Kota Kecamatan Labuan. Berdasarkan sejarahnya, Mesjid Caringin didirikan pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1883 sewaktu Daendels membangun jalan Anyer-Panarukan. Beberapa orang muslim yang dipaksa menjadi pekerja rodi membelot dan lari ke selatan dipimpin oleh Abdurrakhman yang merupakan keturunan Syarif Hidayatullah. Kemudian mereka bermukim di Caringin dan mendirikan mesjid. Mesjid

Caringin memiliki sifat khas dilihat dari arsitektur mesjid yang mengandung nilai-nilai makna dan simbol ajaran *tasawuf*, serta memiliki keunikan dengan tidak memiliki menara sebagaimana mesjid pada umumnya. Keistimewaan Mesjid Caringin terletak pada nilai sejarahnya yaitu selain digunakan sebagai tempat ibadah, mesjid ini juga digunakan sebagai tempat rapat para pejuang saat terjadinya peristiwa Geger Cilegon tahun 1888.

Mesjid Caringin dipugar pertama kali pada tahun 1893, kemudian pada tahun 1980/1981. Bangunan mesjid ini memiliki luas 480 m^2 di atas tanah seluas 2.271, 69 m^2. Bangunannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 x 20 meter dengan atap tumpang bersusun tiga.

Mesjid ini memiliki serambi di sekeliling sisi ruang utamanya. Pada bagian serambi ini terdapat tiang-tiang penyangga yang secara keseluruhan jumlahnya adalah 29. Angka 2 dan 9 ini jika dijumlahkan menghasilkan angka 11 yang menyimbolkan perpaduan antara Rukun Islam (6) dan Rukun Iman (5) yang harus ditegakkan setiap umat Islam seperti tegak dan kokohnya tiang. Pada sisi sebelah timur terdapat ruangan dengan atap tersendiri yang disebut dengan ruang riungan. Untuk masuk ke dalam ruang utama mesjid ini terdapat tiga jalan masuk, yaitu dari arah utara melalui pintu utama, dari arah timur melalui ruang riungan, kemudian dari arah selatan melalui ruang wadonan. Secara keseluruhan bangunan mesjid ini terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang utama, ruang *wadon* (*pawestren*), ruang *ririungan* (pertemuan), dan ruang *istiqomah*. Pada ruang utama terdapat mimbar dengan bentuk ramping yang memiliki beberapa undakan. Terdapat hiasan tulisan ayat-ayat suci Al Qur'an, serta dua bendera bergambar pedang Syaidina Ali. Pada bagian atas mimbar terdapat hiasan berupa buah nenas dalam ukuran besar dan kecil. Ruang utama ini disangga oleh empat tiang yang keletakannya membentuk denah bujur sangkar, dengan umpak batu dari bahan andesit yang dipahat menyerupai buah labu.

Di luar dari bangunan dan kelengkapannya, Mesjid Caringin memperlihatkan nilai-nilai tasawuf dari ragam hias yang ada. Bentuk-bentuk ragam hias itu adalah pola geometris dalam bentuk pelipit, garis silang (bentuk ketupat), setengah lingkaran, bulan bintang, spiral dan *swastika*, serta stiliran binatang.

Mesjid Caringin

Mesjid Carita

Mesjid Jami Al Khusaeni atau dikenal dengan Mesjid Carita terletak di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan keterangan yang didapat, mesjid ini didirikan bersamaan dengan Mesjid Caringin, yaitu pada abad ke-19. Pada masa lalunya, mesjid ini dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam.

Mesjid Carita

Bangunan Kodim 0601

Lokasinya terletak di sudut barat laut alun-alun atau di Jalan Pendidikan No. 2 Pandeglang. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, gedung ini dibangun pada tahun 1918. Saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai Kantor Kodim 0601 Pandeglang. Kondisi bangunan relatif utuh, namun di beberapa tempat sudah mengalami perubahan dengan penambahan bangunan-bangunan baru di sekitarnya. Secara arsitektur, gedung ini dipengaruhi gaya Eropa, tiang-tiang bergaya *doria* ditempatkan di bagian teras depan. Terdapat juga dekorasi ornamental di bagian plafon dan renda kayu berukir di plafon bagian belakang.

Bangunan KODIM 0601 Pandeglang

Kantor Kewedanan Pandeglang

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, bangunan ini didirikan pada tahun 1838. Pada saat ini dalam kondisi utuh namun sudah mengalami alih fungsi menjadi Gedung Balai Budaya Pandeglang. Lokasinya terletak di sebelah timur alun-alun. Ciri khas arsitektur Eropa terlihat di jendela dan pintu yang yang berukuran besar dan tinggi.

Kawedanaan Pandeglang

Pendopo Kabupaten Pandeglang

Lokasinya terletak di sebelah utara alun-alun, tepatnya di Jl. Asnawi No.1, Pandeglang. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pandeglang menyebutkan bahwa bangunan ini didirikan pada tahun 1847/1848. Kondisi saat ini berada dalam bentuk asli dan terpelihara dengan baik. Gedung pendopo kabupaten masih berfungsi sesuai dengan fungsi awalnya, yakni sebagai rumah dinas kediaman Bupati Pandeglang. Secara umum gedung pendopo kabupaten dianasir oleh gaya Klasik Eropa, terlihat tiang-tiang bergaya *doria* di bagian teras utama, jendela, pintu yang tinggi dan lebar, dan didukung ornamen lain.

Kantor KAwedanan Menes

Terletak di sebelah Selatan alun-alun Menes. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pandeglang menyebutkan bangunan ini didirikan pada tahun1847/1848. Kondisi gedung saat ini masih terlihat utuh, namun tidak berfungsi lagi. Arsitekturnya dipengaruhi gaya tradisional yaitu bangunan *pendopo* dengan atap *joglo*.

Kantor Kawedanan Menes

Peninggalan masa pendudukan Jepang di Pulau Sangiang

Posisi geografis Banten adalah sangat strategis bagi pertahanan militer pada saat Jepang menduduki Indonesia. Jika pada masa Kesultanan Banten Selat Sunda menjadi pemicu kejayaan Banten, sebaliknya pada masa pendudukan Jepang, Selat Sunda adalah daerah rawan bagi masuknya kekuatan militer musuh bagi Jepang. Oleh karena itu Jepang lebih berkonsentrasi di Banten dengan menempatkan pangkalan-pangkalannya seperti halnya Anyer sebagai pangkalan angkatan laut dengan Pulau Sangiang sebagai pertahanan laut terdepan.

Pulau Sangiang yang mempunyai luas 700,35 Ha terletak di Selat Sunda yang secara administratif masuk wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten dengan batas-batas sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat Pulau Rakata, sebelah selatan Pulau Ular dan Pulau Jawa, dan sebelah timur Pulau Tempurung.

Peninggalan masa pendudukan Jepang di pulau ini adalah berupa bunker. Sampai saat ini masih dapat disaksikan antara lain berupa bunker-bunker beserta dengan meriam pertahanannya yang boleh dikatakan masih dalam kondisi baik. Pada umumnya bunker dibuat di bawah permukaan tanah dan sesuai dengan fungsinya sebagai perlindungan dan pertahanan, kebanyakan terletak mendekati pantai mengarah ke Selat Sunda. Dari delapan buah bunker yang ada empat di antaranya berfungsi sebagai pertahanan dan tiga lebih mirip bunker perlindungan tentara dan satu bungker merupakan tempat pengintaian.

Bunker pertahanan yang dibuat dari beton bertulang dengan campuran kerakal dan semen ini pada umumnya terdiri dari lorong dan ruang tembak serta dibangun pada tebing yang cukup curam. Ruang tembak merupakan ruang berbentuk segi empat dengan dinding dan atap serta bidang terbuka yang berfungsi sebagai tempat meriam dan pengintaian. Di belakang ruang ini dihubungkan dengan lorong sepanjang sekitar 10 meter dan pada ujungnya terdapat pintu yang berfungsi sebagai jalan keluar dan masuk tentara. Beberapa meriam masih tampak utuh tergeletak di ruang tembak mengarah ke laut dengan

panjang 11 meter, meskipun demikian semua meriam telah lepas dari tumpuannya.

Terdapat pula tiga buah bunker perlindungan tentara berupa bangunan berdinding dan beratap, mempunyai pintu dan lubang angin. sama halnya dengan bunker pertahanan, bunker perlindungan dibuat di bawah tanah, hanya bahan pembuatnya bukan dari beton melainkan batu bata dengan plesteran dari dinding hingga atapnya.

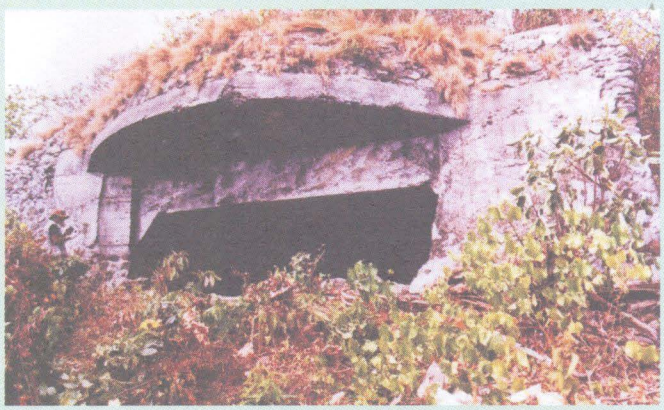
Bungker

Tinggalan lain adalah bangunan yang diduga dipakai sebagai barak tentara. bangunan ini terletak di sebelah utara bunker dengan posisi di bawah bunker. disebut barak tentara karena lokasinya berada di dekat bunker dan denah serta komponen bangunan mengarah ke fungsi tersebut. bangunan ini sekarang tinggal dinding dan sebagain lantai saja, sedangkan atap, kusen jendela dan pintu telah hilang. jika dilihat dari arsitektur bangunannya lebih mengarah kepada bangunan Belanda, hal ini diperkuat dengan adanya tulisan *Steenbakkerij Tangeran* dan adanya genting press.

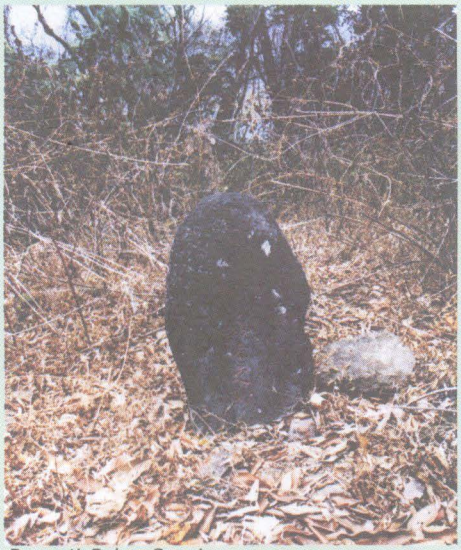
Prasasti Pulau Sangiang

Di pulau ini ditemukan pula sebuah prasasti dengan huruf kanji pada sebuah batu. Pembacaan huruf tersebut oleh seorang arkelog Jepang berbunyi *genjumin romusha no hi* yang artinya kurang lebih hari peringatan untuk pekerja kasar pribumi. jika dikaitkan dengan aktivitas Jepang pada masa itu dapat berarti peringatan untuk para pekerja paksa (romusha) yang didatangkan oleh Jepang ke Pulau Sangiang dalam rangka pembuatan bunker-bunker tersebut.

Gutomo, BP3 Jawa Tengah

Bangunan OSVIA

UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BANTEN

Daerah Banten yang kini merupakan salah satu provinsi dari negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong kaya akan warisan budaya dari berbagai masa Prasejarah, Indonesia Hindu-Buda (atau Klasik), Islam, Kolonial dan Kemerdekaan. Dari warisan budaya yang paling menonjol ialah yang berasal dari masa Islam berupa bekas perkotaan yang tumbuh dan berkembang hingga mencapai kejayaannya sekitar abad XVII. Kesultanan Banten dengan ibukotanya Surosowan sejak pertumbuhan dan perkembangannya telah merupakan salah satu kota besar bersifat internasional. Sejak keruntuhannya pada abad XIX, Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintah Belanda, dan selanjutnya dijadikan empat *regentschap* atau Kabupaten: Kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak, ditambah dengan Kabupaten Tangerang. Di wilayah ini terdapat pula tinggalan dari masa kolonial, masa pendudukan Jepang dan masa Kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945.

Obyek-obyek warisan budaya di daerah Banten, terutama bekas kota lama Surosowan, sangat potensial untuk diselamatkan (termasuk dipelihara, dipugar dan dilindungi secara hukum), diteliti dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemupukan jatidiri budaya bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Sejak masa Hindia-Belanda upaya penelitian atas tinggalan sejarah dan purbakala di wilayah Banten (meskipun masih cenderung melakukan inventarisasi) diselenggarakan oleh beberapa ahli Belanda. Tinggalan itu berasal dari masa Prasejarah seperti kapak dan beliung batu, serta arca megalitik dan punden berundak, dan dari masa Hindu-Buda seperti arca-arca keagamaan Hindu. Sejak itu tinggalan artefaktual yang mudah dipindahkan (*movable*), diinventarisasi dan disimpan di gedung *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang kini disebut Museum Nasional, Jakarta. Sementara tinggalan berupa bangunan yang tidak dapat dipindahkan (*immovable*) seperti punden berundak megalitik di Lebak Cibedug, Kosala, Gunung Pulasari dan Cibeo, masih tetap berada di tempatnya (*in situ*), meskipun kini kurang terpelihara. Penemuan, penelitian, para peneliti dan karya tulisnya sejak sebelum tahun 1914 telah dicatat oleh Dinas Purbakala (*Oudheidkundigen Dienst*)[1].

Data yang telah diinventarisasi Dinas Purbakala ketika itu (yang didirikan pada tanggal 14 Juni 1913[2]) belum diteliti lebih mendalam agar dapat ditempatkan dalam kerangka sejarah lokal daerah Banten maupun sejarah nasional. Pada tahun 1929 B. van Tricht menerbitkan hasil penelitiannya atas peninggalan Prasejarah di situs Kosala-Lebak Cibedug, dalam buku *Levende antiquiteiten in West Java*[3]. A.N.J. Th.A.Th.

van der Hoop dalam disertasinya tahun 1932 berjudul *Megalithic Remains in South Sumatera* membicarakan juga arca-arca di Kosala dan punden berundak di Lebak Cibedug, yang kemudian dijadikan referensi dalam penulisan, *Jaman Prasejarah di Indonesia*, I (Soejono 1984, ed.)[4]. Temuan-temuan kapak dan beliung batu dari karesidenan Banten yang disimpan di Museum Nasional, Jakarta, pernah didaftar dalam himpunan benda-benda prasejarah tahun 1941 dalam *Prehistorische Verzameling, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.[5]

Dinas Purbakala tahun 1914 telah mengiventarisasi temuan dari masa Indonesia Hindu-Buda seperti dari Caringin berupa arca Dewa Brahma, Mahadewa Guru, Dewi Durga, Ganesha dan yoni, yang menunjukkan gaya lebih sempurna daripada arca gaya Pajajaran. Arca-arca itu, yang semuanya dibawa ke Jakarta dan disimpan di Museum Nasional, dibicarakan antara lain oleh Friederich tahun 1850.[6] Selain itu di Pulau Panaitan terdapat beberapa arca seperti dewa Siwa menaiki Nandi (sapi), yang kini disimpan di Museum Sri Baduga, Bandung. Sebuah arca besar Nandi ditemukan ketika penggalian memperdalam kanal Karangantu, dan kini disimpan di Museum Situs Banten Lama. Pada tahun 1947 prasasti Sri Maharaja Purnawarman beraksara Pallawa dan berbahasa Sansekerta ditemukan di tepi sungai Cidanghiang, desa Munjul, Pandeglang, yang jelas membuktikan bahwa Kerajaan Taruma juga meliputi daerah Banten.[7]

Perhatian terhadap peninggalan Islam terutama dari masa Kesultanan Banten sudah ada sebelum berdirinya Dinas Purbakala tahun 1913 yaitu oleh J.A. van der Chijs, khususnya dalam upaya merekonstruksi sejarah kota itu atas dasar tinggalan-tinggalan purbakala, peta-peta kuno, dan berita-berita asing. Hasil kajiannya diterbitkan tahun 1881 dalam buku *Oud Bantam*, yang mencakup masa awal abad XVI - awal abad XIX, ketika Kesultanan Banten mulai runtuh.[8] Selanjutnya tahun 1902 terbit karya L. Serrurier berjudul *Kaart van Oud Bantam*, yang menggambarkan keletakan tempat-tempat dalam wilayah ibukota Kesultanan Banten dahulu.[9] Upaya inventarisasi, dokumentasi dan penyelamatan (pemeliharaan dan pemugaran) oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah setempat dituliskan dalam laporan Dinas Purbakala (*Oudheidkundige Verslag*) tahun 1913, 1914, 1915, 1928, 1930.[10].

Bersamaan dengan terbentuknya Dinas Purbakala, muncul seorang putra Banten, R.A. Hoesein Djajadiningrat, yang berhasil mempertahankan disertasinya *Critische beschouwing van de Sadjarah Banten. Bijdrage terkenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving* atas dasar penelitiannya terhadap naskah-naskah kuno mengenai sejarah Banten di Universitas Negeri Leiden. Ia adalah bangsa Indonesia yang pertama kali memperoleh gelar doktor dalam bidang bahasa dan sastra Nusantara. Disertasi

yang menggambarkan sejarah lokal Banten itu memberi arahan metodologis bagaimana seharusnya orang melakukan penelitian atas dasar sumber naskah kuno yang berisi sastra-sejarah dengan perbandingan sumber-sumber asing.

Sejak masa kemerdekaan, Kiai Haji Tubagus Khatib, Residen pertama Banten mengerahkan masyarakat untuk membersihkan reruntuhan bekas keraton, benteng, jembatan rantai, pabean, pasar kuno, Tasikardi, pipa air, Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan keraton Kaibon. Khatib menyatakan bahwa lahan-lahan di sekitar tinggalan tersebut adalah tanah wakaf untuk kepentingan pemeliharaan tinggalan purbakala Kesultanan Banten. Bahkan pada tahun 1954 Khatib menyambut baik gagasan Uka Tjandrasasmita untuk segera melakukan pemugaran, pemeliharaan bekas keraton dan situs sekitarnya, karena ketika itu bekas keraton dan situs kepurbakalaan lainnya tertutup semak belukar yang amat lebat, dan banyak bata-bata bangunannya diambil penduduk. Hal ini terungkap pada persidangan Pengadilan Negeri Serang yang diterangkan oleh saksi hidup tergugat (Pemda Kab. Serang dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala) pada tanggal 30 Oktober 1984.[12] Peninggalan sejarah dan purbakala yang masih terpelihara baik di sana hanyalah Mesjid Agung dan makam sekitarnya, karena masih difungsikan masyarakat.

Guna meningkatkan kesadaran sejarah, sejak tahun 1963-1964 atas permintaan Bupati Serang waktu itu (Kolonel Tubagus Suwandi), setiap akhir bulan Uka Tjandrasasmita memberi ceramah tentang kesejarahan Banten. Untuk menambah pengertian tentang sejarah Banten pada tahun 1967 Uka Tjandrasasmita menerbitkan buku Sultan Ageng Tirtayasa Musuh Besar Kompeni Belanda.[13]

Pada tahap berikutnya pihak Direktorat bekerja sama dengan Pemda dan masyarakat setempat mengadakan pembersihan di keraton Surosowan berdasarkan undang-undang yang berlaku (*Monumenten Ordonnantie Stbl.* 238, 1931). Bantuan dana juga diberikan oleh Gubernur DKI (Ali Sadikin) pada tahun 1967 untuk membersihkan keseluruhan situs Surosowan dari semak belukar yang penuh dengan ratusan ular dan hewan lainnya.

Pada tahun 1968 Pemda Kabupaten Serang membentuk Team Komando Purbakala Banten, yang tugas utamanya hingga tahun 1973 melakukan perencanaan pelestarian secara menyeluruh bersama-sama dengan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Demikianlah dengan SK Bupati Kabupaten Serang tanggal 6 September 1968 No. 072/B.I./S.K./68 mulailah disosialisasikan kepada masyarakat rencana pemindahan, pengaturan, dan penempatan bangunan/rumah-rumah yang terdapat di sekitar alun-alun dan benteng Surosowan Banten Lama.

Sejak tahun 1976—dan seterusnya dengan dana proyek pembangunan Repelita II, 1974-1979 sampai 1985 dan seterusnya dilakukanlah ekskavasi penelitian dan pemugaran secara bertahap, mulai dari keraton Surosowan, parit-parit, Jembatan Rante, Benteng Speelwijk, Tasikardi, Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, hingga ke Keraton Kaibon. Meskipun pemugaran Mesjid Agung didanai oleh Bhakti Siliwangi, tetapi Direktorat senantiasa mengawasi dan memberi petunjuk teknis pemugaran, sesuai undang-undang yang berlaku. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pemugaran dilaporkan setiap tahun oleh Direktorat, dan dari tahun ke tahun makin banyak dilaporkan penelitian ilmiah baik oleh para peneliti maupun mahasiswa untuk penyusunan skripsi dan disertasinya.[14]

Melalui proyek Depdikdud tahun 1979/1980 lingkungan Keraton Surosowan dibersihkan melalui pemindahan rumah-rumah yang ada di sekitar benteng keraton Surosowan ke daerah dekat Benteng Speelwijk dengan pemberian hak pemilikan tanah seluas 300 meter persegi untuk masing-masing keluarga. Kecuali tanahnya, Pemerintah hanya mengganti rumah lama mereka dan tanamannya, karena masyarakat telah mengetahui bahwa lahan sekitar benteng itu adalah tanah wakaf (*khairiyah*) untuk kepentingan pemeliharaan tinggalan kesultanan Banten (surat tanggal 4 Oktober 1982 no. 397/Sek./1982). Meskipun dalam tahun 1983 dan 1984 ada gugatan sebagian masyarakat atas tanah di lokasi Museum Situs, namun akhirnya putusan Pengadilan Negeri tanggal 13 Pebruari 1985 menyatakan bahwa gugatan masyarakat itu tidak dapat diterima.

Dengan selesainya masalah pertanahan, maka Museum Situs mulai dibangun dan pembangunannya diserahkan kepada kontraktor Bk. K.H. Hasan, seorang sesepuh Banten. Pada tanggal 15 Juli 1985 Museum Situs diresmikan Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Haryati Soebadio. Fungsi museum itu untuk menampung dan memamerkan berbagai benda temuan seperti: keramik lokal; keramik asing dari Cina, Thailand, Jepang, Timur Tengah, Eropa; genting kuno; saluran air dari tanah liat; mata uang; peluru dari besi; barang logam; gambar; peta kuno; dsb. Sebenarnya sangat ideal apabila naskah-naskah kuno; arsip-arsip; berita-berita asing; dan karya-karya tulis tentang Banten dapat dihimpun di Museum ini untuk bahan studi Banten (Bantenologi). Dengan tinggalan-tinggalan itu maka kota Surosowan tergambar sebagai ibukota Kesultanan Banten yang maju dalam berbagai segi, baik politik maupun perdagangan internasional, keagamaan dan kebudayaan.

Untuk memantapkan pelaksanaan penelitian dan pemugaran dalam rangka menciptakan sebuah Taman Purbakala Perkotaan Banten Lama maka dibuatlah katalog dari tinggalan yang ada di Museum Situs dengan bantuan The Ford Foundation

bekerjasama dengan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala tanggal 15 Juli 1985. Pada tanggal 15 Agustus sampai 29 September 1986 di Banten diselenggarakan Seminar Internasional mengenai preservasi situs Banten yang dihadiri oleh para ahli dari berbagai negara. Seminar tersebut menghasilkan masukan bagi upaya pemeliharaan, pemugaran kota bersejarah Banten dan Taman Purbakala Perkotaan yang baik.[15]

Pada tahapan pembangunan untuk membuat taman purbakala nasional (khususnya dalam hubungannya dengan perkotaan muslim masa lalu sebagai obyek wisata sejarah, budaya dan ziarah), di wilayah perkotaan Banten Lama dilaksanakan kegiatan pemugaran, pembuatan taman, pembuatan lapangan parkir, dan penempatan warung-warung di lokasi tertentu agar obyek-obyek peninggalan historis/ arkeologis tidak dikenai polusi.

Sebagai akibat dari keinginan Pemerintah untuk mengajak masyarakat turut memelihara dan memanfaatkan obyek-obyek peninggalan bekas Kesultanan Banten, maka dibentuklah Badan Otorita. Pada tahap awal badan ini ditugasi memelihara dan memanfaatkan Tasik Ardi untuk kepentingan rekreasi, tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992 dan PP No. 10 Tahun 1993, yang dalam melaksanakannya dewasa ini perlu memperhatikan UU OTDA No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 2000). Untuk penanganan pemeliharaan dan pemanfaatan peninggalan bekas Kota Banten Lama tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah (Pemda, Pusat) dengan masyarakat.

Situasi dan kondisi bekas ibukota Kesultanan yang pada beberapa tahun lalu masih terpelihara, teratur dan bersih, kini tampak kotor dan semrawut. Polusi pandangan terjadi di sini, karena warung-warung yang semakin padat menutupi museum, alun-alun, benteng keraton dan tinggalan lainnya. Bahkan warung-warung itu menyebar sampai masuk ke dalam pelataran Mesjid Agung. Demikian pula terjadi polusi suara karena hiruk-pikuk para penjual dan peminta-minta. Semoga keadaan ini segera dapat ditata kembali oleh Pemda, Pemerintah Pusat dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli akan nilai-nilai warisan budaya masyarakat Banten khususnya dan warisan budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Semoga Allah meridhoi dan memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kemajuan Provinsi Banten dalam berbagai bidang.

Uka Tjandrasasmita, Universitas Pakuan, Bogor.

TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN

Detik-detik perjuangan yang "menggetarkan" selama kurun waktu 1999 – 2000 boleh dikata sudah "tergilas" zaman, dan tak mungkin terulang kembali. Namun, catatan sejarah yang terpatri dalam setiap kata yang mengandung makna dan pesan seakan-akan "menegur" atau mungkin "menggugat" kita untuk kembali menjadi idealis dalam mengusung cita-cita dan tujuan terbentuknya Provinsi Banten.

Era Presiden B.J. Habibie menyatakan dukungannya di Pondok Pesantren *Darul Iman* Pandeglang, Jum'at 5 Februari 1999. Dilanjutkan kemudian dengan pertemuan tokoh-tokoh Banten yang menyatakan "Kebulatan Tekad" yang dilaksanakan di Kampung Nyi Mas Ropoh, Pandeglang, 23 Januari 2000.

Cita-cita idealis menggema di forum-forum diskusi dan orasi, serta dalam kegiatan lain seperti tertuang dalam pernyataan sikap berbagai komponen masyarakat yang dipelopori oleh Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Serang, dan yang diikuti oleh Parpol, LSM, OKP, Organisasi Mahasiswa, ulama/kiai, pendekar dan para pejabat eksekutif, legislatif dan lainnya.

Keberhasilan membangun persatuan dan kesatuan masyarakat Banten dan tokoh-tokohnya dapat diibaratkan sebagai orang yang akan membina rumah tangga baru, sehingga satu sama lain "saling menjaga nama baik". Dalam kondisi kondusif yang tertuju pada "lahirnya" Provinsi Banten, maka di-"kawin"-kanlah ide-ide daerah dengan pusat (rakyat Banten dengan Pemerintah Pusat) yang kemudian disetujui melalui RUU No. 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten sebagai "kelahiran Provinsi Banten", 4 Oktober 2000 di Senayan, Jakarta.

"Perkawinan Ide" tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : Pertama, karena terdorong dengan *Limaliha* (harta/kekayaan alam), yakni potensi alam yang melimpah baik hasil pertanian, perikanan laut/darat, perkebunan, tambang emas, maupun industri yang mampu menyumbangkan devisa negara cukup besar. Kedua, karena terdorong dengan *Walihasabiha* (keturunan), yakni tokoh-tokoh Banten dari keluarga Kesultanan, ulama/kiai, tubagus, mas atau entol dan lainnya sudah banyak yang menjadi tokoh-tokoh nasional yang mengabdi di lembaga-lembaga pemerintah di pusat hingga daerah, termasuk para pejuang kemerdekaan RI di masa lalu yang mempunyai andil cukup besar atas kemerdekaan RI. Ketiga, karena terdorong dengan *Walijamaliha* (kecantikan/daya tarik daerah), yakni karena memang letak geografis daerah Banten berada di lintas Pulau Jawa dan Sumatera sebagai "pintu gerbang" Ibukota Negara RI, Jakarta.

Keempat, karena *Walidiniha* (ketaatan agamanya), yaitu faktor penentu untuk dapat menguji berhasil atau tidaknya cita-cita menuju Provinsi Banten guna menyejahterakan masyarakat. Ini tergantung pada tekad para pejabatnya dalam mengemban amanat.

Itulah salah satu alasan yang menjadi dorongan kuat dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten, sejalan dengan *political will* pemerintah yang ditandai dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana daerah dituntut untuk mampu mengembangkan SDA dan SDM daerahnya tanpa harus ada ketergantungan kepada Jakarta (pemerintah pusat) yang sentralistik dan membelenggu demokratisasi, berbangsa dan bernegara.

Secara umum misi strategi pembangunan Provinsi Banten sebagaimana dalam kajian konsorsium Perguruan Tinggi, kajian Pokja PPB, Komite PPB maupun Bakor PPB melalui Forum *Workshop* diantaranya: meningkatkan kesejahteraan/ kemandirian masyarakat; meningkatkan kemitraan dengan wilayah lain; menjadikan Banten sebagai pusat kajian budaya, arkeologis, dan agama Islam serta meningkatkan integritas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian juga sasaran/tujuan yang hendak dicapai Provinsi Banten adalah menciptakan Banten mandiri, maju, dan religius dalam wilayah Negara Kesatuan RI. Makna yang terkandung di antaranya: Pertama, Banten tidak tergantung pada dunia luar yang dikhawatirkan merintangi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, nilai-nilai religius yang ada di masyarakat Banten sebagai dasar atau titik tolak pembangunan pemberdayaan SDM. Ketiga, memajukan bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, baik fisik maupun kesejahteraan sandang, pangan, papan dan lainnya secara merata.

Kronologi Terbentuknya Provinsi Banten

1. Dalam perjalanan sejarah administrasinya, daerah Banten mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1620-1677, wilayahnya meliputi Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang, bagian barat Kabupaten Bogor, dan sebagian kecil bagian barat Kabupaten Sukabumi. Pada periode tahun 1677-1705, daerah Banten bertambah luas ke arah timur terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi yang berlangsung sampai dimulainya kekuasaan pemerintah Belanda tahun 1811. Sejak tahun itu, Banten berbentuk Karesidenan, wilayahnya meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.

2. Tahun 1963, beberapa tokoh Banten yang terdiri atas para eksekutif, legislatif, dan kalangan partai politik, berkumpul di pendopo Kabupaten Serang, mencetuskan gagasan perlunya daerah Karesidenan Banten menjadi provinsi tersendiri. Gagasan ini berlanjut dengan dibentuknya Panitia Persiapan Provinsi Banten.

3. Pada tahun 1966, Pangdam Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie meresmikan Korem 064/Maulana Yusuf di Serang sebagai upaya membendung pihak PKI memanfaatkan gerakan di Provinsi Banten.

4. Pada tahun 1967-1968, gerakan tuntutan Provinsi Banten gencar kembali. Pada saat itu dilakukan pembersihan unsur PKI/PNI Asu (Ali Surahman) dari kepanitiaan, sementara itu Eksponen '66 terlibat aktif dalam kepanitiaan, terutama di Jakarta, Bandung, dan Banten. Pada tahun 1967, Tim DPR-GR Tk. I Jawa Barat pimpinan Kastura, tokoh koperasi dan orang Banten Kidul, mengadakan dengar pendapat dengan tokoh partai politik dan organisasi masyarakat di Serang tentang Provinsi Banten. Selanjutnya tim DPR-GR RI pimpinan Brigjen (Pol.) Domo Pranoto berkunjung ke Banten untuk mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat Banten di Karesidenan dan mengadakan kunjungan ke lokasi infrastuktur perekonomian.

5. Pada tahun 1970, Bustaman, S.H., dari Fraksi PSII DPR-GR-RI mengajukan usul inisiatif anggota DPR-GR bersama kurang lebih 20 anggota DPR-GR yang semuanya orang Banten, serta Lukman Harun (tokoh Muhammadiyah) dengan rekomendasi dari DPRD-GR Tk. I Jawa Barat menyerahkan kebijakan politiknya kepada pusat. Namun hal ini tidak sempat disidangkan dalam pleno DPR-GR karena pemerintah pusat (ABRI), Kodam Siliwangi, dan Gubernur Jawa Barat tidak mendukung sepenuhnya.

6. Pada tahun 1968, Brigjen Ali Murtopo (Asisten Pribadi Presiden Soeharto) dan kepala Opsus mengirimkan Ketua KAPPI Pusat dari unsur IPPNU (NU), IPM (Muhammadiyah) dan SEPMI (PSII) ke Serang, pada saat Rapim KAPPI se-Jawa Barat dan menyampaikan pesan kepada Ketua KAPPI Jawa Barat, Uwes Qorny agar rapat itu tidak membahas agenda Provinsi Banten, untuk menjaga tidak pecahnya KAPPI Banten dan KAPPI Bandung.

7. Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Gubernur Jawa Barat berikutnya ialah pengiriman tim khusus provinsi pimpinan Kolonel Abdullah (Kepala Direktorat Khusus) bersama Tjetje Hidayat (pendiri AMS), Uwes Qorny, Enan Romdani dan puluhan Mahasiswa Kumala (Lebak) dan Kumandang (Pandeglang) ke empat kabupaten di Banten dan Ali Murtopo mengirimkan Moh. Danu Hasan (bekas Panglima DI/TII Jawa Barat) untuk bertemu dengan segenap pemimpin orpol/ormas. Di situ, Kolonel Abdullah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gerakan Provinsi Banten. Tetapi DPRD-GR Tk. I se-Wilayah Banten, setelah pertemuan dengan Kolonel Abdullah di wilayah masing-masing memutuskan bahwa tuntutan Provinsi Banten merupakan hak rakyat Banten sepenuhnya.

8. Pada tahun 1974, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah Karesidenan Banten diubah menjadi wilayah I Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sejak itu jabatan Residen sebagai pejabat tertinggi di karesidenan diganti melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, banten sebagai wilayah I Provinsi Jawa Barat berdiri sendiri dengan nama Provinsi Banten. Wilayahnya meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

9. Pada bulan Agustus 1997, Harian Merdeka Jakarta memuat opini Uwes Qorny yang mendapatkan tanggapan pro-kontra tentang Provinsi Banten.

10. Pada tahun 1998, di Rangkasbitung berlangsung diskusi terbatas yang dihadiri oleh aktifis '66 dan Kader Mahasiswa Keluarga Lebak (Kumala), membahas kemungkinan dilanjutkannya perjuangan Provinsi Banten. Di Pandeglang, aktifis '66 yang membahas masalah perlunya dibangkitkan kembali gerakan Provinsi Banten. Di Serang, dengan topik yang sama berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh aktifis PGRI, H. Sanuri Almaariz dan beberapa aktivis '66. Namun dari ketiga pertemuan dan diskusi ini tidak segera ditindaklanjuti.

11. Pada tahun 1999, Tabloid Banten Express memuat tulisan Uwes Qorny tentang Provinsi Banten yang mulai mendapat perhatian publik Banten. Pada tahun itu juga para kiai Banten menyampaikan tuntutan Provinsi Banten ke hadapan Presiden Habibie di Pandeglang. Sebagai jawaban, Habibie menyerahkan ke DPRD Pandeglang. Selain itu, beberapa puluh mahasiswa Banten melakukan

demonstrasi ke DPRD Tk. I Jawa Barat/Gubernur Jawa Barat, mendesak Provinsi Banten. Pada tanggal 30 Juni 1999, Harian Republika memuat pernyataan Sumitro bahwa di Jawa Barat harus ada 3 provinsi, yaitu: Jawa Barat tengah (Priangan), Banten, dan Jawa Barat Utara (Cirebon), Subang, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka)..

12. Pada tanggal 18 Juli 1999, dideklarasikan Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB).

13. Pada masa kampanye Pemilu '99, Ketua Umum PDR Jawa Barat, Uwes Qarny menyatakan tekad untuk memperjuangkan Provinsi Banten di hadapan masa PDR di Lebak dan Pandeglang. Ketua Umum PAN Prof. Dr. Amien Rais dalam kampanyenya di Serang menyatakan akan memperjuangkan Provinsi Banten dan gubernurnya harus putra daerah. Demikian juga dengan ketua umum MKGR, Mien Sugandi pada kampanyenya di Pandeglang menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Provinsi Banten.

14. Pada tanggal 4 Oktober 2000, Provinsi Banten diresmikan dan pada saat itu usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten menjadi UU disetujui oleh para wakil rakyat.

Khatib Mansur, Yayasan Shengpo, Banten

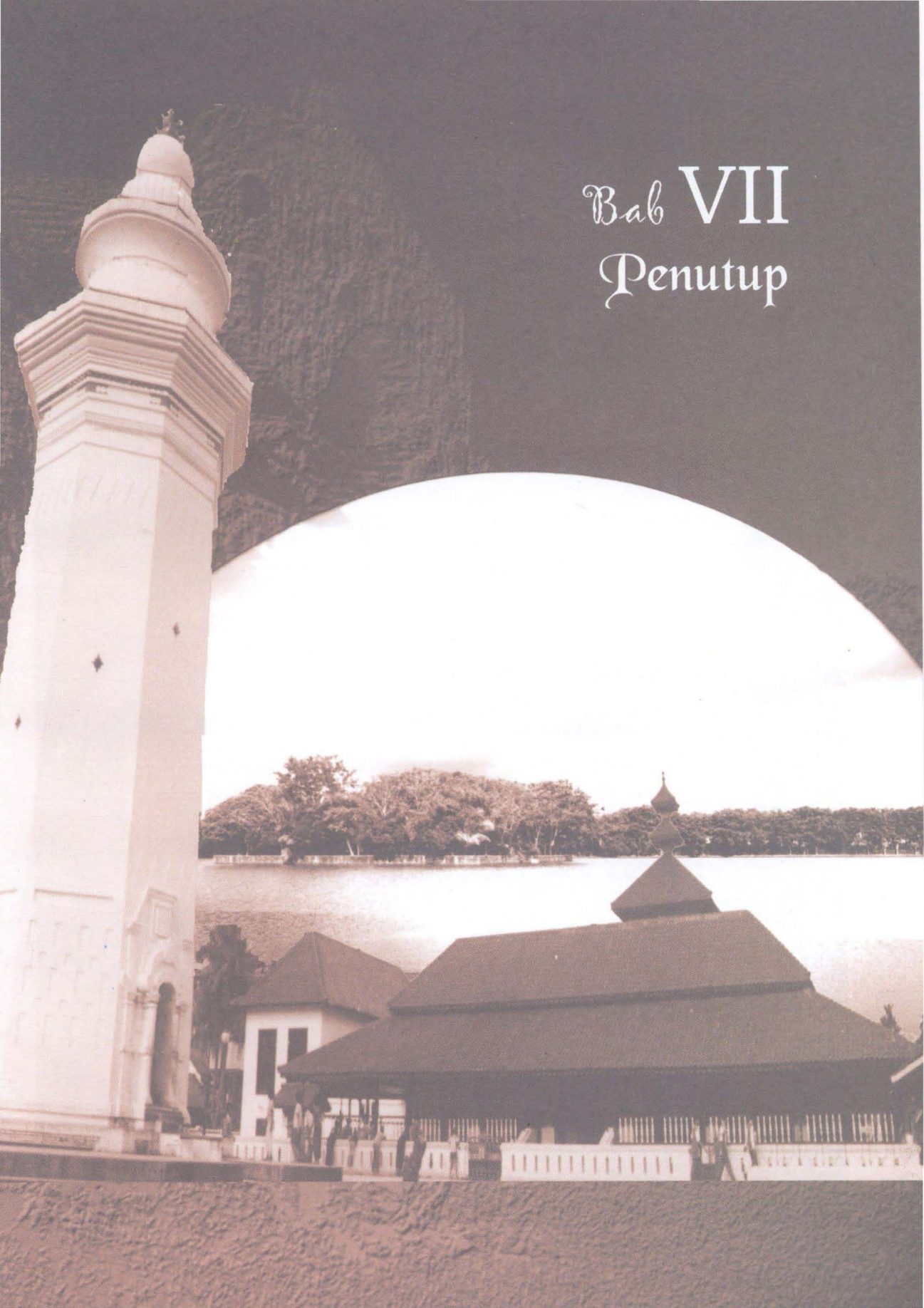

Bab VII
Penutup

Bangunan tempat penyimpanan garam

Bab VII

PENUTUP

Karya budaya monumental dari masa lalu Banten adalah pusaka budaya yang berasal dari penjelmaan dan pencerminan sosialkultural pada zamannya. Pusaka budaya tersebut merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat Banten pada masa lalu dan refleksi dari tujuh unsur universal kebudayaan yaitu bahasa, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, sistem mata pencaharian, peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan kesenian. Budaya Banten yang kini masih tegar dalam era globalisasi, tidak terlepas dari tonggak budaya yang pernah mempengaruhi Banten sejak jaman dahulu. Budaya tersebut tumbuh dan berkembang melalui proses panjang sejak dari masa Prasejarah, Hindu-Buda, Islam, Kolonial, Kemerdekaan sampai terbentuknya Propinsi Banten.

Pusaka budaya pada setiap penciptaannya memiliki corak dan kekhasan masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dan dominan pada masa itu, dengan kata lain bahwa berdasarkan masanya pusaka budaya Banten dapat dibedakan atas tinggalan-tinggalan dari masa yang berbeda dimana setiap masa atau periode ditandai oleh karya budaya yang berbeda-beda pula.

Masa prasejarah Banten meskipun sampai saat ini belum banyak yang terungkap. Namun tinggalan budaya yang ada di daerah ini membuktikan bahwa budaya awal atau budaya prasejarah di Banten dimulai dan berkembang dari masa ketika manusia hidup dari mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan atau dikenal dengan Masa Paleolitik sampai dengan Masa Megalitik dan Perunggu. Budaya prasejarah tersebut ditandai dengan tinggalan yang dapat memberikan bukti-bukti tentang nilai-nilai luhur yang dibentuk dari kreatifitas bangsa yang diwariskan oleh masyarakat prasejarah Banten.

Satu contoh nilai luhur dari budaya prasejarah tercermin dari sifat-sifat kepribadian bangsa dalam bentuk perilaku gotong royong yang muncul pada masyarakat pendukung tradisi megalitik. Pendirian bangunan tradisi megalitik selalu ditunjang oleh struktur organisasi sosial, teknologi, seni dan religi, sehingga secara bersama-sama menghasilkan budaya yang sangat megah. Semangat persatuan dan kesatuan, hidup saling membantu terpancar pada cara-cara mereka membuat dan mendirikan bangunan-bangunan besar. Kebangkitan persatuan dan sifat gotong royong

dilandasi oleh kesadaran tentang hidup bermasyarakat dimana bangunan-bangunan megalitik yang berkaitan dengan ketentraman, kesuburan, baik untuk tanaman dan manusia maupun untuk arwah nenek moyang didirikan secara bersama-sama dan bergotong royong dengan dasar dan pola pemikiran untuk keperluan bersama. Salah satu contoh tinggalan tradisi megalitik tersebut adalah punden berundak Lebak Sibedug, Bayah, Kabupaten Lebak.

Kebudayaan Hindu-Buda atau Klasik adalah kebudayaan yang berkembang di Banten setelah masa Prasejarah. Hadirnya kebudayaan ini di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan India yang berkembang dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-16. Pengaruh budaya Hindu-Buda membentuk suatu masyarakat yang lebih kompleks dibanding dari masa sebelumnya. Ciri utama masa ini adalah masyarakat menyatakan pikiran-pikirannya dengan tulisan, baik pada prasasti dari batu atau logam maupun pada naskah cerita yang ditulis pada daun lontar. Prasasti dari Masa Hindu-Buda yang ada di Banten adalah prasasti Munjul dari abad ke-5 yang dibuat pada masa Maharaja Purnawarman dari Kerajaan Taruma.

Setelah pengaruh Islam masuk di Banten, pengaruh Hindu-Buda perlahan mengalami kemunduran. Salah satu unsur penting yang mempercepat proses kedatangan Islam adalah perdagangan dan dipercepat dengan situasi politik di wilayah kerajaan-kerajaan yang didatangi. Kejayaan Islam di Banten puncaknya terjadi pada masa Kesultanan Banten. Faktor-faktor penunjangnya adalah karena pusat kerajaan berada pada letak geografis yang strategis, ekologis yang menguntungkan, struktur masyarakat dan pemerintahan yang baik sehingga memungkinkan kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan sosial politik Kesultanan Banten yang harmonis, puncaknya terjadi pada abad ke-16- 17.

Pada masa kesultanan, Banten sebagai negara kota juga berfungsi sebagai kota bandar sehingga Banten menjadi salah satu pusat usaha perdagangan yang bersifat regional maupun internasional di Nusantara. Banten yang berada pada jalur perdagangan dan pelayaran internasional (dikenal dengan ***jalan sutera***) yaitu jalan-jalan kuno yang menghubungkan negeri-negeri Asia dan Barat memungkinkan hubungannya tidak hanya dalam bidang perdagangan tetapi juga terjadi kontak-kontak kebudayaan dengan negeri luar.

Kejayaan Kesultanan Banten mulai mundur ketika kolonialisme VOC dengan pengaruh politik maupun dengan sistem monopoli ekonomi perdagangannya dijalankan. Melalui perjanjian-perjanjian antara pihak Kesultanan Banten dengan VOC yang sangat menguntungkan pihak VOC, dan kemudian pendirian benteng Speelwijk tahun 1684-1685 merupakan lambang kekuasaan politik yang ditanam oleh VOC.

Akhirnya pada awal abad ke-19, Kesultanan Banten benar-benar berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang datang kemudian menggantikan VOC.

Kini bekas-bekas Kesultanan Banten masih dapat dijumpai di Banten Lama. Pusaka budaya dari masa Kesultanan Banten di situs Banten Lama, bekas pusat kota Kesultanan Banten sampai saat ini merupakan situs yang terus menarik perhatian baik dari sisi penelitian, pelestarian maupun pemanfaatannya. Dari sisi penelitian, Banten Lama telah dikaji dari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Banyak tema penelitian dilakukan di situs ini yang telah memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, meski demikian sampai kini belum semua pertanyaan tentang masa lalu Kesultanan Banten terungkap, maka tidak heran bila dinyatakan bahwa Banten Lama merupakan kawasan penelitian bagi beragam disiplin ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Banten, situs Banten Lama juga selalu dijadikan alasan untuk melangkah lebih maju. Ketika Provinsi Banten akan dibentuk, masyarakat menjadikan sejarah Kesultanan Banten dengan segala tinggalannya di Banten Lama sebagai alasan bahwa Banten pada masa lalu pernah maju dalam berbagai bidang. Berdirinya Provinsi Banten diharapkan Banten ke depan dapat lebih berkembang seperti Kesultanan Banten pada masa lalu.

Masalah yang dihadapi di situs Banten Lama sekarang termasuk pusaka budaya yang lain di Provinsi Banten adalah upaya pelestarian. Upaya pelestarian tersebut mengalami kendala ketika antara pemerintah dan masyarakat memiliki perbedaan pemahaman dan pemberian makna terhadap pusaka budaya.

Pada hakekatnya upaya pelestarian pusaka budaya harus dapat memberikan makna baru bagi pusaka budaya yang dilestarikan, jika tidak ada makna baru yang dirasakan oleh masyarakat maka upaya pelestarian itu akan sulit bahkan kemudian tidak akan mencapai sasaran. Oleh karena itu para ahli purbakala harus menyadari bahwa kerja penelitian dan pelestarian pusaka budaya adalah untuk masyarakat, artinya makna yang diberikan oleh para ahli terhadap tinggalan masa lampau harus dapat meyakinkan dan diterima oleh masyakarat pada masa kini.

Di samping itu, para ahli purbakala kini lebih diharapkan menjembatani perbedaan pendapat yang terjadi di dalam masyarakat dalam menentukan masa depan pusaka budaya. Dengan kata lain, mereka sebagai mediator harus aktif terlibat dalam memberikan pendapat, memberikan narasi-narasi tentang sumber daya budaya yang penting dan relevan dengan masalah yang ada di masa kini, di samping harus kritis melihat bagaimana kepentingan masa kini mempengaruhi interpretasi masa lampau. Sebagai perantara masa lampau dan masa kini, para ahli purbakala harus peka terhadap beragam minat dan kepentingan di masa kini dan dampaknya terhadap kualitas

sumberdaya pusaka budaya yang tersedia. Dengan demikian peranannya menjembatani tafsir ilmiah/akademis dengan tafsir publik/masyarakat semakin terasa.

Ahli purbakala yang berkecimpung dalam pelestarian pusaka budaya kini harus lebih luwes dalam bergaul, terbuka, bertukar pikiran dan bernegosiasi dengan masyarakat. Perbedaan pandangan dengan masyarakat harus dihargai dan diwadahi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Kini harus disadari bahwa pada saat ini dan di masa yang akan datang para ahli purbakala yang bekerja di pemerintahan bukanlah satu-satunya pihak yang dapat melaksanakan pengelolaan pelestarian, penelitian, dan menafsirkan nasib pusaka budaya. Akan tetapi masyarakatlah yang harus terus didorong dan nantinya mempunyai peranan besar untuk menentukan semua itu.

Akhirnya, di era globalisasi saat ini, diharapkan nilai-nilai dari karya yang lahir sepanjang perjalanan sejarah dan budaya dapat kembali dilirik. Karena nilai-nilai tersebut diyakini sebagai konsepsi yang memiliki nilai kearifan yang berpijak pada keserasian dan penghargaan terhadap lingkungan.

Dalam perjalanan sejarah dan budaya bangsa, kreasi atau karya budaya dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran bentuk dan nilai, tidak terkecuali karya budaya yang pernah ada di Banten. Meski pergeseran terus terjadi, namun pengungkapan nilai-nilai kearifan masa lalu yang terpendam dari pusaka budaya yang berbentuk tinggalan fisik atau kebudayaan materi perlu terus diungkap.

Berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai tinggalan budaya tersebut, maka ada dua tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu tinggalan budaya dapat menghasilkan apa yang disebut identitas budaya dan sebagai sarana pembentukan rasa kebangsaan. Di samping itu, pusaka budaya berpotensi besar untuk dimanfaatkan terutama sebagai obyek wisata budaya yang dapat menambah devisa negara.

Kandungan nilai-nilai yang dimiliki pusaka budaya Banten yang sarat dengan kearifan, maka diharapkan bagi semua kalangan baik pemerintah, organisasi/lembaga masyarakat, *stakeholder*, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat luas untuk melestarikannya. Kepedulian kita adalah bentuk penghargaan kita terhadap sejarah dan pusaka budaya masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Bellwood, Peter, *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2000.

Chijs, J.A. van der, *Oud Bantam. Tijdschriftvan het Bataviaasch Genootschap van Kunstenen Wetenschappen*, doel 26: 1-62, 1981.

Cortessao, Armando, *The Summa Oriental of Tome Pires*, London: The Hakluyt, 1944.

Dillistone, F. W., *The Power of Simbols*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Djaenuderadjat, Endjat dan Juliadi,*Catatan Jejak Peninggalan Purbakala Sebelum Islam di Daerah Banten*, Serang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Banten, 2001.

Djaenuderadjat, Endjat, dkk, Laporan Hasil Survei Situs Kontol Gopar di Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (tidak terbit), 2003.

Djoewisno, MS, *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*, Jakarta: Khas Studio, 1988.

Fadillah, Ali, "Pengkultusan Orang Suci Pada Masyarakat Sunda: Kontinuitas Budaya Lokal dalam Ritual Keagamaan Islam," *paper Konferensi Internasional Budaya Sunda*, Bandung, 22-25 Agustus 2001.

Fadillah, Ali, *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Survei Arkeologi di Lereng Pegunungan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*, Bandung: Balai Arkeologi Bandung, 2002.

Fallah, W. Anwar, *Laporan Penanggulangan Kasus Situs Patapan Kabupaten Serang-Jawa Barat*, Bandung: Balai Arkelogi Bandung (tidak terbit), 1996.

Fallah, W. Anwar, *Laporan Situs Patapan, Kabupaten Serang, Jawa Barat*, Bandung: Balai Arkeologi (tidak terbit), 1997-1998.

Ferdinandus, P.E.J., "Wisnu di Atas Garuda dari Trawas Sebagai Arca Pancuran", *PIA III*, Hal 240-255, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, 1985.

Graff, H.J. de dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Graff, H.J. de, "De Oorsprong der Javaanche Moskee," Indonesie le JRG. N.V. Unitgeverij W, Van Hoevegravenhage, hlm. 289-305, tahun 1977.

Guillot, Claude, dkk, *Banten Sebelum Zaman Islam*, Jakarta: Depdikbud, 1996/1997.

Hanif, Teuku, dkk, *Laporan Pemetaan dan Penggambaran Situs Patapan Desa Nagara, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang*, Serang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung (tidak terbit), 2001.

Heriyanti Ongkodharma, "Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kesultanan Banten" dalam Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra," *Kumpulan Makalah Diskusi Depdikbud*, hlm 69-77, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.

Ibrahim, Maulana, *Kompleks Candi Prambanan dari Masa ke Masa*, Jakarta: Depdikbud, 1996.

Indraningsih, Joyce Ratna dan R. Budi Santoso Azis, "Catatan Pendahuluan Aspek-Aspek Artefak Prasejarah di Situs Odel, Jawa Barat", *Prasaran dalam Diskusi Banten* (MS), 1984.

Indraningsih, Joyce Ratna, "Pemukiman Prasejarah di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Cibanten Hilir-Sebuah Kajian Awal", *PIA IV*, Jakarta: Puslit Arkenas, 1986: 238-248, 1986.

Indraningsih, Joyce Ratna, dkk, "Laporan Penelitian Arkeologi Lampung", *Berita Penelitian Arkeologi No. 33*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1985.

Inventarisasi dan Dokumentasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, Proyek Pembinaan dan Pelestarian Kepurbakalaan Jawa Barat, 1989/1990.

Irmawati M. Johan, "Mengapa Bentuk Mesjid Kuno di Indonesia Tidak Sama Dengan Bentuk Mesjid Kuno di India?" dalam *Monumen*, hlm 302-310, Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono, Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah no. 11. Edisi Khusus FSUI Depok ,1990.

Kadir, Harun, "Aspek Megalitik di Toraja, Sulawesi Selatan", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi Cibulan 21-25 Februari 1980*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1980.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1990.

Michrob, Halwany, "A Hypothetical Reconstruction of the Islàmic City of Banten, Indonesia", *Master Sciences Thesis*, University of Pennsylvania, USA, 1987.

Michrob, Halwany, *Arca Ganesha di Panaitan, Hasil Penelitian Arkeologi di Taman Nasional Ujung Kulon*, Serang: Saudara, 1992.

Michrob, Halwany, *Catatan Masa Lalu Banten*, Serang: Saudara, 1993.

Michrob, Halwany, *Lebak Sibedug dan Arca Domas di Banten Selatan Studi Banding dalam Konteks Kesamaan Akar Budaya Nusantara*, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Prop. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung, 1993.

Minsarwati, Wisnu, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.

Mulia, Rumbi, Beberapa Catatan Mengenai Arca-Arca yang Disebut Arca Tipe Polinesia, *Pertemuan Ilmiah Arkeologi Cibulan 21-25 Februari 1997*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1980.

Pijper, G.F. "The Minaret in Java," *India Antiqua*, Leiden: E.J. Brill, hlm 274-283, 1947.

Proyek Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, *Laporan Studi Teknis Situs Patapan, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang Banten*, Serang, 2003.

Purwitasari, Tiwi, "Kultus Arca Domas dan Pelestarian Hutan Studi Kasus Komunitas Baduy di Kampung Kompol-Jawa Barat", *Kronik Arkeologi Perspektif Hasil Penelitian Arkeologi di Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Lampung*, Jakarta: Puslit Arkenas, 2000.

Renik, S.A. Kt., "Arca Durga Mahisasuramardini di Pura Penataran Panglan Pejeng", *PIA III Ciloto, 23-28 Mei 1983*, hlm. 272-285, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, 1985.

Sakai Takashi dan Naniek H. Wibisono, *Laporan Penelitian Ekskavasi Situs Tirtayasa Banten*, Simposium Jepang 'Keramik Hizen Ditemukan di Asia Tenggara', The Japanese Society for Banten Site Studies, Jakarta: Puslitarkenas, 2000.

Santoso Soegondho, *Tradisi Gerabah di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Kini. Himpunan Keramik Indonesia*, hlm 38-46, PT. Dian Rakyat, 1995.

Soediman, "Candi Sambisari dan Masalah-Masalahnya", *PIA Cibulan 21 Februari 1977*, hal. 155-188, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta: PT Rona Karya, 1980.

Soejono, R.P. et. al., *Studies on Ceramics*, Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, Depdikbud: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1984.

Soejono, R.P., *Sejarah Nasional Indonesia I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Soekmono, R., "Candi, Fungsi dan Pengertiannya", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, 1974.

Stutterheim, W.F., *De Islam en zign Komst in den Archipel Groningen*, Batavia: J.B. Wolters Vitgevers Maatschapij N.V., 1935.

Sukendar, Haris, *Album Tradisi Megalitik di Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1985.

Sukendar, Haris, dkk, "Laporan Survei Pandeglang dan Ekskavasi Anyar Jawa Barat 1979", *Berita Penelitian Arkeologi No.28*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1982.

Tibbetts, G.R., *A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia*, London-Leiden: Royal Asiatic Society, 1979.

Tjandrasasmita, Uka (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Wirjosuparto, Sutjipto, "Sejarah Pertumbuhan Bangunan Mesjid Indonesia," dalam *Romantika Arkeologi, tahun VIII (3)*, hlm. 16-20 (Pemuatan ulang dari majalah Fajar tahun III (2) , 1996).

Daftar Pustaka Tulisan DR. Moh. Ali Fadillah

Abdullah, Taufik. 1991. "Pengajaran dan Penelitian Sejarah: Relevance, Kebenaran-faktual, keterangan-peristiwa"' dalam Majalah Sejarah, Pemikiran, Rekontruksi dan Persepsi, No. 1, Jakarta: Gramedia.

Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah. Pendapat-Pendapat Moderen tentang Filsafat Sejarah* (terj. Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia.

Bogaert, A. 1711. *Historische Reizen door d'oostersche Deelen van Asia*, Amsterdam.

Bruijn, Cornelis, de. 1725. *Voyages de Corneille Le Brujn*. Paris.

Djajadiningrat, Hoesein. 1983. *Tinjauan Kritis Sadjarah Banten*. Jakarta: Djambatan.

Graaf, H.J. de. 1958. "De Regering van Sultan Agung"' *VKI*, 23, 's-Gravenhage, MN.

Guillot, Claude. 1989. "Banten en 1678"' *Archipel* 37, Paris: 119-152.

Guillot, Claude. 1992. "Libre entreprise contre economie dirigee, guerres civiles a Banten 1580-1603", *Archipel*, n° 43.

Guillot, Claude. 1995. "La Politique vivriere du Sultan Ageng", *Archipel*, n° 50.

India Office Records, G/21/7, *Surat dari Direktur2 kepada Raja Banten 1635-1682*.

Ismail, Muhammad. 1956. "Banten, Petunjuk Jalan dan Keterangan Bekas Kerajaan Kesultanan Banten", Serang.

Lodewijcksz, Wilems. 1598. *D'Eerstre Boeck*, Amsterdam.

Miksic, John. N. 1986. "Artifact, Monument and Urban Site Restoration", *Final Report, Seminar on Historical Sites of Banten*, Jakarta: Ditlinbinjarah.

Miksic, John. N. 1989. "Urbanization and Social Change: The Case of Sumatera", *Archipel* 37, Paris: 3-30.

Perret, Daniel. 1999. "Konsep 'negeri' dalam sumber Melayu lama berunsur sejarah dan hukum" dalam Wan Hashim Wan The & Daniel Perret, (eds.), *Di Sekitar Konsep Negeri*, Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan.

Pigeaud, Th. G. Th. 1963. *Java in the Fourteenth Century*, The Hague: Martinus Nijhoff.

Pudjiastuti, Titik. 1991. *Sajarah Banten: Edisi Kritik Teks*, Tesis, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Reid, Anthony.1980. "The Structure of Cities in Southeast Asia Fifteenth to Seventeenth Centuries", *Journal of Southeast Asia Studies*, II/2: 235-250.

Rouffaer & Ijzerman. 1915. *De Eerste Schipvaart de Nederlanders naar Oost India onder Cornelis de Houtman 1595-1597*, 's Hage: Martinus Nijhoff.

Sakai, Takeshi & Naniel H. Wibisono (ed.) 2000. *Laporan Penelitian Ekskavasi Situs Tirtayasa, Banten*. Tokyo: Institute of Asian Cultures, Sophia University.

Saleh, Siti Hawa Haji. 1999. Mitos dan Legenda Dalam Konsep Kerajaan dan Kenegaraan Melayu Tradisional', dalam Wan Hashim Wan The & Daniel Perret, (eds.), *Di Sekitar Konsep Negeri*, Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan.

Scott, E. 1943. Dalam *The Voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas 1604-1606*, London: 152-162.

Stavorius, J.S. 1798. *Voyage par le Cap de Bonne-Esperance Batavia, Bantam et au Bengale*, Paris.

Tjandrasasmita, Uka. 1982. *Sultan Ageng Tirtayasa, Musuh Besar Kompeni Belanda*, Jakarta: Depdikbud.

Valentijn, F. 1724-1726. *Oud en Nieuw Oost Indien*, Dordrecht-Amsterdam.

Vostenlanden, 1926. *Adatrechbundel*, XXXIV, Serie D, N° 81, pp. 277-300.

Whitley, Paul. 1983. *Negara and Commandery*, Chicago: University of Chicago, Geografy Departement Research Papers.

Daftar Pustaka Tulisan Dra. Widya Nayati, M.A, Ph.D

Hietala, H. 1084. Intersite Spatial Analysis in Archaeology. Cambride: Cambridge University Press.

Holt-Jensen,Arild. 1999. Geography: History and Concept. London: Sage Publications.

Kardono Darmoyuwono, 1981. ."Penerapan Teknik Penginderaan Jauh untuk Inventarisasi dan Pemetaan Peninggalan Purbakala Daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur", Laporan Hasil Penggunaan Foto Udara di Trowulan, Mojokerto. Jakarta.

Lillesand, Thomas M. and Ralph W. Kifer, 1979. Remote Sensing and Image Interpretation, New York : John Willey and Sons.

Miksic, John Norman. 1979. Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra, Unpublished PhD. Thesis, Cornell University.

Mrozowski, Stephen A. 1991. Landscapes of Inequality, in Randall H. McGuire and Robert Paynter (eds.), *The Archaeology of Inequality*. Oxfort: Blackwell. Pp 102-124.

Nayati, Widya. 1982. Interpretasi Ibukota Kerajaan Mataram Islam di Plered Berdasarkan Foto Udara. Skripsi Sarjana Muda, Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nayati, Widya. 1985. Kota Banten Lama berdasarkan Interpretasi Foto Udara. Sarjana Thesis.Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sutikno, 1983 "Penginderaan Jauh untuk Pemetaan Terintegrasi Kepurbakalaan Banten dan Jepara", Laporan Penelitian Penggunaan Citra Penginderaan Jauh, Jilid II (Jepara-Demak), Bekerjasama dengan BAKOSURTANAL-Fakultas Geografi UGM,.

Sutikno, 1983. "Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan Terintegrasi Kepurbakalaan Banten-Jepara", Laporan Penelitian Penggunaan Citra Penginderaan Jauh, Jilid I (Banten), Bekerjasama dengan BAKOSURTANAL-Fakultas Geografi UGM

Trombold, Charles D. 1991. Ancient Roads Networks and Settlement Hierarchies in the New World. Cambride: Cambridge University Press.

Daftar Pustaka Tulisan Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary

Amri Yahya, *Sarasehan Kebudayaan*, Universitas Muhammadiyah, 2000.

Meililink-Roelofsz, M.A.P., *Asian Trade and Europen Influence in the Indonesi Archipelago between 1500 and about 1630*. The hague, Martinus Nijhoff, 1962.

Mundardjito, Hasan Muarif Ambary, Hasan Dja'far, "Laporan Penelitian Arkeologi 1976", dalam *Berita Penelitian Arkeologi No. 18*, Jakarta, 1980.

Rouffaer G.P. dan J.W. Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Netherlanders naar Oost indie Onder Cornelis de Houtman 1595-1597's*. Gravenhage, Martinus nijhoff, 1915.

Uka Tjandrasasmita, (editor), *Sejarah nasional Indonesia III*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Valentijn, Francois, *Oud en Nieuw Indien III*, Uitgegeven door Dr. S. Keyser's Gravenhage, H.C. Susan-CH. Zoon, 1958.

Daftar Pustaka Tulisan Dra. Naniek H. Wibisono

Guillot, Claude; Lukman N; dan Sonny W, *Banten Sebelum Zaman Islam:Kajian Arkeologi Banten Girang 932?—1526.* Puslitarkenas-EFEO. 1996

Meilink Roelofsz MAP; *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630.* The Hague:Martinus Nijhoff, 1962

Naniek Harkantiningsih, *Keramik Di Situs Pabean Banten: Sebuah Penelitian Pendahuluan.* Jakarta:FSUI 1980

Ronny Siswandhi dan Naniek H, *Timbul Tenggelamnya Perdagangan Keramik Di Banten Berdasarkan Data Arkeologi,* dalam **Majalah Arkeologi**. Jakarta:FSUI. 1982

Sakai T dan Naniek H, *Laporan Penelitian Ekskavasi Situs Tirtayasa, Banten.* Jakarta:Puslitarkenas. 2000

Volker T, *Porcelain and the Ducht East India Company.* Laiden: E.J. Brill. 1954

Referensi dan Catatan Tulisan Prof. Dr. Uka Tjandrasasmita

1. Dr. N.J. Krom, *Raporten van het Oudheidkundingen Dienst in Nederlandsch-Indie 1914. Inventaris der Hindoe-Oudheiden*, 1914. Eerste Deel Uitgegeven door Batavaiaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Albrecht & Co M. Nijhoff 'S-Gravenhage-Batavia, 1915. (Residentie Bantam, hlm. 6-11.
2. R. Soekmono, Sedikit Riwayat. *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1913-1963.* Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional Departemen P&K. Jakarta, 1977, hlm. 1-25.
3. B. van Tricht, Levende antiquiteiten in West Java, *Djawa*, 9, 1929, hlm. 43-120.
4. A.N.J. Th.a.Th. van der Hoop, *Megalitik Remains in South Sumatera.* Zutphen, 1932; R.P. Soejono (Editor Khusus), Jaman Prasejarah di Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia I*, Marwati Djoened Poesponegoro-Nugroho Notosusanto (Editor Umum). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 211, 219.
5. A.N.J. Th.a.Th. van der Hoop, *Catalogus der Prehistorische Verzameling. Batavia.* Koninklijk Bataviaasch Genootscahp van Kunsten en Wetenschappen, 1941.

6. Friederich, Beelden van Tjaringin, in Javaansche Oudheden. V.B.G. XIII, 1850, hlm. 21 etc.
7. Laporan Tahunan Dinas Purbakala R.I. 1954, dibaca J.G. de Casparis, hlm. 5-6.
8. J.A. van der Chijs, Oud Bantam. *T.B.G.*, 26, 1881, hlm. 1-62.
9. Mr. L. Serrurier, Kaart van Oud Banten. *T.B.G.*, 45, 1902, hlm. 257-262.
10. *O.V.* 1913, 1e Kwrt., *O.V.* 1914, 1e Kwrt., hlm. 91 Bijlage W., hlm. 107-109; *O.V.* 1915, 1e Kwrt. Hlm. 1.; *O.V.* 1928, 1e-twede Kwrt.; *O.V.* 1930, hlm. 60.
11. R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Critische beschouwing van de Sadjarah Banten. Bijdrage terkenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving*. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1913. Sudah diterjemahkan KITLV., *Tinjauan Kritis tentang Sadjarah Banten. Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983.
12. Laporan Persidangan Perkara Ganti Rugi Tanah di Kota Banten Lama (Petugas Tim Direktorat Purbakala, Wahyu sasongko, S.H.) kepada Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 1985.
13. Uka Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtayasa Musuh Besar Kompeni Belanda*. Yayasan Nusalarang Jakarta, 1967.
14. Kecuali laporan-laporan hasil penelitian dan pemugaran oleh Proyek Depdikbud tahun 1976/1977 sampai 1986 disimpan pada arsip Dit. Linbinjarah di Jakarta juga banyak karya-karya tulis baik skripsi maupun karangan lepas tentang kepurbakalaan Banten oleh mahasiswa UI. Kami (Uka Tjandrasasmita, ada 10 makalah dalam seminar nasional maupun internasional. Demikian juga Hasan Muarif Ambary yang memimpin penelitian di situs-situs Banten. Alm. Chalwani Mihrob yang pernah memimpin proyek dan sebagai kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Banten telah menerbitkan beberapa buah karya tulis tentang Banten; Heriyanti Ongkodharma kecuali makalah berkenaan dengan keramik temuan di situs Banten juga berhasil mempertahankan disertasinya tentang hubungan Banten dengan faktor ekologi. Masih banyak lagi karya-karya berupa makalah yang pernah dikemukakan dalam diskusi-diskusi ilmiah tentang Banten dalam *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Depdikbud, Jakarta, 1995.
15. *Final Report: The Ford Foundation Project for the Conservation and Development of Site Museum of Banten*. Seminar on Preservation on Historic Sites of Banten. August 29, 1986-September 6, 1986. Directorat of Protection anf Development of Historical and Archaeological Heritage Ministry of Education and Culture.

DAFTAR ISTILAH

Afdeling : Kesatuan hukum wilayah administratif di bawah *provinsi*. Sehingga satu *provinsi* terdiri dari beberapa *afdeling* yang dikepalai oleh seorang *Residen*. Tiap *afdeling* meliputi beberapa kabupaten. Di bawah *afdeling* adalah *onder afdeling* yang dikepalai oleh seorang *Asisten Residen* yang berkedudukan di tiap kabupaten. Pejabat Belanda berhubungan langsung dengan pejabat pribumi, dalam hal ini Bupati. Bupati adalah jabatan rangkap yang berfungsi sebagai alat pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah, selain itu juga sebagai penasehat *Asisten Residen*.

Alun-alun : Satu bidang luas yang terbuka, lapangan yang berada di tengah kota sebagai pusat kota.

Arca : Patung terutama yang dibuat dari batu atau lainnya yang dipahat menyerupai bentuk manusia ataupun hewan.

Archais : Satu gaya arsitektural awal yang berasal dari seni Celtic, yaitu satu gaya yang berkembang di Eropa, yaitu di sebelah timur Bavaria, Bohemia, dan Austria. Gayanya banyak menonjolkan motif tarikan garis geometris.

Aristokrat : Orang ningrat, golongan dari kaum ningrat.

Arkeologi : Ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan masa lalu, disusun dengan dengan mempelajari tinggalan benda-benda historis.

Bale kambang : Rumah di tengah-tengah atau di pinggir kolam tempat raja-raja mandi.

Bastion : Bagian dari bangunan benteng yang menjorok ke luar dari dinding benteng, biasanya terletak di tiap sudut, namun bisa juga berada di bagian bukan sudut, dan dengan sendirinya bastion-bastion itu membentuk sudut-sudut pertahanan benteng. Denahnya dapat berupa bagian dari lingkaran, segi banyak, jajaran genjang dan lainnya. Fungsinya adalah sebagai tempat pengamatan dan kadang-kadang juga untuk meletakkan senjata seperti meriam.

Batu inti	:	Sisa bahan batu (kerakal/serpihan besar) yang berbidang-bidang akibat penyerpihan.
Beliung persegi	:	Alat batu pada masa bercocok tanam. Bentuknya memanjang dengan penampang lintang persegi. Seluruh bagiannya di *upam* halus, kecuali pada bagian pangkalnya yang digunakan tempat ikatan tangkai. Tajamannya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah, landai ke arah pinggir ujung permukaan atas. Ukuran dan bentuknya bermacam-macam tergantung kegunaan. Bahannya adalah batuan rijang seperti kalsedon, agat (*chert*), jaspis, dan lain-lain.
Bentar	:	Bentuk gerbang yang terdiri dari dua bangunan yang saling bersisian, merupakan simbolisasi dari gunung yang terbelah menandakan wilayah yang profan.
Bilah	:	Alat serpih panjang yang kedua sisi sampingnya sejajar.
Bolwerk	:	Kubu pertahanan awal yang berada di depan kubu pertahanan induk atau inti.
Bunker	:	Perlindungan dan pertahanan, umumnya dibuat di bawah permukaan tanah
Candi	:	Bangunan dari batu yang berfungsi sebagai tempat memuja, menyimpan abu jenazah raja/pendeta Hindu dan Buda.
Candrasengkala	:	Rumusan tahun dengan kata-kata, yang setiap kata melambangkan angka, dibaca dari depan, ditafsirkan dari belakang. Suatu perhitungan waktu Jawa yang memakai perhitungan bulan.
Controle-afdeling	:	Wilayah dimana Asisten Residen berkedudukan.
Desentralisasi	:	Pemberian hak otonomi dan pemerintahan sendiri bertujuan untuk membuka kemungkinan adanya daerah yang mempunyai pemerintahan dan hak mengurus rumah tangganya sendiri.
Dinasti	:	Keturunan atau silsilah raja-raja yang memerintah yang berasal dari satu keluarga atau keturunan.
District	:	Kesatuan administratif di bawah Kabupaten. Tiap *district* dikepalai oleh seorang *districtshoofd* (wedana).

Dolmen : "Meja batu", susunan batu yang terdiri dari satu batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lainnya sehingga menyerupai meja. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan dalam hubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Kata ini berasal dari bahasa Breton (Perancis Utara), *dol* berarti meja, sedangkan *men* berarti batu.

Doria : Gaya arsitektural Yunani yang menggunakan kolom-kolom pilar yang memiliki perbandingan 1 : 8 antara diameter dan tinggi pilarnya.

Façade : Bagian depan atau bagian muka dari suatu bangunan.

Fosil : Sisa-sisa kehidupan di jaman lampau yang ditemukan dalam keadaan membatu di lapisan tanah. Dapat berbentuk sisa hewan, kotoran hewan (*koprolit*), tumbuh-tumbuhan, kayu, tapak kaki, dan lain sebagainya.

Geomorfologi : Berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ge*= bumi; *morphe*=bentuk; *logos*=perkataan, uraian. Merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi dari zaman ke zaman.

Gewest : Wilayah pemerintahan.

Indis : Arsitektur campuran antara gaya yang dibawa dari tempat asal penjajah dari negeri Belanda (orang Eropa Barat pada umumnya) dengan gaya arsitektur lokal.

Inskripsi : Tulisan aksara atau angka pada satu permukaan media tertentu.

Istiwa : Penunjuk waktu untuk shalat yang menggunakan sinar matahari sebagai sarana pembantu.

Jalan pos besar (*Grote Postweg*) : Jalan besar atau utama pada masa kolonial yang digunakan untuk kelancaran pengiriman surat antar daerah dan juga digunakan pula untuk kelancaran gerak militer.

Jirat : Bentuk persegi empat pada makam. Jirat makam kuna biasanya bertingkat-tingkat menyerupai punden berundak yang syarat dengan pola hias daun atau lainnya dengan bahan dari batuan andesit.

Kala : Sejenis binatang yang dikenal dalam mitologi Hindu. Dalam arkeologi digambarkan sangat menyeramkan; bermata

terbelalak, mulut menganga sehingga tampak taringnya yang besar dan menonjol. Hiasan *kala* biasa ditempatkan di tengah bingkai atas pintu candi atau relung. Penggambaran *kala* biasanya dilengkapi dengan *makara*.

Kanal : Secara umum kanal adalah saluran air yang dibuat manusia dengan cara menggali daratan. dan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *kanal irigasi* yang dipergunakan mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, serta *kanal navigasi* yang digunakan untuk jalan kapal atau kendaraan air lainnya. Dilihat dari keletakannya, kanal dapat dibedakan lagi menjadi *kanal arterial*, yaitu kanal yang menghubungkan dua buah sungai. Berikutnya adalah *kanal lateral*, yaitu kanal yang posisinya sejajar dengan aliran air sungai.

Kapak perimbas : Alat batu yang dipangkas pada salah satu sisi permukaannya untuk memperoleh tajaman. Merupakan hasil dari pada teknik pembuatan paleolitik yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, Asia Timur, dan juga Eropa Barat.

Kaputren : Kumpulan bangunan yang digunakan khusus untuk para wanita di lingkungan istana kerajaan, didalamnya biasanya berdiam istri raja dan putri-putrinya.

Keramik : Berasal dari bahasa Yunani, *keramos* yang berarti periuk atau belanga dari tanah. Umum digunakan untuk menyebut berbagai benda hasil olahan dari tanah liat yang dibakar hingga menjadi keras.

Keramologi : Ilmu yang mempelajari keramik.

Kelenteng : Rumah tempat berdo'a atau memuja sang pencipta bagi orang Konghucu.

Keraton : Kumpulan bangunan tempat tinggal raja dan keluarganya. Keraton pada umumnya juga dijadikan pusat kota sekaligus kerajaan, dan merupakan pusat dari segala kegiatan politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Kerkhoff : Berasal dari bahasa Belanda untuk menyebut kompleks pemakaman.

Keresidenan	:	Wilayah yang diperintah oleh seorang Residen sebagai bagian dari wilayah provinsi, terbagi atas beberapa *afdeling* yang diperintah oleh Asisten Residen.
Kolonial	:	Berasal dari bahasa Belanda yang diambil dari bahasa Latin, Koloni yang berarti jajahan atau daerah jajahan. Masa kolonial di Indonesia masa sejak kehadiran bangsa Eropa di Indonesia dan diakhiri dengan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia.
Kosmologi	:	Pengetahuan tentang jagad raya dan seluruh isinya.
Kubur batu	:	Tempat penguburan yang dinding-dindingnya, alas, dan tutupnya dibuat dari kepingan batu lebar (papan batu).
Kuil	:	Rumah tempat orang memuja berhala atau dewa-dewa.
Lesung batu	:	Berupa batu besar yang berlubang. Lubang berbentuk lonjong-panjang (oval-panjang). Fungsinya kemungkinan digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan upacara pemujaan arwah leluhur.
Lak	:	Perekat keras dari damar berwarna merah atau hitam untuk cap dsb. bila dihubungkan dengan penggunaannya pada pedang mungkin digunakan sebagai segel agar tidak mudah dibuka atau ditarik pihak lain.
Laken	:	Bahan pakaian yang terbuat dari bulu domba.
Litologi	:	Ilmu yang mempelajari bebatuan.
Loji	:	Berasal dari bahasa Belanda untuk menyebut bangunan kantor yang juga sekaligus dipergunakan sebagai toko dan gudang bagi kompeni Belanda pada zaman VOC. Bangunan ini juga memiliki kubu pertahanan atau benteng.
Lumpang batu	:	Berupa satu batu besar berlubang (satu atau lebih). Lubang berbentuk lingkaran. Fungsinya belum jelas, mungkin digunakan dalam upacara yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur.
Magis-religius	:	Kekuatan kepercayaan yang bersifat di luar akal atau indera.
Makam	:	Berasal dari bahasa Arab, "makama" yang berarti tempat perhentian, pertemuan. Makam adalah liang yang digali di tanah atau gua untuk mengubur mayat. Makam juga

merupakan penyebutan untuk bagian dari liang kubur yang tampak dari luar, biasanya berupa bangunan khusus menyerupai tempat tinggal karena adanya anggapan bahwa makam adalah tempat tinggal (sementara) bagi jiwa.

Makara : Ragam hias yang menggambarkan sejenis binatang laut berbelalai yang hanya dikenal dalam mitologi Hindu. Biasanya dijumpai di bagian bawah samping pintu, *relung*, atau jendela candi, dan berhubungan dengan hiasan *kala* di atasnya.

Manik-manik : Jenis perhiasan yang dibuat dari bermacam bahan, bentuk, dan warna. Bahan yang digunakan antara lain batu akik (*kornalin*), kaca dan tanah liat yang dibakar. Fungsinya sebagai benda pusaka atau sebagai alat jual beli (alat tukar).

Masjid : Berasal dari bahasa Arab, yaitu *sajada* yang berarti tempat sujud. Kata *sajada* ini kemudian mendapat awalan *ma*, sehingga terbentuk kata *masjid*. Dalam lafal orang Indonesia, kata masjid berubah menjadi mesjid.

Megalitik Muda : Satu masa yang berkembang dalam masa perundagian dengan memperlihatkan tinggalan budaya berupa kubur peti batu, dolmen semu, sarkofagus, dan bejana batu. Masa ini berlangsung pada awal millenium pertama Sebelum Masehi s/d abad-abad pertama Masehi.

Megalitik Tua : Pembabakan masa Megalitik dimana hasil kebudayaannya adalah beliung persegi. Pada masa ini juga mulai dikenal pembuatan benda atau bangunan yang disusun dari batu besar seperti dolmen, undak batu, punden berundak, dan pelinggih. Masa ini menurut beberapa sarjana masuk dalam masa Neolitik yang berlangsung 2.500 s/d 1.500 Sebelum Masehi.

Memolo : Disebut juga dengan *mustoko*, yaitu hiasan yang diletakkan pada puncak atap bangunan

Menara : Bagian dari bangunan mesjid yang digunakan sebagai tempat *muazin* mengumandangkan azan.

Menhir : Batu tegak, satu batu panjang yang didirikan tegak. Berfungsi sebagai batu peringatan dalam hubungan dengan

pemujaan arwah leluhur. Kata ini berasal dari bahasa Breton, *men* berarti batu sedangkan *hir* berarti tegak.

Mihrab : Tanda arah kiblat pada mesjid, terletak pada sumbu tengah ruang sembahyang utama dalam masjid.

Mimbar : Bisa diartikan sebagai kursi, singgasana, atau tahta. Mimbar umumnya terbuat dari kayu yang dihias atau diukir dan merupakan kursi yang untuk mendudukinya biasanya melalui beberapa anak tangga.

Moko : Sejenis *nekara* yang pada umunya berukuran kecil, bidang pukulnya menjorok keluar dari bagian bahu. Daerah persebarannya khusus di Indonesia bagian Timur.

Monumen : Tanda peringatan dalam bentuk tugu, patung, bangunan, dan sebagainya.

Motif : Corak hiasan.

Nekara : Benda perunggu yang mirip dengan genderang, tersusun dalam tiga bagian, yaitu bagian atas yang terdiri dari bidang pukul yang datar, dan bagian cembung (bahu) dengan dua pasang pegangan bagian tengah yang berbentuk silindris, dan bagian bawah atau kaki yang melebar, dihiasi dengan pola geometris, perahu arwah, gambar-gambar manusia dan binatang. Daerah persebarannya di daratan Asia sampai Indonesia. Sering pula digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.

Nisan : Secara umum nisan diartikan sebagai 'tanda' yang asal katanya diduga dari kata *maejan* atau *maesan* yang di Jawa disamakan dengan *tetengger* yang berarti 'tanda'.

Omega : Satu bentuk ragam hias yang mengambil awan-awan sebagai inspirasinya yang seringkali digambarkan seperti nama huruf ke-24 dalam deretan abjad Yunani (W).

Onder distrik : Kesatuan administratif di bawah *district*. Tiap *onder distrik* dikepalai oleh seorang *onder districtscoofd* (camat). Kesatuan wilayah administratif inilah yang membawahi atau meliputi beberapa desa.

Ornamen : Gambaran dari irama dalam garis atau bidang yang biasanya dimaksudkan sebagai hiasan.

Pacinan : Pemukiman orang-orang Cina yang berada dalam satu wilayah tersendiri. Pada masa lalu wilayah Pacinan merupakan wilayah yang berdekatan dengan pusat niaga dan juga merupakan bagian dari wilayah niaga tersebut.

Paduraksa : Bentuk gerbang yang pada dasarnya terdiri dari dua bangunan yang saling bersisian namun disatukan oleh atap atau struktur yang membentuk atap atau portal. Gerbang ini merupakan tanda memasuki wilayah sakral.

Pakulahan : Tempat *wudhlu* berupa kolam dengan bentuk yang menyilang atau bersilang.

Pakuwan : Sebutan lain untuk pusat kerajaan dimana terletak adanya pusat pemerintahan berupa keraton.

Paleoantropologi : Ilmu yang mempelajari sifat-sifat ragawi manusia masa lalu berikut cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dikembangkannya.

Paleometalik : Tradisi paleolitik yang berkembang pada tingkat kehidupan perundagian, juga disebut tradisi logam awal (perunggu-besi). Unsur-unsur pentingnya adalah antara lain teknologi pembuatan alat-alat dari logam, struktur sosial dan sistem religi yang kompleks.

Panil : Satu bidang datar seperti papan dengan ukuran dan bentuk tertentu yang dipermukaannya biasa menampilkan relief.

Pangindelan : Bangunan berbentuk semacam benteng/bungker yang berfungsi sebagai penyaring air (*filter station*).

Parapet : Tembok terluar yang melindungi pasukan sepanjang sekeliling jalan di atas benteng atau pertahanan kota dan juga merupakan dinding yang difungsikan sebagai penahan dari hantaman tembakan meriam musuh.

Paseban : Ruang besar untuk berkumpul. Di keraton, ruang ini biasa digunakan oleh raja untuk menerima para tamu. Kadang juga merupakan ruang terbuka seperti alun-alun.

Patina : Kerak batu.

Pawestren : Satu ruang di dalam bangunan mesjid yang dikhususkan untuk kaum wanita.

Pejal (*massive*) : Padat dan keras.

Pelengkung	:	Konstruksi melengkung, dapat berbentuk setengah lingkaran, runcing puncaknya (pelengkung patah) untuk pintu, jendela, dan jembatan
Pelinggih	:	Disebut juga tahta batu. Terdiri dari sebuah alas dan sebuah sandaran. Batu alas dan batu sandaran pada umunya datar. Fungsinya sebagai tempat upacara dalam hubungan dengan pemujaan arwah leluhur.
Pendopo	:	Bangunan atau ruang besar yang digunakan untuk tempat berkumpul.
Prefecture	:	Unit administrasi kemasyarakatan yang mulai dikenal pada awal pemerintahan Dinasti Tang dan Sung di Cina.
Perundagian	:	Berasal dari kata dasar *undagi* yang berarti tukang, seseorang yang memiliki keahlian atau ketrampilan dalam kegiatan berproduksi. Sedangkan perundagian adalah sistem sosial dengan para tukang atau ahli dalam berbagai bidang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
Pilin berganda	:	Ragam hias yang menggunakan hiasan rangkaian pilinan. Biasanya berbentuk pilinan sulur-suluran tumbuhan atau pola geometris.
Plestosen	:	Kala Plestosen atau Zaman Dilluvium, suatu masa geologi sebelum Kala Holosen, yaitu masa dimana kita hidup saat ini. Masa ini dipengaruhi oleh masa *pengesan* (*glasial*) yang berulang kali terjadi. Masa ini berlangsung pada ± 3.000.000 s/d 10.000 tahun yang lalu. Masa ini adalah bagian sejarah geologi yang paling muda dan singkat tetapi merupakan masa pertama adanya manusia. Dalam Kala Plestosen hidup manusia purba.
Prasasti	:	Piagam atau tulisan yang tertulis di atas batu atau logam atau benda keras lainnya.
Provinsi	:	Kesatuan hukum wilayah administratif pada masa kolonial Belanda yang sama luas dan batasnya. Dikepalai oleh seorang gubernur, jadi setingkat dengan Provinsi Daerah Tingkat I saat ini.
Punden berundak	:	Bangunan berundak-undak yang dataran atasnya biasa mengandung benda-benda megalitik atau makam seseorang yang dianggap tokoh dan dikeramatkan, sedangkan pada

bagian tebingnya diperkuat dengan batu kali. Fungsinya adalah sebagai tempat upacara dalam hubungan dengan pemujaan arwah leluhur.

Regeering-*Reglement* : Peraturan Pemerintah.

Regentschap : Wilayah yang bagian-bagiannya membentuk satu provinsi. Pada masa sekarang, satuan administratif ini setingkat dengan kabupaten.

Regentschap Ordonanntie : Peraturan Pemerintah Kabupaten.

Residen : Berasal dari bahasa Belanda untuk menyebut kepala pemerintahan suatu daerah yang disebut keresidenan yang merupakan bagian dari provinsi (pada zaman penjajahan Belanda). Kedudukannya diatas jabatan Bupati pada masa sekarang.

Rijang : Batuan yang banyak mengandung silika (SiO2) yang asalnya organik ataupun anorganik, dan bersifat kriptokristalin. Terdapat dalam bentuk bintil (*nodule*) ataupun merupakan lapisan, berupa endapan primer maupun sekunder, ataupun dalam bentuk silika yang tersebar rata dalam batuan, bidang-pecah hampir rata.

Rodi : Kerja tanpa upah atau ganti rugi untuk tenaga yang digunakan, biasa pula disebut dengan kerja paksa yang dilaksanakan pada masa kolonial Belanda.

Ruang *istiqomah* : Ruang khusus yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ruang *ririungan* : Satu ruang yang digunakan sebagai tempat berkumpul dalam satu bangunan. Di Banten, satu mesjid yang memiliki ruang tersebut digunakan sebagai tempat berkumpul untuk merayakan hari-hari besar Islam.

Sarkofagus : Kubur batu yang pada umunya terdiri dari wadah dan tutup yang bentuk dan ukurannya sama (simetris).

Selir : Para wanita yang dikawin oleh seorang raja/bangsawan, tetapi bukan merupakan seorang istri.

Sentralistis	:	Bentuk pemerintahan terpusat dimana daerah tidak diberikan wewenang dan kuasa untuk memiliki pemerintahan dan hak mengurus rumah tangganya sendiri.
Serpih	:	Alat yang dibuat dari serpihan batu yang dilepaskan dari batu induknya. Teknik melepaskan serpih menimbulkan ciri-ciri pada alat serpih seperti dataran pukul, kerucut pukul (*bulbus*), garis-garis lingkar dan tanda cacat. Bentuk serpih tidak beraturan, pinggiran serpih digunakan sebagai tajaman (mata serpih). Digunakan sebagai pisau, *serut*, *gurdi* dan penusuk.
Serut samping	:	Satu tipe dari jenis kapak perimbas dengan ciri berbentuk tak beraturan dan tampak tegap. Tajamannya dibuat pada satu sisi.
Situs	:	Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
Srimanganti	:	Tempat yang disediakan bagi para tamu untuk mendapat kesempatan bertemu Sang Sultan atau Raja.
Staatsblad	:	Lembaran negara.
Stadsgemente ordonanntie	:	Peraturan Pemerintah Kotapraja.
Stilir	:	Istilah ini dikenal dan umum digunakan untuk menyebut suatu seni yang menghaluskan satu obyek dengan memberikan penggayaan sehingga obyek yang dibuat menjadi tidak seperti asli atau kenyataannya. Contohnya adalah penggambaran hewan yang distilir dengan cara menggambarkan tumbuh-tumbuhan yang dibentuk menjadi hewan.
Swastika, hiasan	:	Swastika adalah lambang peredaran bintang dalam ajaran agama hindu. Bentuk lambangnya seperti bujur sangkar yang dibagi empat tanpa memiliki setengah bagian dari tiap sisinya.
Tasawuf	:	Salah satu kelompok, aliran dengan ajarannya dalam agama Islam. Ajarannya penuh dengan simbol-simbol rahasia dan

hidupnya diisi hanya dengan ibadah semata, dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Para pengikut ajaran ini biasa disebut dengan kaum *sufi*.

Tatal : Bekas atau sisa ketaman atau serutan yang tipis.

Tatap-batu : Teknik tatap-batu (*Paddle-anvil*) dalam pembuatan gerabah menggunakan sebilah papan kecil bergagang (tatap) untuk meratakan permukaan datar gerabah (dengan memukulkan tatap pada gerabah) dan sebuah batu bulat untuk menekan-nekan permukaan dalam gerabah. Istilah lainnya adalah tatap-landasan.

Temu gelang : Suatu susunan batu-batu besar dalam bentuk lingkaran, mungkin merupakan tempat untuk upacara dalam hubungan dengan pemujaan arwah nenek moyang.

Tera : Teknik hias dalam pembuatan gerabah dengan cara memberikan tekanan yang meningalkan bekas (cap).

Terakota : Warna kemerahan dari bata atau tanah liat yang dibakar.

Traktat : Persetujuan tertulis antara dua atau lebih negara meliputi macam-macam masalah, seperti kerjasama, hubungan diplomatik, ekstradisi narapidana, dan perbatasan negara.

Tumpal : Pola hias berbentuk segitiga yang banyak diterapkan pada permukaan luar gerabah dan benda-benda yang terbuat dari perunggu.

Tumpang : Bentuk arsitektur atap bangunan dimana atapnya terdiri dari susunan beberapa atap. Atap bangunan tersebut ditopang oleh tiang-tiang utama yang biasa disebut dengan *sokoguru*.

Umpak batu : Batu yang diletakkan di bagian dasar dari satu tiang yang biasanya berbahan kayu, berfungsi sebagai pelandas.

Upam : Penghalus. Mengupam adalah teknik menghaluskan satu obyek sehingga permukaannya menjadi halus.

Vihara : Biara yang menjadi tempat tinggal biksu-biksu beragama Buddha.

Waruga : Kubur batu yang berbentuk kubus dengan tutup berbentuk atap rumah, khusus ditemukan di Minahasa (Sulawesi Utara).

KUTIPAN

UU No. 5 Tahun 1992 dan PP No. 10 Tahun 1993

Tentang

Benda Cagar Budaya

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional;
b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya;
c. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah:
   a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya

atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

c. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs.

BAB III
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN

Bagian Pertama
Penguasaan dan Pemilikan

Pasal 4

(1) Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.

(2) Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia.

(3) Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensi internasional.

Pasal 5

(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara.

(2) Ketentuan mengenai penentuan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang:

a. dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;

b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.

(3) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b.

(4) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 7

(1) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara.

(2) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan.

(2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanya hilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.

Bagian Kedua
Penemuan

Pasal 10

(1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.

(2) Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.

(3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya proses penelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya.

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, dan menetapkan:

a. pemilikan oleh Negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;

b. pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b;

c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti benda tersebut bukan sebagai benda cagar budaya atau bukan sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya;

d. pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebut ternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pemeritah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya.

Bagian Ketiga
Pencarian

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

(1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.

(2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 14

(1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah memberikan teguran.

(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.

(2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang:

a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
b. memindahkan banda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
c. mangambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

(3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

Pasal 17

(1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 18

(1) Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah.
(2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 19

(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila :
a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);
b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

(3) Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam

keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.

Pasal 22

(1) Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki oleh negara maupun perorangan dapat disimpan/dirawat di museum.
(2) Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah.
(2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan.
(2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, memisahkan tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

Barang siapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Barang siapa dengan sengaja:

a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui.

pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23;

masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini setiap orang yang belum mendaftarkan benda cagar budaya tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, yang dimiliki atau dikuasainya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Undang-undang ini.

(2) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaan Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

UMUM

Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" serta penjelasannya antara lain menyatakan "Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa "... kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan".

Beranjak dari amanat ini maka Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa.

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya

untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jatidiri suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat tersebut di atas, maka disusunlah Undang-undang tentang Benda Cagar Budaya ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penegasan mngenai lingkup ini diperlukan agar pengaturan Undang-undang ini juga dapat menjangkau masalah benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Karena sifat dan hakikat benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dapat mendekati pengertian benda cagar budaya, maka benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dimasukkan dalam pengaturan Undang-undang ini.

Dengan demikian:

a. Hal ihwal terutama dalam hal kegiatan pencarian, penemuan, atau pengangkatan tentang benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yang kemudian ternyata merupakan benda cagar budaya ditundukkan sepenuhnya pada Undang-undang ini;

b. Dalam hal benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya kemudian ternyata bukan merupakan benda cagar budaya ditundukkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Penguasaan oleh Negara mempunyai arti bahwa Negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya pengembalian benda cagar budaya oleh Pemerintah dalam rangka penguasaan oleh Negara dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang kebudayaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah perorangan atau badan hukum/yayasan/perhimpunan/perkumpulan dan badan yang sejenis. Sekalipun benda cagar budaya pada dasarnya dikuasai oleh Negara, tetapi setiap orang juga dapat memiliki dan menguasai benda cagar budaya tertentu, dalam arti melaksanakan pengelolaan, pengampuan, atau tindakan sejenis, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan pemanfaatannya bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pelestariannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Imbalan dapat berupa uang atau benda pengganti yang bermanfaat bagi pemilik. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengalihannya berlangsung secara hibah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengawasan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau aparat pemerintah daerah yang terdekat.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas (lihat penjelasan Pasal 9)

Ayat (2)

Penelitian dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Teguran sebagimana dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan secara tertulis, atau secara lisan yang dicatat dalam buku kunjungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah kawasan di sekitar atau di sekeliling benda cagar budaya dan situs, yang diperlukan bagi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Yang dimaksud dengan daerah dalam butir ini adalah Kabupaten/Kotamadia/Daerah Tingkat II di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Butir c

Yang dimaksud dengan dalam keadaan darurat dalam butir ini adalah kondisi yang dapat mengancam benda cagar budaya, seperti kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya.

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Cukup jelas

Butir f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3470

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai panguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nonor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah :
   a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa – sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun), atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
   b. benda alam yang dianggap menpunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
3. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/ intrinsik tinggi yang tersembunyi atau

terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

BAB II
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENDAFTARAN, DAN PENGALIHAN

Pasal 2

(1) Untuk perlindungan dan/atau pelestarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan situs yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara.

(2) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 3

(1) Benda cagar budaya yang karena:
   a. nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia;
   b. sifatnya memberikan corak khas dan unik;
   c. jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka;

berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan menjadi milik Negara.

(2) Benda cagar budaya yang dimiliki oleh Negara, pengelolaanya diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan, dan hal lain yang berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya.

(4) Penentuan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Setiap orang dapat memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.

(2) Benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas benda cagar budaya yang:
   a. diperoleh dari keluarga secara turun – temurun atau warisan ; atau
   b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.

(3) Jenis dan jumlah benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dapat dimiliki oleh setiap orang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Warga negara asing hanya dapat memiliki benda cagar budaya bergerak tertentu, yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak serta sebagian telah dimiliki oleh Negara.

(2) Pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilikan, tata cara pendaftaran benda cagar budaya, dan ketentuan tentang perizinan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilikan benda cagar budaya bergerak tertentu oleh warga negara asing diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya wajib mendaftarkannya.

(2) Pendaftaran benda cagar budaya dilakukan pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya di Daerah tingkat II tempat benda cagar budaya tersebut berada.

(3) Pandaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
   a. identitas pemilik;
   b. riwayat pemilikan benda cagar budaya;
   c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran benda cagar budaya.

(4) Pendaftaran benda cagar budaya yang tidak bergerak, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dilengkapi pula dengan gambar peta situasi benda cagar budaya tersebut berada.

Pasal 7

(1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberi surat bukti pendaftaran.

(2) Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila benda cagar budaya tersebut:
   a. dialihkan pemiliknya; atau
   b. dipindahkan ke lain Daerah Tingkat II.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dimiliki seseorang secara turun-temurun atau warisan hanya dapat dialihkan pemilikan atau penguasannya kepada ahli waris yang sah atau dialihkan pemilikannya kepada Negara.

(2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu kepada Negara disampaikan oleh pemilik kepada Menteri disertai data benda cagar budaya yang akan dialihkan pemilikannya.

(3) Dalam hal pengalihan pemilikan benda cagara budaya tertentu kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh ahli waris, selain disertai data cagar budaya tersebut juga harus atas kesepakatan dari para ahli waris.

(4) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) selain yang

berlangsung secara hibah, disertai dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemilik.

(5) Bentuk atau besarnya imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

(6) Pengalihan pemilikan atau penguasaan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan kepada orang lain dengan ketentuan:

a. wajib dilaporkan kepada instansi tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan;

b. wajib didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, apabila benda cagar budaya tersebut dipindahkan ke lain Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Dalam hal orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) adalah warga negara asing, pengalihannya hanya dapat dilakukan apabila warga negara asing yang bersangkutan telah menetap di Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan memiliki izin tinggal yang masih berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan rusaknya benda cagar budaya kepada instansi tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan selambat-lambatnya sejak 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya rusaknya benda cagar budaya.

(2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan musnahnya benda cagar budaya tersebut maka benda cagar budaya tersebut dihapus dari daftar.

(3) Tata cara penghapusan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan hilangnya benda cagar budaya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terdekat yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilangnya benda cagar budaya.

(2) Selain melaporkan kehilangan benda cagar budaya kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau yang menguasai wajib melaporkannya pula kepada instansi tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimasud dalam ayat (2), instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya mencatat hilangnya

benda cagar budaya tersebut dalam daftar.

(4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun benda cagar budaya tersebut ternyata tidak dapat ditemukan, maka benda cagar budaya tersebut dihapus dari daftar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

BAB III
PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 13

(1) Setiap orang yang menemukan atau yang mengetahui ditemukannya benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, atau situs wajib melaporkannya kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau aparat pemerintah daerah terdekat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penemuan tersebut.

(2) Dalam hal laporan penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada aparat pemerintah daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan tersebut segera diteruskan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya atau langsung kepada Menteri.

(3) Sejak laporan diterima, instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera melakukan pengamanan terhadap benda cagar budaya atau yang diduga benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, atau situs.

(4) Untuk menentukan temuan tersebut sebagai benda cagar budaya atau situs, dilakukan penelitian.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis, bahan, bentuk/wujud, ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya yang dilakukan oleh tim dan/atau ahli yang dibentuk oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Selama proses penelitian, benda dan/atau lokasi temuan dilindungi sebagaimana perlindungan benda cagar budaya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengamanan, perawatan, atau pemeliharaan agar tidak rusak, hilang, berubah bentuk dan wujud, nilai sejarah, dan/atau keasliannya.

Pasal 15

(1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut sebagai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), benda cagar budaya tersebut dimiliki oleh Negara dan kepada penemu dapat diberikan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5).

(2) Dalam hal benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan benda cagar budaya bergerak, benda

tersebut dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

(3) Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa benda temuan tersebut ternyata sebagai benda cagar budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak, Menteri menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan ketentuan:
   a. seluruhnya dapat dimiliki Negara dengan memberikan imbalan kepada penemu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5);
   b. sebagian dimiliki oleh Negara dan sebagian dapat dimiliki oleh penemu tanpa disertai imbalan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut ternyata bukan benda cagar budaya, benda temuan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penemu.

(2) Apabila hasil penelitian benda temuan tersebut menunjukkan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Tanpa izin Menteri setiap orang dilarang melakukan kegiatan pencarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik di darat maupun di air.

(2) Pencarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya.

Pasal 18

(1) Izin pencarian benda cagar budaya diberikan oleh Menteri kepada pemohon hanya untuk kepentingan:
   a. penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. penyelamatan dan/atau pelestarian benda cagar budaya.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. instansi pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang ilmiah;
   b. yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain yang berkedudukan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pelestarian benda cagar budaya;
   c. lembaga asing yang bergerak di bidang ilmiah yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permohonan izin pancarian banda cagar budaya disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi kerangka acuan pencarian benda cagar budaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pencarian benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 19

Instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib melaporkan kegiatan dan hasil pencarian benda cagar budaya kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Pencarian benda cagar budaya dan benda berharga untuk tujuan selain tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hanya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.

(2) Pencarian benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada lembaga yang berkedudukan sebagai badan hukum.

Pasal 21

Apabila hasil pencarian benda cagar budaya dan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ternyata merupakan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya, benda tersebut dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 22

Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.

Pasal 23

(1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran.

(2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya Menteri menetapkan situs.

(2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk penyelamatan dan pengamanan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah:
   a. kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia;
   b. beralihnya pemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak;
   c. berubahnya keaslian dan nilai sejarahnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan perawatan untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap:
   a. kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh proses alami dan hayati;
   b. pencemaran.

(2) Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan diatur oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis yang diberikan oleh Menteri.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarahnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, syarat, dan tata cara pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melindungi atau memeliharanya, yang dapat mengakibatkan rusak, hilang atau berubahnya nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai budayanya diberikan teguran.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Menteri.
(3) Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
(4) Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran tahap ketiga tetap tidak diindahkan upaya perlindungan dan pemeliharaan, Menteri dapat mengambil alih kewajiban perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
(5) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya dapat:
    a. memberikan hak untuk pemanfaatan dan/atau pengelolaan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai imbalan atas perlindungan dan pemeliharaan kepada Pemerintah;
    b. mengalihkan hak pemilikan atau penguasaannya kepada Pemerintah dengan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peneguran serta pengalihan hak pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya, situs, dan lingkungannya.
(2) Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situsnya adalah kegiatan:
    a. mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;

b. mengurangi, mencemari, dan/atau mengubah fungsi situs.

Pasal 30

(1) Setiap orang hanya dapat membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
   a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. sosial/ budaya;
   c. pemanfaatan lain yang diatur oleh Menteri.

(3) Permohonan izin untuk membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan dengan disertai data benda cagar budaya, kerangka acuan, dan sistem pengamanannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 31

(1) Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang akan membawa dan memindahkan benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh izin Menteri dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 32

(1) Setiap orang hanya dapat memindahkan benda cagar budaya tertentu dengan tidak menghilangkan atau mengurangi nilai sejarah dan fungsi pemanfaatannya dari daerah satu ke daerah yang lainnya atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.

(2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

(1) Setiap instansi yang terkait atas pengamanan benda cagar budaya apabila mengetahui dibawanya atau dipiindahkannya sebagian atau seluruh benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 wajib melakukan penahanan atas benda tersebut.

(2) Instansi yang melakukan penahanan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya segera memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya atau langsung kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.

(3) Apabila berdasarkan pemeriksaaan, ternyata benda tersebut merupakan benda cagar budaya dan tidak dilengkapai dengan izin yang sah, dengan tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor

5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang bersangkutan wajib mengembalikan ke tempat asal atas biaya orang yang membawa atau yang memindahkannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan dan pengembalian benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

(1) Setiap orang tanpa izin Menteri dilarang:
   a. mengambil atau memindahkan sebagian benda cagar budaya ataupun seluruhnya;
   b. mengubah bentuk dan/atau warna benda cagar budaya;
   c. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang memperdagangakan, memperjualbelikan, atau memperniagakan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimeksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai usaha dagang, wajib memiliki izin usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi oleh Menteri.

(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara berkala benda cagar budaya tertentu yang diperjualbelikan kepada instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya setempat.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 36

(1) Pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

(3) Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya.

(4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri disertai dengan kerangka acuan pemanfaatan benda cagar budaya.

(5) Berdasarkan penelitian dan penilaian kerangka acuan, Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan benda cagar budaya.

(6) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata:
   a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
c. mencari keuntungan pribadi dan/ atau golongan;
d. karena keadaanya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi,

Menteri dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya.

(7) Penghentian pemanfaatan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengakibatkan dicabutnya izin.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 37

(1) Terhadap benda cagar budaya yang masih dimanfaatakan untuk kepentingan agama, masyarakat dapat tetap melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian benda cagar budaya.

Pasal 38

Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.

Pasal 39

(1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan hanya dapat dilakukan atas izin Menteri.

(2) Permohonan izin diajukan kepada Menteri dengan disertai persetujuan tertulis dari pemilik benda cagar budaya.

(3) Pemegang izin penggandaan benda cagar budaya wajib memberi tanda khusus pada setiap hasil penggandaanya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penandaan diatur oleh Menteri.

Pasal 40

(1) Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki Negara maupun perorangan dapat disimpan dan dirawat di museum.

(2) Pengaturan mengenai permuseuman yang meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi museum yang berupa benda cagar budaya diatur tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan terhadap pengelolaan benda cagar budaya.

(2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya berkenaan dengan tata cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya;
b. Pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian.

(3) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
a. bimbingan dan penyuluhan;
b. pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya;

c. peningkatan peranserta masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Peranserta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan oleh peroangan atau badan hukum, yayasan, perhimpunan, perkumpulan, atau badan lain yang sejenis.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

Pasal 43

(1) Menteri bertanggung jawab atas pengawasan pelestarian benda cagar budaya dan dilakukan bersama secara terpadu antara instansi pemerintah terkait atau dengan masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau pimpinan instansi terkait baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 44

(1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan:

a. tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya;

b. tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya;

wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya.

(3) Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut, Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri lain atau pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, dapat menyatakan:

a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs;

b. menyarankan perubahan rencana pembangunan;

c. memindahkan benda cagar budaya dari situs;

d. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau,

e. menghapus benda cagar budayaa dan situs dari daftar.

(4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Paal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang

Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

(3) Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 38, dan Pasal 39, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur penguasan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya atau situs, dan ketentuan pencarian benda berharga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1993

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd.

Bambang Kesowo, S.H., L.L..M.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA

UMUM

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah memberikan arah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. Selain hal di atas, di dalam beberapa pasal Undang-undang tersebut secara tegas juga telah mengamanatkan masalah-masalah yang pelaksanaan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Beranjak dari amanat tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai pengaturan: penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.

Meskipun beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap masalah di atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun guna pengaturan yang bersifat tuntas serta menyeluruh, maka terhadap masalah-masalah lain yang saling berkaitan perlu pula diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk pengaturan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan maupun pemanfaatan banda cagar budaya dalam Peraturan Pmerintah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya disini, bukan hanya meliputi benda buatan manusia yang termasuk dalam pengertian dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi juga termasuk benda warisan alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, misalnya fosil manusia atau binatang purba, benda sisa meteor dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, selain mengatur upaya-upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arah dalam tata cara/syarat pemilikan,

penguasaan, dan upaya membawa banda cagar budaya keluar wilayah Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan kelancaran peribadatan, maka Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pelaksanaan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam ayat ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Penguasaan benda cagar budaya oleh Negara tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah dalam hal ini Menteri untuk menetapkan pengaturan mengenai pencarian, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan terhadap benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, ataupun benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif yang pelaksanaanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Benda cagar budaya yang harus dimiliki oleh Negara dalam ayat ini ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya dan sejarah bangsa, kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas yang mewakili zamannya.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemilikan benda cagar budaya dalam ayat ini merupakan suatu hak perdata yang dapat dialihkan secara waris, hibah, atau dengan cara lainnya. Meskipun pemilikan benda cagar budaya di atas merupakan suatu hak perdata, tetapi dalam pengalihan pemilikan atau penguasaan kepada orang lain harus tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pemilikan benda cagar budaya oleh seseorang harus memperhatikan fungsi sosialnya, dimaksudkan agar benda cagar budaya yang dimiliki seseorang pemanfaatannya tidak hanya semata-mata

untuk kepentingan pribadi tetapi juga memperhatikan kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, atau kepentingan umum lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud benda cagar budaya tertentu disini adalah benda cagar budaya yang tidak termasuk kriteria benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud jenis benda cagar budaya adalah keanekaragaman benda cagar budaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan perizinan dimaksud, misalnya izin tinggal, izin membawa benda cagar budaya ke luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendaftaran adalah suatu usaha pencatatan benda cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak beserta situsnya dalam rangka inventarisasi benda cagar budaya untuk kepentingan pelestarian, perencanaan pengelolan perlindungan, dan pemanfaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Benda cagar budaya tertentu dalam ayat ini hanya dapat dialihkan pemilikannya dan/ atau penguasaannya kepada ahli waris yang sah atau dialihkan pemilikanya kepada Negara, dimaksudkan untuk menghindari pindahnya pemilikan/penguasaan benda cagar budaya tersebut kepada orang lain selain kepada ahli waris atau Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Kerusakan yang mengakibatkan musnahnya benda cagar budaya dapat terjadi kerena akibat bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia atau akibat lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan jangka waktu 6 (enam) tahun untuk dapat dihapuskan dari daftar benda cagar budaya didasarkan pada sistem pengaturan kadaluwarsa tindak kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam jangka waktu tersebut di atas tidak tertutup kemungkinan benda cagar budaya tersebut ditemukan kembali. Apabila ditemukan kembali sesudah batas waktu tersebut benda cagar budaya harus didaftar ulang.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud aparat Pemerintah Daerah terdekat, misalnya Kepala Desa atau Lurah, Camat, atau Bupati. Penetapan batas waktu melapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pelapor, juga untuk mencegah hilang atau rusaknya benda temuan tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud pengamanan disini adalah kegiatan menjaga dan/atau melindungi benda temuan tersebut agar tidak pindah, rusak, atau hilang dari tempat asal temuan sebelum dilakukan penelitian oleh pihak yang bertanggung jawab atas bidang penelitian benda cagar budaya.
Ayat (4)
Yang dimaksud penelitian dapat berarti penelitian penyelamatan dan/atau penelitian murni atas benda cagar budaya sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Benda cagar budaya bergerak asal temuan dapat disimpan di museum apabila benda tersebut bukan merupakan bagian dari satu kesatuan atau kelompok benda cagar budaya. Apabila benda temuan tersebut ternyata merupakan bagian dari satu kesatuan atau kelompok benda cagar budaya, benda

tersebut dikembalikan kepada kesatuan atau kelompoknya, atau untuk pengamanannya disimpan di museum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya ketentuan Pasal 587 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud di darat dan di air dalam ayat ini adalah di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerangka acuan harus berisikan uraian antara lain mengenai tujuan, lokasi pencarian, jumlah dan jenis kemampuan tenaga, sarana, dan prasarana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk badan hukum disini adalah yayasan/perhimpunan/perkumpulan, dan badan lain yang sejenis.

Pasal 21

Hasil penelitian terhadap hasil pencarian benda cagar budaya dan benda berharga dapat mendatangkan kesimpulan bahwa benda tersebut adalah benda cagar budaya. Namun, seringkali pula bahwa hasil penelitian terhadap hasil pencarian benda berharga tersebut ternyata diduga sebagai benda cagar budaya, maka perlakuan perlindungan sama sebagaimana layaknya terhadap perlindungan benda cagar budaya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada; atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah, dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan

ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata budaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (*zoning*) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan.

Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya, yakni lahan situs; mintakat penyangga, yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs, dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan situs disini dapat dilakukan apabila dalam satu wilayah tertentu terdapat beberapa situs yang berdekatan dan saling mempunyai keterikatan keruangan, sejarah, dan arkeologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini, misalnya ketentuan yang mengatur masalah tata ruang, lingkungan hidup, pertambangan, industri dan sebagainya, sehingga tidak terjadi benturan dalam pengaturan benda cagar budaya dengan kepentingan lainnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan sehari-hari atau pengawetan (konservasi) bila perlu untuk mencegah/menanggulangi kerusakan dan/atau pelapukan benda cagar budaya akibat pengaruh faktor alami dan dalam rangka memelihara kelestarian benda cagar budaya.

Yang dimaksud dengan faktor hayati adalah faktor lingkungan yang merupakan unsur hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, atau manusia; sedangkan faktor alami adalah faktor lingkungan non hayati yaitu geotopografi, iklim atau bencana alam, seperti kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Pencemaran melekatnya unsur asing pada benda cagar budaya tidak dikehendaki, karena dapat menimbulkan kerusakan atau pelapukan.

Ayat (2)

Prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarh dan budayannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan

keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggugjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud untuk kepentingan sosial/ budaya dapat berupa antara lain pameran, diplomasi kebudayaan, pertukaran informasi, dan sebagainya.

Ayat (3)

Yang dimaksud sistem pengamanan disini meliputi syarat pengepakan, pengangkutan, dan jaminan keselamatan benda cagar budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini, misalnya ketentuan mengenai pengiriman ekspor barang, ketentuan perpajakan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Penahanan terhadap benda cagar budaya atau yang diduga benda cagar budaya dilakukan apabila benda yang akan dipindahkan baik antar daerah maupun keluar wilayah Republik Indonesia, dicurigai tidak memenuhi ketentuan perizinan pemindahan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dalam keadaan darurat disini adalah kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan peletarian benda cagar budaya, misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lain yang sejenis.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kewajiban melapor tersebut dimaksudkan untuk memantau lalu lintas benda cagar budaya. Lihat pula penjelasan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksud agar masyarakat yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan keagamaannya dengan lebih baik tanpa terganggu kelancarannya, baik dalam melakukan ibadah, maupun pemeliharaan tempat ibadah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Meskipun dilarang untuk dimanfaatkan seperti fungsi semula, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk pemanfaatan lain sejauh tidak bertentangan dengan nilai penting yang terkandung dalam benda cagar budaya itu, misalnya untuk kepariwisataan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.

Pasal 39
Ayat (1)
Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Studi analisisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang berkaitan antara rencana kegiatan pembangunan dan benda cagar budaya, dalam hal ini terutama adalah studi dampak pambangunan terhadap sosial budaya yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1989 tentang Panitia Nasioanal Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga, atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan lain yang berkaitan.

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3516

Pintu Gerbang Bentar Keraton Kaibon

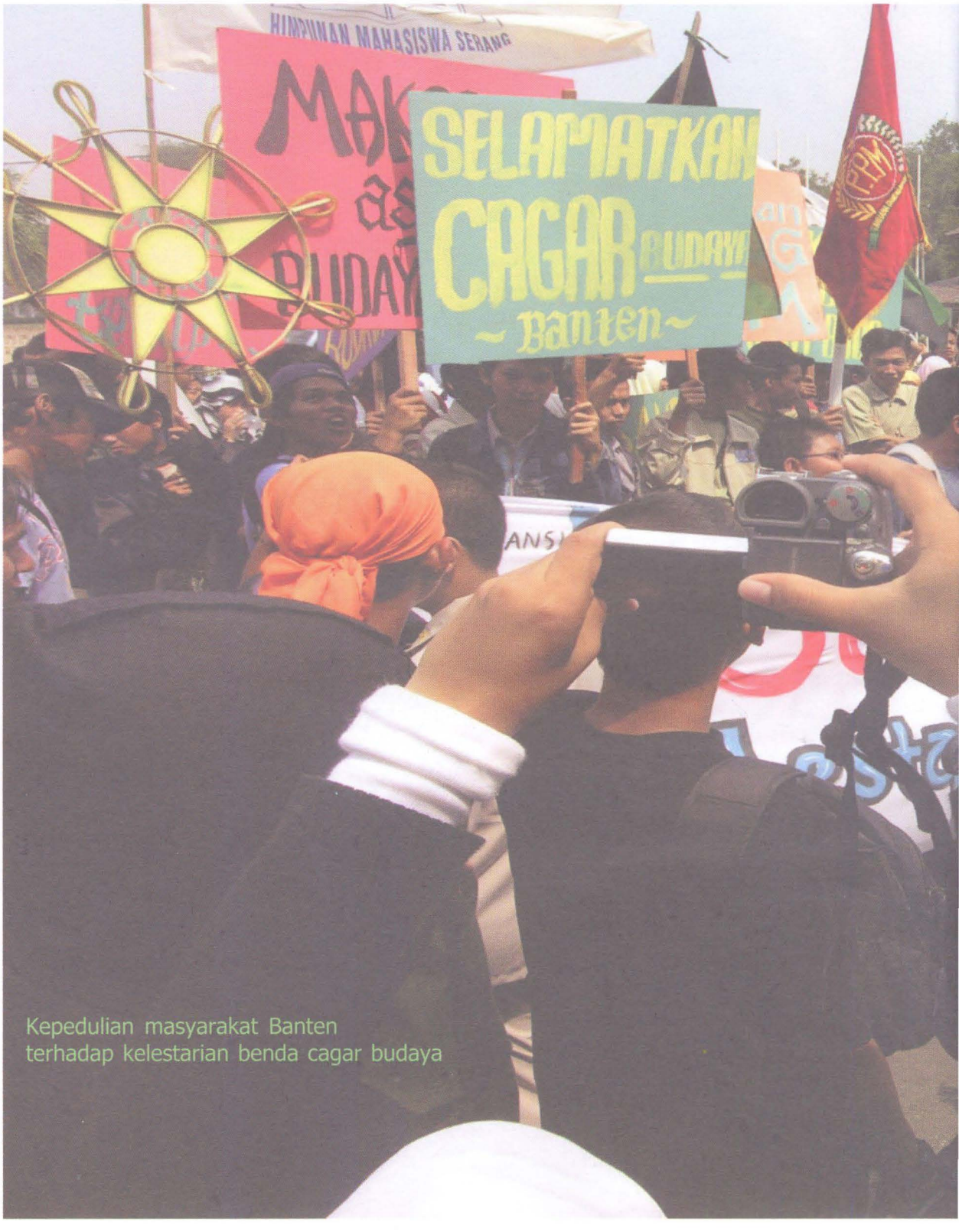

Kepedulian masyarakat Banten
terhadap kelestarian benda cagar budaya

UNTIRTA
SAVE
OLD CITY

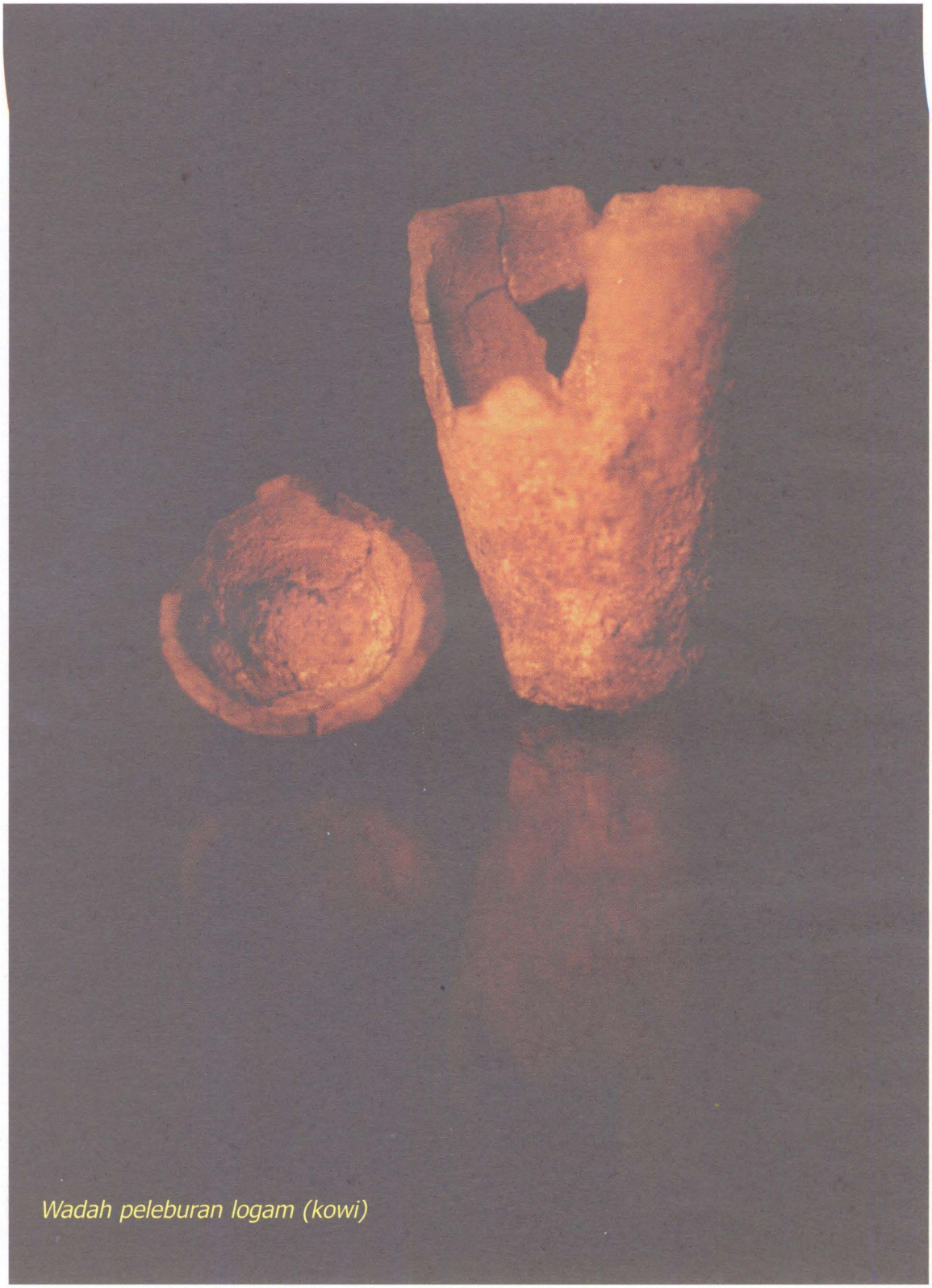

Wadah peleburan logam (kowi)

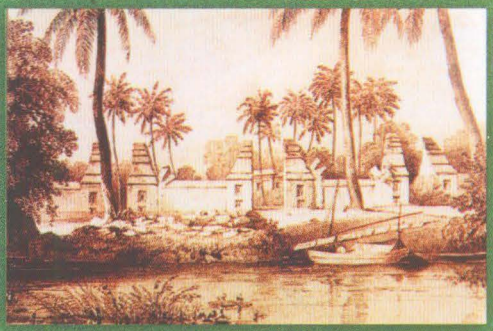

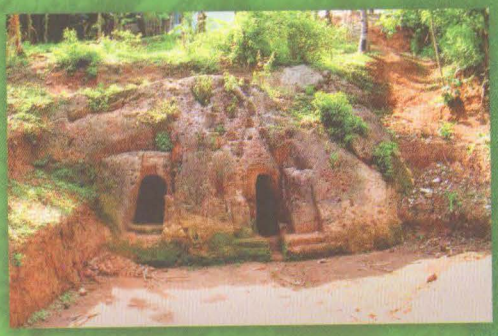

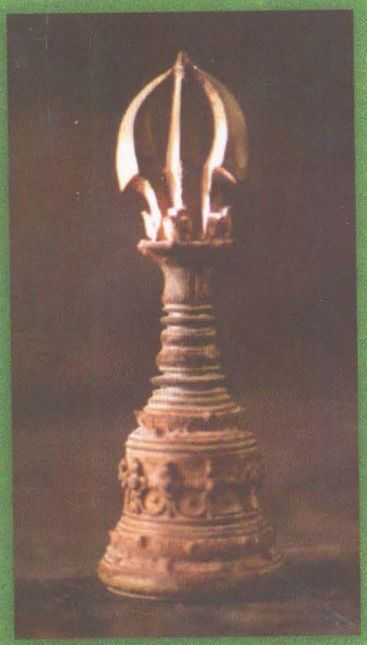

ISBN 979-99324-0-8

9 789799 932402 >